

Drs. Abd. Rachman Assegaf, M. A.

INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN

Sketsa Perbandingan Pendidikan
di Negara-Negara Islam dan Barat



INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN

SKETSA

**PERBANDINGAN
PENDIDIKAN
DI NEGARA-NEGARA**

ISLAM

Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.

Biodata Penulis

Abd. Rachman Assegaf. Lahir di Gresik pada 12 Maret 1964. Pernah mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di berbagai kota, antara lain: STIT Raden Santri (Gresik), Universitas Muhammadiyah (Gresik), STIT Pancawahana (Bangil). Selain itu pernah juga menjadi Ketua Bagian Pendidikan Yayasan Al-Khairiyah Surabaya. Saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta UPN Veteran (Yogyakarta). Jenjang pendidikannya ditempuh dari MI dan SMP Malik Ibrahim, SMA YWSG dan STIT Raden Santri (semuanya di Gresik), lalu melanjutkan ke jenjang Magister (S-2) di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) dengan tesis berjudul *TEORI PENDIDIKAN JOHN DEWEY DAN MUHAMMAD 'ATHIYAH AL-ABRASYI (Studi Analisis-Komparatif)*. Sekarang ini sebagai kandidat Doktor di Pascasarjana yang sama. Selama ini aktif mengikuti pertemuan ilmiah berupa pelatihan, seminar, lokakarya, penelitian, penulisan makalah, jurnal maupun buku. Di antara buku yang pernah diterbitkan adalah: *Pola Hidup Orang Shaleh (Kajian 141 Tokoh Muslim)* dan *Konstruksi Hukum Islam (Telaah Tekstual Bersumber dari Sabda Nabi saw)*, keduanya diterbitkan oleh Pustaka Amani, Jakarta, 1996. Beberapa tulisan dalam jurnal yang sudah diterbitkan dengan ISSN adalah: *Konfigurasi Teori Pendidikan John Dewey dan Al-Abrasyi* dalam *Jurnal Penelitian Agama* No.18 Th.VII Januari-April 1998, Puslit IAIN Sunan Kalijaga, *Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar Bahasa Arab bagi Remaja Masjid Istiqomah, Tanjung Sari* dalam *Jurnal Aplikasi*, Vol.2 No.1 Juni 2001, *Menelusuri Jejak Kebijakan Kelembagaan PAI (Kajian Politico-Historis)*, dalam *Jurnal IPI*, Fakultas Tarbiyah, dan *Beberapa Respon Masyarakat terhadap Produk Kebijakan PAI Pra-Reformasi* dalam *Jurnal IPI* di fakultas yang sama, serta tulisan lainnya berupa makalah seminar atau terbitan lain, yang akan terlalu panjang bila disebutkan di sini satu per satu.

Kata Pengantar

Gaya hidup modern ditandai dengan serba canggihnya teknologi, dari teknologi komunikasi hingga transportasi. Kini, untuk mengadakan konferensi internasional, pihak penyelenggara tidak lagi mesti menghadirkan para peserta untuk datang ke satu negara tertentu, melainkan cukup dengan *tele-conference*, dimana masing-masing peserta tetap di tempat asalnya, sementara komunikasinya tersambung lewat layar monitor yang disaksikan oleh tiap pesertanya. Kadang kala, seorang dosen yang sedang mengajar di ruang kelas harus diinterupsi oleh penyentara Ponsel yang ukurannya lebih kecil dari saku. Atau, mahasiswa yang tak kurang akal bila tidak hadir kuliah, karena ia bisa mencari materi yang bisa dikembangkannya nyaris tanpa batas via internet yang hanya dibayar tiga ribu rupiah per jam. Pengumuman hasil UMPTN sekarang ini pun tidak harus ditempel di papan pengumuman oleh pihak kampus, namun, sekali lagi, via internet. Jarak antar negara juga terasa kian dekat. Bila Anda sedang berada di Belanda dan hendak pergi ke beberapa negara Eropa di sekitarnya, anggap saja ke London, Berlin, Paris atau Roma, maka Anda hanya membutuhkan waktu satu jam terbang dari Lanud Internasional Amsterdam. Teknologi modern telah merubah gaya hidup seseorang.

Bagaimana teknologi modern bisa sedemikian maju ? Majunya teknologi modern tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Pendidikan menyajikan ilmu pengetahuan kepada para peserta didiknya melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengembangan (*Research & Development, R & D*). Untuk mendalami suatu bidang ilmu, ilmu komunikasi misalnya, secara formal seorang murid dituntut agar dapat mengikuti sistem persekolahan yang berjenjang selama jangka waktu tertentu hingga lulus sebagai sarjana komunikasi. Pendidikan juga diasumsikan sebagai meningkatkan profesionalitas. Seorang dokter, misalnya, tidak akan menjadi dokter yang baik tanpa melalui proses pendidikan yang baik. Begitu pula profesi lainnya. Untuk tujuan itulah, tiap-tiap negara di dunia mengatur penyelenggaraan pendidikannya melalui departemen tersendiri dengan kerja dan kebijakan tertentu demi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut.

Karena suatu negara memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, hukum, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain, negara tertentu perlu menjalin kerjasama dengan negara lain secara *mutual cooperation*. Hubungan internasional ini tak terelakkan, sebab bila tidak dilakukan akan berakibat terkucilnya suatu negara, dan akibat *kuper* (baca: kurang pergaulan) tersebut, bisa menimbulkan kemunduran suatu bangsa atau

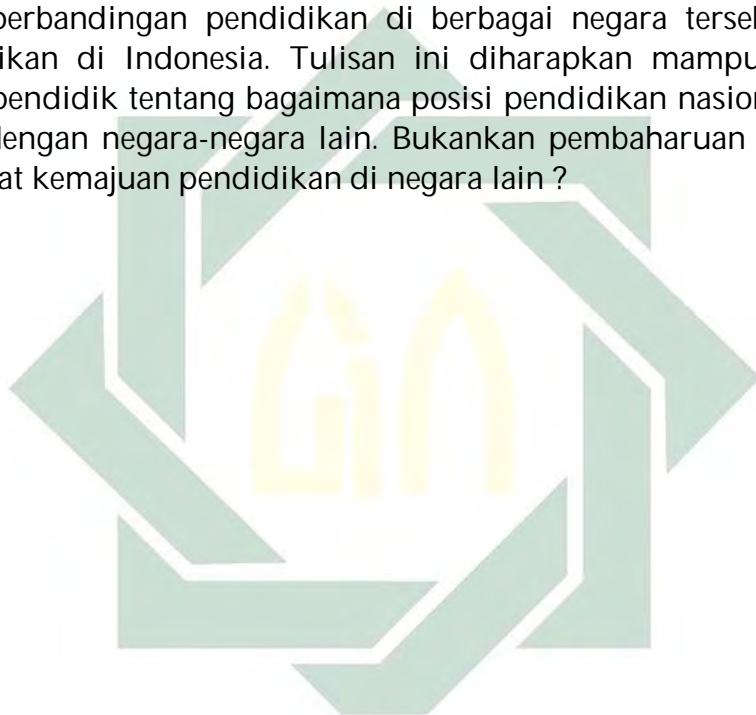
negara itu sendiri. Jepang merupakan contoh nyata. Ketika politik isolasi ditempuh oleh Pemerintah Jepang selama lebih dari seratus tahun sejak abad ke-14 dan 15, karena takut tertular budaya asing, praktis Jepang terkucil dari dunia luar dan kemajuan Dunia Barat.¹ Begitu armada Portugis datang ke Jepang dengan dilengkapi meriam, senapan dan mesin ketik, mereka terheran-heran dan baru menyadari ketertinggalannya dengan negara lain. Maka, Kaisar Meiji merubah kebijakan isolasi tersebut dengan program yang dikenal dengan *Restorasi Meiji*. Akibatnya, Jepang bukan saja Negara Asia pertama yang meniru dan mengambil-alih ilmu pengetahuan dan teknologi barat lalu mengembangkannya dengan berhasil, melainkan Jepang kini menjadi salah satu negara maju di dunia. Bisa jadi, belajar dari pengalaman ini Universitas Tokyo menggunakan motto *act locally think globally*, berbuat secara lokal berpikir secara global. Konon juga, ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia ke-2 akibat Nagasaki dan Hiroshima dibombardir oleh tentara sekutu, sang kaisar bertanya kepada para prajurit yang selamat: “berapa jumlah guru yang tewas?”, dengan heran para prajurit bertanya: “mengapa bukan jumlah prajurit yang tewas yang ditanyakan?”, jawab Sang Kaisar: “kalian para prajurit berjuang untuk masa kini, sedang para guru berjuang untuk masa depan membangun anak bangsa ini”. Keseriusan Jepang membangun negaranya yang porak-poranda akibat perang tersebut dibuktikan dengan komitmen penyelenggaraan pendidikan bagi rakyatnya.

Kerjasama antar negara di bidang pendidikan telah dirintis sejak lama, bahkan idenya telah ditemukan mulai dari zaman Yunani Kuno, lalu masa kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad, terus berlanjut ke Dunia Barat dalam bentuk sekolah internasional. Hubungan antar negara dalam bidang pendidikan ini memuncak setelah berdirinya PBB pada 24 Oktober 1945 yang membawa secercah harapan akan hubungan yang harmonis antar negara, di antaranya melalui kerjasama di bidang pendidikan melalui UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*). Belakangan kerjasama di bidang pendidikan ini juga dilakukan dalam level regional, misalnya lingkup ASEAN atau Uni-Eropa. Di bawah lembaga formal kerjasama bidang pendidikan inilah dilakukan program tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dosen, peneliti dan lain sebagainya baik secara *Government to Government* (G to G), maupun *University to University* (U to U), atau bahkan atas inisiatif sendiri.

Buku ini menyediakan informasi yang bermanfaat bagi kondisi pendidikan di berbagai negara di dunia. Dimulai dari uraian mengenai dasar-dasar perbandingan yang mengupas secara historis, prinsip-prinsip perbandingan pendidikan, metodologi serta ruang lingkungannya, sampai kepada pembahasan mengenai sistem dan kebijakan pendidikan berbagai negara di dunia.

¹ Marius B. Jansen, *Jepang Selama Dua Abad Perubahan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press-Yayasan Obor Indonesia, 1983), h.vii.

Menariknya, buku ini menampilkan *sketsa* tentang sistem dan kebijakan pendidikan beberapa negara yang tergolong dalam *Organization of Islamic Conference* atau Organisasi Konferensi Islam (OKI), sedangkan beberapa negara lain selain Negara Islam yang dibahas, juga diketengahkan penjelasan ringkas tentang Islam di negara tersebut. Sedemikian hingga buku ini bisa bermanfaat bagi umum, bukan saja di lingkungan IAIN karena muatan pendidikan Islamnya, namun juga Perguruan Tinggi Umum karena tema-tema yang diungkap bersinggungan dengan masalah pendidikan di negara maju, bahkan kalangan pemerhati di luar lingkungan kampus juga dapat mengambil manfaat dari buku ini. Itu terlihat dari tajamnya analisis yang dipakai untuk merefleksikan perbandingan pendidikan di berbagai negara tersebut dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Tulisan ini diharapkan mampu membuka wawasan para pendidik tentang bagaimana posisi pendidikan nasional kita bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Bukankah pembaharuan pendidikan kita perlu melihat kemajuan pendidikan di negara lain ?



Pendahuluan

SAAT saya menempuh kuliah jenjang Strata 1 di Tarbiyah pada awal 1990-an, di antara mata kuliah yang diberikan adalah Perbandingan Pendidikan. Tidak seperti yang terlintas dari nama mata kuliah tersebut yang inklusif pendidikan di berbagai negara di seluruh dunia, ternyata isinya menyangkut Perbandingan Pendidikan lingkup ASEAN saja. Agaknya mata kuliah ini mengikuti perkembangan kurikulum yang berlaku di lingkungan IKIP, dan memang referensi yang dipakai pun begitu.² Kini, setelah lima tahun berlalu, sejak kurikulum 1995, ketika saya efektif mengajar di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terdapat mata kuliah baru dengan nama Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam, disingkat PPNI. Jelas terjadi perubahan mendasar menyangkut negara mana yang dikaji. Bila dalam kurikulum 1990, memfokuskan perhatian pada negara di lingkungan Asia Tenggara atau negara sedang berkembang, seperti: Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Philipina dan Thailand, PPNI menjangkau keluar Asia Tenggara, meliputi Timur Tengah semisal: Mesir, Saudi Arabia, Iran, Irak dan lain-lain. Pembahasan mengenai skeepa pendidikan di Negara-negara Islam ini disampaikan dalam Bab kedua, setelah konsep dasar perbandingan pendidikan.

Belakangan saya menyadari ada dua “kejanggalan” pada kurikulum ini. *Pertama*, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, China dan Korea, dan lain-lain, ternyata masuk dalam Silabinya. Terlintas dalam pikiran saya, masuknya negara Barat dan Eropa merupakan bentuk inkonsistensi dengan sebutan Negara Islam. Di ruang kuliah, para mahasiswa pun mempersoalkan masalah ini. Lantas, apa batasan negara Islam di sini? Untuk sementara saya berargumentasi di hadapan mahasiswa bahwa hal tersebut untuk memperluas cakrawala perbandingan, sekaligus diakui pula bahwa telah terjadi kontak lintas batas negara Islam dengan negara Barat dalam hal pendidikan, jadi relevan untuk dikaji. Agar lebih menukik, Bab tiga saya khususkan untuk membahas masalah ini. Atas komentar saya tersebut, untuk sementara pula, para mahasiswa

² Di antara penulis perintis perbandingan pendidikan lingkup ASEAN ini adalah Prof. Imam Barnadib, M.A., Ph.D., dosen IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY). Saat itu referensi yang dipakai adalah: M. Said, *Pendidikan Abad Duapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaanannya*; Sardjan Kadir dan Umar Maksum, *Pendidikan di Negara Sedang Berkembang*; Imam Barnadib, *Dasar-Dasar Pendidikan Perbandingan*, juga *Pendidikan Perbandinga Buku Satu dan Dua*; Mahmd Yunus, *Perbandingan Pendidikan Modern di Negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat*; T. Neville Postlethwaite and R. Murray Thomas, *Schooling in ASEAN Region*, Muller, *Education in South East Asia*, JP. Sarumpaet, *Perbandingan Pendidikan*, William Boyd, *The History of Western Education*; at-Tabawi, *Islamic Education*, dan James Monroe Hughes, *Education in America*. Lihat Kurikulum 1990 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

menerima argumentasi saya. “Kejanggalan” kedua saya dapati dalam referensi yang dipakai. Yang tercantum dalam silabi hampir seluruhnya tidak relevan dengan topik inti dalam kurikulumnya.³ Dalam hal “kejanggalan” kedua ini, saya bicara pada diri saya sendiri, mungkin karena kurangnya referensi yang relevan. Hal yang sama dirasakan juga oleh para mahasiswa yang saya beri tugas mencari data tentang pendidikan di Negara-negara Islam, mereka kesulitan. Untuk itu, sebagai wujud pertanggungjawaban secara akademik sekaligus moral, sebagai pengampu mata kuliah tersebut, juga untuk mengatasi kelangkaan referensi yang relevan, saya menulis buku ini.

Jadi niat semula ditujukan untuk menutupi kekurangan referensi di lingkungan IAIN atau PTAIS, tetapi karena materi bahasan dalam buku ini bersifat umum, pemerhati lain dan khalayak pembaca di luar itu bisa memperoleh manfaat dari buku ini.

Agar informasi mengenai pendidikan di Negara-negara Islam yang disajikan dalam buku ini tetap *up to date*, saya mengakses tidak hanya ke berbagai perpustakaan, melainkan juga berkorespondensi dengan berbagai kedutaan maupun konsulat beberapa negara dimaksud, melalui perwakilannya di Indonesia. Tentu saja itu saya lakukan dalam rangka memperoleh tambahan bahan dan data. Di samping itu, beberapa alamat dalam internet juga saya buka. Sedang tinjauan singkat sejarah suatu negara, yang juga penting dalam konteks ini, saya telusuri via ensiklopedi. Sebagian besar membantu, tetapi tidak dapat dihindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau *missing link* dari temuan yang ada. Bisa jadi apa yang terlulis dalam buku ini telah berubah atau tidak aktual lagi di negara tersebut. Penulis mana pun tidak bisa mengelak dari kemungkinan ini. Untuk itu, kajiannya saya fokuskan pada sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku di suatu negara, suatu hal yang tidak mudah berubah atau dirubah dalam waktu singkat, kecuali ada faktor revolusioner yang mendorongnya. Pemakaian kata ‘sketsa’ dalam judul buku ini mencerminkan kondisi di atas, karena jangan lagi membahas pendidikan di berbagai negara di dunia, mempelajari pendidikan di negeri sendiri saja sudah amat kompleks, tidak kunjung selesai dan terus berkembang. Apalagi mengungkap banyak negara ?!

Membandingkan pendidikan antar negara memang *plus – minus*. Nilai tambahnya adalah kita dapat belajar dari keberhasilan yang dicapai oleh suatu negara, atau menghindarkan diri dari kegagalan yang sama yang dialami oleh

³ Di antara referensinya adalah: Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*; Imam Barnadib, *Perbandingan Pendidikan*; Mahmud Yunus, *Perbandingan Pendidikan Modern di Negera-Negara Islam dan Intisari Pendidikan Barat*; Abdurrahman an-Nahlawi, *Ushulu al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha*; Donald Adam dan Bjork, *Education and Developing Areas*; at-Tigwam, *Islamic Education*; dan *Muslim Education Quarterly*. Lihat Kurikulum 1995 dan 1998 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Isi seluruh referensi ini sedikit sekali yang berkaitan langsung atau relevan dengan rincian topik inti yang dibuat.

negara lain, membuka wawasan, meningkatkan kerjasama dan internasionalisme pendidikan. Tetapi bila transfer budaya negara lain *without reserve*, tanpa filter budaya nasional, apalagi timbul asumsi bahwa segala hal yang datang dari luar, terutama Barat, adalah modern, maka mau tidak mau akan mengarah pada pengikisan identitas bangsa. Hal ini perlu disikapi dengan arif. Itu sebabnya, di bab akhir tulisan ini disediakan bagian tersendiri untuk refleksi terutama bagi upaya pembaharuan pendidikan di Indonesia.

Semoga bermanfaat !.



Daftar Isi

PENDAHULUAN 4

PENGANTAR 7

DAFTAR ISI 7

BAB I : KONSEP DASAR PERBANDINGAN PENDIDIKAN 8

- Tinjauan Historis 8
- Dasar dan Prinsip 19
- Metodologi 23
- Ruang lingkup 28

BAB II : SKETSA PENDIDIKAN DI BEBERAPA NEGARA ISLAM 40

- Mesir 40
- Saudi Arabia 48
- Iran 55
- Irak 64
- Turki 73
- Malaysia 82
- Pakistan 90

BAB III : BEBERAPA NEGARA LAIN 99

- India 99
- Belanda 112
- Jepang 123
- Jerman 140
- Kanada 156
- Amerika Serikat 162

BAB IV :PENDIDIKAN DI INDONESIA : Sebuah Refleksi 185

DAFTAR PUSTAKA 218

INDEX 218

LAMPIRAN 218

BAB I

KONSEP DASAR PERBANDINGAN PENDIDIKAN

□ *Tinjauan Historis*

SEJAK Plato (427-347) SM, diskursus tentang penyelenggaraan pendidikan oleh negara telah dibahas secara filosofis. Buku *Republika* menggambarkan bagaimana pembinaan sebuah negara, masyarakat dan pendidikan mesti dilakukan. Menurut Plato, sebagaimana terurai dalam buku tersebut, negara ideal haruslah berdasar pada keadilan. Keadilan dalam negara hanya tercapai apabila tiap-tiap warganya mengerjakan pekerjaan yang teruntuk bagi dia. Plato berpendapat bahwa pada tiap negara, semua golongan manusia merupakan alat bagi pencapaian kesejahteraan secara kolektif. Kesejahteraan kolektif inilah yang menjadi tujuan hakiki suatu negara.

Di samping keadilan, suatu negara tergantung juga pada budi penduduknya. Dalam hal ini pendidikan menjadi tema sentral bagi negara. Menurutnya, pendidikan anak-anak dari umur 10 tahun ke atas menjadi urusan negara, supaya mereka terlepas dari pengaruh orang tuanya. Dasar yang utama bagi pendidikan anak-anak adalah gimnastik (senam) dan musik. Tetapi gimnastik didahulukan, karena menyehatkan badan dan pikiran. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang berani yang diperlukan bagi calon penjaga. Saat usia 14 sampai 16 tahun, anak-anak perlu diajarkan musik dan puisi serta mengarang sajak. Sebab, musik menanamkan jiwa, perasaan dan budi yang halus. Dengan musik jiwa manusia akan kenal dengan harmoni dan irama. Padahal, keduanya menjadi landasan yang baik untuk menghidupkan rasa keadilan. Namun demikian, dalam musik harus dijauhi lagu-lagu yang melemahkan jiwa dan menimbulkan nafsu buruk. Begitu pula dengan puisi, puisi yang merusak moral hendaknya dijauhi. Pendidikan gimnastik dan musik hendaknya dilaksanakan secara seimbang.

Usia 16 sampai 18 tahun, menjelang dewasa, anak-anak diberi pelajaran matematika untuk mendidik jalan pikirannya. Di samping itu diajarkan pula dasar-dasar ketuhanan dan sopan santun agar dalam diri anak tertanam rasa persatuan. Tahap berikutnya, ketika anak berusia 18 sampai 20 tahun, hendaknya mereka mendapat didikan militer. Setelah usia 20 tahun ini diadakan seleksi atas kemampuan mereka untuk mendapatkan didikan ilmiah secara lebih

mendalam dan teratur selama 10 tahun. Lalu, diadakan seleksi kedua, bagi mereka yang diterima diangkat sebagai pegawai negeri. Lalu, mereka ini dididik lagi dalam hal pengetahuan tentang Adanya (*Being*), idea dan dialektika. Tamat dari didikan ini mereka berhak memperoleh kedudukan tinggi. Kalau sudah 15 tahun bekerja dan mencapai usia 50 tahun, mereka diterima di lingkungan pemerintah atau filosof. Saat itu mereka dianggap telah layak melaksanakan tugas tertinggi dalam negara: menegakkan keadilan berdasarkan idea kebaikan. Agaknya konsep negara ideal Plato ini sarat dengan ajaran moralitas berbangsa, yakni negara yang adil dan berbudi. Titik tekan yang sama, masalah etika negara ini, dibicarakan pula oleh murid Plato, yakni Aristoteles.

Aristoteles (384-322) SM, juga bicara soal etik, tetapi menurutnya, etik baru sempurna terlaksana dalam sebuah negara. Pada dasarnya manusia mempunyai bakat moral, tetapi itu hanya dapat dikembangkan dalam hubungannya dengan manusia lain. Manusia adalah *zoon politikon* sekaligus *sosial*. Ia tidak dapat berdiri sendiri. Hubungan manusia dengan negara ibarat bagian (*partikular*) dengan keseluruhan (*totalitas*). Karenanya sebuah negara tersusun oleh individu, keluarga, dan masyarakat. Bagi Aristoteles, tiang masyarakat adalah kaum menengah yang berbudi baik.

Menurut Aristoteles, bentuk negara ada tiga macam: *monarki*, *aristokrasi* dan *demokrasi*. Negara monarki diperintah oleh seorang, sedang negara aristokrasi dipimpin oleh sekelompok orang, sementara negara demokrasi merupakan refleksi dari keseluruhan rakyat. Baginya, ketiga bentuk negara tersebut tidak lepas dari kelebihan dan kelemahan. Kekuasaan monarki berpotensi membentuk *tirani*, aristokrasi bisa menimbulkan *oligarki* atau persekongkolan, dan demokrasi cenderung mengandalkan kuantitas. Di sini Aristoteles memandang bahwa demokrasi lebih rendah dari aristokrasi, sebab dalam demokrasi keahlian diganti dengan jumlah. Karenanya, kombinasi antara aristokrasi dan demokrasi, menurut Aristoteles, adalah model yang terbaik.⁴ Baik Plato maupun Aristoteles, keduanya memandang penting penyelenggaraan pendidikan oleh negara. Inilah poin utama penyajian masa Yunani ini, karena masa itu menandai awal munculnya konsep tentang penyelenggaraan pendidikan oleh suatu negara.

Sayangnya, masa Yunani-Romawi yang mencapai masa kejayaannya hingga 117 M, mengalami kemunduran terus-menerus hingga pada 476 M kekuasaan Romawi berakhir akibat peperangan, penaklukan dan imperialisme. Faktor lain yang menimbulkan runtuhnya kejayaan Imperium Yunani-Romawi adalah: punahnya sirkulasi mata uang dan kembalinya ke sistem ekonomi alami, menurunnya industri dan perniagaan, tumbuhnya tuan tanah dan bangkitnya kekuasaan kaum feodal, pengawasan pemerintah terhadap sebagian besar kehidupan ekonomi makin luas, dan terjadinya transisi dari rejim

⁴ Mohammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, (Jakarta: Tintamas, 1980), h. 108-114; 132-138.

penguasa atas dasar inisiatif individual kepada status kekuasaan turun-temurun.⁵ Sejak itu khazanah intelektual Yunani terpendam dan tidak berkembang, sampai terjadi perjumpaan dengan dunia Islam, terutama masa Abbasiyah (750-1258)M yang gemar terhadap ilmu pengetahuan, filsafat Yunani dibuka kembali.

Kontak filsafat Yunani dengan dunia islam terjadi melalui dua jalur: *via difusi* yakni kontak langsung secara fisik, dan *via erutorium* atau melalui pustaka. Meskipun demikian, kedua jalur perjumpaan tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Jalur difusi dimulai dengan peristiwa penaklukan Alexander Yang Agung terhadap Darius di Persia pada 311 SM. Dikatakan bahwa Alexander Yang Agung yang pernah menjadi murid Aristoteles, sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani. Itu sebabnya tidak heran bila beliau gemar filsafat serta cinta terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Sebagai buktinya adalah ketika ia datang ke Persia ia tidak menghancurkan kebudayaannya, bahkan beliau hendak menyatukannya dengan peradaban Yunani. Para jenderal dan sekitar sepuluh ribu tentaranya, bahkan dirinya sendiri kawin dengan wanita-wanita Persia. Ia mendirikan kota dan koloni yang penduduknya diatur sedemikian rupa hingga dapat berasimilasi antara orang Yunani dengan Persia. Usaha penyatuan kedua peradaban itu kemudian dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Ptolemeus di Mesir dengan Alexandria sebagai ibu kotanya, dan Seleucus di Asia dengan kota pentingnya Antioch (di Syria), Seleucia (di Mesopotania), dan Bactra (di Persia sebelah timur).

Di Alexandria, pada 300 SM telah berdiri museum dan perpustakaan yang menjadi pusat studi bagi para mahasiswa dan pengajar dengan berbagai latar belakang suku bangsa, seperti Mesir, Yunani, Siria, Yahudi, Ethiopia, Roma, Persia dan Anatolia. Museum dan perpustakaan Alexandria ini menjadi pusat pengembangan kritik sastra, ilmu eksakta, geografi dan studi tentang kesejahteraan keluarga. Pendek kata, Museum dan perpustakaan Alexandria ini tidak ubahnya seperti sebuah universitas serta institusi penelitian dengan sarana yang lengkap.

Selanjutnya, meskipun upaya penyatuan yang dirintis oleh Alexander Yang Agung ini belakangan tidak membawa hasil nyata, bekas-bekas dan pengaruh yang ditinggalkannya cukup besar artinya bagi sejarah. Bahasa Yunani tetap dipakai sebagai bahasa administrasi atau bahasa resmi, sampai terjadinya kontak fisik atau difusi melalui masuknya Islam di sana, yang kemudian diganti dengan Bahasa Arab oleh khalifah ke-5 Bani Umayyah, yakni Malik ibn Marwan (685-705) M. Kota-kota Antioch, Alexandria dan Bactra lalu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Di samping ketiga kota pusat pengetahuan tersebut, pada abad III M, kota Yundishapur yang terletak di barat daya

⁵ Edwards McNall Burns, *Western Civilizations: Their History and Their Culture*, (New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1958), h.232-233.

Baghdad, telah terdapat rumah sakit, akademi kedokteran dan filsafat dalam bahasa Yunani, atau sebagai kota pusat pengetahuan yang keempat. Jalur difusi ini dipercepat dengan kian banyaknya kaum atau bangsa lain yang masuk Islam. Sebagai contoh, Harits ibn Khaladah, seorang dokter beragama Yahudi yang pernah belajar di Yundishapur, memeluk Islam. Demikian pula dengan Ibn Abi Ransiah dari suku Tamim, seorang ahli bedah yang kemudian masuk Islam.

Pada waktu khalifah al-Mansur sakit pada tahun 765 M, atas nasehat menterinya Khalid ibn Barmak, Kepala Rumah Sakit Yundishapur yang bernama Circis ibn Buchtishu yang beragama Kristen, dipanggil untuk mengobatinya. Konon ia juga diminta untuk mengajarkan ilmu kedokteran di Baghdad. Meskipun ia seorang Kristen, tetapi ia mendapatkan penghormatan dan perlakuan baik dari penduduk Baghdad dan khalifah sendiri. Tanpa memandang agama yang dipeluknya, ahli-ahli ilmu pengetahuan diundang ke istananya untuk bekerjasama dengan mendapat hadiah yang lumayan. Di antaranya adalah Maubacht, seorang astronom Persia, yang kemudian masuk Islam di hadapan khalifah sendiri. Ini adalah sebagian dari contoh kontak difusi.

Sedang jalur erutorium atau pustaka ditandai dengan upaya penerjemahan buku-buku pengetahuan dan filsafat Yunani ke dalam Bahasa Arab, dan ini terlaksana terutama sekali saat Bani Abbasiyah memegang kendali pemerintahan. Di antara khalifah yang mendukung upaya ini adalah Harun al-rasyid, al-Makmun, al-Mansur dan lain-lain. Di masa Harun al-Rasyid inilah didirikan *Bait al-Hikmah* yang merupakan perpustakaan sekaligus lembaga pendidikan yang bersifat internasional. Di dalamnya bukan saja berisi koleksi buku-buku Agama Islam dan Bahasa Arab, melainkan juga bermacam-macam buku umum yang berasal dari terjemahan bahasa Yunani, Persia, India (Bahasa Sangkrit), Qibti, dan Arami. Sistem sirkulasi buku di *Bait al-Hikmah* ini telah diorganisir rapi, dengan arsitektur bangunan, penyusunan rak buku, sistem katalog, prosedur peminjaman, staf perpustakaan yang terdiri dari petugas perpustakaan, penerjemah, penulis, penjilid dan pengunjung, di samping telah berlakunya sistem keuangan dan pembukuan yang tertib. Selain berfungsi sebagai perpustakaan internasional, *Bait al-Hikmah* juga merupakan sekolah internasional, karena di dalamnya terdapat pusat kajian pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan beragam pelajar yang berasal dari berbagai kota atau negara lain. Prestasi Harun al-Rasyid dengan *Bait al-Hikmah* ini, meskipun setelah masa kemunduran, tidak berkembang lebih lanjut, akibat faktor konflik politik internal, dan lagi-lagi, imperialisme dunia Barat ke berbagai negara Islam, tapi satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa Harun al-Rasyid beserta penerusnya telah berjasa melanjutkan konsep Plato tentang penyelenggaraan pendidikan oleh negara, ke dalam bentuk internasionalisasi pendidikan. Kalau Plato telah mengawali pemikiran tentang perlunya penyelenggaraan pendidikan oleh suatu negara, maka Harun al-Rasyid, melalui *Bait al-Hikmah* ini telah melangsungkan proses internasionalisasi pendidikan, suatu titik tolak

munculnya perbandingan pendidikan antar negara di kemudian hari. Pendidikan internasional dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan.

Internasionalisasi pendidikan yang berjalan di dunia Islam membawa konsekuensi perjumpaan dengan dunia Barat, sebagaimana dunia Islam telah pernah mengalami perjumpaan dengan Yunani. Buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan, disalin atau dikembangkan oleh para filosof Muslim, kemudian diterima di belahan dunia Barat sedemikian hingga pada abad ke-14 sampai abad ke-16 Barat mengalami *Renaissance*. Masa ini menandai kebangkitan baru dunia Barat setelah sekian lama berada dalam *Dark Ages*, berangkat dari sini mulai bermunculan gagasan baru di bidang pendidikan internasional.

Piere Du Bois (1250-1321) M, seorang penasehat Raja Philip IV dari Prancis, misalnya, mengusulkan didirikannya sekolah internasional. Jenis sekolah yang diusulkan ini bertugas menanamkan rasa saling mengerti antar bangsa dan kerjasama. Itu sebabnya, dana penyelenggaraan sekolah internasional ini menurutnya mestilah bersumber dari dana yang sedianya dialokasikan untuk keperluan perang. Cita-cita Du Bois ini terpengaruh akibat gelombang *Renaissance* yang menjunjung tinggi peranan manusia di dunia untuk mengatur dirinya dan hidup bermasyarakat. Gereja dianggap tidak lagi perlu ikut campur dalam masalah keduniaan, sebab hal itu merupakan otoritas negara. Selain itu, Du Bois juga berharap agar Sri Paus membentuk sebuah Dewan yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan berbagai negara. Wakil-wakil tersebut hendaknya atas nama negaranya dengan komitmen memelihara perdamaian. Meskipun proposal Du Bois ini telah ditulis dalam bentuk buku berjudul *Penemuan Kembali Tanah Suci*, tetapi sayangnya usul Du Bois ini tidak terlaksana, hingga akhir abad *Renaissance*, ide Du Bois ini dibicarakan kembali dalam bentuk lain oleh Francis Bacon (1561-1626) M.

Bacon juga berkeinginan untuk mendirikan sekolah internasional, sebagaimana idenya tersebut termuat dalam *The New Atlantis*. Di sini ia menguraikan bahwa usaha bersama yang dilakukan oleh para sarjana mengenai penyelidikan terhadap alam dapat diambil manfaatnya bagi peningkatan kemanusiaan dan saling mengerti antar bangsa serta akhirnya dapat membantu ke arah timbulnya kemantapan pergaulan antar bangsa. Bacon mengusulkan agar lembaga perguruan tinggi yang menjadi area kerjasama tersebut diberi nama *The Salomon's House*. Namun, sama seperti Du Bois, keinginan Bacon hanya sebatas angan-angan. Gagasan sekolah internasional selanjutnya muncul dari Johann Amos Comenius (1592-1670) M.

Comenius, seorang tokoh dari Moravia, berusaha untuk mendirikan sekolah internasional yang akan diberi nama *Pansophia*. Sekolah ini diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan dan memberikan segala macam ilmu dengan harapan terwujudnya kebajikan. Para sarjana di dunia diharapkan dapat bekerjasama di perguruan tinggi tersebut untuk menciptakan perdamaian yang

abadi dan universal. Sesuai dengan zamannya yang belum meyakinkan terhadap usaha perdamaian semacam itu, maka cita-cita Comenius hanya dapat berkembang sebatas utopia.

Perjalanan ide perlunya dibentuk sekolah internasional ini terus bergulir. March Antoine de Paris, pada 1817, muncul sebagai perintis pengembangan pendidikan perbandingan sebagai ilmu. Ia mengusulkan kepada Raja agar didirikan sebuah Komisi yang bersifat internasional. Menurutnya, Komisi tersebut bertugas mengumpulkan data tentang pendidikan di berbagai negara di Eropa, untuk kemudian data tersebut dijadikan sebagai bahan informasi bagi negara-negara yang bersangkutan, dengan maksud agar dapat dipelajari dan dibandingkan oleh para tokoh pendidik maupun negarawan. Diharapkan setelah mengetahui pendidikan di negara lain tersebut, dapat timbul saling pengertian dan kerjasama antar bangsa.

Agaknya upaya de Paris berhasil sampai dengan pengumpulan data tentang pendidikan di negara-negara Eropa. Teknik pengumpulan data yang dilakukan De Paris adalah *interview* dan *kuisisioner*, sehingga dapat dikatakan telah mengembangkan perbandingan pendidikan sebagai ilmu. Meskipun begitu, hasil upaya de Paris ini tidak diperhatikan oleh kaum politisi, sehingga usahanya tidak mendapatkan legitimasi politik melalui kebijakan pemerintah.

Setelah de Paris, para tokoh mengkaji masalah perbandingan pendidikan dari sudut pandang ilmiah. Beberapa tokoh mencoba untuk menguraikan perbandingan pendidikan ini melalui kunjungan ke berbagai negara dan tinggal beberapa waktu di sana untuk mengamati praktek pendidikannya. Di antara mereka itu adalah John Griscom, Victor Cousin, dan Horace Mann. John Griscom tinggal selama satu tahun (1818-1819) di Inggris, Swiss, Italia dan Belanda, khusus untuk mempelajari pendidikan di negara-negara tersebut, dan hasilnya diterbitkan berupa buku berjudul *A Year in Europe*. Victor Cousin, Guru Besar Ilmu Filsafat dari Prancis, pada 1831 mengadakan kunjungan ke Prusia untuk tujuan yang sama, mempelajari pendidikan di negara tersebut, hasilnya berupa *Laporan tentang Pendidikan Umum di Prusia*. Kedatangan Cousin ke Prusia adalah atas saran Menteri Pengajaran Umum Prancis. Sedang Horace Mann (1796-1859), setelah meninjau pendidikan di Eropa beberapa bulan lamanya ia menuliskan hasil laporannya dalam *Seventh Annual Report* pada 1844. Laporan ini berisi perbandingan pendidikan di Inggris, Irlandia, Prancis dan Jerman. Aspek yang dibandingkan adalah administrasi sekolah dan metode pengajaran.

Sampai dengan akhir abad ke-19, penekanan studi perbandingan pendidikan masih berada pada lingkungan negara-negara di Eropa dengan jalan kajian ilmiah, pengamatan dan kunjungan ke berbagai negara, dan hasilnya dipublikasikan berupa buku atau laporan. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya terbitan berkala maupun hasil penelitian. Henry Barnard, misalnya, menguraikan secara rinci sistem pendidikan asing dalam jurnal berkala sebanyak 31 jilid, yaitu *The American Journal of Education*, terbit antara 1856-1861.

terbitan lain adalah *Encyclopaedia of Education*, editor Paul Monroe, sebanyak 5 jilid yang terbit antara 1911-1913, juga *International Yearbook of International Institute of Education*, editor Isaac L. Kandel, terbit antara 1925-1941, dan *Yearbook of Education*, oleh Eustace Percy, terbit sejak 1932 dan sekarang tidak terbit lagi. Sedang hasil penelitian, di antaranya adalah *Opvoeding tot Autonomie* yang dilakukan oleh G.J. Niewenhuis pada 1923. Isinya dalah membandingkan sistem pendidikan di Philipina dan Hindia Belanda dengan tinjauan khusus mengenai persiapan kedua negeri itu ke arah otonomi, serta lainnya. Agaknya sampai saat tersebut upaya yang dilakukan belum berbentuk pendirian institusi. Ide untuk mendirikan institusi kerjasama antar negara di bidang pendidikan baru dirintis pada kuartal pertama abad ke-20.

Dr. Fannie Fern Andrews, misalnya, berupaya secara sungguh-sungguh untuk menjadikan pendidikan sebagai wahana terciptanya perdamaian dunia melalui pendidikan internasional. Sebagai seorang ahli di bidang hubungan internasional Andrews mengusulkan kepada Presiden William H. Taft untuk mempertemukan berbagai bangsa dengan maksud meningkatkan kerjasama.

William H. Taft, waktu itu menjabat sebagai Presiden AS periode 1909-1913, lalu memerintahkan kepada pejabatnya agar merintis terselenggaranya Konferensi Internasional di Den Haag, Belanda. AS menyampaikan maksud ini kepada wakil negara-negara Eropa dan Inggris, dan meskipun tidak mendapat sambutan memuaskan, rintisan ini merupakan batu loncatan ke langkah selanjutnya.

Selanjutnya, Andrews berusaha agar para pemimpin Sekutu dapat menyetujui terbentuknya suatu lembaga yang disebut *International Bureau of Education* (Biro Pendidikan Internasional) dalam struktur *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa).⁶ Ia juga mengusulkan agar tugas Biro ini mengusahakan agar negara-negara anggota Liga menjadikan ide, prinsip dan metode pendidikan dan pengajaran di negara yang bersangkutan. Usul ini dapat dimengerti karena dalam Piagam Liga Bangsa-Bangsa 1919 juga tercantum untuk meningkatkan kerjasama antar bangsa dan mewujudkan perdamaian serta ketentraman internasional. Tujuan demikian ternyata mampu menggerakkan para anggota Liga untuk menaruh perhatian tentang perlu adanya lembaga *International Bureau of Education* tersebut. Lantas, dengan dukungan anggota Liga, *International Bureau of Education* ini terbentuk pada 1925, menjadi bagian integral dari Liga Bangsa-Bangsa, dan berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Di antara kegiatan Biro ini adalah: mengadakan konferensi internasional, menerbitkan buku tahunan tentang pendidikan pada umumnya dan studi perbandingan pendidikan khususnya, menerbitkan majalah triwulan yang berisi resensi buku yang terbit di seluruh dunia, serta mendirikan perpustakaan yang

⁶ Penyebutan Biro Pendidikan Internasional selanjutnya disingkat Biro, dan Liga Bangsa-Bangsa disingkat Liga.

baik. Hasil kerja yang diraih oleh Biro ini disebarkan ke seluruh dunia. Sebaliknya, Biro ini juga menerima umpan balik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah negara anggota Liga dan tokoh pendidik dari berbagai negara. Dengan cara seperti itu, Biro ini telah berperan sebagai lembaga pendidikan internasional yang belum pernah dilakukan oleh lembaga lain sebelumnya. Itu sebabnya, Biro ini bisa dipandang sebagai lembaga perintis yang kedudukannya makin lama makin kuat dan luas. Di antara perluasannya adalah membawahi terbentuknya *Commission on Intellectual Cooperation* (Komisi Kerjasama Intelektual) pada 1926.

Tokoh yang bekerja pada Komisi ini adalah Madame Curie, Henry Bergson dan Gilbert Murray. Sedang di tiap negara yang disebut sebagai Komisi Nasional, terdapat tokoh ilmuwan dari negara yang bersangkutan. Tugas Komisi Nasional ini sejalan dengan apa yang digariskan oleh Pusat, di antaranya:

1. Merencanakan dan mengorganisasikan pertemuan kerjasama internasional antar perguruan tinggi, perpustakaan, museum dan organisasi guru.
2. Mengadakan studi mengenai apa yang dilakukan sekolah dalam memperkenalkan anak tentang tujuan dan kegiatan Liga serta prinsip-prinsip kerjasama internasional.
3. Mempelajari buku-buku, terutama sejarah, agar dapat dicegah timbulnya pandangan sempit (*chauvinistis*) dalam bidang pendidikan.
4. studi tentang komunikasi massa, seperti radio, film dan pers, agar terwujud kerjasama internasional.

Biro juga memberi pertolongan dan pertimbangan atas berbagai masalah pendidikan bagi negara anggota yang memerlukan. China, misalnya, telah mendapat bantuan dari Biro untuk mengadakan pembaharuan sekolah. Sebuah delegasi telah dibentuk dan dikirimkan ke sana untuk memenuhi permintaan negeri tersebut. Selain itu Biro juga mengembangkan kegiatan lain. Misalnya, *Cultural Relation Program* (Program Hubungan Kebudayaan) yang didirikan oleh AS, Inggris, Prancis dan Jerman, untuk kemudian disebarkan ke berbagai negara.

Pada 1939, Amerika membentuk *Division of Cultural Relations* (Bagian Hubungan Kebudayaan) di bawah Departemen Luar Negeri (Deplu). Pada 1934, Inggris mendirikan *The British Council*, juga di bawah Deplu. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan saling pengertian antar negara di dunia. Sejak berdirinya sampai akhir Perang Dunia II gerakan yang dilakukannya terbatas pada negara anggota Persemakmuran (*Commonwealth*), sedang sesudah itu ditujukan pula pada negara-negara berkembang di luar organisasi Persemakmuran. Prancis juga merintis Hubungan Kebudayaan Prancis atau *Ouvres Francaise a l'etranger*, melalui Deplu. Sementara Jerman, sejak 1930, mendirikan *Auslandsschule* untuk memperkenalkan kebudayaannya kepada negara-negara lain melalui pers, radio dan sekolah Jerman di luar negeri. Hingga tahun 1990-an, Kedutaan Jerman di Jakarta masih menerbitkan dan menyebarkan majalah *Skala* edisi Bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau lainnya,

dalam rangka memperkenalkan kebudayaannya terutama kepada lembaga pendidikan dan perpustakaan yang ada di berbagai negara di dunia.

Selain Biro Pendidikan Internasional, di Amerika berdiri *World Federation of Educational Associations* (Federasi Internasional Asosiasi Pendidikan), setelah sekitar 600 pendidik dari 60 negara mengadakan pertemuan di San Fransisco pada 1922. Tujuan organisasi ini adalah: menggalang kerjasama di bidang pendidikan, pengumpulan dan penyebaran informasi tentang pendidikan, dan usaha nyata tentang peningkatan perdamaian dunia. Secara produktif Asosiasi ini menerbitkan majalah pendidikan dan konferensi internasional dengan tempat penyelenggaraan yang berpindah-pindah, di antaranya di Eidenburgh (1925), Toronto (1927), Jenewa (1929), Denver (1931), Dublin (1933), Oxford (1935), dan Tokyo (1937). Perkembangan selanjutnya, pada 1946, organisasi ini berubah nama menjadi *World Organization of the Teaching Profession*. Dengan perubahan ini berarti ruang gerak organisasi ini menyempit ke bidang profesi pengajaran.

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, pada 24 Oktober 1945 berdirilah *The United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Salah satu program kerja PBB adalah bidang pendidikan melalui organisasinya yang bernama UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), yang berdiri pada 4 September 1948. tujuan UNESCO adalah untuk memberi kontribusi bagi upaya perdamaian dan keamanan dengan jalan mempromosikan kerjasama antar negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Agar tercapai saling menghormati secara universal bagi keadilan, peraturan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan kebebasan fundamental yang ditekankan bagi seluruh manusia di dunia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Sejak itu terjadilah kontak intensif antar berbagai negara, terutama anggota PBB, untuk saling meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, melalui pertukaran pelajar, mahasiswa, dosen, para profesional serta lainnya, dalam bentuk *Government to Government*, disingkat *G to G*. Belakangan ini bentuk kerjasama yang dijalin telah meluas sedemikian hingga skopnya dilakukan bukan hanya antar pemerintah melainkan antar Perguruan Tinggi, *University to University*, disingkat *U to U*.

Sejalan dengan globalisasi, saat ini seseorang bisa mengakses untuk mengikuti pendidikan di negara mana saja yang dia suka, baik lewat *G to G* maupun *U to U*, atas biaya sendiri, atau kalau dia seorang yang berprestasi, bisa mendapatkan *fellowship* atau *grant* untuk studi ke luar negeri. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi dewasa ini benar-benar mempermudah niat seseorang untuk belajar di luar negeri.

Bila seluruh uraian di atas menyetengahkan bagaimana sejarah munculnya perbandingan pendidikan di tingkat internasional, maka perlu disampaikan pula bahwa sebagai kelanjutannya, kerjasama di bidang pendidikan ini berkembang ke tingkat regional melalui ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) atau Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara, yang ketika

berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, beranggotakan: Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Philipina dan Brunai Darussalam. Tujuan ASEAN adalah untuk menggalang kerjasama antar sesama negara anggota dalam peningkatan kesejahteraan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sains dan teknologi serta pendidikan. Khusus mengenai bidang pendidikan ini, ASEAN mengelola suatu proyek yang disebut dengan *ASEAN Development Education Project* atau ADEP. Tujuannya adalah agar dapat tumbuh kerjasama untuk memperkuat kemampuan negara anggota dalam bidang pendidikan.

Saat itu, kerjasama di bidang pendidikan meliputi:

1. Sistem Manajemen Informasi Pendidikan (*Education Management and Information System*), dengan Malaysia sebagai pengelola.
2. Pendidikan Khusus (*Special Education*), dengan Indonesia sebagai pengelola.
3. Pembaharuan Pendidikan Guru (*Teacher Education Reform*), dengan Philipina sebagai pengelola.
4. Pengembangan Tes (*Test Development*), dengan Thailand sebagai pengelola, dan
5. Pendidikan Berorientasi Kerja untuk Pemuda (*Work Oriented Education for in School or out of School Youth*), dengan Singapura sebagai pengelola.

Semua negara anggota menjadi peserta dari semua proyek tersebut. Untuk memudahkan pengelolaanya, di tiap negara dibentuk suatu dewan pengembangan pendidikan nasional (*National Development Education Council, NADEC*). Untuk Indonesia, NADEC ini dipegang oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Proyek-proyek yang telah disebutkan di muka telah dikenai evaluasi internal pada tahun 1983 dan diikuti oleh evaluasi tengah program yang sekaligus mengikutsertakan Pemerintah Australia. Di samping NADEC, ASEAN juga mendirikan SEAMO (*Southeast Asian Ministers of Education Organization*) dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan. Ruang lingkup SEAMO adalah pendidikan tinggi dan penelitian. Pada April 1970, ketika diselenggarakan pertemuan di Jakarta antar sesama anggota SEAMO, disepakati didirikannya lima lembaga penelitian dan latihan pendidikan tinggi, yaitu:

1. BIOTROP (*Tropical Biology*), berpusat di Bogor, Indonesia.
2. CCB TROPED (*Central Coordinating Board for Tropical Medicine*), berpusat di Bangkok, Thailand.
3. RECSAM (*Regional Centre for Science and Mathematics*), berpusat di Penang, Malaysia.
4. SEARCA (*Southeast Asian Research Centre in Agriculture*), di Los Banos, Philipina.
5. RELC (*Regional English Language Centre*), berpusat di Singapura.

6. INNOTECH (*Innovation and Technology in Education*), sekarang berpusat di Quezon City, Philipina.

Kelima lembaga tersebut berfungsi sebagai pusat regional untuk bidangnya masing-masing.

Sekarang, bagaimana di Indonesia ? Ilmu Perbandingan Pendidikan masuk ke perguruan tinggi di Indonesia sejak 1959. Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadikan pendidikan perbandingan (komparatif) sebagai satu mata kuliah tersendiri, hingga fakultas tersebut berubah menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan pada 1961, lalu berubah lagi menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta sejak 1964, dan sampai sekarang dalam bentuk Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), mata kuliah perbandingan pendidikan ini tetap menjadi bagian dari kurikulumnya. Semua universitas keguruan memasukkan mata kuliah Perbandingan Pendidikan ini sebagai bagian dari kurikulumnya. Menariknya, materi Perbandingan Pendidikan ini ternyata terfokus pada negara-negara di lingkungan ASEAN, atau paling banter di negara sedang berkembang, suatu hal yang berbeda dengan yang terjadi di negara Barat. Hal ini barangkali agar lebih sesuai dengan lingkup dan peran Indonesia di antara negara tetangga di ASEAN. Termasuk dalam perintis Ilmu Perbandingan Pendidikan ini adalah Prof. Imam Barnadib, M.A., Ph.D., waktu itu sebagai Guru Besar IKIP Yogyakarta. Tulisan beliau menyangkut Ilmu Perbandingan Pendidikan dijadikan sebagai bagian dari referensi tulisan ini.

Di lingkungan IAIN dan juga PTAIS, mata kuliah Perbandingan Pendidikan ini mulai diperkenalkan sejak tahun 1960-an, berbarengan dengan masuknya mata kuliah tersebut di lingkungan IKIP di seluruh Indonesia. Hingga kurikulum 1990, IAIN dan PTAIS masih menjadikan mata kuliah Perbandingan Pendidikan, terutama di Fakultas Tarbiyah, sebagai bagian dari kurikulumnya. Perubahan terjadi mulai kurikulum 1995 sampai sekarang, ketika mata kuliah Perbandingan Pendidikan diubah menjadi Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam, disingkat PPNI. Perubahan yang terjadi cukup mendasar, dari skope negara ASEAN atau negara sedang berkembang, menjadi negara-negara Islam. Agaknya peralihan negara mana yang dikaji ini lebih disesuaikan dengan karakteristik Perguruan Tinggi Agama Islam yang spesifik mengkaji masalah Kelslaman.

Jadi, serangkaian perkembangan telah berjalan. Mulai dari ide Plato tentang penyelenggaraan pendidikan oleh negara, munculnya museum dan perpustakaan Alexanria oleh Alexander Yang Agung sebagai pusat pengetahuan yang lintas etnis dan bangsa, pendirian *Bait al-Hikmah* oleh Harun al-Rasyid sebagai lembaga pengetahuan internasional di Baghdad, cita-cita sekolah internasional oleh Piere Du Bois dan seterusnya, sampai terbentuknya Biro Pendidikan Internasional, UNESCO, ASEAN, hingga masuknya disiplin Ilmu

Perbandingan Pendidikan di lingkungan universitas keguruan, lalu menjadi PPNI di lingkungan IAIN dan PTAIS. Suatu perjalanan yang panjang !

□ ***Dasar dan Prinsip***

Faktor Perjumpaan. Bagaimana suatu bangsa dapat mengenal bangsa lain? ada beberapa jalur atau faktor, suatu suku, bangsa atau negara dapat mengenal budaya di luar suku, bangsa dan negaranya sendiri. *Pertama*, melalui sarana perniagaan atau kehidupan ekonomi. Disengaja atau tidak, diatur oleh pemerintah atau berjalan secara alami, kontak perdagangan ini merupakan kondisi tak terelakkan dalam pemenuhan kebutuhan penduduk yang kian berkembang, saling memerlukan barang dan jual-beli benda. Jadi, kontak ini merupakan proses awal terjadinya interaksi antar bangsa, terlebih setelah komunikasinya dipermudah dengan kian majunya alat transportasi. Daerah jauh semakin terjangkau dan pertukaran barang pun menjadi lancar, mengakibatkan para pelaku pasar saling mengamati kondisi penduduk setempat. Adat istiadat lokal, termasuk praktek pendidikan yang dilaksanakan di negara atau bangsa yang dikunjungi, dikenal tanpa sengaja. Terjadilah pengenalan budaya di luar bangsanya. Pengamatan ini dalam jangka panjang bisa menjadi faktor kuat terjadinya pembaharuan pendidikan suatu negara. Dapat dikatakan bentuk awal kontak antar bangsa adalah melalui jalur perdagangan ini.

Kedua, melalui penaklukan atau peperangan. Sejak masa Yunani hingga Perang Dunia II, sering terjadi konflik antar bangsa yang berakhir dengan kekerasan senjata. Umumnya bangsa pemenang tampil sebagai penguasa, kadang kala diikuti oleh perubahan mendasar dalam hal sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku sebelumnya di negara taklukan, kadang pula tetap dipertahankan. Terjadi akulturasi budaya. Perang Romawi-Yunani, misalnya, berakhir dengan pembauran budaya. Ketika terjadi imperialisme negara Barat terhadap negara berkembang, upaya pengenalan pendidikan kolonial dilakukan dengan tujuan asosiasi budaya, seperti yang pernah diterapkan oleh Belanda terhadap Indonesia. Prancis terhadap Mesir, atau Inggris terhadap India, Malaysia atau lainnya. Bedanya dengan faktor pertama, jalur peperangan ini dilakukan secara paksa, atau bila tidak, dilaksanakan secara perlahan dengan misi tertentu.

Ketiga, adanya kontak antar negara melalui kerja sama bilateral yang bersifat *mutual-cooperation*, dalam bentuk pertukaran ahli maupun pengembangan di bidang pengetahuan. Masuk dalam kategori ini adalah jalur politik atau diplomatik, pertukaran budaya, pelajar, dosen, mahasiswa atau kerja sama luar negeri di bidang pendidikan. Kontak ini bisa dikatakan sebagai tahap maju interaksi antar bangsa, setelah disadari pentingnya hubungan harmonis, saling menghargai dan tujuan perdamaian abadi antar bangsa dan negara. Kerja

sama antar negara ini bisa dalam bentuk regional, misalnya lingkup ASEAN, antar Negara Islam sebagaimana tergabung dalam OKI, negara persemakmuran, maupun lingkup internasional melalui *United Nations*, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketiga faktor kondusif bagi munculnya perbandingan pendidikan di atas bukanlah sebuah urutan, melainkan bentuk-bentuk interaksi antar bangsa dan negara. Itu sebabnya, ketiga faktor tersebut bisa terjadi secara kombinasi maupun isolasi atau sendiri-sendiri. Ketiganya juga dipermudah dengan kian canggihnya teknologi modern berupa alat transportasi dan komunikasi.

Definisi. Dalam disiplin ini, istilah yang pertama muncul adalah “pendidikan internasional” atau *international education*, lalu dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan *comparative education*, yang dalam terjemahan Bahasa Indonesianya ada dua versi istilah yang digunakan. *Pertama*, pendidikan perbandingan, dan *kedua* perbandingan pendidikan. Namun, sebutan istilah pertama, yakni “pendidikan perbandingan” dalam Bahasa Indonesia bisa menimbulkan kebingungan arti, misalnya itu berarti perbandingannya yang menjadi objek kajian, atau berarti upaya mendidik suatu perbandingan, bukan pendidikannya yang diperbandingkan. Sedang istilah yang kedua, “perbandingan pendidikan”, secara gramatikal dapat dipahami bahwa objeknya adalah pendidikan. Pendidikan yang diperbandingkan, atau lebih fokus lagi, pendidikan di suatu negara yang diperbandingkan dengan pendidikan di negara lain. *Comparative education*, dalam Bahasa Inggris bisa diterjemahkan sebagai perbandingan pendidikan, sebagaimana *comparative religion* diartikan sebagai perbandingan agama, bukan agama perbandingan. Menurut hemat kami, niat yang tersirat dari dua istilah tersebut adalah sama, yakni studi perbandingan tentang pendidikan di berbagai negara, *a comparative study of education between countries*. Akan tetapi, mengingat struktur kalimat dalam Bahasa Indonesia yang mengikuti pola subyek-obyek, menerangkan-diterangkan, maka penulis mengikuti pemakaian istilah kedua, perbandingan pendidikan, agar secara gramatikal lebih mudah dipahami. Bila dalam bagian yang lain disebut dengan istilah pendidikan internasional, maka maknanya adalah identik.

Apa arti “perbandingan pendidikan” itu sendiri ? Berbagai ahli menerangkannya dengan *stressing* yang berbeda. Carter V. Good, misalnya, mengartikan perbandingan pendidikan sebagai studi tentang kekuatan-kekuatan pendidikan, sosial, politik dan ekonomi dalam hubungan internasional dengan tekanan pada potensi dan bentuk pendidikan, sedang tujuannya adalah untuk meningkatkan saling pengertian dengan jalan tukar-menukar sarana pendidikan, teknik dan metode, mahasiswa, guru, dosen, teknisi dan lain-lain. Agaknya Carter V. Good ini memperluas dimensi bahasan perbandingan pendidikan dengan memasukkan faktor-faktor yang berpengaruh di luar pendidikan.

Senada dengan itu, I.L. Kandel menyatakan bahwa perbandingan pendidikan adalah studi tentang teori dan praktek pendidikan sekarang, sebagaimana dipengaruhi oleh bermacam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Dengan definisi ini berarti Kandel hendak menunjukkan bahwa objek studinya adalah teori dan praktek pendidikan sekarang. Maksudnya adalah sistem pendidikan yang berlaku di berbagai negara. Sistem itu sendiri, menurutnya, dipengaruhi oleh bermacam latar belakang dan faktor yang berpengaruh, misalnya sosial, ekonomi, ideologi, filsafat dan lain-lain. Selain itu, perbandingan pendidikan terkait dengan sejarah pendidikan di suatu negara.

Menurut Robert F. Arnove, dkk, perbandingan pendidikan mengkaji bagaimana negara-negara berencana memperluas, meningkatkan dan melakukan upaya demokratisasi terhadap sistem pendidikan mereka.⁷

Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disarikan bahwa perbandingan pendidikan adalah perbandingan teori dan praktek pendidikan antar negara dengan tinjauan terhadap faktor yang berpengaruh maupun sejarah perkembangannya dalam rangka pengembangan sistem pendidikan mereka. Perbandingan pendidikan berkaitan dengan sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku di suatu negara. Jadi, keluar dari definisi ini adalah perbandingan antar tokoh, konsep maupun institusi pendidikan antar negara. Misalnya perbandingan tokoh pendidikan Muhammad Athiyah al-Abrasyi dari Mesir dengan John Dewey, seorang pendidik berkebangsaan Amerika. Atau membandingkan antar konsep pendidikan. Misalnya, membandingkan antara konsep pendidikan Muhammad Abduh (Mesir) dengan Ahmad Dahlan (Indonesia). Atau membandingkan antara dua institusi pendidikan, misalnya membandingkan antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Indonesia dengan Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) di Malaysia, dan sebagainya. Bahwa dalam hal tertentu ketika membandingkan pendidikan antar negara tersebut perlu menyinggung tokoh, konsep atau institusi, namun tidak menjadi fokus utama, maka yang demikian itu dipandang sebagai melengkapi data. Adapun penekanannya sendiri adalah pada teori dan praktek, sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku di suatu negara.

Tujuan dan Manfaat. Suatu negara menyelenggarakan pendidikan bagi bangsanya adalah dengan maksud mencerdaskan rakyat, meningkatkan pengetahuan mereka, demi kesejahteraan bersama, yang pada gilirannya akan menjadikan negara itu sendiri mengalami kemajuan. Akan tetapi, acap kali perkembangan pendidikan suatu negara perlu melihat kemajuan pendidikan yang dicapai oleh negara lain. Itulah sebabnya, dalam memajukan pendidikan,

⁷ Robert F. Arnove, dkk, "Approaches and Perspectives" dalam Philip G. Altbach dkk, *Comparative Education*, (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1982), h.3.

suatu negara perlu membandingkannya dengan pelaksanaan pendidikan di negara lain, mengetahui persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kelemahan, lalu mengambil unsur positif sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi lokal. Tentu saja pengalaman pendidikan suatu negara tidak dapat ditransplantasikan begitu saja ke negara lain, karena perbedaan budaya, politik, hukum, ekonomi dan lainnya, namun pada taraf tertentu prinsip umum yang menjiwai suatu penyelenggaraan pendidikan dapat berlaku secara global di negara lain. Adapun prakteknya bisa disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

Paling tidak, dengan perbandingan pendidikan tersebut dapat tumbuh saling pengertian, menghargai dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara di bidang pendidikan. Terlebih ketika jarak antar negara bukan sebuah hambatan, menjadi kian dekat karena canggihnya teknologi komunikasi dan media elektronik, dimana seseorang dapat mengakses langsung via internet untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan di suatu negara. Belajar dari keberhasilan pendidikan negara lain, kita dapat memulai pembaharuan pendidikan di negara sendiri.

Beberapa Problem. Tidak dapat dihindarkan, di balik manfaat yang bisa ditimbulkan akibat membandingkan pendidikan antar negara, adanya masalah yang dihadapi. *Pertama*, studi lintas negara bila tidak diawali dengan keyakinan akan identitas bangsa, proteksi terhadap budaya sendiri serta jati diri negara, dapat saja berdampak pada erosi budaya. Terutama bila kesan segala sesuatu yang berasal dari Barat adalah identik dengan kemajuan, modern atau canggih, masih ada. Persepsi ini menghambat kemajuan negara sesuai dengan identitasnya sendiri. Membandingkan pendidikan di negara lain tidaklah perlu meleburkan diri dengan kondisi negara lain. Jepang tetap menjadi negara maju setelah menganut politik membuka diri dengan budaya luar, tanpa meninggalkan budaya nasional. Baju kimono masih dipakai, upacara adat serta seni dan tradisi lokal tetap bertahan di tengah kemajuannya.

Kedua, seringkali upaya membandingkan pendidikan antar negara ini berhenti pada dataran konsep pendidikan suatu negara semata, tidak diteruskan dengan kebijakan *follow up* yang jelas, baik karena alasan teknis, dana, SDM, keterkaitan dengan budaya nasional maupun lainnya. Pembaharuan pendidikan nasional pun berjalan secara alami. Percepatan pembenahan pendidikan nasional umumnya dilakukan di luar upaya perbandingan pendidikan antar negara, misalnya akibat tuntutan masyarakat, perubahan konstelasi politik nasional atau lainnya.

Ketiga, tujuan yang semula hendak dicapai setelah membandingkan pendidikan antar negara, yakni untuk menumbuhkan rasa saling pengertian (*understanding*), saling menghormati, meningkatkan perdamaian dunia dan kerjasama antar negara, melalui pertukaran pelajar, mahasiswa, guru, dosen, para profesional, teknisi dan lain-lain, tidak menghalangi kepentingan politik

atau misi suatu negara terhadap negara lain. Di sini politik asosiasi budaya berjalan secara perlahan. Ketika Belanda menjajah Indonesia, Belanda pun melaksanakan pendidikan bagi Bumi Putera, tetapi mengikuti kurikulum model Belanda. Begitu pula dengan Inggris saat menduduki India.

Keempat, yang diketahui tentang pendidikan suatu negara adalah mencerminkan kondisi saat itu. Besok atau lusa, apalagi berselang tahunan, belum tentu sama ketika pengamatan pertama kali dilakukan. Kompleksitas budaya, politik, hukum, ekonomi, ideologi, atau pendidikan suatu negara itu sendiri berubah-ubah, dan susah ditebak kapan akan berubah atau kemana perubahan akan mengarah. Terlebih bila perubahan itu menyangkut politik negara, umumnya berpengaruh langsung terhadap kebijakan suatu negara. Sebut saja Indonesia, ketika merdeka dari penjajahan, sistem dan kebijakan pendidikannya segera berubah secara signifikan. Bisa dibayangkan, Arab Saudi misalnya, bila struktur pemerintahan *mamlakah* atau kerajaannya berubah menjadi republik, apa yang akan terjadi dengan peraturan pendidikannya? kompleksitas tersebut bertambah rumit karena faktor non-pendidikan yang berpengaruh, mengalami interaksi sinergik dalam perubahan pendidikan suatu negara. Pengaruh globalisasi juga tidak dapat dikesampingkan. Euforia reformasi begitu melanda Indonesia, negeri jiran, Malaysia, yang menyaksikannya lewat media informasi bisa jadi terinduksi. Begitu pula sebaliknya.

□ ***Metodologi***

Kajian perbandingan pendidikan mengikuti prosedur ilmiah. Bagaimana seseorang atau suatu negara mengetahui teori dan praktek pendidikan di negara lain, bisa dilaksanakan dengan menerapkan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan prosedur ilmiah. Sebagaimana diterangkan dalam tinjauan historis sebelumnya, Julien de Paris, mengawali studi perbandingan pendidikan ini dengan menerapkan teknik pengumpulan data *interview* dan *kuisisioner*. Teknik ini membutuhkan ketelitian tersendiri dan bisa menyerap waktu dan energi, karena menyangkut siapa yang patut diwawancarai atau diberi angket, bagaimana isi pertanyaan yang objektif dengan kondisi pendidikan di suatu negara, serta pengolahan data dan kesimpulan yang diambil. Meskipun teknik tersebut bersifat tradisional, bukan berarti tidak relevan lagi dipakai. Hanya saja teknik pengumpulan data lainnya perlu dikembangkan, misalnya *observasi*. sebagaimana hal ini dilakukan oleh John Griscom, Victor Cousin, dan Horace Mann yang meneliti kondisi pendidikan di berbagai negara dengan cara visitasi, lalu hasilnya disusun dalam bentuk laporan atau buku. Kadang kala teknik observasi ini diliputi dengan unsur subjektivitas peneliti, sebab peneliti dalam memandang secara kritis pendidikan suatu negara bisa “dibanyang-bayangi”

dengan apa yang terjadi di dalam negerinya sendiri, walaupun ini tidak hendak saya katakan bahwa peneliti dalam negeri tidak bisa kritis. Semangat nasionalisme peneliti yang berlebihan bisa mengurangi objektivitas hasil penelitiannya.

Dalam memahami sistem atau kebijakan pendidikan suatu negara, *teknik dokumentasi* berperan penting. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan pejabat terkait beserta rinciannya tentang pendidikan, umumnya didokumentasikan oleh negara, bahkan dipublikasikan. Mengetahui dokumen yang masih berlaku bisa dipakai untuk mengenal bagaimana sistem dan kebijakan pendidikan yang dianut oleh suatu negara tertentu. Berbeda dengan praktek pendidikan yang mungkin bervariasi antara satu lembaga dengan lembaga pendidikan lainnya, yang acap kali berubah-ubah, sistem dan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh suatu negara tidak mudah berubah dalam waktu relatif pendek, kecuali ada kondisi tertentu yang revolusioner. Di Indonesia, Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No.4 Tahun 1950 baru diubah melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 Tahun 1989, sedang kurikulumnya berkembang melalui kurikulum 1950, 1958, 1964, 1968, 1975, 1984 dan kurikulum 1994.

Seiring dengan kemajuan alat komunikasi, saat ini pengumpulan data dan dokumen tentang pendidikan di suatu negara dapat dibuka melalui internet kapan saja. Datanya pun *realible*.

Ada beberapa metode yang bisa dipilih untuk studi perbandingan pendidikan ini. *Pertama*, metode historis. Metode ini berperan untuk menemukan fakta tentang situasi pendidikan pada waktu lampau, untuk memahami pendidikan masa kini dan yang akan datang. Sebagaimana dikemukakan oleh Isaac L. Kandel, bahwa perbandingan pendidikan itu mempelajari pendidikan saat ini dengan mengingat latar belakang historisnya. Metode historis dalam penelitian perbandingan pendidikan merupakan wahana sistematis dan objektif untuk menilai dan menafsirkan bukti-bukti kejadian pendidikan suatu negara di masa lampau, sehingga dapat dimengerti dan dibandingkan dengan kondisi sekarang. Misalnya, bagaimana sistem pendidikan di Mesir ketika dijajah Inggris dibandingkan dengan pasca kolonial. Bisa saja, di saat yang sama dibandingkan dengan masa kolonialisme Inggris di India, atau penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah membandingkan antar waktu dan negara tersebut, dapat diketahui aspek apa saja yang telah berubah, persamaan atau perbedaan, dalam sistem pendidikannya, baik sebelum atau sesudah merdeka, di suatu negara atau beberapa negara, untuk kemudian dicari *trends* perubahannya di masa depan. Dengan demikian, peneliti berupaya menampilkan tipe ideal pendidikan di masa silam agar dapat dibaca pada masa sekarang. Dalam konteks ini metode historis adalah membandingkan berbagai tipe ideal pendidikan di masa silam dari berbagai bangsa atau masyarakat yang ada saat itu. Beberapa langkah yang bisa ditempuh dalam melaksanakan metode

historis ini adalah: memilih problem, mengumpulkan data, menguji data, membuat hipotesa tentang kondisi pendidikan masa lalu, dan menarik kesimpulan.

Kedua, metode deskriptif. Bila peneliti menguraikan, menjelaskan dan menyampaikan kondisi objektif tentang teori dan praktek pendidikan, berupa sistem, kebijakan, proses, kurikulum, aliran atau lainnya yang terjadi di suatu negara, maka peneliti tersebut sesungguhnya telah memilih metode deskriptif ini. Metode ini mengupayakan untuk mengetahui apa saja yang ada dan bagaimana status dari fenomena itu pada masa sekarang. Van Dalen mengatakan bahwa metode deskriptif itu tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan fakta secara rutin, melainkan membuat prediksi dan identifikasi hubungan antar variabel. Metode deskriptif penting artinya bagi perbandingan pendidikan bila peneliti mampu berhadapan dan mengalami langsung situasi kongkrit pendidikan di suatu negara. Bedanya dengan metode historis, metode deskriptif meninjau kondisi pendidikan di suatu negara pada masa sekarang, bukan dalam konteks masa lampau. Maka, problem yang bisa muncul dari metode deskriptif ini adalah validitas data dan sejauh mana data tersebut aktual atau *up to date*. Untuk itu apa yang diberitakan dalam media massa, media cetak maupun elektronik, setidaknya membantu mengungkap isu aktual yang sedang berkembang. Tapi, sering kali berita yang tidak diverifikasi, belum tentu sesuai dengan kondisi riil di lapangan, mengingat informasi tersebut bisa berbentuk analisa.

Ketiga, metode statistik. Yaitu, cara penelitian dengan menggunakan data statistik yang ada, guna mengungkap atau menganalisa hubungan antar variabel penelitian tentang pendidikan di berbagai negara. Data statistik yang berhubungan dengan kependudukan, aset negara, *Gross National Product* atau GNP, jumlah murid, guru, mahasiswa, dosen, ilmuwan, sekolah, perguruan tinggi, angka pengangguran bahkan intensitas kriminalitas suatu masyarakat, dan sebagainya, merupakan indikasi atau potret pendidikan di suatu negara. Data statistik itu sendiri masih berupa *raw materials* atau bahan mentah, yang masih perlu diolah, dianalisa dan diberi interpretasi oleh peneliti. Bagaimana trends perkembangan kelembagaan pendidikan di suatu negara, dapat dibaca melalui angka-angka statistik tentang jumlah sekolah atau perguruan tinggi yang ada dari waktu ke waktu. Tentu saja, data statistik pendidikan di suatu negara ini akan lebih berarti bila dibandingkan dengan kondisi negara lain. Bila tidak, pertumbuhan pendidikan di suatu negara akan dimaknai secara berlebihan oleh negara yang bersangkutan. Apa yang secara nasional dianggap telah berhasil, mengalami kemajuan atau peningkatan, belum tentu demikian halnya setelah capaian negara tersebut dihadapkan dengan perolehan di bidang yang sama oleh negara lain. Sebagai contoh berikut ini dikemukakan perbandingan jumlah Doktor dalam tiap satu juta penduduk di beberapa negara.

TABEL 1
JUMLAH DOKTOR DALAM TIAP SEJUTA PENDUDUK
DI BEBERAPA NEGARA

NO	NEGARA	JUMLAH DOKTOR
1	Amerika Serikat	6.500
2	Jepang	6.500
3	Jerman	4.000
4	Prancis	5.000
5	India	1.250
6	Mesir	400
7	Israel	16.500
8	Indonesia	65

Sumber: Ceramah Dirjen Dikti pada Rakernas Pascasarjana di Bandungan, 27 Juni 1997

Data statistik di atas bisa dikembangkan untuk aspek yang lain, misalnya perbandingan jumlah terbitan ilmiah per tahun, biaya pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan serta lainnya. Berangkat dari temuan data matematis tersebut, sebenarnya mempermudah untuk mengukur keberhasilan pendidikan oleh suatu negara.

Keempat, metode filosofis. Metode ini mencoba mencermati prinsip dan konsep pendidikan yang dianut oleh suatu negara. Dalam pendidikan, banyak istilah, prinsip atau konsep yang dipakai, seperti menggunakan terma peserta didik, orang tua, wali murid, pendidikan kaum dewasa (*adult education*), pendidikan seumur hidup (*long life education*), penanaman nilai, teori pendidikan, dan lain sebagainya. Tiap negara memiliki maksud tersendiri atas terma tersebut. Posisi metode filosofis dalam menghadapi terma di atas adalah sebagai kajian kritis dan analisa mendalam terhadap konsep pendidikan yang berkembang di suatu negara. Setelah mengenal terma yang dipakai dapat diskemakan bagaimana ideologi pendidikan suatu negara itu sebenarnya. Metode filosofis amat perlu dalam studi perbandingan pendidikan untuk memahami bagaimana pengertian terma, konsep, teori dan ideologi pendidikan yang berlaku pada suatu bangsa atau masyarakat tertentu bila dibandingkan dengan bangsa atau masyarakat lainnya. Metode filosofis meneruskan kajian deskriptif kondisi pendidikan antar negara, dimana peneliti kemudian menggunakan kekuatan nalarnya untuk menganalisa secara kritis faktor, sebab-musabab perbedaan dan persamaan, kelemahan dan kelebihan, serta kecenderungan konsep pendidikan yang dijalankan oleh suatu negara.

Kelima, metode komparatif. Dalam hal ini terdapat ketidaksepakatan di kalangan peneliti tentang unsur yang diperbandingkan, apakah itu menyangkut

sistem pendidikan nasional, atau sub-unit sistemnya ? dan apakah yang dibandingkan itu dari sudut yang berbeda di waktu yang sama atau tidak ? bisakah kita, misalnya, membandingkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa abad ke-19 dengan negara-negara Amerika Latin, Afrika atau Asia, sekarang ini ? Problem lain yang muncul dalam menggunakan metode komparatif ini adalah bahwa untuk menemukan pola umum atau prinsip yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan hubungannya bagi konteks sosial masyarakat suatu negara, para peneliti sering mengabstraksikan sistem pendidikan suatu negara menurut konteks sejarah. Dalam membandingkan, sebuah realitas sejarah dikorbankan bagi kepentingan suatu teori. Metode komparatif ini memang amat kompleks.

Untuk mengurangi *mis-match* dalam metode komparatif, pilihan terhadap unit yang diperbandingkan dalam suatu negara menurut kurun waktu tertentu, atau antar negara dengan aspek tertentu, hendaknya diseleksi agar unitnya *comparable*, setaraf, dan relevan. *Comparable* maksudnya layak dibandingkan. Misalnya, membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia pada masa kolonial, atau bila di satu negara, bagaimana kebijakan pendidikan Orde Lama jika dibandingkan dengan Orde Baru di Indonesia. Setaraf artinya adalah dari sisi unsur, ruang dan waktu yang dibandingkan menunjukkan representasi yang logis, tidak jauh berbeda. Umumnya, membandingkan kondisi pendidikan di antara negara berkembang, atau antar anggota ASEAN, adalah setaraf. Tapi, membandingkan pendidikan negara maju dengan negara miskin, adalah tidak setaraf. Ibarat membandingkan bola dengan kelereng. Sedang relevan menunjukkan kesesuaian antar unsur yang dibandingkan. Kalau sudah ditentukan bagaimana demokratisasi pendidikan di Iran dan Irak, misalnya, maka sejak awal unsur ini harus konsisten dan dicari relevansinya dengan struktur masyarakat di kedua negara tersebut. Ringkasnya, ketiga hal tersebut, *comparable*, setaraf dan relevan, merupakan sebagian dari parameter untuk mempertegas batas yang diperbandingkan, bila tidak maka bias perbandingan tidak dapat dihindari.

Keenam, metode quasi-eksperimental. metode ini bersifat empiris, karena menggunakan pengamatan terhadap variabel terkontrol dan variabel bebas. Pengamatannya dilakukan di dua atau lebih negara yang berdekatan. Meskipun desain eksperimental, menurut Foster, tidak mungkin dilakukan, namun rancangan quasi-eksperimental bisa. Sebagai contoh, dalam mengkaji pengaruh persekolahan bagi institusi sosial pribumi di Afrika Barat, Foster menyarankan menggunakan rancangan quasi-eksperimental yang melibatkan pemilihan terhadap satu suku yang terpisah di antara dua negara yang berbeda, dan sebaliknya, memilih dua atau banyak suku di negara yang sama. Rancangan seperti itu akan memfasilitasi keputusan bagi pengaruh yang terkait dengan kebijakan negara tentang akses dan sukses sekolah bagi anak-anak dari latar belakang etnis yang berbeda.

□ *Ruang lingkup*

Karakter Negara Berkembang. Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini seluruh negara-negara Islam adalah negara berkembang, bahkan ada yang masuk dalam kategori miskin. Memang, status negara maju, berkembang dan miskin, adalah relatif dan tidak permanen. Relatif maksudnya ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi suatu negara itu berbeda-beda menurut negara masing-masing, dan tidak permanen karena suatu negara pada waktu tertentu bisa saja maju tapi di waktu yang lain menjadi berkembang atau bahkan miskin, tergantung dari sejauh mana unsur pembentuk karakter suatu negara disebut maju, berkembang atau miskin itu ada dalam suatu negara. Negara maju itu sendiri bukan tanpa masalah, beberapa karakter negara berkembang bisa terdapat di negara maju. Sebaliknya, tidak selamanya negara berkembang identik dengan kemunduran atau ketertinggalan dari kemajuan, karena bisa jadi unsur yang membentuk negara maju juga dapat kita saksikan di negara berkembang. Karenanya, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana karakter negara berkembang tersebut. Berikut adalah penjelasan singkatnya.

Satu, tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Umumnya tingkat kelahiran dan kematian di negara berkembang adalah tinggi. Bila kita gunakan angka kelahiran kasar dari negara berkembang lalu dibandingkan dengan apa yang terjadi dengan negara maju, akan tampak sebagai berikut. Afghanistan 50, Ethiopia 49, Yaman 48, Arab Saudi 43, dan Pakistan 43, sementara di New Zealand 15, Amerika Serikat 16, Prancis 14, Swedia 11 dan Jepang 12. Adapun angka pertambahan penduduknya tercatat: Prancis 0,4; Jepang 0,1; Amerika Serikat 1,0; Swedia 0,2; sedang Ethiopia 2,6; India 2,5 dan Indonesia 2,34 (sekarang turun lagi). Meskipun data ini *interpretable*, seperti pertambahan penduduk karena berkurangnya angka kematian, atau karena masuknya imigran luar negeri, indikator tersebut masih dapat dipakai untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk di suatu negara.

Tingkat kematian, terutama untuk anak-anak, juga dapat dipakai sebagai indikator negara berkembang. Faktual, bahwa layanan kesehatan di negara berkembang belum memadai. Pengetahuan ibu-ibu tentang pemeliharaan anak maupun dirinya sebagai ibu hamil masih kurang, di samping kemiskinan yang ada, angka kematian anak-anak di bawah satu tahun adalah tinggi. Sebagai ilustrasi, angka kematian di Inggris adalah 10, dan Jepang 6, sedang Malaysia 30, India 110, Mesir 100 dan Philipina 50, meskipun angka kematian ini cenderung menurun dari tahun ke tahun akibat majunya bidang kesehatan yang dicapai oleh negara berkembang.

Dua, Kondisi sanitasi tidak memadai. Indikator kebersihan suatu negara bisa dilihat dari ketersediaan air bersih untuk minum atau keperluan rumah tangga.

Air merupakan kebutuhan esensial dalam kehidupan sehari-hari. Langkanya air berakibat langsung pada kondisi kebersihan suatu masyarakat pengguna. Contohnya, penjual makanan di pinggir jalan memakai seember sehari untuk keperluan cuci piring dan lainnya. Di daerah miskin, orang menggunakan air sungai yang keruh sebagai sumber air, untuk mandi, cuci, atau minum. Sebaliknya, di negara maju, tersedia saluran air minum yang bersih, bahkan tanpa direbus sudah mencapai standart aman untuk dikonsumsi. Fasilitas air bersih tersedia bahkan menjangkau ke hutan dan gunung. Berikut ini data ketersediaan air bersih untuk minum dari sejumlah negara. Di Afghanistan 28 % penduduk kota dan 8 % penduduk desa yang mendapat air bersih, India 77 % untuk perkotaan dan 31 % untuk pedesaan, Bangladesh 26 % untuk perkotaan dan 40 % untuk pedesaan, Pakistan 72 % untuk perkotaan dan 20 % untuk pedesaan dan di Bolivia di Amerika Latin 69 % untuk perkotaan dan 20 % untuk pedesaan (data UNICEF 1986). Perlu diingat pula, air minum yang tersedia di negara berkembang tidak siap minum seperti halnya di negara maju, karena masih perlu direbus agar aman dikonsumsi. Itu sebabnya dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini ketersediaan air bersih merupakan salah satu indikator apakah negara tersebut termasuk negara berkembang atau tidak.

Tiga, kondisi perumahan buruk. Kemiskinan di bidang perumahan di negara berkembang terlihat secara nyata. Di daerah kumuh, gubuk-gubuk tak layak huni ditempati secara berjejal. Pemandangan seperti ini terdapat di daerah kumuh di Asia, Afrika atau Amerika Latin.

Untuk menjadikan kondisi perumahan sebagai indikator negara berkembang, belum ada ukuran yang didasarkan atas banyaknya gubuk atau rumah mewah, melainkan digunakan ukuran berapa meter persegi jatah ruang per orang dalam rumah. Dengan ukuran tersebut dapat digambarkan perbedaan antara negara maju dengan berkembang. Negara maju, yang mayoritasnya adalah negara Barat, menganggap penting *privacy* seseorang. Oleh karena itu rumah yang berjejal penghuninya, dianggap bertentangan dengan kebutuhan memperoleh *privacy* tersebut. Itulah sebabnya, banyak studi dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan seseorang karena hidup di tempat yang berjejal.

Empat, tingginya jumlah pekerja sektor pertanian. Sebagian besar penduduk negara berkembang tinggal di daerah pedesaan dengan mata pencaharian sektor pertanian. Di negara berkembang, jumlah petani penggarap dan buruh tani lebih besar dari pemilik pertanian (*land-owner*). Don R. Hoy mengutip data UNESCO dengan menggambarkan peta bola dunia di negara berkembang yang hidup dari bertani sekitar 40 % - 80 %. Sebaliknya di negara maju kurang dari 20 %. Di negara berkembang, *perawatan tanah pertanian juga rendah*. Karena sempitnya lahan garapan, maka daerah pertanian ditanami terus-menerus sepanjang musim. Tanpa itu, petani tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Akibatnya,

upaya perawatan lahan pertanian tidak dapat dilakukan dengan optimal. Sebab lain karena pengetahuan tentang perawatan tanah tidak ada.

Masih berkaitan dengan tanah ini, di Amerika Latin dan Asia, banyak *kepemilikan tanah dikuasai oleh sekelompok kecil orang*. Kepemilikan tanah umumnya diperoleh karena strata sosial yang dipegang oleh seseorang. Tanah yang luas tersebut digarap oleh para petani yang bekerja atas dasar berbagai kondisi yang sifatnya tradisional. Petani buruh hanya mengerjakan tanah dan dibayar tiap hasil kerjanya. Petani penggarap akan mengerjakan tanah dari menanam hingga memanen. Ia akan memperoleh bagiannya apabila selesai panen sejumlah hasil yang telah disepakati menurut tradisi masing-masing budaya. Adalah kenyataan bahwa sebagian besar penduduk negara berkembang adalah petani. Mereka menggarap tanahnya secara tradisional dan mengajarnya secara turun temurun. Kepemilikan tanah orang tua biasanya akan dibagikan kepada keturunannya menurut hukum adat masing-masing kelompok budaya atau sub-kultur. Dari tradisi mewariskan ini, tiap bidang tanah akan terbagi menjadi jumlah yang lebih kecil. Selanjutnya, tanah akan terpotong kecil-kecil dengan pemilik yang berbeda. Kondisi ini akan menyulitkan apabila akan dilakukan pengelolaan tanah secara modern, karena tanah tersebut ada di tangan banyak orang sehingga sulit mengambil keputusan bersama. Pengelolaan tanah secara mekanik juga menjadi sulit dilakukan.

Lima, Gross National Product Rendah. Kecuali negara penghasil minyak bumi yang sedikit penduduknya, umumnya Pendapatan Per Kapita penduduk negara berkembang adakah rendah. Karena rendahnya, maka prioritas penduduk adalah untuk kebutuhan pokok, yaitu pangan. Logislah bila pendapatan mereka habis hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan ini. Konsekuensi lain adalah munculnya gizi rendah. Di Yaman 54 % penduduk kekurangan gizi ringan dan 4 % berat, Bangladesh 63 % ringan dan 21 % berat, Indonesia 27 % ringan dan 3 % berat, sementara El Salvador 52 % ringan dan 6 % berat (data UNICEF 1986).

Memilih makanan bergizi juga memerlukan sejumlah pengetahuan. Penduduk di negara berkembang yang tidak pernah mengalami pendidikan formal, tidak mungkin memilih cara memilih makanan bergizi tanpa informasi secara khusus mengenai hal itu. Dengan demikian, penduduk negara berkembang yang tidak pernah bersekolah dan mendapat penyuluhan tentang makanan yang baik, tidak tahu bagaimana makanan berkalori, bergizi dan sehat, meskipun ia cukup mampu untuk memperolehnya. Selain itu, budaya sekelompok etnis tertentu menyebabkan rendahnya kalori yang dikonsumsi seseorang. Budaya tentang ayah mendapat jatah makanan yang baik, anak nomor dua dan sisanya ibu, budaya anak jangan makan yang anyir (telur, daging dan ikan) agar menjadi pandai dan sebagainya adalah salah satu contoh peran budaya yang kurang menguntungkan dalam mencapai kadar gizi yang memadai.

Sebagai ilustrasi, Papua New Guinea memperoleh 79 % dari kalori yang seharusnya dikonsumsi setiap hari. Honduras 95 %, Mali 74 %, Indonesia 111 %, Jepang 124 % dan Amerika Serikat 137 %. Karena angka ini rerata, dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang makan dengan kalori yang amat rendah. Juga, rerata di atas 100 % pada negara maju tidak selalu menunjukkan bahwa orang tersebut makan lebih banyak dari seharusnya, karena di negara maju telah sampai pada taraf mengurangi kalori makan untuk tujuan kesehatan dan kecantikan.

Kembali pada masalah rendahnya GNP, World Bank menyebutkan perbandingan GNP lingkup negara Asia Tenggara sebagai berikut.

TABEL 2
PENDAPATAN PER KAPITA (GNP) BEBERAPA NEGARA
DI ASIA TENGGARA 1970-2005 (dalam US \$)

NEGARA	1970-1975	1980-1985	1988-1993	2005 (diproyeksikan)
Thailand	390	810	2.110	4.800
Singapore	2.770	7.300	19.850	40.000
Philipina	370	520	820	1600
Malaysia	890	1.910	3.140	8.000
Indonesia	220	520	740	1.400

Sumber: World Bank, 1995 and Asia Pacific Profiles, Australian National University.

Enam, tingkat buta huruf tinggi. Pada saat negara-negara berkembang merdeka sekitar Perang Dunia kedua, mayoritas penduduknya adalah buta huruf. Setelah itu, upaya melek huruf dilakukan hingga mencapai loncatan persentase mampu baca yang mengagumkan. Tapi, dibandingkan dengan negara maju, negara berkembang masih tertinggal. Perbandingan angka buta dan melek huruf amat penting artinya untuk mengetahui partisipasi sekolah anak-anak serta *human resources* suatu negara. Kemajuan teknologi juga dipengaruhi oleh kemampuan baca-tulis dan tingkat pendidikan ini. Teknologi transportasi dan komunikasi, misalnya, merupakan sesuatu yang mahal bagi negara berkembang. Akibatnya, *tingkat penguasaan teknologi rendah.*

Transportasi berarti pemenuhan jalan raya, lalu lintas sungai dan pangkalan udara. Semuanya merupakan infrastruktur transportasi yang terbangun dengan biaya tinggi. Di samping itu, teknologi komunikasi di negara berkembang juga merupakan barang mewah. Negara berkembang belum mampu memproduksi sendiri produk teknologi mutakhir tersebut, melainkan mengimport dari negara maju. Akibat susulannya adalah *negara berkembang hanya mampu mengekspor bahan mentah*, sedang produk teknologi terpaksa mengimport dari luar negeri, negara maju. Sarana telepon dan media elektronik,

semisal *hand-phone, lap top, internet* serta lainnya, sebagai alat komunikasi modern, merupakan hal biasa dan kebutuhan tingkat rumah tangga bagi negara maju, sementara bagi negara berkembang, fasilitas tersebut dinikmati oleh sebagian kecil dari orang yang mampu, masyarakat pada umumnya memandang media tersebut sebagai simbol modernitas dan kemajuan yang tidak mudah didapat. Di saat penduduk negara maju telah memakai jasa internet di rumah, prosentase penduduk negara berkembang yang memiliki telepon masih sangat rendah.

Tujuh, integritas nasional labil. Negara berkembang yang multi-etnis, bila tingkat pendidikannya rendah dan kesadaran persatuan nasionalnya tidak menjadi prioritas, berisiko terhadap munculnya konflik antar etnis, ras, adat dan agama. Di antara sebab munculnya ketegangan sosial adalah karena ikatan kekerabatan itu lebih besar dari pada kesadaran bernegara. Konflik berkepanjangan dapat mengancam kestabilan politik, iklim amn untuk investasi dan bisnis menjadi terganggu. Terlebih bila kemudian muncul gerakan sepijalan yang bermaksud memisahkan diri dari suatu negara, maka integritas negara berada diujung tombak. Ketidakstabilan politik negara tersebut tidak sempat melaksanakan pembangunan.

Kemudian, acap kali negara berkembang berupaya mengatasi problema integritas nasionalnya mengakibatkan menggunakan pendekatan militer. *Pemerintahan dipegang oleh kekuatan militer.* Faktanya, kebanyakan negara berkembang memiliki pimpinan militer. Keadaan ini terdapat di Amerika Latin, Afrika maupun Asia.

Delapan, investasi rendah, bunga bank tinggi dan kekayaan berpusat di kota atau tersimpan di luar negeri. Sebagian besar penduduk negara berkembang melakukan praktek tabungan secara alami. Misalnya, menyimpan hewan piaraan yang dianggapnya bernilai karena dapat dibiakkan dan itu menguntungkan investasinya. Kadang kala menyimpan emas untuk meningkatkan status ekonomi. Tidak jarang pula pada saat tertentu, penduduk membelanjakan *in come*-nya untuk suatu keperluan, yang menurut kacamata Barat, tidak produktif. Misalnya, pesta setelah panen sebagai ungkapan terima kasih kepada alam.

Bunga bank tinggi, dan tidak semua orang mendapat fasilitas kredit, bahkan sering kali penduduk miskin yang justru membutuhkan pinjaman modal, tidak atau sulit memperoleh kepercayaan bank untuk mengembangkan usahanya melalui kredit, kalau toh dapat bunganya tinggi. Sebaliknya, para konglomerat mendapat kemudahan.

Di negara maju, jasa adalah uang. Karena kompleks dan canggihnya tata kehidupan masyarakat, berbagai macam pelayanan jasa yang memberi kemudahan "ditawarkan dan dibeli". Misalnya pajak. Bagi wajib pajak di negara maju menyelesaikan urusan pajaknya pada perusahaan pajak. Untuk membeli karcis tontonan berbagai hiburan, orang tidak harus keliling ke tempat-tempat pertunjukan, melainkan cukup mendapatkannya di perusahaan jasa penjual

karcis. Sekarang, jarang orang membawa uang *cash*. Yang dibawa adalah *card* atau ATM (Agunan Tunai Mandiri) yang bisa diuangkan sewaktu-waktu di jalan raya, pasar, terminal, bandara atau lainnya tanpa dibatasi jam kerja. Dengan cara ini pemilik mengetahui berapa sisa uang yang ada, dan tentu saja lebih aman.

Kekayaan terpusat di kota, karena penduduk kota umumnya lebih maju daripada desa. Pola hidup kota membutuhkan banyak jenis layanan dan jasa. Layanan transportasi merupakan contoh kongkrit, hal mana di kota kebutuhan akan transportasi adalah vital, karena hiruk pikuk dan lalu lalang orang ke pertokoan, perkantoran atau industri merupakan aktivitas rutin sehari-hari, sementara di desa yang sebagian besar lahannya adalah pertanian, tidak memerlukan demikian.

Selain itu, mata uang di negara maju lazimnya lebih stabil dari pada mata uang regional di negara berkembang. Keadaan ini memungkinkan kaum modal untul menyimpan uangnya ke luar negeri. Parahnya, bila nilai tukar yang fluktuatif, orang kemudian berspekulasi terhadap kurs mata uang asing, untuk meraup keuntungan tanpa keluar keringat. Keuntungan sekali lagi di pihak pengusaha atau kaum modal, sementara bagi yang pengusahaan kecil-kecilan tidak mampu bersaing.

Sembilan, statifikasi masyarakat dan loyalitas sosial bertumpu pada tradisi. Di negara berkembang, tradisi memegang peran penting. Munculnya tradisi bisa bersumber dari kerajaan, agama atau adat istiadat itu sendiri. Di lingkungan kerajaan, orang menjabat posisi tertentu ditentukan oleh garis ikatan darah. Begitu pula dengan kepala suku atau adat. Dalam hubungannya dengan perempuan atau istri, misalnya, adat bisa ikut menentukan struktur keluarga maupun relasi publik atau domestik seseorang. Umumnya perempuan berada dalam peran domestik, sementara lelaki banyak di sektor publik. Status wanita di negara berkembang, dilihat dari ukuran Barat, bisa dianggap rendah, karena masyarakat Barat memiliki kultur yang berbeda dalam memandang agama dan adat, ukuran status perempuan yang dipakai juga berbeda. Bisa saja bagi adat, perilaku tertentu dari seorang perempuan yang membatasi diri dari pergaulan bebas adalah suatu kesopanan, terhormat atau perempuan baik-baik, tapi bagi Barat hal itu bisa dinilai membatasi hak perempuan. Menyikapi hal ini, saya konsisten dengan argumentasi sebelumnya bahwa ukuran budaya suatu negara itu relatif.

Kedekatan kerabat atau daerah asal, juga merupakan karakter yang sering dijadikan pertimbangan utama dalam loyalitas sosial. Kondisi ini rawan konflik, karena rasa fanatisme kelompoknya mengalahkan semangat nasionalisme. Sejumlah penduduk di negara berkembang merasa aman bila bersama dan berhubungan dengan keluarganya, kerabat semarga, trah atau sedaerah, dari pada berhubungan dengan orang asing. Meskipun tradisi ini tidak bisa dipungkiri mengandung makna positif, tetapi sikap tertutup ini dapat menghalangi kemajuan.

Sepuluh, banyak tenaga kerja anak-anak. Karena kondisi ekonomi keluarga yang rendah, anak-anak dilibatkan untuk bekerja. Padahal mereka masih usia sekolah atau masa bermain yang secara fisik maupun psikis belum siap menghadapi kemandirian hidup. Anak jalanan dan terlantar juga menjadi fenomena sekaligus problema bagi negara berkembang. Akibat ekonomi negara yang rendah, masalah anak ini tidak mampu ditanggulangi secara tuntas. Apalagi bila perlindungan hukum bagi mereka juga tidak jelas, anak-anak bisa jadi korban kriminalitas orang dewasa. Di negara maju, masalah anak ini bukan tidak ada, tetap ada, namun penanganannya lebih memadai karena telah memiliki perangkat perlindungan hukum yang jelas.

Kesepuluh karakter negara berkembang di atas bisa ada sebagian atau keseluruhan dalam satu negara dengan intensitas yang berbeda-beda, dan pada kurun waktu tertentu karakter tersebut bisa menjadi kian parah atau sebaliknya menjadi hilang, lantas negara tersebut masuk ke dalam karakter negara maju. Di negara maju sendiri tentulah tidak bebas masalah. Masalah perumahan, kemiskinan, kriminalitas, dan berbagai ciri yang menunjukkan tingkat yang rendah, juga bisa terjadi di negara maju. Karakteristik ini dibuat untuk dapat membatasi secara tegas kondisi apa yang umumnya dijumpai di negara yang disebut berkembang itu. Padahal, negara-negara Islam umumnya masih tergolong sebagai negara berkembang, bahkan miskin.

Negara yang berada dalam kategori miskin (*under-development countries*), umumnya berkarakteristik sebagai berikut:

1. Kondisi kemiskinan bagi penduduk dalam prosentasi yang besar.
2. Distribusi yang buruk bagi penduduk berpendapatan rendah (*low-income*).
3. Sejumlah besar SDM nya buta huruf dan tak trampil.
4. Angka pengangguran tinggi.
5. Infrastruktur yang tak memadai.
6. Pelayanan yang buruk dalam bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Amat tergantung dengan bantuan asing, dan
8. Rerata investasi dan tabungan rendah.

Lingkup Perbandingan Pendidikan. Studi ini secara ringkas dapat dikatakan meliputi dua wilayah: *pertama*, kajian tentang sistem dan kebijakan pendidikan di negara tertentu, yang dalam konteks ini dikhususkan pada negara-negara Islam. Contohnya adalah studi tentang jenis, jalur dan jenjang pendidikan, persekolahan atau kelembagaan, undang-undang atau peraturan pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya. Sedang *kedua*, studi tentang tema pendidikan tertentu yang ada di suatu negara. Misalnya, masalah biaya pendidikan, SDM, perencanaan, proses belajar-mengajar, pendidikan formal-nonformal, peran serta masyarakat, atau bahkan satu tema yang timbul dari sistem atau kebijakan pendidikan, sebagaimana dalam kategori pertama. Jadi,

sebenarnya dua wilayah tersebut dibedakan dari aspek keluasan skope bahasannya, bila menyangkut isu nasional, umum atau luas, maka masuk dalam wilayah sistem dan kebijakan, bila terkait dengan kasus spesifik, maka masuk dalam wilayah tematik, kriteria kedua.

Umumnya skope nasional berupa sistem dan kebijakan dimaksud tidak mudah mengalami perubahan, terutama jika dibandingkan dengan skope tematik, atau yang kedua tadi, kecuali kalau negara tersebut mengalami peristiwa revolusioner. Mengingat sifatnya yang demikian itulah, maka ulasan perbandingan pendidikan yang disampaikan dalam tulisan ini menitikberatkan pada wilayah yang pertama, sistem dan kebijakan pendidikan di suatu negara. Agar data yang disajikan tetap relevan dan *up to date*, sementara kajian tematik di beberapa titik akan dibahas seperlunya.

Negara Islam yang Mana ? yakni negara yang umumnya telah menjadi anggota *Organization of Islamic Conference* (OIC) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tetapi, karena banyaknya anggota negara tersebut, yakni ada 50 negara, maka dalam forum yang terbatas ini hanya dipilih sebagian saja, terutama yang datanya terjangkau, *accessible* atau yang kapasitas interaksinya, secara historis maupun kultural, dengan Indonesia cukup intens. Di antara negara-negara Islam tersebut berada di Asia, Timur Tengah dan Afrika. Sebagian merupakan negara kaya, sebagian masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah, sementara sebagian besar tergolong negara miskin. Keseluruhan negara Islam dimaksud disajikan dalam lampiran.

Pada poin ini saya hendak membuat batas, bahwa yang dimaksud dengan negara Islam, dalam konteks ini, bukan saja negara yang secara formal menjadikan ajaran Islam, yakni Al-Qur'an-Hadis, sebagai undang-undang negara dan kebijakan pemerintah yang berlaku secara nasional di negaranya, melainkan, di samping itu, negara Islam adalah negara dengan komposisi mayoritas berpenduduk Muslim, dimana hak-hak mereka selaku Muslim dilindungi. Indonesia dan Malaysia, misalnya, merupakan dua negara yang tidak menerapkan ajaran Islam secara juridis-formal dalam peraturan dan kebijakannya, namun mengingat keduanya mayoritas berpenduduk Muslim, dan memberi tempat bagi hidup dan berkembangnya Islam secara proporsional yang dilegitimasi oleh negara, maka layak dikaji.

Kemudian, lepas dari lingkup negara Islam tersebut, agar perbandingan pendidikan ini memiliki wawasan terbuka dan luas, di Bab III, saya mengembangkan bahasannya di luar negara Islam, meliputi, Belanda, Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Kita mulai dari negara Islam, Mesir.

TABEL 3
DATA NEGARA-NEGARA ISLAM ANGGOTA OKI

Negara	Tahun Mer-deka	Bentuk Pemerintahan	Luas Tanah (ribuan Km2)	Jumlah Penduduk (Mid-1996)	Kepadatan Penduduk Per Km2 (1996)	Pertumbuhan Penduduk Rerata Per Tahun (%) 1990-1996	Usia Harapan Hidup (1996)
Afghanistan	d	Perang Sipil	652	24,2	37	2,8	45
Albania	d	Presiden Terpilih	29	3,3	113	0,0	72
Algeria	1962	Militer	2,382	28,7	12	2,3	70
Azerbaijan	1991	Presiden Terpilih	87	7,6	87	1,0	69
Bahrain	1971	Kerajaan	0,6	0,6	998	2,9	73
Bangladesh	1971	Perdana Menteri	144	121,7	845	1,6	58
Benin	1960	Presiden Terpilih	113	5,6	50	2,9	55
Brunei	1984	Kerajaan	6	0,3	48	2,0	75
Burkina Faso	1960	Presiden Terpilih	274	13,7	29	2,9	46
Cameroon	1960	Presiden Terpilih	475	13,7	29	2,9	56
Chad	1960	Perdana Menteri	1,284	6,6	5	2,5	48
Comoros	1975	Presiden/ Pengaruh Militer	2	0,5	252	2,6	59
Djibouti	1977	Presiden/ Pengaruh Militer	23	0,6	27	3,0	50
Mesir	1922	Presiden Terpilih	1,001	59,3	59	2,0	65
Gabon	1960	Presiden Terpilih	268	1,1	4	2,6	55
Gambia	1965	Presiden Terpilih	11	1,1	104	3,7	46
Guinea	1958	Presiden Terpilih	246	6,8	27	2,7	44
Guinea Bassau	1974	Presiden Terpilih	36	1,1	30	2,1	38
Indonesia	1945	Presiden Terpilih oleh Majelis	1,905	197,1	103	1,7	65
Iran	d	Presiden	1,648	62,5	38	2,5	70

		Terpilih					
Irak	1932	Peran Partai, Presiden Seumur Hidup	438	21,4	49	2,8	62
Jordan	1946	Kerajaan	89	4,3	48	5,1	71
Kazakhstan	1991	Demokrasi/ Militer	2,717	16,5	6	-0,3	65
Kuwait	a	Kerajaan	18	1,6	88	-4,8	77
Kyrgyzstan	1991	Demokrasi/ Militer	198	4,6	23	0,7	67
Lebanon	1945	Presiden melalui Majelis Nalt	10	4,1	408	1,9	70
Libya	1951	Pimpinan tiap Majelis	1,760	5,2	3	2,5	68
Malaysia	1948	Perdana Menteri	330	20,6	62	2,3	72
Maldives	1953 (b)	Presiden Terpilih	0,300	0,3	853	2,9	64
Mali	1960	Presiden Terpilih	1,240	10,0	8	2,8	50
Mauritania	1960	Presiden Terpilih	1,026	2,3	2	2,5	53
Morocco	1956	Kerajaan	447	27,0	60	1,9	66
Mozambique	d	Presiden Terpilih	802	18,0	22	4,0	45
Niger	1960	Peran Militer	1,267	9,3	7	3,3	47
Oman	1951	Kerajaan	212	2,2	10	4,8	71
Pakistan	1947	Perdana Menteri	796	133,5	168	2,9	63
Qatar	1971 (c)	Kerajaan	11	0,7	60	5,0	72
Saudi Arabia	d	Kerajaan	2,150	19,4	9	3,4	70
Senegal	1960	Presiden Terpilih	197	8,5	43	2,5	50
Sierra Leone	1961	Peran Militer	72	4,6	64	2,4	37
Somalia	1960	Perang Sipil	638	9,8	15	2,1	49
Sudan	1955	Peran Militer	2,506	27,3	11	2,1	54
Suriname	163	0,4	3	1,1	71
Syria	1941	Presiden Terpilih	185	14,5	78	3,0	69
Tajikistan	1991	Demokrasi/ Veto Militer	141	5,9	42	1,9	69
Tunisia	1956	Presiden Terpilih	164	9,1	56	1,9	700

Turki	d	Demokrasi/ Veto Militer	779	62,3	80	1,8	69
Turmenistan	1991	Demokrasi/ Veto Militer	488	4,6	9	3,8	66
Uganda	1962	Militer	236	19,7	84	3,2	43
Uni Arab Emirate	1971	Kerajaan	84	2,5	30	5,3	75
Uzbekistan	1991	Demokrasi/ Veto Militer
Yaman	1953 (e)	Presiden Terpilih	528	15,8	30	4,7	54

Sumber: Ali Nawaz Memon, *The Islamic Nations: Status & Future of Muslims in the New World Order*, (Maryland: Writers' Inc. International, 1995), h.26-28; World Bank, *World Bank Atlas 1998*; IMF, *International Financial Statistics*, July 1998. IDB, *Annual Report 1997-1998*, h.344-345.

Catatan:

- (a) Konstitusi baru Kuwait disiapkan pada 1962.
- (b) Maldives menjadi negara republik pada 1953.
- (c) Qatar bergabung menjadi anggota PBB pada 1971.
- (d) Afghanistan, Iran, Turki, Saudi Arabia telah memperoleh kemerdekaan dalam berbagai bentuknya untuk waktu yang lama.
- (e) Para pejuang kemerdekaan di Yaman mengklaim kemerdekaannya pada 1953. ... belum diperoleh datanya. Termasuk dalam hal ini adalah Palestina.

Daftar Pustaka

- Altbach, Philip G., dkk. *Comparative Education*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1982.
- Barnadib, Imam. *Dasar-Dasar Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Institute Press IKIP, 1986.
- Barnadib, Imam. *Pendidikan Perbandingan: Buku 1 Dasar-Dasar*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Burns, Edwards McNall, *Western Civilization: Their History and Their Culture*. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1958.
- Deobold B, Van Dalen. *Understanding Educational Research*. New York: Macmillan Company, 1966.
- Fakhry, Majid. *A History of Islamic Philosophy*. New York: Colombia University Press, 1983.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hasan, Chadidjah. *Kajian Perbandingan Pendidikan*. Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Hatta, Mohammad. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: Tintamas, 1980.
- K. Abdoelrachman. *Knowing Countries*. Jakarta: Djambatan, 1976.
- Memon, Ali Nawaz. *The Islamic Nation: Status & Future of Muslims in the New World Order*. Maryland: Writers" Inc. International, 1995.
- Saifullah, Ali. *Pendidikan Internasional dan Adult Education*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Shalaby, Ahmad. *History of Muslim Education*. Beirut: Dar al-Kashshaf, 1954.
- Sidharto, Suryati. *Pendidikan di Negara Berkembang: Suatu Tinjauan Komparatif*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita, 2000.
- Tadjab. *Perbandingan Pendidikan: Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Moderen, Islam dan Nasional*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Umar, Abdul Ghaffar. *Masuknya Filsafat Yunani dalam Islam Sampai dengan Filosof Ibn Sina*. Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 1990/1991.
- Vatikiotis, Michael R.J. *Political Change in Southeast Asia: Trimming the Banyan Tree*. London: Routledge, 1996.
- Warmser, Ricard. *American Islam: Growing up Muslim in America*. USA: Walker Publishing Company, 1994.

BAB II

SKETSA

PENDIDIKAN DI BEBERAPA NEGARA ISLAM

▪ MESIR

EGYPT dikenal berasal dari kata Yunani 'Aigyptos'. Menurut sumber berbahasa Arab dan Semit, kata tersebut diturunkan dari kata *Kuftain*, putra Mizrain, cucu Nabi Nuh yang tinggal di lembah Nil, lalu memberikan namanya untuk kota tua *Quft* atau *Guft*, bersebelahan dengan kota *Thebes*, sebuah ibu kota *Egypt* kuno. Orang Arab menyebutnya *Dar al-Qibt*, rumah penganut *Copts*, tanah penganut Kristen asli. Sedang kata *Coptic* dan penganut Kristen, dipakai secara bergantian oleh orang Arab. Jadi, istilah *Coptic* agaknya dipandang sebagai turunan dari kata Arab *Qibt*, yang merupakan kependekan dari Bahasa Yunani *Aigyptos*. Untuk selanjutnya *Egypt* dikenal sebagai *Mishr* atau Mesir. Mesir ditaklukkan oleh Amr Ibn 'Ash pada 639 H, di bawah komando khalifah kedua, 'Umar Ibn al-Khattab, sejak itu Islam masuk dan berkembang di Mesir.

Setelah Baghdad sebagai pusat Dunia Islam diserang oleh Khulafu pada 1258 M, ibu kota Dunia Islam pindah ke Kairo, Mesir. Begitu juga lembaga pendidikannya, yang semula *Bait al-Hikmah* merupakan lembaga pendidikan internasional di Baghdad, maka setelah mengalami kemunduran, *Al-Azhar* di Mesir didirikan sebagai lembaga pendidikan alternatif, sekaligus pusat ilmu pengetahuan yang dikunjungi oleh para ulama dan pelajar dari seluruh pelosok dunia hingga kini.

Al-Azhar didirikan oleh Jauhar al-Shiqili, seorang panglima khalifah Fathimiyah Al-Mu'iz Lidinillah, yang selesai dibangun selama dua tahun dan berakhir Sabtu 7 Ramadhan 361 H atau 22 Juni 972 M. Sejak dibangunnya hingga kini, *Al-Azhar* ini mendapat perhatian dan bantuan dari pihak pemerintah setempat. Pada awal mula berdirinya, *Al-Azhar* mengajarkan *fiqh* menurut Madzhab Syi'ah, dan itu berjalan sampai jatuhnya khalifah Fathimiyah pada 567

H. Ketika Mesir diperintah oleh Shalahuddin al-Ayyubi pada 1171 M atau 567 H, pelajaran *fiqh syi'ah* diganti menurut Madzhab Sunni. Selanjutnya didirikan madrasah-madrasah dengan guru-guru resmi yang diangkat untuk mengajar di sana. Terjadilah peralihan dari Al-Azhar kepada madrasah-madrasah Ayyubiyah, mengakibatkan kemajuan bergeser pada madrasah tersebut. Kebangkitan Al-Azhar kembali terjadi melalui Sultan Baibars. Namun, agaknya kejayaan Mesir dengan Al-Azharnya ini jatuh-bangun, saat Mesir jatuh di bawah kekuasaan Sultan Usmaniyah Turki pada 1517 M atau 923 H, kemegahan Mesir pindah ke Istanbul, Turki.

Beberapa abad kemudian, modernisasi Mesir dilakukan kembali. Muhammad Ali Pasya pada 1805 M atau 1220 H membangun kembali Al-Azhar. Para ulamanya dikirim untuk belajar ke Prancis guna mempelajari ilmu kedokteran, teknik, militer dan lain-lain.

Muhammad Ali Pasya (1765-1849), kendati pun ia seorang *illiterate* atau buta huruf, namun ia mengerti akan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kemajuan suatu negara. Dalam pembangunan pendidikan ini ia mendirikan Kementerian Pendidikan, dan mendirikan Sekolah Militer pada 1815, lalu Sekolah Teknik dan Kedokteran pada 1827. Para guru dan tenaga ahlinya didatangkan dari Barat dan Eropa. Di samping itu, ia mengirim para pelajar untuk studi di Barat, mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di sana, dan sekembalinya ke tanah air mereka ditugaskan untuk mengembangkan iptek tersebut. Ia juga mendirikan Sekolah Farmasi, Sekolah Pertambangan, Sekolah Pertanian, Sekolah Kedokteran, Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Penerjemahan dan lain-lain. Selain itu, untuk memperkuat pertahanan negaranya, Muhammad Ali Pasya mengembangkan pendidikan militer dan bentuk-bentuk latihan lainnya. Bisa dikatakan modernisasi pendidikan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasya ini merupakan upaya pembaharuan pendidikan di Dunia Islam yang pertama, karena bentuk sekolah yang didirikannya berbeda dengan madrasah atau sekolah tradisional yang ada sebelumnya, yang hanya menekankan pelajaran agama semata.

Bila Muhammad Ali Pasya tampil dalam pembaharuan sistem pendidikan secara nasional di Mesir melalui jalur politiknya sebagai pejabat Pemerintah, Muhammad Abduh tercatat sebagai pembaharu pendidikan Mesir terutama untuk skope lembaga pendidikan tradisional dan keagamaan, yakni Al-Azhar. Bagi Abduh, ilmu pengetahuan modern yang berkembang di Barat bersumber dari *sunnahullah* atau hukum alam, dan karenanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya iptek telah menjadi sebab kemajuan Umat Islam di masa lampau, dan merupakan faktor kemajuan di Dunia Barat saat ini. Untuk memodernisir kembali Umat Islam, iptek harus kembali dipelajari. Umat Islam hendaknya memperhatikan pendidikan dan iptek. Sekolah-sekolah modern perlu dibuka, dan diberikan pengetahuan modern di samping materi agama.

Menurut Abduh, pembaharuan pendidikan di Al-Azhar akan mempengaruhi Dunia Islam, mengingat Al-Azhar merupakan Universitas Islam internasional yang bukan saja dikunjungi para pelajar Muslim dari penjuru dunia yang kembalinya ke negara asal akan membawa ide pembaharuan, melainkan juga Al-Azhar telah mendapat tempat terhormat di kalangan Umat Islam. Berpijak dari pola pikir demikian, Abduh menghendaki dimasukkannya beberapa disiplin ilmu modern (*al-ulum al-aqliyah*) dalam kurikulum Al-Azhar, seperti fisika, ilmu pasti, filsafat, sosiologi dan sejarah. Begitu pula sebaliknya, ia menghendaki dimasukkannya pendidikan agama yang lebih intensif, termasuk sejarah kebudayaan Islam, ke dalam kurikulum sekolah-sekolah bentukan pemerintah. Agaknya Abduh berupaya mengintegrasikan ilmu modern dengan agama. Dengan masuknya ilmu modern di Al-Azhar, lalu memperkuat pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah, menurut Abduh, dikotomi ilmu dan jurang pemisah antara *ulama* dan *ilmuwan modern* dapat diperkecil.

Profile

Muhammad Abduh. Lahir pada 1265 H atau 1848 di Propinsi Gharbiyyah. Ayahnya bernama Abduh ibn Hasan Khair Allah. Ia lahir dalam lingkungan keluarga petani yang hidup sederhana, taat dan cinta ilmu pengetahuan. Pendidikannya dimulai dengan pelajaran dasar membaca dan menulis dari orang tuanya sendiri, lalu belajar Al-Qur'an pada seorang *hafidz*. Hanya dalam tempo dua tahun ia sanggup menghafal seluruh isi Al-Qur'an. Pendidikan selanjutnya diperoleh di Thanta, di lembaga pendidikan Masjid Ahmadi. Abduh merasa metode pelajaran yang diterapkan di dunia Islam ketika itu sebagai tidak efektif, sampai ia berjumpa dengan pamannya Syeikh Darwisy, penganut Tarekat Syaziliyah, yang kemudian mengajarnya tasawuf dengan cara yang berbeda. Lalu, Abduh menuju ke Al-Azhar, dan pada 1871 ia berjumpa dengan Sayyid Jamaluddin al-Afghani, yang menyebabkan ia kenal dengan ilmu pengetahuan, filsafat, kalam dan ilmu pasti. Metode pengajaran Jamaluddin al-Afghani bersifat praktis (*amaliyah*), yang mengutamakan pemberian pengertian lewat diskusi. Pada 1877, Abduh berhasil menyelesaikan studinya dengan memperoleh gelar *alim*, dan berhak mengajar di Al-Azhar. Dari sini ia melakukan modernisasi pendidikan.

Sekarang, Al-Azhar bukan lagi universitas keagamaan, yang memiliki beberapa fakultas seperti Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah, Fakultas Dakwah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab, melainkan juga terdiri dari

berbagai fakultas umum: Fakultas Pertanian, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, dan Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi dan Fakultas Ilmu Pasti Alam, Fakultas Teknik dan Industri dan Fakultas Perdagangan dan Manajemen. Gelar akademis yang diberikan oleh universitas ini sesuai dengan strata pendidikan tinggi yang diikutinya, semisal Lc atau *Licence* untuk S-1, Magister untuk S-2, dan Doktor untuk S-3. sementara itu, gelar Diploma diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada program Diploma. Sarana perpustakaan Al-Azhar tergolong terbesar di Mesir setelah Perpustakaan Negara, *Dar al-Kutub*. Perpustakaan Al-Azhar ini memiliki lebih kurang 24.000 manuskrip, dan tersebar di enam lokasi, di antaranya di Madrasah Aqdiba, Madrasah Tibristiyah, Ruwwaq Turki, Ruwwaq Abbasi, Ruwwaq Maghribi dan Ruwwaq Sawwam. Juga, tiap fakultas memiliki perpustakaan sendiri secara otonom, plus perpustakaan yang tersedia di asrama mahasiswa.

Di tingkat pendidikan tinggi, selain Al-Azhar, di Mesir terdapat beberapa universitas, yaitu: *University of Cairo* (1948), *Alexandria University* (1942), *Ein al-Syams University* (1950), *Assuit University* (1958).

Sampai pada 1956, Mesir menerapkan sistem persekolahan sebagai berikut:

1. Sistem pendidikan keagamaan, semisal madrasah, kuttab dan Al-Azhar.
2. Sistem Sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Asing.
3. Sistem Sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Arab.
4. Sistem Sekolah yang didirikan oleh pemerintah, dan
5. Sistem sekolah asing dengan kurikulumnya sendiri.

Sistem pengajaran al-Azhar dari tingkat rendah hingga tinggi dikelola oleh Majelis Tinggi al-Azhar yang dipegang oleh Syeik al-Azhar. Sampai 1998, sistem perjenjangan pendidikan lembaga ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Rendah (*ibtida'i*) selama 6 tahun.
2. Tingkat Menengah (*i'dadi*) selama 3 tahun.
3. Tingkat Menengah Atas (*Tsanawi*) selama 4 tahun.
4. Tingkat Universitas selama 4-6 tahun.

Sejak tahun akademik 1992/1993, Universitas al-Azhar telah membuka filiannya di luar Kairo, yaitu Iskandariyah, Damanhur, Dimyat, Mansurah, Zaqahik, Tanta dan Shibin al-Kom. Pihak al-Azhar ikut mengadakan fakultas yang tersendiri antara mahasiswa lelaki dengan perempuan. Di antara fakultas untuk kalangan putra adalah fakultas syari'ah dan hukum, Bahasa Arab, Dakwah Islamiyah, Ushuluddin, Studi Islam dan Bahasa Arab, Pendidikan Sains, Pengobatan, Kedokteran Gigi, Perdagangan, Bahasa dan Penerjemahan, Pharmasi, Pertanian, dan sebagainya. Sedangkan fakultas untuk kalangan putri adalah Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab yang meliputi kuliah Syari'ah, Ushuluddin, Bahasa Arab, Humaniora, Pengobatan, Perdagangan, Sains dan lain-lain. Dari dulu hingga kini, al-Azhar telah sukses melahirkan jutaan sarjana

dan cendikiawan, dan hal itu tidak lain akibat upaya para pimpinan al-Azhar yang terus-menerus melakukan modernisasi.

Modernisasi pendidikan terus dilakukan oleh Mesir. Berbagai peraturan dan perundang-undangan dibuat untuk mengintegrasikan jenis dan sistem persekolahan yang semula otonom menjadi sistem pendidikan nasional. Menurut perundang-undangan Mesir saat itu, sistem persekolahan mengikuti pola 6-3-4-4 tahun, yakni 6 tahun di Sekolah Dasar, 3 tahun di Sekolah Persiapan, 3 tahun di Sekolah Menengah dan 4 tahun di Universitas. Usia wajib belajar berlaku pada pendidikan dasar 6 tahun, dari usia 6 sampai 12 tahun. Di sini mereka bebas bayar, baik di sekolah negeri maupun swasta. Untuk mengakhiri Sekolah Dasar ini tidak melalui ujian, kecuali dalam rangka masuk ke jenjang selanjutnya. Sekolah Persiapan atau *Preparatory Stage* yang berlangsung selama 3 tahun dan merupakan sekolah umum, dilaksanakan tanpa adanya penjurusan. Sedang Sekolah Menengah atau *General Secondary Stage* merupakan sekolah umum untuk persiapan ke Perguruan Tinggi. Agar lebih jelas, sistem pendidikan di Mesir disajikan dalam bentuk skema di bagian akhir dari tulisan ini.

Kesempatan berpendidikan ditingkatkan. Pada 1950-an, pemerintah mengklaim bahwa dalam tiga hari selalu dibuka dua sekolah baru. Konsekuensinya, tidak dapat dihindari, mutu pengajaran acap kali rendah, lalu menyulut kritik bahwa ekspansi pendidikan dipandang terlalu tergesa-gesa. Engka buta huruf ternyata belum mampu turun secepat yang diharapkan, terutama karena anak-anak usia sekolah bagi penduduk desa sering diperbantukan oleh orang tuanya dalam membantu pekerjaan ladangnya. Meskipun demikian, sekitar 1970-an, Mesir telah dapat menghasilkan puluhan ribu guru, insinyur, dokter, para ahli farmasi dan pegawai. Banyak di antaranya yang bekerja di luar negeri, baik di lingkungan negara-negara Arab lainnya maupun ke Barat, sehingga mereka dapat meraup penghasilan yang lebih baik.

Dewasa ini Mesir telah mengalami transformasi cepat dalam hal perkembangan potensi pendidikannya. Berdasarkan data Dirjen Dikti 1997, disebutkan bahwa dalam satu juta penduduk di Mesir terdapat 400 Doktor, suatu angka yang signifikan bila dibandingkan dengan potensi *human resources* di negara-negara Islam anggota OKI lainnya. Sekedar perbandingan, dalam skala yang sama Indonesia hanya mencapai angka 65 Doktor dalam satu juta penduduk. Para *ulama* dan cendikiawan Mesir tergolong produktif dalam hal karya ilmiah. Buku-buku tentang *Islamic Studies* yang terbit banyak yang beredar ke Indonesia, Malaysia, Singapura dan lainnya, bahkan menjadi literatur bagi kurikulum IAIN sejak kemunculannya. Karya tulis Omar al-Toumy al-Syaebani, Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi, Yusuf Qardlawi, an-Nahlawi dan lain-lain telah populer dalam referensi *tarbiyah*. Gerakan *tajdid* dalam pemikiran keislaman juga mulai berkembang di Mesir, terutama bersumber dari para sarjana alumni Barat. Gerakan kaum perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan jender, serta perlindungan terhadap pelanggaran HAM berkaitan

dengan kasus pelecehan seksual (*sexual harassments*), belakangan ini mulai meningkat seiring dengan kian terbukanya pendidikan bagi warga Mesir dan pergeseran budaya yang begitu cepat melanda negeri ini. Kebijakan tentang tema pendidikan mulai diperdebatkan di kalangan akademisi. Agaknya transformasi kultural di Mesir saat ini dan masa depan, --- bisa juga terjadi di negara-negara Islam lainnya--- digerakkan berawal dari modernisasi pendidikan.

Potensi lain. Tanah para fir'aun dan piramid, merupakan sebutan yang tepat bagi Mesir. Itu sebabnya Mesir menjadi salah satu kota kunjungan pariwisata terbesar di wilayah Arab, selain dari Makkah karena kunjungan jama'ah hajinya. Sejarah agama-agama kuno juga berasal dari negeri ini. Orang Mesir meyakini bahwa tidak ada jiwa yang dapat masuk ke wilayah kekuasaan *Orisis* tanpa kepemilikan jasad, sebab jasad tersebut merupakan tempat tinggal jiwa di dunia ini. Karena itu pada saat seseorang meninggal dunia, para kerabatnya mengambil mayatnya lalu memberi balsem. Selama berminggu-minggu mayat tersebut direndam dalam cairan natron, lalu dilapisi dengan aspal. Bahasa Persia dari aspal ini adalah "Mumiai" dan jasad yang telah dibalsem disebut "mummy". Mummy tadi dibungkus dengan kain khusus yang amat panjang, lantas diletakkan di peti mati untuk kemudian siap dipindahkan ke persemayaman terakhirnya, terutama di dalam piramid. Pengawetan jasad ini ternyata mampu meraup devisa dari kunjungan para turis yang datang ke Mesir.



Di samping potensi pariwisata, Mesir juga tergolong negara Arab yang subur. Tidak seperti yang tergambar pada umumnya negara Timur Tengah yang penuh dengan padang pasir dan sahara, Sungai Nil yang mengalir sepanjang jalur Mesir menyuburkan tanah pertanian, seolah menyulap gurun yang gersang menjadi padang rumput yang hijau. Di antara hasil pertaniannya adalah korma dan gandum. Terutama korma, dibudidayakan untuk ekspor ke luar negeri yang meningkat konsumsinya menjelang tiap Ramadhan, khususnya bagi penganut Muslim.

Letak geografisnya cukup kondusif bagi jalur perdagangan di antara negara di Timur Tengah. Meskipun tidak sebesar Arab Saudi dalam hal sumber minyak, Mesir termasuk eksportir minyak dalam jumlah besar ke Eropa.

Kontak dengan Eropa sebenarnya telah terjalin cukup lama, ketika Inggris dan juga Prancis menguasai Mesir, yang kemudian menyadari Mesir akan kemajuan yang dicapai oleh Barat. Maka untuk mengejar ketertinggalannya itu, dilakukan pengiriman para sarjana untuk studi ke Barat. Dibandingkan dengan beberapa negara Islam lainnya, kondisi ekonomi Mesir dapat diuraikan sebagai berikut.

TABEL 4
KONDISI EKONOMI BEBERAPA NEGARA ISLAM ANGGOTA OKI

NEGARA	GNP Per Kapita (US \$, 1996)	Pertumbuhan rerata riil GNP Per Kapita (% , 1990-1996)	Nilai tukar per US \$ (akhir 1997)	Total hutang (dalam miliar US \$)
Mesir	1.080	2.860	3.39	31.407
Arab Saudi	7.040	9.700	3.75	-
Iran	-	5.360	1.754,26	21.183
Irak	-	-	0.31	-
Turki	2.830	6.060	205.605	79.789
Pakistan	480	1.600	44.05	29.901
Malaysia	4.370	10.390	3.89	39.777
Indonesia	1.080	3.310	*4.650	129.033

Sumber : Islamic Development Bank, Annual Report 1997-1998, h. 344-345 dan 356-357.

Catatan:

GNP = Gross National Product.

(-) = kurang dari 1.

(*) = pada mid-Juni 2002, nilai tukar rupiah berkisar antara 8.600 s/d 8.700 rupiah per dolar AS.

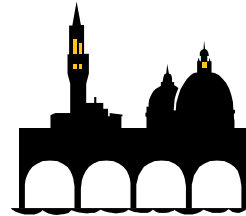
Daftar Pustaka

- Ajami, Fouad. *The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice Since 1967*. New York: Cambridge University Press, 1992.
- Al-Ali, Nadjie. "Secularism, Gender and the State: The Egyptian Women's Movement" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World* (ISIM). Leiden: ISIM, 6/2000.
- Ali, Ahmad Mohamed, dkk. *Islamic Development Bank Annual Report 1997-1998*.
- Djainuri, Achmad. *Pendidikan dan Modernisasi Dunia Islam*. Surabaya: al-Ikhlâs, 2001.
- Faraq, Iman. "Educational Debat in Egypt" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World* (ISIM). Leiden: ISIM, 1/1998.
- Hasan, Chalidjah. *Kajian Pendidikan Perbandingan*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Hudson, Michael C. (Ed.). *Middle East Dilemma: The Politics and Economics of Arab Integration*. New York: The Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1998.
- K. Abdoelrachman. *Knowing Countries*. Jakarta: Djambatan, 1976.

- Lewis, Bernard. *The Middle East: A Brief History of the Last 2000 Years*. New York: Scribner, 1995.
- Lubis, Arbiyah. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mansfield, Peter. *The Arabs*. England: Penguin Books, 1990.
- Memon, Ali Nawaz. *The Islamic Nation: Status & Future of Muslims in the New World Order*. Maryland: Writers" Inc. International, 1995.
- Peretz, Don. *The Middle East Today*. New York: Praeger Publishers, 1983.
- Rejwan, Nissim. *Arabs Face the Modern World: Religious, Cultural and Political Responses to the West*. Gainesville: University Press of Florida, 1998.
- Said, Atef Shahat. "Homosexuality and Humam Rights" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM)*. Leiden: ISIM, 9/2002.
- Said, Edward and Fuad Suleman (Ed.). *The Arabs Today: Alternatives for Tomorrow*. USA: Forum Associate, Inc., 1973.
- Shalaby, Ahmad. *History of Muslim Education*. Beirut: Dar al-Kashshaf, 1954.
- Solihin, Sohirin Mohammad. *Copts and Muslims in Egypt: A Study on Harmony and Hostility*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 1991.
- Tadjab. *Perbandingan Pendidikan: Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Moderen, Islam dan Nasional*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Thompson, J.H. and R.D. Reishauer (Ed.). *Modernization of the Arab World*. New York: The Trustees of Columbia University, 1966.
- Universiti al-Azhar es-Syerif dalam *Pendidikan di Mesir* sebagaimana dikutip dari situs internet www.google.com.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1986.

▫ Saudi arabia

BAGI Umat Islam, Makkah adalah pusat berkumpulnya jama'ah haji setiap tahun. Pergi haji ke Makkah termasuk salah satu dari rukun Islam. Wajib hukumnya bagi Muslim yang mampu, untuk pergi haji, seumur hidup sekali. Selama berabad-abad, ibadah haji ini tidak sekedar berarti menjalankan kewajiban agama, melainkan juga sebagai sumber devisa negara terbesar di dunia, mengalahkan *in come* hasil kunjungan wisata negara-negara lain. Sebelum terjadi penyatuan teritorial Semenanjung Arabia dibentuk oleh almarhum Raja Abdul Aziz al-Sa'ud, ayah dari Raja Faisal, pergi haji ke Makkah bukanlah tanpa mara bahaya. Perjalanan ke Jeddah, yang merupakan pelabuhan penting Saudi Arabia, menuju Makkah, para jama'ah haji tidak jarang bekalnya dirampok oleh berbagai anggota suku Arab yang suka berpindah-pindah tempat tinggal. Lalu, pada 1926 Hijaz menjadi bagian dari kerajaan Arab Saudi sehingga kondisinya berubah menjadi damai dan teratur. Raja Abdul Aziz al-Sa'ud memerintah dengan tangan besi, para penjahat mendapat hukuman seberat-beratnya. Hukum *qishash*, mata dibalas mata dan gigi dibalas gigi diberlakukan oleh Raja. Itu sebabnya angka kriminal di Saudi Arabia tergolong rendah. Di samping karena hukum yang tegas, tentu saja akibat kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. Maka, tiap tahun di bulan Dzulhijjah atau beberapa waktu sebelumnya, seluruh masyarakat Muslim dari penjuru dunia berkumpul ke Makkah dengan aman demi menunaikan ibadah kepada Allah di kota dimana Islam lahir. Kota kelahiran Nabi Muhammad saw tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Saudi Arabia (*mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*).



Kerajaan Saudi Arabia terletak di sudut Barat Daya Benua Asia, meliputi area seluas 2.400.000 km², menempati 4/5 atau 80 % dari total wilayah Semenanjung Arabia. Di sebelah Barat berbatasan dengan Jordania, Irak dan Kuwait, di sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Arab, Bahrain, Qatar, dan Persatuan Emirat Arab, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Oman dan Yaman. Populasi penduduknya lebih dari 16.900.000 jiwa (1994), dengan Riyadh sebagai ibu kota. Kondisi geografis Saudi Arabia tergolong spesifik, sebagian besar berupa gurun, bukit, dan di beberapa daerah berdekatan dengan sungai atau laut. Saudi Arabia termasuk pengekspor gandum terbesar ke-6 di dunia (1991), dan perkebunan korma yang berkualitas tinggi juga mampu menembus pasar internasional. Untuk meningkatkan pelayanan para jama'ah haji, maka pemerintah setempat terus menerus membangun dan merenovasi berbagai bangunan dan fasilitas yang berhubungan dengan haji, termasuk di dalamnya adalah Masjid di Makkah dan Madinah.

Masjid Makkah mampu menampung lebih dari 300.000 orang dan lahan parkir yang berkapasitas 4000 motor-mobil. Untuk menjalankan *sa'i* setelah *thawaf* orang tidak lagi meninggalkan Masjid, karen jalan antara *Safa* dan *Marwah* sekarang ini telah dibangun di dalam wilayah Masjid. Rumah sakit besar juga didirikan di Makkah sebagai sarana kesehatan para jama'ah haji. Air zamzam yang diminum oleh para jama'ah, bahkan dijadikan tanda mata untuk keluarga di kampung negara asalnya, setiap hari berada di bawah pemeriksaan kesehatan oleh Departemen Kesehatan, termasuk pengawasan terhadap rumah atau tempat *muqim* para jama'ah selama mereka tinggal di kota suci ini.

Kerajaan Saudi Arabia berdiri pada 1920-an, tetapi proklamasi terhadap negaranya dilakukan pada 1932 oleh Raja Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Sa'ud. Jadi, pendiri Kerajaan ini adalah Raja Abdul Aziz (almarhum) yang wafat pada 1373 H atau 1953 M, lalu digantikan oleh putranya, Raja Ra'ud ibn Abdul Aziz, setelah itu Raja Faisal, Raja Khaled, kemudian sekarang Raja Fahd ibn Abdul Aziz ibn Sa'ud. Sistem pemerintahan Saudi Arabia adalah monarki atau kerajaan, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw sebagai undang-undang. Kekuasaan legislatif dan yudikatif dipegang oleh dewan kabinet dan raja. Sat ini putra mahkotanya adalah pangeran Abdullah ibn Abdul Aziz al-Sa'ud, merangkap sebagai wakil Perdana Menteri dan Panglima Garda Nasional. Kerajaan Saudi Arabia memperingati hari nasionalnya setiap tahun pada hari pertama rasi bintang libra, yaitu tanggal 23 September, sesuai dengan tanggal berdirinya kerajaan tersebut saat didirikan oleh Raja Abdul Aziz al-Sa'ud. Kalender resminya adalah kalender hijriyah, yakni berpedoman atas peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah yang bertepatan dengan tahun 622 M.

Secara historis, Kerajaan Saudi Arabia berdiri atas kerjasama antara Muhammad ibn Abd al-Wahab, seorang pemikir Islam revolusioner, dengan Ibn Sa'ud, waktu itu sebagai pemimpin kabilah. Itu sebabnya karakter Wahabi mewarnai aliran keagamaan negara. Paham Wahabiyah selanjutnya berpengaruh bagi kebijakan pemerintah. Di antaranya upayanya adalah purifikasi pada sumber hukum dan nilai kehidupan sosial atas unsur-unsur dan praktek yang dikategorikan sebagai *tahayyul*, *bid'ah*, dan *c(k)hurafat*, seperti ziarah kubur yang dapat mengarah pada kultus individu dan lainnya, dipandang tidak sesuai dengan inti Agama Islam yang murni, dan karenanya harus dilarang.

Meskipun demikian, ketika Saudi Arabia bersentuhan dengan modernisasi dari Barat, muncul polemik atas isu tuntutan masyarakat bila dihadapkan dengan keyakinan agama yang dianutnya selama ini. Contoh yang kongkrit adalah terjadinya transformasi sosial Saudi Arabia akibat eksplorasi sumber minyak oleh *Standart Oil Company* pada 1933-1939. Kerjasama Saudi Arabi dengan Amerika pun dijalin untuk pengeboran minyak melalui dibentuknya *Arabian American Oil Company* (ARAMCO) yang didirikan di Dahrhan, provinsi bagian timur dari Kerajaan Saudi Arabia. Sejak itu Saudi

Arabia menjadi negara kaya, dan terutama bagi wilayah Timur Tengah, Saudi Arabia bisa dibilang sebagai *financial superpower*. Perkembangan infrastruktur komunikasi elektronik di Saudi Arabia juga berdampak terhadap pergeseran sosial. Media cetak berupa buku, surat kabar, jurnal, majalah dan lainnya, serta media elektronik dengan munculnya film, TV, radio, komputer multimedia, ditambah lagi dengan internet, belakangan ini kian mempengaruhi pola kehidupan sosial Saudi Arabia, terlebih secara finansial mereka mampu memiliki fasilitas canggih tersebut. Sarana transportasi juga membawa kemudahan mobilitas sosial masyarakat Saudi Arabia. Bagi sebagian besar penduduk Saudi Arabia, kendaraan otomotif bukanlah barang mewah. Interaksi sosial dimodernisir melalui kemampuan finansial akibat ditemukannya sumber minyak, media komunikasi dan sarana transportasi tersebut.

Setelah Perang Dunia II, produksi minyak Saudi Arabia menjadi basis pendapatan negara, meskipun baru pada 1973 ketika terjadi revolusi harga minyak dunia, pembangunan nasional Saudi Arabia mengalami peningkatan dramatis. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Saudi Arabiya pada 1977 mencapai 40 triliun US \$, dan tiga tahun kemudian, pada 1980, meningkat menjadi 70 triliun US \$, maka kontan saja dana sebesar itu mampu mengembangkan infrastruktur kota, dan tidak ketinggalan pula, bidang pendidikan.⁸ Memang, selain kunjungan jama'ah haji, kekuatan ekonomi Saudi Arabia bersumber dari minyak ini.

Bagaimana halnya dengan bidang pendidikan ? Di bidang pendidikan, sejak 1950-an, Saudi Arabia telah melancarkan usaha pendidikan. Pendidikan dilaksanakan secara cuma-cuma bagi semua penduduk, seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah. Bahkan sekolah atau lembaga tertentu yang didirikan di luar negeri untuk mempopulerkan Bahasa Arab atau Kajian Islam, bukan hanya tanpa biaya melainkan pendaftar yang diterima mendapat tunjangan dana akomodasi, buku-buku serta lainnya. Belakangan ini Arab Saudi

⁸ Di kisaran tahun yang sama di negara-negara Islam lainnya, termasuk Indonesia dan Malaysia, mengalami banjir minyak atau *oil boom*, yang pengaruhnya dirasakan bagi program pendidikan. Di Indonesia, akibat meningkatnya pendapatan sektor migas ini, mampu menaikkan APBN bidang pendidikan sampai dua kali lipat anggaran tahun 1974/1975. disebutkan bahwa pada 1972, minyak mentah Indonesia terjual kurang dari 3 US \$ per barel. Sekitar 1980, per barel minyak mentah Indonesia terjual lebih dari 30 US \$. Dalam periode 1970-1981, pendapatan ekspor dari minyak meningkat rata-rata 45,5 persen. Minyak dan gas (migas) tercatat 37 persen dari total pendapatan ekspor dalam tahun 1970; pada 1981, perolehan ini menanjak ke 82 persen. Selama periode ini pendapatan rata-rata negara (GDP) rata-rata 7-8 persen per tahun.

Pada April 1973, harga minyak mentah per barel di Indonesia adalah 2,93 US \$, lalu naik drastis menjadi 10,80 US \$ pada Januari 1974, dan terus naik menjadi 11,70 US \$ pada April 1974, lalu 12,60 US \$ pada Juli 1974 (sampai Agustus 1971 nilai tukar rupiah adalah Rp.378 per 1 US \$, lalu naik menjadi 415 per 1 US \$). Dalam Repelita I (1969-1973), anggaran pendidikan untuk Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 36,6 milyar atau 3,4 % dari seluruh anggaran pembangunan pemerintah. Kemudian, dalam Repelita II pos tersebut menjadi Rp.436 milyar. Berarti kenaikan 12 kali atau 9 %. Kenaikan ini bahkan lebih dramatis dari kisah kenaikan harga minyak bumi di Indonesia. Selengkapnya lihat C.E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Pemilaian dan Pedoman Perencanaan*, (Jakarta: LP3ES, 1979), h.1-3.

telah menggandakan Al-Qur'an dan Terjemahannya yang telah diratifikasi oleh Departemen Agama di Indonesia untuk dicetak dan dibagikan ke berbagai Masjid serta institusi pendidikan Islam lainnya.

Bagaimana dengan sistem perjenjangan pendidikannya ? Di tingkat dasar dibentuk dua macam madrasah: *Madrasah Al-Qur'an* (sejenis Taman Pendidikan Al-Qur'an di Indonesia), dan *Madrasah Ibtidaiyah* (Sekolah Dasar), menggantikan Sekolah Desa yang dihapus pada 1954. Untuk tingkat menengah, semula terdapat dua jenjang Sekolah Umum (non-kejuruan), yakni *Kafaah* selama tiga tahun dan *Tauhijiyah* juga selama tiga tahun, tapi kemudian dirubah menjadi *I'dadiyah* dengan lama belajar tiga tahun. Perubahan kebijakan pendidikan di Saudi Arabia ini tidak mengalami kesulitan, di antaranya mengingat komposisi masyarakatnya yang homogen, dengan Islam sebagai satu-satunya pandangan hidup.

Di tingkat sekolah menengah atas, disebut *Madrasah Tsanawiyah*, memiliki dua jurusan, *Ilmi* (Jurusan Ilmu Pengetahuan) dan *Adabi* (Jurusan Sastra). Sekolah ini bersifat umum (non-kejuruan) dengan fokus mempersiapkan para siswanya untuk melanjutkan studi ke tingkat Perguruan Tinggi. Meskipun demikian, bagi mereka yang bermaksud untuk terjun ke masyarakat disediakan keterampilan tertentu oleh lembaga pendidikan dengan berbagai alternatif jurusan: keguruan, perusahaan, perdagangan, kajian Al-Qur'an dan teologi Islam.

Sebagai bentuk pembinaan pemuda, Saudi Arabia berupaya meningkatkan prestasi mereka di bidang olah raga dan kebudayaan yang ditangani oleh Badan Negara Urusan Kesejahteraan Pemuda (*General Presidency of Youth Welfare*). Stadion Internasional Raja Fahd di Riyadh yang diresmikan pada 1408 H atau 1988 M. Stadion ini merupakan salah satu pusat gelanggang olah raga terbesar di dunia yang dapat menampung 80.000 penonton.

Masalah pendidikan di Saudi Arabia ditangani oleh dua departemen, yaitu:

1. *Wizarah al-Ma'arif wa al-Tsaqafah* (Departemen Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah, baik umum maupun khusus, dan
2. *Wizarah al-Ta'lim al-Aly* (Departemen Pengajaran Tinggi), yang menangani lembaga pendidikan tinggi baik di lingkungan Perguruan Tinggi Umum (PTU) maupun Perguruan Tinggi Agama (PTA).

Tentang lembaga pendidikan tinggi, Saudi Arabia memiliki tujuh universitas dalam semua jurusan. Riyadh memiliki universitas yang relatif lengkap, yakni Universitas Su'udiyah (*Ibn Sa'ud University*), yang terdiri dari Fakultas Sastra, Syari'ah, Hukum, dan Kajian Peradilan. dan *University of Riyadh* yang memiliki berbagai fakultas, yaitu: Fakultas Seni, Sains, Ekonomi dan Niaga, Pertanian, Teknik, Perminyakan, Kedokteran, Farmasi dan Kedokteran Hewan. Kuliah di Universitas ditempuh dalam waktu 4 tahun. Di Riyadh ini terdapat dua

Sekolah Tinggi independen, yakni Institut Kajian Islam dan Bahasa Arab (*the Arabic Language and Islamic Studies Institute*), dan Sekolah Tinggi Hukum Syari'ah (*High Institute of Syari'ah Law*). Di sana juga terdapat tiga akademi militer dan lembaga pendidikan lainnya. Dua fakultas agama yang semula terpisah, yakni Fakultas Mu'alimin (Keguruan) dan Fakultas Syari'ah (Hukum Islam), pada 1961, dilebur menjadi satu fakultas, Fakultas Syari'ah dan Tarbiyah.

Kedua fakultas terakhir tersebut lalu berkembang menjadi universitas tersendiri, yakni Universitas Islam Madinah (*The Islamic University of Madinah*) dengan tiga fakultas, Fakultas Syari'ah dengan maksud untuk melatih *ulama* Magister di masa depan, Fakultas Dakwah dan Ushuluddin. Atas prakarsa Baginda Raja Su'ud, pada Tahun Akademik 1961/1962 mulai menerima mahasiswa baru sebanyak 320 orang, 20 % dari Saudi Arabia sendiri dan 80 % sisanya terdaftar sebagai mahasiswa dari 63 negara Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Karena pertumbuhan ekonomi Saudi Arabia yang pesat, maka semua mahasiswa yang belajar di Universitas Islam Madinah ini diberi beasiswa, termasuk tiket perjalanan bagi mahasiswa luar negeri. Tujuan universitas ini adalah agar mahasiswa ahli di bidang agama, ilmu syari'at, dan Bahasa Arab.

Makkah, di samping sebagai pusat penyelenggaraan ibadah haji juga sebagai pusat pendidikan, di dalamnya terdapat Universitas Ummul Quro' (*Ummul Quro' University*) yang meliputi fakultas Pendidikan, Syari'ah dan Kajian Islam. Selain itu terdapat Universitas Raja Abdul Aziz (*The King Abdul Aziz University*) yang terletak di Jeddah, provinsi bagian timur dari Kerajaan Saudi Arabia ini, lokasinya berdekatan dengan ladang minyak di Dahrhan, meskipun terdapat fakultas non-agama, seperti Fakultas Humaniora, Ekonomi, Kedokteran Teknik, Institut Kajian Laut Merah (*Institute for Red Sea Studies*), Minyak dan Mineral (*College of Petroleum and Minerals*), universitas ini termasuk dalam Pendidikan Tinggi Islam. Selain itu terdapat Universitas Raja Faisal (*King Faisal University*) yang memiliki empat fakultas di Dhammam. *Madrasah Darul Ulum al-Diniyah* juga berlokasi di Makkah. Didirikan pada 1933 oleh orang-orang Indonesia, Malaysia dan Siam yang bermukim di kota tersebut. Lembaga ini berstatus swasta dan mendapat donatur tetap, terutama dari sumbangan jama'ah haji, dua departemen pemerintah yang menangani pendidikan, sebagaimana tersebut di atas, dan bantuan lain. Jenjang pendidikan di madrasah ini adalah *Ibtidaiyah* (enam tahun), *Tsanawiyah* (empat tahun) dan *Aliyah* (dua tahun).

Upaya menempuh pendidikan tinggi ini, terutama bagi para pangeran, pengusaha, atau kalangan berada lainnya, tidak hanya diperoleh di lingkungan nasional, melainkan banyak pula yang mengambilnya di luar negeri, negara-negara Barat. Sayangnya, tidak selamanya pendidikan ke luar negeri ini untuk mengembangkan potensi daerah asalnya atau disebut *truth seekers*, yakni pencari kebenaran untuk mengembangkan daerahnya, melainkan sebagian besar dari para terdidik yang belajar di Barat merasa tidak berkembang lagi atau tidak *applicable* bagi ilmu yang diperolehnya dengan kondisi dan kenyataan yang ada

di daerah asalnya, dan itu mendorong mereka untuk bermigrasi ke kota atau negara yang dipandang relevan dengan ilmu yang dipelajari di luar negeri. Mereka ini disebut sebagai *efficiency seekers*, yakni pencari kenyamanan untuk meningkatkan statusnya. Konsekuensinya, tidak sedikit para sarjana Saudi Arabia yang enggan kembali ke tempat asalnya atau mengembangkan disiplin ilmunya di sana, namun tinggal menetap di negara Barat. Sebaliknya, justru para ilmuwan dari luar negeri, seperti Mesir, Jordan, Irak atau ilmuwan Barat, banyak yang direkrut untuk mengajar di lembaga pendidikan di Saudi Arabia. Mereka mendapat *salary* yang memadai, terutama bila dibandingkan dengan penghasilan yang sama bila diperoleh di negara asalnya. Interaksi demikian menyebabkan Saudi Arabia dalam perjalanan percepatan modernisasi pendidikannya.

Kontak Indonesia dengan Saudi Arabia ini telah terjalin sejak lama, terutama via *jama'ah* haji. Gelombang pendidikan pertama yang ditempuh oleh Bangsa Indonesia untuk studi keislaman adalah ke Makkah, melalui perjalanan haji yang dilanjutkan dengan *muqim* beberapa tahun di Makkah dalam rangka belajar Agama Islam. Di antara mereka kemudian ada yang menjadi *ulama* terkemuka bahkan menetap di Makkah. Misalnya adalah Ahmad Khatib dari Minangkabau, atau Syekh Nawawi dari Banten, serta lainnya. Mereka menetap, belajar, lalu menjadi *ulama* terkemuka di Makkah, yang kemudian mempengaruhi munculnya gerakan Islam, baik secara individual maupun organisasi, di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Khalid. " Saudi Arabia's National Day" *Journal of Muslim World League*. Mecca: Rabithah al-Alam al-Islami, Vo.6 Dhulqaada 1399 H/ No.12 Oktober 1979.
- Al-Arkhabil*. Saudi Arabia: Universitas Islam Muhammad ibn Saud, Tahun 5 – Vol.8, Sya'ban 1429 H atau Nopember 1999 M.
- Departemen Penerangan Urusan Penerangan Luar Negeri. *Kerajaan Arab Saudi Selayang Pandang*. Saudi Arabia: Departemen Penerangan, [1990].
- Departemen Penerangan Urusan Penerangan Luar Negeri. *Dua Kota Suci*. Saudi Arabia: Departemen Penerangan, [1990].
- Badan Negara Urusan Pendidikan Perempuan. *Al-Juhrafiyah al-Iqlimah li al-'Alam al-Islami*. Jilid III. Saudi Arabia: Badan Negara Urusan Pendidikan Perempuan, 1994.
- Ajami, Fouad. *The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice Since 1967*. New York: Cambridge University Press, 1992.
- Djainuri, Achmad. *Pendidikan dan Modernisasi Dunia Islam*. Surabaya: al-Ikhlash, 2001.
- Hubaiti, A.K. "Social Change in Saudi Arabia" dalam *Journal of Muslim World League*. Mecca: Rabithah al-Alam al-Islami, Vo.6 Shawwal 1399 H/ No.11 September 1979.
- Hudson, Michael C. (Ed.). *Middle East Dilemma: The Politics and Economics of Arab Integration*. New York: The Center for Contemporary Arab Studies, Georgetown University, 1998.
- K. Abdoelrachman. *Knowing Countries*. Jakarta: Djambatan, 1976.
- Lewis, Bernard. *The Middle East: A Brief History of the Last 2000 Years*. New York: Scribner, 1995.
- Mansfield, Peter. *The Arabs*. England: Penguin Books, 1990.
- Peretz. Don. *The Middle East Today*. New York: Praeger Publishers, 1983.
- Rejwan, Nissim. *Arabs Face the Modern World: Religious, Cultural and Political Responses to the West*. Gainesville: University Press of Florida, 1998.
- Said, Edward and Fuad Suleman (Ed.). *The Arabs Today: Alternatives for Tomorrow*. USA: Forum Associate, Inc., 1973.
- Tadjab. *Perbandingan Pendidikan: Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Moderen, Islam dan Nasional*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Thompson, J.H. and R.D. Reishauer (Ed.). *Modernization of the Arab World*. New York: The Trustees of Columbia University, 1966.
- Ali, Mukti. *Aliran Pemikiran Islam di Timur Tengah*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Syarif Hidayatullah, 1992

▫ Iran



R

EPUBLIK Islam Iran merupakan sebuah negara yang terletak di Timur Tengah belahan utara bumi, antara 25 derajat dan 40 derajat garis lintang serta 44 derajat dan 63 derajat garis bujur Greenwich. Negara ini meliputi area seluas 1.648.195 km², dan merupakan negara terluas keenam belas di dunia. Letak negara ini sedemikian strategis, sehingga tiga macam keadaan iklim dapat dilihat di berbagai tempat. Dengan laut Kaspia yang beriklim lembab dan daerah pegunungan yang setengah gersang, serta daerah padang pasir yang kering.

Secara politis, Iran mengalami transisi mendasar baik akibat revolusi maupun perang. *Transisi pertama* adalah akibat revolusi, yakni perubahan konstelasi politik dari bentuk negara otokrasi menjadi republik. Bentuk negara otokrasi hendak dikembangkan oleh Shahinshah Mohammad Reza Pahlevi Aryamehr yang dinobatkan pada 1925. Sejak itu Shah Reza Pahlevi berniat membangkitkan model kerajaan *Cyrus II*, atau paling tidak hendak menata kembali tradisi dan peninggalan Persipolis. Pada 1963, ia memberlakukan apa yang disebutnya sebagai *White Revolution*, sebuah program untuk memperbaiki kondisi kehidupan penduduk, yang menurutnya telah mengalami banyak ketertinggalan, kebodohan, penyakit, kemiskinan dan lain-lain.

Dalam rangka menghilangkan kebodohan, Shah Reza Pahlevi memerintahkan berdirinya Badan Pemberantasan Buta Huruf (*Literacy Corps*), serta sekolah-sekolah yang mampu menampung semua anak, laki-laki maupun perempuan. Dalam upaya menghilangkan kemiskinan, ia mendirikan Badan Perluasan dan Pengembangan (*Extention and Development Corps*) untuk mengatasi masalah kemiskinan pedesaan. Tim teknis yang terdiri dari para insinyur, ahli pertanian, arsitek, dokter hewan, ahli pipa air dan gas, spesialis irigasi, ahli ekonomi, sosiolog, dan lainnya, dibentuk untuk mengembangkan lebih lanjut program Menteri Pertanian, Perumahan dan Ekonomi.

Shah Reza Pahlevi mendirikan Bank Nasional dan berbagai sekolah negeri di seluruh negeri, untuk kemudian mencanangkan program wajib belajar. Universitas Teheran didirikan, para perempuan pun dapat mendaftar kuliah di sana, meskipun *jilbab* sebelumnya telah dilarang. Pabrik pun dibangun, jalur kereta api antarkota, serta instalasi pelabuhan modern di wilayah Teluk Persia dan Laut Kaspia beserta ribuan mil jalan darat, dibangun. Rute perjalanan menjadi aman, jaringan komunikasi dimodernisir dan dinas kepolisian pun dibentuk.

Saat meletus Perang Dunia II, Iran menyatakan negaranya netral. Namun, ketika Jerman menyerang Rusia dan Tentara Sekutu memerlukan tersedianya jalur yang aman bagi tentara Rusia lewat jalur lintas kereta api dari Teluk Persia ke arah Utara, maka mereka menyerang dan menduduki Iran. Akibatnya, pada 1942, Iran menyatakan perang dengan Jerman. Setelah terjadi penarikan mundur tentara pendudukan, lalu pusat pemerintahan dapat dikendalikan lagi, Iran berupaya merehabilitasi kerugian ekonomi dan sosial, namun saat itu negara benar-benar tidak memiliki dana. Untuk mengatasi itu dibukalah negosiasi dengan pihak Perusahaan Minyak Anglo-Iran (*Anglo-Iranian Oil Company*) yang disepakati secara bulat. Dicapai kesepakatan dimana konsorsium perusahaan minyak dibentuk untuk mengeksploitasi dan memasarkan minyak Iran. Iran menjadi salah satu negara produsen minyak terkemuka di dunia. Pada 1968, produksi minyak tahunan Iran mencapai satu milyar barel per hari, menempatkan Iran di antara tiga negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Kontan saja, dalam waktu satu tahun, kestabilan ekonomi dapat dicapai. Dengan begitu, Shah Reza Pahlevi dapat mencurahkan energinya untuk membangun masa depan Iran. Ia bekerja keras meratakan kesejahteraan dan meningkatkan standar hidup lebih tinggi bagi kebanyakan penduduk di negaranya. Dalam memerintah, ia didampingi oleh istrinya, Ratu Syahbanu atau yang dikenal dengan Farah Diba. Untuk menerapkan programnya itu Shah Reza Pahlevi mengadopsi model budaya Barat, dalam hal ini Amerika Serikat, dalam bentuk westernisasi. Baginya kemajuan Barat bisa dipakai untuk memodernisir Iran.

Afiliasinya dengan negara Barat, terutama Amerika Serikat, dalam program *White Revolution* tersebut dibarengi dengan perubahan mendasar bagi keyakinan mayoritas penduduk Iran yang notabene Muslim Syi'ah. Shah Reza Pahlevi berupaya mengganti peradilan agama yang telah berlaku lama dengan model peradilan Prancis yang sekuler. Pada 1935, kantor-kantor catatan sipil dibuka. Purdah atau cadar khas penutup aurat wanita dihapus secara semena-mena. Kalender *Hijriyah* yang bagi rakyat Iran telah dipakai jauh sebelumnya, diganti dengan kalender kerajaan yang bersumber dari agama Mitraisme dan kejayaan *Cirus*. Kompetensi para *fuqaha* dan *mullah* dipersempit dalam skala besar, lalu pada 1962, Shah Reza Pahlevi mengumumkan sebuah undang-undang peralihan bagi rakyat Iran yang isinya mengganti Al-Qur'an dengan undang-undang baru yang sekuler. Tidak pelak lagi, kebijakan tersebut membuka konfrontasi langsung dengan pihak *ulama*. Menghadapi ini, Shah Reza Pahlevi melakukan penangkapan, sensor, memasukkan ke penjara, pengusiran, bahkan eksekusi. Protes massal terjadi hampir setiap hari.

Di antara *ulama* terkemuka yang menentang kebijakan westernisasi Shah Reza Pahlevi, yang kemudian membangkitkan gerakan revolusioner rakyat Iran adalah Ayatullah Ruhullah Musavi Khumeini atau Imam Khumeini. Imam Khumeini termasuk di antara pihak yang paling vokal menentang kebijakan pemerintah, namun pemerintah pun tidak gagah mengeksekusinya karena

pertimbangan simpatisan dan pengikutnya yang banyak. Maka, Imam Khumeini ditangkap dan diasingkan beberapa kali ke luar negeri, semula ke Turki, lalu Irak, kemudian ke Prancis. Dalam pengasingan, Imam Khumeini terus berkampanye menentang rejim Shah Reza Pahlezi via pidato yang direkam dan selebaran. Media ini ternyata efektif dalam membangkitkan revolusi Islam Iran. Pada 1 Februari 1979, Imam Khumeini kembali ke Iran dengan disambut penduduk Iran atas kemenangan yang dicapai. Imam Khumeini pun dinobatkan sebagai pemimpin spiritual Iran.

Profile

Imam Khomeini. Lahir pada 1901 di Khomein, Iran bagian tengah, bertepatan dengan ulang tahun kelahiran Fathimah az-Zahrah, putri Nabi saw. Ketika usia lima bulan, ayahnya terbunuh oleh rejim penguasa dari dinasti Qajar. Ia pun lalu dibesarkan oleh kakak lelakinya, Morteza dan Nooreddin. Usia 19 tahun, ia menyelesaikan studinya dan pindah ke Irak untuk melanjutkan studi di bawah asuhan Ayatullah Hairei, lalu kembalinya ke Iran ia mendirikan beberapa sekolah agama di Qom. Pada 1928, ia menikah, lantas dikaruniai tiga anak perempuan dan dua anak lelaki. Dalam karya ilmiah, ia menulis buku *Kasf al-Asyraar*, yang isinya berupa kritik tajam bagi Shah Reza Pahlevi, juga *al-Hukumah al-Islamiyah*, tentang ketatanegaraan berdasarkan Islam, di samping puluhan judul buku lainnya. Konfrontasi dengan pihak penguasa menyebabkan ia diasingkan beberapa kali, selama 15 tahun. Tapi seruannya terus berkumandang lewat berbagai media, hingga pada 1979, ia berhasil dalam Revolusi Islam. Akibat sakit yang dideritanya, Imam Khumeini meninggal pada 3 Juni 1989 di Rumah Sakit Teheran yang kemudian dimakamkan di Behest e-Zahra.

Kemana gerakan Shah Reza Pahlevi ? Pada 23 Oktober 1979, Reza Pahlevi, yang berusia 59 tahun dengan ditemani istrinya Farah Diba, meninggalkan Mexico menuju Amerika Serikat untuk berobat karena penyakit kanker lympha yang konon telah dideritanya saat ia berkuasa di Iran, lalu meninggal. Tirani kekuasaan otokratis Shah Reza Pahlevi ditumbangkan oleh *people power*, lalu bentuk pemerintahannya berubah menjadi Republik Islam Iran, *Jumhuriyah Islamiyah*, dengan slogan *la syarqiyah wa la gharbiyah, Jumhuriyah Islamiyah* (tidak Timur maupun Barat, tapi Republik Islam). Setelah Imam Khumeini wafat pada 1989, suksesi nasional dilakukan melalui pemilu.

Waktu Shah Reza Pahlevi berkuasa, hampir semua sarana pendidikan terpusat di kota. Penduduk pedesaan sangat tidak beruntung dalam hal ini. Setelah revolusi Islam, berbagai pusat pemberantasan buta huruf didirikan di seluruh pelosok negara, terutama di pedusunan. Pada 1979, dilakukan gerakan melek huruf hingga menjangkau sekitar tiga juta rakyat dengan lebih dari 167.000 kelas pemberantasan buta huruf.

Mengingat revolusi Iran berdasarkan atas nilai Islam, maka pasca revolusi banyak didirikan sekolah agama untuk mendidik siswa agar mampu berasimilasi dengan kebudayaan Islam. Banyak para pelajar dan mahasiswa masuk ke sekolah dan Perguruan Tinggi, terutama di pusat kota seperti Teheran, Qom dan Masyhad. Dibandingkan sebelum revolusi, Iran pasca-revolusi banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut antara lain nampak dalam hal kurikulum, buku pelajaran, kegiatan akademik, dan juga gerakan melek huruf.

Transisi kedua adalah ketika perang dengan Irak selama hampir satu dekade setelah Revolusi Iran meletus. Akibat dari perang ini, kerugian infrastruktur ekonomi dan sosial tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Anggaran negara banyak tersedot untuk *supply* amunisi senjata, rakyat dimobilisasi untuk kepentingan militer, termasuk kaum perempuan. Ditambah lagi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan kekeringan, yang acap kali menimpa Iran. Pendidikan tidak urung terkena imbasnya, kaderisasi militer ditanamkan sejak dini di bangku sekolah. Gedung sekolah kadang menjadi korban artileri perang. Namun, setelah gencatan senjata tercapai sekitar tahun 1990-an, pemulihan seluruh bidang pembangunan mulai dilakukan.

Modernisasi di bidang ekonomi, politik, hukum dan pendidikan diprioritaskan. Di bidang ekonomi, produksi minyak yang tersendat sewaktu perang Iran-Irak mulai dibangun kembali. Demokratisasi sistem politik dibuka secara luas melalui pemilihan umum. Pengakuan terhadap hak-hak perempuan terus diperhatikan, dan kegiatan pendidikan ditingkatkan. Transisi wajah Iran dari kekuasaan Shah Reza Pahlevi yang otokratis ke republik sejak 1979, dan tercapainya gencatan senjata dalam perang Iran-Irak, benar-benar telah mengubah kehidupan dan identitas Bangsa Iran.

Identitas Bangsa Iran saat ini dapat diuraikan sebagai berikut: Hampir 66 % rakyat Iran adalah berasal dari Bangsa Persia, sedang 25 % dari Turki, 5 % Kurdi dan 4 % berasal dari Arab. Suku terkenal di Iran adalah klan Bakhtisri, Cossack, Qajar, Turkaman, Syahsoon, Kurd, Afsyar, Sanjani, Gilak dan lain-lain. Karakter jasmaninya adalah tinggi-sedang, dengan mata dan alis berwarna hitam. Mata uang Iran adalah Rial yang sama dengan seratus Dinar. Ibu kotanya adalah Teheran. Iran terdiri dari 24 propinsi, 195 kota dan 498 distrik yang diawasi oleh kepala propinsi, Gubernur Jenderal dan Gubernur Distrik. Bahasa resmi bangsa Iran adalah Bahasa Persia. Itu sebabnya urusan administrasi, dokumen dan komunikasi sehari-hari menggunakan Bahasa Persia ini, sementara Bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam, diajarkan di semua

tingkat sekolah pada tiap jurusan. Kalender resmi pemerintah adalah kalender *Syamsiah*, dengan libur resmi mingguan adalah hari Jum'at. Meskipun begitu kalender *Qomariyah* yang mendasarkan atas peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw juga populer dipakai di Iran. Bendera Iran berwarna komposisi hijau, putih dan merah dengan lencana khusus yang menggunakan kata *Allahu Akbar*. Sistem pemerintahan Iran dibentuk atas kepemimpinan pemerintah (*wilayat al-amr*) dan kepemimpinan agama (*imamah*). Kepala pemerintahan adalah presiden, sedang kepemimpinan agama berasal dari *faqih (wilayat al-faqih)* yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. Khusus mengenai sistem pemerintahan ini, struktur Negara Republik Islam Iran ini dapat dilihat di bagian akhir dari tulisan ini.

Sebesar 98,8 % penduduk Iran menganut Agama Islam, 91 % di antaranya berafiliasi dengan madzhab *syi'ah imamiyah*, 0,8 % penganut Kristen, 0,2 Yahudi, 0,1 Zaratustra dan 0,1 beragama lain. Agama negara Iran adalah Islam madzhab Jakfari Dua Belas Imam (*Ja'fariyah, Itsna Asy'ariyah*). Sedang madzhab lain, seperti Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali dan Zaidi dihormati sepenuhnya dan para pengikutnya bebas melaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan ajaran keagamaannya dan status dirinya, termasuk masalah perkawinan, perceraian, warisan dan wasiat, dipandang sah dalam hukum. Penganut Zaratustra, Yahudi dan Kristen yang merupakan kelompok minoritas keagamaan yang diakui, dalam batas undang-undang mereka bebas melakukan upacara keagamaannya. Di antara sumber ekonomi Iran adalah: pertanian, peternakan, perikanan dan kerajinan tangan. Yang terakhir ini menghiasi rumah tangga dan tempat-tempat formal, yakni permadani. Jenis permadani Iran terkenal halus dan berkualitas ekspor ke mancanegara.

Kondisi pendidikan. Undang-undang Dasar Republik Islam Iran memberi penekanan kepada kewajiban pendidikan dan pengajaran. Itu sebabnya pemerintah menyediakan sarana cuma-cuma kepada para pemuda dan anak-anak sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama. Kementerian Pendidikan dan Pengajaran bertugas mengurus agar anak-anak mendapat pendidikan dasar hingga tamat SMP.

Adapun sistem pendidikannya dibagi atas:

1. Sekolah Persiapan (Taman Kanak-kanak), dimulai pada usia 5 tahun. Di Teheran dan kota besar lainnya, terdapat Taman Kanak-kanak, akan tetapi pendidikan pra-sekolah ini tidak secara resmi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasionalnya.
2. Sekolah Dasar, dimulai pada anak usia 7 tahun yang merupakan tahap awal proses pendidikan. Sekolah Dasar ditempuh selama 5 tahun. Para siswa harus lulus ujian sekolah pada tiap akhir tahun akademiknya agar supaya mereka bisa dipromosikan untuk sekolah di tingkat selanjutnya, dan dengan lulus ujian negara pada akhir kelas enam mereka dapat masuk ke sekolah menengah.

Tidak semua Sekolah Dasar Iran terdiri dari 6 kelas. Di banyak Sekolah Dasar pedesaan, sekolah ini hanya memiliki 4 kelas. Sebagian besar dari sekolah yang terletak jauh di pelosok memiliki sekolah dengan satu ruang dan satu guru. Meskipun begitu, seorang murid bisa mengikuti Sekolah Dasar 6 tahun jika mampu dijangkau.

3. Sekolah Lanjutan Pertama atau Sekolah Orientasi. Di sini proses pendidikan berlangsung selama 3 tahun. Pada tahap ini, siswa-siswi mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan persiapan untuk memilih bidang pengetahuan sesuai dengan minatnya.
4. Sekolah Lanjutan Atas atau Sekolah Sains Teoritis. Sekolah Lanjutan Atas hanya ditempuh oleh siswa-siswi yang lulus ujian Sekolah Menengah Pertama, di samping itu merupakan tahap akhir sekolah. Sekolah Menengah Atas terbagi dalam 2 bagian: teori dan praktek.
5. Pendidikan Tinggi. Pendidikan ini ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan lulus seleksi.

Ada beberapa universitas di Iran, di antaranya adalah Universitas Teheran. Universitas ini dilengkapi dengan berbagai laboratorium yang cukup memadai untuk sebuah kampus modern. Di laboratorium zoologi, misalnya, terdapat ribuan jenis binatang yang sudah diawetkan, termasuk sebuah kerangka binatang purba yang sangat besar. Selain untuk kegiatan akademis, kampus Universitas Teheran juga digunakan sebagai tempat satu-satunya shalat Jum'at di ibu kota Iran ini. Universitas lainnya adalah Universitas Allamah Thabathaba'i, Universitas manajemen Imam Shadiq, Universitas Syahid Behesti, dan Universitas Sains dan Teknologi Iran. Sebelumnya telah berdiri banyak universitas, seperti Universitas Tabriz (1947), Universitas Meshed (Mashhad, 1949), Universitas Esfahan (1949), Universitas Gondishapour (dulunya adalah Universitas Ahvaz, 1955), juga beberapa universitas swasta, semisal Universitas Pahlavi atau Universitas Shiraz (1960), Universitas Nasional Iran (1961) dan Universitas Teknik Aryanehr (1965).

Selain universitas tersebut, terdapat berbagai *College*, Sekolah Tinggi, dan Institut. Sebagian diantaranya diselenggarakan oleh pemerintah, sedang sebagian lagi dilaksanakan oleh pihak swasta atau lembaga semi-swasta yang kebanyakan menawarkan program pendidikan teknik dan profesional. Walaupun universitas di Iran tidak di bawah pengawasan pusat dalam hal persoalan akademiknya, namun Dewan Pusat Universitas (*the Central Council of Universities*) melakukan pengawasan terhadap lama waktu tahun akademik, jumlah jam kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan tingkat, promosi fakultas, dan konfirmasi atas pengangkatan para dekan. Sebaliknya di tingkat fakultas, sedikit banyak memiliki kebebasan memilih staf mereka sendiri, menentukan metode pembelajarannya dan melakukan ujian materi pelajaran kepada siswa.

Di samping berbagai lembaga pendidikan tinggi tadi, terdapat juga pendidikan teknik dan kejuruan. Untuk jenis ini ada tiga tingkat pendidikan

teknik di Iran: *tingkat pertama* adalah program sekolah dagang paska Sekolah Dasar yang terkait dengan sekolah menengah pertama; ini merupakan program akhir yang diarahkan pada pelatihan siswa agar menjadi pekerja yang mahir dan trampil. Sedang *tingkat kedua*, berkaitan dengan menengah atas; para murid yang lulus dari menengah pertama bisa diterima di sekolah teknik menengah atas ini. Sekolah ini dimaksudkan untuk melatih para ahli teknik dan industri. Sedang *tingkat ketiga* adalah Sekolah Tinggi teknik yang menerima siswa yang telah menyelesaikan program akademik sekolah menengah atau telah lulus dari sekolah menengah teknik. Sekolah Tinggi ini diniatkan untuk melatih para insinyur dan teknisi.

Perempuan merupakan pihak yang mendapat perhatian khusus pemerintah Iran, terutama dalam hal pendidikannya. Dalam undang-undang, perempuan dipandang sebagai unit fundamental dari masyarakat lingkup keluarga, tidak lagi dipandang sebagai 'barang' atau sebagai alat yang melayani konsumerisme dan eksploitasi. Perempuan Iran memperoleh kembali kewajibannya yang paling terhormat sebagai ibu dalam memelihara manusia yang berakidah, sebagai pelopor bersama kaum pria, dan sebagai prajurit yang aktif di medan juang. Pendek kata, dalam pandangan Islam perempuan mendapatkan nilai dan kebajikan yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya, partisipasi perempuan Iran dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dan pemerintahan, lebih maju. Saat terjadi perang Iran-Irak, perempuan pun berjuang ke medan pertempuran.

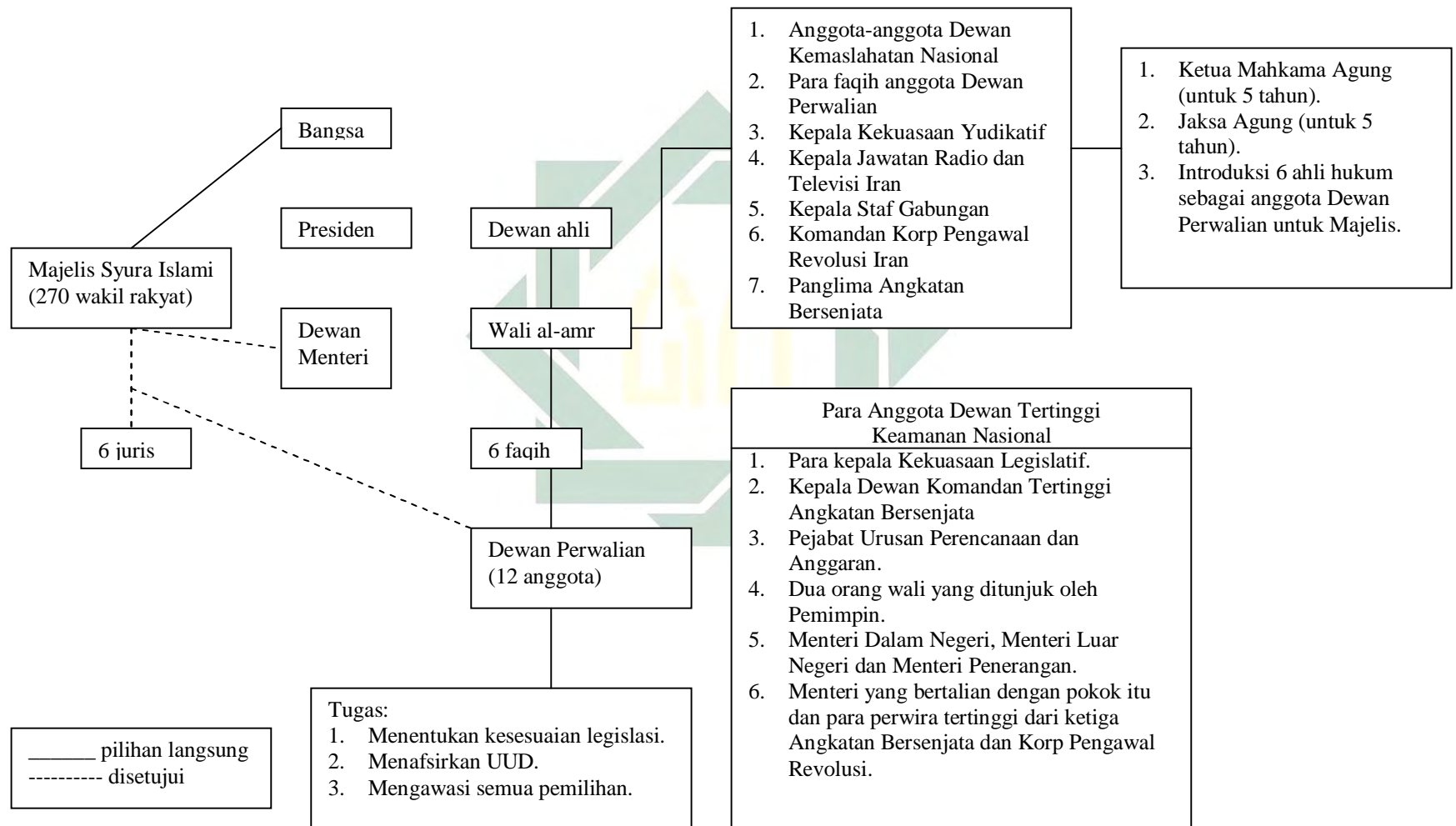
Gerakan feminisme pasca Revolusi Iran kian meningkat terutama datang dari aktivis yang mengenyam pendidikan dari Barat. Sejak 1995, Debat isu jender antara pihak *ulama* dengan kaum feminis sering terjadi di forum ilmiah, khususnya perguruan tinggi. Karya sastra berupa film yang menggambarkan kondisi perempuan Iran mulai muncul. Ziba Mir-Hosseini, misalnya, merupakan aktivis perempuan yang mengapresiasi protes pasifnya terhadap kondisi perempuan Iran. Dalam filmnya *Divorce Iranian Style*, ia memberi ilustrasi empat karakter utama: Massy, seorang perempuan yang berniat cerai dengan suaminya; Ziba, seorang gadis lugu usia 16 tahun yang tetap tabah bersanding dengan suami berusia 38 tahun beserta keluarganya; Jamileh yang membawa suaminya ke pengadilan untuk memberinya pelajaran, dan Maryam yang kawin lagi dan putus asa untuk memperoleh pengawasan bagi dua saudara perempuannya. Dalam filmnya yang lain, *Runaway*, yang diputar pada 2000 di Teheran, mendapat tanggapan luas masyarakat Iran khususnya kaum perempuan. Dalam film keduanya ini, Ziba Mir-Hosseini mengkisahkan bagaimana perempuan Iran belajar menentang peraturan lama di tengah cepatnya perubahan yang terjadi di negaranya. Alur cerita film ini menggambarkan bagaimana seorang perempuan usia lima belas tahun mencari kebebasan, cita-cita di masa depan, dan pengalamannya di tengah masyarakat yang menerapkan aturan dan standar ganda bila masalahnya dihadapkan

dengan isu jender. *Islam and Gender: the Religious Debate in Contemporary Iran*, merupakan karya tulis ilmiah yang mengetengahkan bagaimana masalah jender dari berbagai sudut pandang, ditulis sebagai wujud keprihatinan perempuan terhadap praktek yang terjadi selama ini di Iran. Isu poligami dan nikah *mut'ah* akhir-akhir ini menjadi tema sentral gerakan perempuan Iran yang semakin terbuka akibat modernisasi pendidikan yang dialaminya.

Selain itu, Revolusi Iran 1979 yang berakhir di tangan kekuasaan rejim teokratik yang mampu memobilisasi bagian penting dari pemuda kota untuk kepentingan perang dengan Irak dan mewujudkan utopia Islam. Dua dekade berikutnya muncullah bentuk baru gerakan politik-kultural dengan kecenderungan demokrasi, yang dibangun utamanya oleh tiga kelompok: kaum intelektual, para mahasiswa dan kaum perempuan.

Peristiwa Revolusi Islam Iran, sebenarnya, mempengaruhi kehidupan Umat Islam di berbagai belahan dunia. Peristiwa tersebut memunculkan seberkas harapan dari awal kebangkitan Islam. Sebab, Imam Khomeini sebagai *figure ulama* kharismatik ternyata dipandang mampu menggulingkan kekuasaan rejim Shah yang pro-Barat, secara revolusioner. Indonesia, Malaysia, Pakistan dan lainnya yang berpenduduk mayoritas Muslim tidak urung mengikuti perkembangan kebangkitan Islam di Iran tersebut, sehingga membangkitkan simpati Umat Islam. Terlebih *syi'ah* Iran melakukan propaganda ke berbagai negara melalui media cetak, seperti majalah *Yaum al-Quds* (sekarang *Waris*), yang isinya mengintrodusir *Syi'ah* Iran. Kasus *Satanic Verses* karya Salman Rusdie yang divonis mati oleh Imam Khomeini juga memicu simpati Umat Islam, karena hal itu dipandang sebagai manivestasi pembelaan terhadap nilai-nilai keIslaman, di saat mana *ulama* dari Negara Islam lainnya tidak tampil di pentas untuk mengomentari isu tersebut. Bagi Indonesia, hubungan dengan Iran adalah persaudaraan yang diikat oleh banyak kesamaan, terutama agama Islam, lepas dari madzhab apa yang dianutnya. Bahkan salah satu teori tentang masuknya Islam di Indonesia adalah lewat jalur perdangan dari Persia. Buku-buku kajian keIslaman kontemporer yang bersumber dari sarjana Iran, semisal Ali Syariati, Sayid Hosein Nasr, Murtadha Munthahari, Thaba'taba'i dan masih banyak yang lain, dikenal sebagai literatur *Islamic Studies*, dan dipelajari oleh para mahasiswa secara terbuka. Dalam hubungannya dengan *join* riset dan pendidikan, entah mengapa negara-negara Islam, Timur Tengah, termasuk Iran, tidak ditangani secara serius, seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Dalam jangka waktu lama, tentu saja hal ini akan menimbulkan asosiasi budaya.

BAGAN 1 STRUKTUR NEGARA REPUBLIK ISLAM IRAN

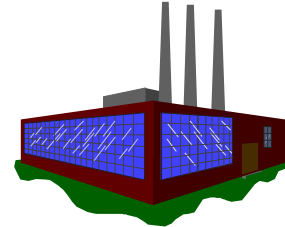


Daftar Pustaka

- Afakhami, Mahnaz, dan Erika Friedl (Ed.). *In the Eye of the Storm: Women in Post-Revolutionary Iran*. New York: Syracuse University Press, 1994.
- Ajami, Fouad. *The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice Since 1967*. New York: Cambridge University Press, 1992.
- Deighton, Lee. C (Ed.). *The Encyclopedia of Education*. Vol. 5. London: the MacMillan Company & the Free Press, [1983].
- K. Abdoelrachman. *Knowing Countries*. Jakarta: Djambatan, 1976.
- Kedutaan Iran. *Ringkasan Biografi, Pidato-pidato & Wasiat Imam Khomeini*. Jakarta: Kedutaan Iran, t.t.
- , *Undang-undang Dasar Republik Islam Iran*. Jakarta: Humas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, t.t.
- Khosrokhavar, Farhad. "New Social Movements in Iran" dalam *International Institute for the Study of Islam in Modern World (ISIM)*. Leiden: ISIM Newsletter 7/2001.
- Kian-Thiebaut, Azadeh. "Women's Religious Seminaries in Iran" dalam *International Institute for the Study of Islam in Modern World (ISIM)*. Leiden: ISIM Newsletter 6/2000.
- Mansfield, Peter. *The Arabs*. England: Penguin Books, 1990.
- Mir-Hosseini, Ziba. "The Making of Divorce Iranian Style" dalam *International Institute for the Study of Islam in Modern World (ISIM)*. Leiden: ISIM Newsletter 2/1999.
- , "Debating Gender with Ulama in Qom" dalam *International Institute for the Study of Islam in Modern World (ISIM)*. Leiden: ISIM Newsletter 5/2000.
- , "Iran's Runaway Girls Challenge the Old Rules" dalam *International Institute for the Study of Islam in Modern World (ISIM)*. Leiden: ISIM Newsletter 9/2002.
- Peretz. Don. *The Middle East Today*. New York: Praeger Publishers, 1983.
- Pudjiantoro, Baron. *Mengapa Pahlevi Tumbang, Khomeini Menang ?*. Surabaya: Pelita Bahasa, 1979/1980.
- Rejwan, Nissim. *Arabs Face the Modern World: Religious, Cultural and Political Responses to the West*. Gainesville: University Press of Florida, 1998.
- Said, Edward and Fuad Suleman (Ed.). *The Arabs Today: Alternatives for Tomorrow*. USA: Forum Associate, Inc., 1973.
- Sihbudi, M. Riza. *Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington*. Bandung: Mizan, 1992.
- Thompson, J.H. and R.D. Reishauer (Ed.). *Modernization of the Arab World*. New York: The Trustees of Columbia University, 1966.

□ I R A K

Sejak Irak menjadi negara merdeka, kemajuan pendidikan berkembang sangat cepat, jumlah murid di sekolah dasar juga banyak. Pendidikan di Irak sebagian besar merupakan tanggungjawab negara karena semua sekolah didirikan untuk mempertahankan pemerintahan. Pendidikan di Irak dikelola oleh Departemen Pendidikan.



Karakteristik pendidikan di Irak dapat dikatakan sebagai bentuk lembaga bercorak nasionalistik, demokratis dan progresif. Sebagai institusi pendidikan nasionalistik maksudnya adalah untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme bagi generasi muda bangsa, untuk menarik kembali tradisi Irak sebagai pusat kemajuan kebudayaan Arab di masa lampau dan mendorong masa depannya demi kesejahteraan manusia. Demokratis maksudnya adalah memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan bagi setiap masyarakat tanpa mengenal kelas dan ras. Sedang progresif maksudnya adalah mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.

Sistem perjenjangan pendidikan di Irak, tersusun dalam tiga tingkat: 6 tahun tingkat Sekolah Dasar, 5 tahun Sekolah Menengah yang terbagi atas dua bagian, yakni: 3 tahun pertama untuk Sekolah Menengah dan 2 tahun berikutnya untuk Sekolah Menengah Lanjutan. Kurikulum pada sekolah lanjutan pertama adalah meliputi mata pelajaran agama, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, matematika, biologi, fisika, kimia, olah raga dan menggambar. Pada sekolah lanjutan tingkat kedua terdapat kursus khusus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak. Program pelajaran untuk siswa laki-laki terbagi dalam tiga bagian: sains, niaga dan sastra. Pola sistem perjenjangannya adalah 6-3-2 tahun, sementara pendidikan tinggi ditempuh antara 4 sampai 6 tahun. Jadi, sistem sekolah di Irak merupakan sistem anak tangga sederhana yang meliputi sekolah dari tingkat pra-sekolah sampai universitas. Pendidikan pra-sekolah berlangsung selama dua tahun, dengan pendaftaran sejak usia 4 tahun. Jenjang pendidikan ini mendapat sedikit perhatian dari pemerintah. Pada pertengahan 1960-an hanya terdapat 15.000 murid yang terdaftar tiap tahunnya.

Departemen pendidikan menangani beberapa masalah, antara lain adalah:

1. Pendidikan Dasar, yang berlaku untuk semua anak usia sekolah.
2. Pendidikan untuk orang dewasa.
3. Pendidikan menengah dan kejuruan, dan
4. Pendidikan tinggi.

Pada 1951 tanggungjawab memimpin Sekolah Dasar dipindahkan dari Departemen Pendidikan ke pemerintah lokal (tingkat propinsi) di negara

tersebut. Langkah desentralisasi pendidikan ini bertujuan untuk memberi peluang pada daerah agar dapat lebih berpartisipasi dalam bidang pendidikan.

Pendidikan di Irak merupakan paduan dari nilai tradisi Islam dan sekularisasi yang terinspirasi dari nilai Barat, dimana hal ini telah diperkenalkan ke Irak sejak 1920-an. Sistem pendidikan modernnya sebagian besar didasarkan pada sistem pendidikan Inggris yang mendapat pengaruh kuat dari Amerika Serikat dalam hal pola kurikulum dan organisasi. Walaupun pendidikan agama yang diberikan oleh sekolah *kuttab* semakin menurun, pola tradisional belajar di luar kepala masih dijumpai di sekolah sekuler hingga tingkat universitas.

Pendidikan di Irak diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Umum No.57 Tahun 1940. administrasi pendidikannya ditangani dan berada di bawah wewenang secara sentral oleh Kementerian Pendidikan yang menjadi anggota Dewan Menteri dan yang bertanggungjawab langsung pada parlemen. Menteri, deputi menteri dan Direktorat Jenderal Menteri dari Dewan Pendidikan yang melakukan supervisi langsung, pengawasan, dan administrasi semua lembaga pendidikan, termasuk beberapa sekolah swasta yang mengikuti ketentuan kurikulum pemerintah, menetapkan kebijakan pendidikan, melakukan review dan menyetujui anggaran, menetapkan sendiri kurikulum dan buku teksnya, serta mengangkat semua tenaga pengajar dan administrasi. Tiap provinsi Irak memiliki direktor pendidikan sendiri yang berhak mengatur urusan administrasi pendidikan secara lokal. Sejak 1968, upaya memberikan kewenangan propinsi agar lebih bertanggungjawab dengan jalan pemberian tugas administrasi yang bersifat desentralisasi, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan umum di Irak diberikan secara cuma-cuma untuk semua tingkat, biaya seluruhnya ditanggung oleh negara. Hampir 60 persen anggaran pendidikan dibiayai oleh Menteri Pendidikan, dan 40 persen berasal dari kontribusi Menteri Perencanaan. Sekitar 25 persen APBN-nya disediakan untuk dana pendidikan.

Pendidikan dasar. Kementerian Pendidikan merasakan bahwa tanggungjawab utamanya adalah memperluas pendidikan dasar sesegera mungkin, mengingat terdapat 40 persen anak usia sekolah masih belum terdaftar. Walaupun pembangunan gedung sekolah baru belum memenuhi kebutuhan bagi pendidikan, lebih dari 1500 Sekolah Dasar telah dibangun sejak 1964. program pemerintah bertujuan untuk memperluas pendidikan dasar telah berhasil, dan pada tengah-1960an, terdapat 85 persen anak lelaki dan 38 persen anak perempuan usia Sekolah Dasar telah terdaftar. Irak berharap memiliki pendidikan dasar semesta bagi anak lelaki pada 1970 dan anak perempuan pada 1975. Keseluruhan biaya pemerintah yang dikeluarkan bagi pendidikan dasar ini menyebutkan sekitar dua per tiga dari total biaya pendidikan.

Pendidikan dasar adalah wajib diikuti dan berakhir selama 6 tahun, jika muridnya berhasil. Seluruh Irak memberlakukan kurikulum standart, meskipun

berbagai upaya telah dilakukan untuk menyediakan pelatihan pertanian secara praktis di sekolah-sekolah dasar pedesaan. Namun, karakter kurikulumnya amat berorientasi tradisional, dan banyak waktu pelajaran di kelasnya dihabiskan untuk belajar Bahasa Arab Klasik, kajian Al-Qur'an dan Islam, penanaman cara berpikir yang benar, cita-cita tinggi, dan rasa identitas dan kesetiaan bangsa yang kuat. Pola pengajarannya sebagian besar merepresentasikan fakta yang harus dihafal oleh siswa tanpa daya kritis. Ujian menjadi amat penting. Keberhasilan siswa pada jenjang dasar, juga jenjang lanjutan, hampir seluruhnya ditentukan oleh hasil ujian Bacaloriat yang diadakan di seluruh negeri dan dilaksanakan pada akhir sekolah kelas enam.

Meskipun kehidupan konservatif masih tetap bertahan bagi kebanyakan keluarga Muslim, terutama di daerah pedesaan, mereka menghindari berkembangnya *co-education* di Irak, kecuali ketika berada di tingkat universitas. Lebih dari sepertiga Sekolah Dasar menerapkan koedukasi. Kebanyakan sekolah ini adalah sekolah perempuan yang terletak di kota besar dengan staf tenaga pengajar perempuan, dimana sedikit murid lelaki diterima, atau sebaliknya, sekolah lelaki yang berada di kota dimana terlalu kecil lahannya untuk menampung dua jenis sekolah dasar, atau sekolah tanpa guru perempuan yang menjadi staf pengajar bagi sekolah perempuan. Dengan demikian, di beberapa daerah koedukasi terjadi karena kondisi "terpaksa".

Pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Irak dibagi dalam tingkat *intermediate* dan *preparatory*, masing-masing selama tiga tahun. Pada mulanya sekolah menengah dirancang untuk menyiapkan alumni Sekolah Dasar bagi pelayanan pemerintah atau masuk ke universitas. Sejak 1950, pendidikan menengah dibagi menjadi program sekolah umum dan kejuruan.

Dalam program sekolah umum, para murid mengikuti kurikulum umum selama tiga tahun pertama ketika berada di sekolah *intermediate*. Para pelajar meneruskan mata pelajaran yang disampaikan di sekolah dasar, lalu diperkenalkan mata pelajaran matematika dan fisika. Para pelajar yang sukses bersaing dalam pelajaran *intermediate* ini dapat masuk ke sekolah *preparatory* selama tiga tahun, dimana mereka dapat memilih apakah kurikulum sastra atau ilmiah. Kurikulum ilmiah dirancang untuk menolong mengurangi keterbatasan yang akut dari lulusan sekolah tinggi yang telah terlatih dalam pelajaran teknis. Program sekolah menengah umum tetap menjadi aliran dalam pendidikan menengah di Irak.

Karena kebutuhan mendesak bagi tenaga kerja trampil, pengrajin, dan para ahli teknik, Menteri Pendidikan mendorong perkembangan pelatihan vokasional. Sekitar 1967, 36 sekolah kejuruan di Irak setiap tahunnya melatih lebih dari 8000 murid, 16 sekolah di antaranya mengajarkan ekonomi keluarga khusus bagi pelajar perempuan.

Murid-murid sekolah kejuruan bisa memilih empat program yang ditawarkan: pertanian, ekonomi industri, ekonomi keluarga, dan niaga. Pada tiga bidang pertama, para murid diperkenankan untuk mengikuti program pendidikan selama 6 tahun penuh setelah berhasil bersaing dalam ujian tingkat dasarnya. Adapun murid dalam sekolah jurusan niaga harus menyelesaikan tingkat *intermediate* dalam sekolah menengah umum sebelum diterima dalam program pendidikan dua tahun. Kurikulum pada tiap sekolah dibuat menurut kebutuhan niaga, tetapi berbagai upaya dilakukan untuk memelihara keseimbangan yang baik antara studi teoritis dan aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan. Kurikulum komersial (niaga) meliputi pelatihan *accounting*, hukum dagang, aritmatika, surat-menyurat, ekonomi, mengetik, dan Bahasa Inggris. Dalam hubungannya dengan pelajaran umum, kurikulum pertanian adalah sama dengan ekonomi keluarga dan ekonomi industri, dimana para murid di ketiga jurusan tadi diberikan latar belakang yang kuat dalam hal mata pelajaran budaya umum seperti agama, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, pengetahuan umum dan matematika, serta pertolongan pertama dan kesehatan. Mata pelajaran khusus bagi murid pertanian meliputi teori dan praktek produksi tanaman dan hewan, tanah, irigasi, pengolahan sawah, dan ekonomi. Para lulusan sekolah kejuruan menerima sertifikat tanda lulus sekolah menengah. Banyak di antaranya melanjutkan ke Sekolah Tinggi Akuntansi dan Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Pertanian, atau Sekolah Tinggi Perempuan di Universitas Baghdad, atau ke Institut Teknik Sipil Tinggi. Dalam ilmu-ilmu sosial, Menteri Kesehatan mengatur pelajaran perawatan selama tiga tahun bagi paramurid yang telah menyelesaikan pendidikan *intermediate*.

Pendidikan swasta. Pendidikan swasta memainkan peran penting namun kian merosot pengaruhnya di Irak. Di bawah Undang-Undang Irak, para orang tua dilarang mengirimkan putra-putrinya masuk ke sekolah dasar swasta. Akibatnya, adanya lembaga pendidikan swasta di Irak hanya pada level menengah atau tinggi. Sekolah swasta Irak dan sekolah asing umumnya mengikuti kurikulum pemerintah dan harus sesuai dengan peraturan negara tentang kualifikasi guru, buku teks dan ujian. Sekolah swasta memberi penekanan lebih pada bahasa asing dan berkonsentrasi pada pelajaran Bahasa Inggris. Meskipun begitu, bahasa pengantar pelajarannya di semua sekolah dan menengah di Irak menggunakan Bahasa Arab, sedang Bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa kedua di tingkat 5 hingga 11.

Setelah Perang Arab-Israel pada 1967, Sekolah Tinggi Baghdad yang diselenggarakan oleh kaum Jesuit, yakni sekolah persiapan (*preparatory*), dan Universitas al-Hikmah, diambil alih oleh pemerintah Irak, sekolah sekolah Jesuit pun disingkirkan. Walaupun saat ini lembaga-lembaga tersebut dikelola oleh Universitas Baghdad, sekolah-sekolah ini terus mengajar dalam Bahasa Inggris.

Pendidikan guru. Agar dapat melatih ribuan para guru, dibutuhkan staf sekolah dasar (*primary*), menengah (*intermediate*), dan persiapan (*preparatory*). Itu sebabnya Menteri Pendidikan telah membuka sejumlah institut pelatihan guru. Lebih dari 30 sekolah menawarkan kuliah tiga tahun bagi lulusan sekolah menengah yang hendak mengajar di sekolah dasar. Lulusan sekolah persiapan juga bisa melengkapi kuliahnya hanya dalam dua tahun. Kurikulumnya meliputi sejumlah mata pelajaran akademik umum dan kuliah khusus pedagogis. Di akhir tahun, para mahasiswa melakukan latihan mengajar di bawah pengawasan ketat oleh para guru yang berpengalaman. Pelatihan bagi para guru menengah ini dilayani di Institut Tinggi Pelatihan Guru yang sekarang telah menjadi bagian dari Universitas Baghdad. Para guru sekolah persiapan direkrut dari kalangan lulusan Sekolah Tinggi Pendidikan dan Sekolah Tinggi Perempuan di Universitas Baghdad. Akan tetapi, gelar B.A. atau B.S. dari Sekolah Tinggi lain juga dipandang telah memenuhi kualifikasi mengajar di tingkat sekolah persiapan. Sekolah Tinggi Seni di Universitas Baghdad melatih para guru sekolah dasar, menengah dan persiapan selama program tiga tahun. Institut Teknik Tinggi di Baghdad menyediakan kuliah pelatihan guru selama empat tahun bagi guru sekolah teknik dan kejuruan. Pembelajaran tahun kelima dalam pelatihan ini diberikan melalui metode praktek mengajar di sekolah-sekolah tersebut, yang bisa diambil oleh mahasiswa pilihan.

Pendidikan kaum dewasa. Irak, yang memiliki rata-rata angka buta huruf sekitar 50 % mengakui perlunya meningkatkan pendidikan kaum dewasa (*adult education*). Upaya ini secara tidak resmi telah berjalan sejak 1922, lalu program pendidikan bagi kaum dewasa ini diambil alih oleh Menteri Pendidikan pada 1929. Walaupun program yang umumnya berkaitan dengan pelayanan pelatihan baca-tulis, usaha yang sukses telah dicapai dengan memasukkan pelatihan kesehatan, masalah sosio-ekonomi, agama dan aritmatika. Bagi kaum perempuan, ada pelajaran ekonomi keluarga, perawatan anak, kesehatan, seni merajut dan menjahit. Program ini telah diperluas khususnya bagi wilayah pedesaan.

Pendidikan tinggi. Perkembangan pendidikan tinggi di Irak telah dimulai sejak kekuasaan kaum Sumerian sekitar 2000 tahun Sebelum Masehi. Sebuah lemparan terbuat dari tanah liat yang dikeringkan yang berasal dari periode tersebut ditemukan berisi daftar pendek *coefficient* dan tiga masalah Aljabar, dua di antara masalah tersebut mengarah pada persamaan kwadrat. Di bawah pemerintahan Abbasiyah, Sekolah Tinggi Kedokteran didirikan di Baghdad pada 931 M. Pendidikan Universitas Modern secara resmi telah diatur dalam Undang-Undang No.60 tahun 1956 yang menyatakan pendidikan Universitas Baghdad. Universitas ini secara sah berada dalam pengawasan langsung Dewan Menteri

namun kenyataannya merupakan swatantra, yakni struktur administrasinya ditangani oleh Dewan Universitas yang meliputi Rektor Universitas, Pembantu Rektor, para dekan Sekolah Tinggi, sebagian guru besar beserta perwakilan dari Menteri Pendidikan. Posisi Rektor adalah *independent* secara penuh dan bertanggungjawab dalam urusan akademik, administrasi, dan keuangan universitas. Dia menyandang status kementerian dalam mengatur dan merepresentasikan universitasnya. Universitas tersebut diakui oleh hukum melalui promosi kegiatan penelitian ilmiah dan pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan warisan Negara Islam-Arab. Biaya tunjangan dan universitas seluruhnya ditanggung oleh negara. Rata-rata program studinya selesai ditempuh dalam jangka waktu empat tahun lalu menyandang gelar B.A atau B.S. (*Bachelor of Arts* atau *Bachelor of Science*).

Sedang kuliah di Sekolah Tinggi Kedokteran ditempuh selama enam tahun, lima tahun studinya dipersyaratkan untuk dilalui di Sekolah Tinggi Arsitektur, Kesehatan Gigi, Farmasi, dan Kedokteran Hewan. Kuliah program pendek bisa ditempuh di Sekolah Tinggi Dagang (Komersial). Bahasa Inggris merupakan bahasa instruksional bagi Sekolah Tinggi Kedokteran di Universitas Baghdad dan bagi Sekolah Tinggi Teknik di Universitas Mosul. Hal tersebut dominan sekali, meskipun bukan merupakan bahasa eksklusif bagi pembelajaran di Sekolah Tinggi Kesehatan Gigi, Farmasi, Teknik, Sains, dan Kedokteran Hewan di Universitas Baghdad. Di semua Sekolah Tinggi lain di Universitas Mosul, dan di Sekolah Tinggi Teknik dan Sains di Universitas Bashrah. Universitas dan Sekolah Tinggi yang berafiliasi dengan dan berada di bawah pengawasan Universitas Baghdad, melayani kuliah sore paroh waktu di tingkat universitas, hingga jumlah mahasiswanya sekitar 3000 orang. Pendaftaran di Universitas Baghdad pada akhir 1960-a saja sudah mencapai lebih dari 24.000 mahasiswa. Kampus Mosul dan Bashrah dari Universitas Baghdad telah menjadi universitas mandiri sejak 1967. Di akhir 1969, sebuah universitas baru di kota Kurdi, Sulaimaniya, dibuka.

Beberapa problematika. Bisa dibilang, sejarah Irak adalah sejarah penaklukan. Setelah jatuhnya Baghdad pada 1258 akibat invasi tentara Mongol, mengakibatkan khasanah intelektual kemajuan Dunia Islam peninggalan masa keemasan Islam Dinasti Abbasiyah, terutama era khalifah al-Ma'mun, al-Mansur dan Harun al-Rasyid, mengalami kehancuran. Sejak itu Irak terus menerus menghadapi konflik politik internal. Ketika Inggris menjajah negara 1001 malam ini, pada 1917, pemerintah kolonial Inggris meninggalkan bom waktu untuk Irak dengan membagi wilayahnya dengan Kuwait yang semula memang bagian tak terpisahkan dari Irak. Bahkan, henggang kakinya kolonial Inggris dari negeri tersebut ternyata bukan berarti selesainya gejolak politik di negeri ini. Perebutan kekuasaan terus berlanjut hingga kudeta militer memenangkan kendali pemerintahan. Tahun 1960-an merupakan tahun kemenangan Partai Ba'ats

pimpinan Saddam Husein yang penuh dengan gaya kepemimpinan otoriter dan militeristik. Tidak heran bila tahun-tahun selanjutnya Irak terbawa oleh arus perang. Secara internal pemerintah menghadapi gerakan separatis suku Kurdi di sebelah Utara Irak, dan di saat yang sama bersaing dengan kelompok Syi'ah yang tergolong mayoritas, yakni sekitar 60 % penduduk Irak, yang umumnya mereka tinggal di sebelah Selatan Irak. Entah siapa yang memulai, Irak terlibat perang dengan tetangganya, Iran, selama hampir satu dekade.

Sejak 1980, Irak terus menerus menghadapi situasi sulit, karena berada dalam perang berkepanjangan selama delapan tahun dengan negara tetangganya, Iran. Posisi Irak saat itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan oleh peran negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris, Prancis bahkan Rusia dan China yang mensuplai amunisi bahkan senjata kimia. Agaknya kejatuhan Syah Reza Pahlevi yang pro Barat di Iran oleh Ayatullah Ruhullah Khomeini yang berpaham Syi'ah dan anti Barat amat mencemaskan pihak Barat, terutama Amerika Serikat akan kepentingan minyaknya di kawasan teluk ini, dan untuk itu melalui mitranya Irak, berharap agar Iran bertekuk lutut di bawah hegemoni kepentingan Barat. Menjelang akhir 1980-an konflik Irak-Iran ini mulai mereda, namun di awal tahun 1990-an Irak kembali terlibat dalam perang. Kali ini menghadapi koalisi pasukan internasional akibat upaya aneksasi Irak atas Kuwait.

Karena masalah Kuwait ini, Irak harus menghadapi gempuran pasukan internasional pimpinan Amerika. Perang ini disebut Perang Teluk I. Dalam perang yang tak seimbang ini, Irak berhasil dipukul mundur dari Kuwait oleh pasukan gabungan, lebih dari itu Irak harus memikul beban berat dengan embargo ekonomi dan zona larangan militer selama 12 tahun. Beban berat dirasakan oleh rakyat Irak, dimana hal ini benar-benar menyebabkan Irak terisolir dari dunia internasional. Kerugian materi dan non-materi akibat Perang Teluk I tersebut tak terbilang harganya. Kerusakan gedung, bangunan, jalan dan sarana fisik lainnya, bisa dibangun lagi, tapi nyawa, darah dan isak tangis keluarga serta nasib anak-anak sekolah, dan kesehatan mereka, tak tergantikan oleh materi apa pun.

Kini, setelah sekian lama rakyat Irak dirundung oleh krisis ekonomi akibat embargo dan perlucutan senjata, pada Maret 2003, Irak untuk ke sekian kalinya menghadapi perang, bukan dengan negara tetangganya, melainkan dengan Amerika dan koalisinya, hanya dengan satu alasan: bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Kali ini Amerika dan tentara koalisi yang terdiri dari Inggris, Australia dan Spanyol, melakukan agresi militer secara massif terhadap Irak dengan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah melakukan inspeksi ke Irak di bawah pimpinan Hans Blix. Agresi militer Amerika beserta sekutunya yang tidak direstui oleh PBB ini dilakukan dengan pretensi bahwa Irak masih memiliki senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*), termasuk senjata kimia, yang bisa mengancam perdamaian dunia.

Akan tetapi sampai minggu ke-3 dari invasi Amerika ke Irak mulai 20 Maret 2003 hingga tumbangnya Irak pada 10 April 2003, belum ditemukan bukti bahwa Irak memiliki senjata tersebut. Tujuan agresinya pun bergeser menjadi penggulingan rezim Saddam Husein beserta kroninya dari tampuk kekuasaan di Irak yang diklaim otoriter untuk digantikan dengan pemerintahan boneka yang *western-oriented*, atau demokrasi ala Amerika, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika terhadap Afghanistan di bawah pimpinan Taliban, padahal sasarannya adalah memburu Osama bin Laden yang diduga bertanggungjawab atas peristiwa 11 September 2001. Memang, sejak peristiwa 11 September 2001, ketika *World Trade Center* dan Gedung Pentagon Amerika ditabrak oleh pesawat yang menimbulkan korban ribuan orang meninggal, Amerika merasa terancam akan bahaya serupa di masa datang, yang disebutnya sebagai aksi teroris. Atas prinsip *pre-emptive action* ini, Amerika dan koalisinya berdalih menyerang lebih dahulu ke Irak yang sudah lemah, bahkan menurut mantan Presiden Amerika Jimmy Carter, dianggap tidak menjadi ancaman bagi Amerika, untuk digempur dan menggulingkan pemerintahan Saddam Husein. Jatuhnya Baghdad karena gempuran tiap hari rata-rata 1000 rudal ini praktis meluluh-lantakkan negara yang berdaulat dan menjadi pusat peradaban dunia Islam sekaligus menunjukkan lemahnya persatuan dunia Arab Timur Tengah bahkan PBB.

Bagaimana dengan nasib pendidikan di Irak ? Sebelum meletus Perang Teluk, Irak sudah dihadapkan oleh problema pendidikan yang berat. Angka buta huruf yang tinggi, kualitas sekolah beserta fasilitasnya yang kurang, partisipasi perempuan dalam pendidikan, problema kurikulum dan biaya pendidikan serta lainnya, diperparah oleh perang. Kondisi ekonomi yang menurun menimbulkan membengkaknya angka kemiskinan, pengangguran dan lesunya industri, lalu berakibat pada merosotnya ekonomi negara. Tidak sedikit warga Irak yang ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Singapura atau Australia, sekedar mencari kerja dan penghidupan. Kasus Irak adalah cermin bahwa dunia Islam telah terpuruk secara ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Hemat saya, untuk bangkit dari kemundururan luar biasa Umat Islam ini adalah gerakan reformasi sistem pendidikan Islam secara total.

Daftar Pustaka

- Ajami, Fouad. *The Arab Predicament: Arab Political Thought and Practice Since 1967*. New York: Cambridge University Press, 1992.
- Deighton, Lee C. *The Encyclopedia of Education*. Vol.5. London: the MacMillan Company & the Free Press, [1983].
- K. Abdoelrachman. *Knowing Countries*. Jakarta: Djambatan, 1976.
- Jawa Pos*, edisi 20 Maret 2003– 30 April 2003.
- Mansfield, Peter. *The Arabs*. England: Penguin Books, 1990.
- Peretz. Don. *The Middle East Today*. New York: Praeger Publishers, 1983.
- Rejwan, Nissim. *Arabs Face the Modern World: Religious, Cultural and Political Responses to the West*. Gainesville: University Press of Florida, 1998.
- Said, Edward and Fuad Suleman (Ed.). *The Arabs Today: Alternatives for Tomorrow*. USA: Forum Associate, Inc., 1973.

▫ T U R K I

MASUKNYA sistem pendidikan modern di kalangan Kerajaan Turki Utsmani bermula sejak Sultan Mahmud II (1785-1839)M. Ia mengadakan pembaharuan dalam berbagai bidang pemerintahan, militer, hukum dan termasuk dalam bidang pendidikan.



Sebagaimana halnya di dunia Islam lainnya di zaman itu, madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Kerajaan Utsmani. Di madrasah itu hanya diajarkan agama, sedang pengetahuan umum tidak diajarkan sama sekali. Sultan Mahmud menyadari bahwa madrasah-madrasah tradisional tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu ia berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan madrasah yang ada, agar anak-anak bisa mendapatkan pelajaran pengetahuan umum. Namun mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan memasukkan pengetahuan-pengetahuan umum pada waktu itu sangat sulit. Karena itu, ia mendirikan dua sekolah pengetahuan umum yang berdiri sendiri, terpisah dari sistem madrasah tradisional yang ada. Kedua sekolah itu adalah:

1. Sekolah Pengetahuan Umum (*Mekteb-i Ma'arif*), dan
2. Sekolah Sastra (*Mekteb-i Edebiye*).

Di kedua sekolah tersebut, di samping Bahasa Arab siswa diajarkan Bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah dan politik. *Mekteb-i Ma'arif* mendidik siswa menjadi pegawai administrasi, sedang *Mekteb-i Edebiye* menyediakan tenaga penerjemah untuk urusan pemerintah dimana nantinya amat berperan penting dalam upaya penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan modern dari Eropa. Selain itu, Sultan Mahmud juga mendirikan Sekolah Militer, Sekolah Teknik, Sekolah Kedokteran dan Sekolah Ilmu Bedah.

Pada 1845 di Turki dibentuk Komisi Pendidikan yang bertugas mempelajari dan mempersiapkan terwujudnya suatu sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Komisi pendidikan itu memberikan rekomendasi dan beberapa usul sebagai berikut:

1. Agar diciptakan suatu sistem pendidikan atau persekolahan yang mencakup pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi.
2. Agar dibentuk suatu departemen khusus yang mengurus pendidikan dan pengajaran umum yang disebut sebagai Departemen Pengajaran Umum.
3. Agar didirikan Universitas Kerajaan Utsmani.

Usul tersebut baru pada 1847 mulai direalisasikan. Universitas Kerajaan Utsmani didirikan oleh Departemen Pengajaran Umum dan dijadikan bagian dari Kementerian Pendidikan. Wajib belajar dengan gratis selama pendidikan

dasar telah disetujui dengan mulai dibangun dan dipersiapkan sarana pendidikan yang diperlukan. Sekolah menengah modern yang bernama *The Ruhdiya* dibentuk sejajar dengan sistem madrasah yang ada. Pada 1869, setelah diundangkannya peraturan untuk mengembangkan pendidikan modern sehingga mampu mengembangkan jumlah lembaga studi ilmu-ilmu pengetahuan secara modern. Dibuka pula sekolah ilmu pengetahuan ala *Lycee* yang berkembang di Prancis, sebuah sekolah elit-sekuler. Setelah terjadi transisi pemerintahan berkali-kali, pada masa kesultanan Turki dipegang oleh Sultan Abdul Hamid II (1876-1909), ia mendirikan berbagai lembaga pendidikan, seperti Sekolah Tinggi Hukum (1878), Sekolah Tinggi Keuangan (1878), Sekolah Tinggi Kesenian (1879), Sekolah Tinggi Perdagangan (1882), Sekolah Tinggi Teknik (1888), Sekolah Tinggi Kepolisian (1891), dan Universitas Istanbul (1890).

Seiring dengan modernisasi sekolah di atas, pemerintah melakukan program pengiriman pelajar dan mahasiswa pilihan untuk studi lanjut di Eropa, terutama Paris. Mereka dikirim ke sana untuk mempelajari Bahasa Eropa, sistem hukum dan berbagai pengetahuan modern. Sejak tokoh Utsmani Muda (akhir abad ke-19) lalu Turki Muda (awal abad ke-20), sampai dengan tokoh sekuler di bawah pimpinan Mustafa Kemal Attaturk yang mendirikan Republik Sekuler Turki (1923), mereka menjadi penggerak pembaharuan pendidikan di lingkungan Kerajaan Utsmani.

Pada 1924, keluarlah undang-undang tentang penyatuan atau integrasi pendidikan. Seluruh sekolah diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. Madrasah-madrasah ditutup lalu diganti dengan sekolah yang mendidik para *imam* dan *khatib*. Di Universitas Istanbul didirikan Fakultas Keagamaan (*Ilahiyat*). Secara bertahap, pendidikan agama dan Bahasa Arab serta Persia dihapuskan dari kurikulum sekolah. Tulisan Arab ditukar dengan Latin. Westernisasi dan sekularisasi dilaksanakan bukan hanya lingkup institusi, melainkan kebudayaan dan adat istiadat. Pemakaian *tarbus* dilarang seraya diganti dengan topi ala Barat. Pakaian keagamaan juga dilarang, rakyat Turki, baik pria maupun wanita, diharuskan memakai pakaian Barat. Namun, sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal tidaklah sampai menghilangkan agama. Masih ada Departemen Urusan Agama serta sekolah untuk para *imam* dan *khatib*. Menurut Mustafa Kemal, "agama kita (Islam) adalah agama yang paling rasional dan alami, karenanya Islam menjadi agama terakhir. Agar menjadi agama alami, tidaklah boleh bertentangan dengan kebijakan (*wisdom*), sains, teknik dan logika. Agama kita tidak bertentangan dengan semua konsep tersebut. Inilah alat untuk menguji agama kita, dengan ukuran tersebut kita dapat menetapkan apakah sesuatu itu kontadiksi dengan agama kita atau tidak. Bila sesuatu itu sesuai menurut kebijakan, logika, dan kepentingan masyarakat, maka tentulah itu bersesuaian pula dengan agama kita. Karena alasan itulah agama kita menjadi amat maju dan agama penutup ... tiap orang perlu tempat untuk belajar agama beserta aturannya. Tempat itu disebut dengan

sekolah". Akan tetapi pandangan Mustafa Kemal demikian berlanjut pada sekularisasi pengetahuan yang tidak bertahan lama.

Layaknya api dengan asap, begitu api padam asap pun perlahan hilang. Sekularisasi berjalan efektif saat Mustafa Kemal jaya. Begitu ia meninggal dunia, secara berangsur timbul gerakan kembali pada agama. Tahun 1940, para *imam* mulai bertugas di Angkatan Bersenjata, tahun 1949, pendidikan agama masuk kembali ke dalam kurikulum sekolah, bahkan dijadikan sebagai mata kuliah wajib. Fakultas Ilahiyat diubah menjadi Institut Studi Islam, warga Turki diperkenankan naik haji kembali, dan majalah Islam bermunculan kembali.

Direktorat Urusan Agama didirikan oleh Republik Turki untuk menanggapi persoalan agama, khususnya Islam. Para mufti, imam dan khatib ditangani oleh Direktorat ini. Menurut pasal 154 dari Undang-Undang Turki, Direktorat ini berwenang menanggapi masalah administrasi praktek keagamaan, sarana ibadah yang berkaitan dengan keyakinan, ajaran dan dakwah Islam.

Pendidikan agama. Republik Turki menyediakan pendidikan agama yang ditangani oleh tiga tingkat lembaga yang berbeda:

1. Di Universitas dan di bawah penanganan Menteri Pendidikan Nasional.
2. Oleh Direktorat Urusan Agama, dan
3. Sektor Swasta.

Direktorat Umum pendidikan agama yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan Nasional melaksanakan program pengajaran pada tingkat dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan agama diberikan pada semua jenis sekolah tingkat dasar dan menengah. Ada juga sekolah khusus bagi pendidikan agama. Kelas 4 dan 5 untuk sekolah dasar, dan kelas 1 dan 2 untuk sekolah menengah, diberikan mata pelajaran pilihan yang disebut dengan sains agama (*religious science*).

Sekolah khusus yang didasarkan pada masalah agama, yakni Sekolah Menengah Atas *Imam* dan *Khatib*, seperti sekilas disinggung di atas, diberi peluang untuk memberikan pengajaran dalam dua tahap: tahap pertama selama 3 tahun dan tahap kedua selama 4 tahun. Tujuan utama sekolah ini adalah sebagaimana dicantumkan dalam peraturannya: "dalam sistem pendidikan sekuler, sekolah tersebut didirikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sebagai sekolah kejuruan, dengan tujuan untuk mendidik para siswa agar mampu menjadi pemimpin agama (*imam*) dan penceramah (*khatib*), sebagai tenaga pengajar Al-Qur'an, mufti serta jabatan keagamaan yang serupa.

Tamat dari Sekolah Menengah Atas *Imam* dan *Khatib* tersebut, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi Islam selama 4 tahun. Dalam aturannya, institusi pendidikan tinggi Islam ini bertujuan untuk mendidik pelayanan keagamaan masyarakat bagi organisasi tingkat propinsi maupun pusat dari Direktorat Urusan Agama, untuk mendidik para guru agama bagi lulusan Sekolah Menengah Atas *Imam* dan *Khatib*, para guru agama tingkat menengah lainnya,

serta Sekolah Tinggi Pelatihan Keguruan. Perguruan Tinggi Islam juga diberi wewenang untuk membantu mengembangkan para sarjana di bidang agama yang berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan Nasional.

Beberapa perguruan tinggi yang berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan Nasional adalah Universitas Ankara (*University of Ankara*), dan Universitas Erzurum Attaturk (*Erzurum Attaturk University*) dimana keduanya memiliki Fakultas Teologi. Fakultas inilah yang menerima lulusan Sekolah Menengah Atas. Sedang Fakultas Sains Islam menerima lulusan dari Sekolah Menengah Atas dan juga lulusan Sekolah Menengah Atas *Imam* dan *Khatib*. Tujuan fakultas ini paralel dengan dengan tujuan pendidikan tinggi Islam, namun mereka lebih memiliki peluang dan fasilitas penelitian kebudayaan Islam selanjutnya.

Direktorat Urusan Agama menjalankan programnya dengan dua cara: *pertama*, melalui pelatihan pekerjaan (*job training*) dan *kedua*, pendidikan bagi masyarakat. Untuk yang pertama, Pelatihan pekerjaan ditangani oleh Departemen Pendidikan Keagamaan dan Pelayanan Keagamaan bagi Masyarakat. Tiap tahun para mufti, pimpinan organisasi tingkat propinsi maupun pusat, penceramah agama, tenaga pengajar agama, dan jama'ah Masjid, diundang untuk mengikuti pelatihan khusus keagamaan. Waktu yang ditempuh dalam pelatihan ini bervariasi antara 15 hari hingga setahun. Ada tiga pusat pelatihan untuk tujuan ini, satu di Ankara, satu di Istanbul dan satu di Bolu. Sedang untuk yang kedua, pendidikan bagi masyarakat, dilaksanakan dalam dua bentuk: *pertama*, pendidikan khusus Al-Qur'an, dan *kedua*, pendidikan umum keagamaan.

Pada pendidikan khusus Al-Qur'an, materi intinya adalah pelajaran Al-Qur'an. Guru khusus yang berwenang dari Direktorat Urusan Agama disertai tanggungjawab untuk mengajar Al-Qur'an, sekaligus manajemen kelasnya. Peraturan pendidikan dan pelatihannya dirancang oleh peraturan khusus yang dibuat oleh Direktorat Urusan Agama. Sedang pada pendidikan umum keagamaan, diarahkan pada pembinaan para penceramah agama, *imam* dan *khatib* yang biasanya dibutuhkan saat shalat Jum'at, pernikahan atau peristiwa keagamaan lainnya. Sejauh berkaitan dengan sekolah *imam* dan *khatib*, dilakukan juga perluasan Sekolah Al-Qur'an tingkat rendah, dimana anak-anak diajari baca-tulis dan pelajaran dasar Agama Islam. Sebelum terjadinya *coup* pada 1980, jumlah sekolah jenis ini ada 2.610 sekolah, lalu pada 1989, jumlahnya meningkat menjadi 4.715 sekolah. Jumlah murid yang masuk juga bertambah dari 68.486 murid menjadi 155.403 murid, untuk periode yang sama, dan 58.350 di antaranya adalah perempuan.

Lembaga pendidikan swasta bebas didirikan. Paragraf 1 dan 2 pasal 19 dari Undang-Undang Turki menyatakan bahwa: *everyone has the freedom of concept. Any prayers, ceremonies and religious activities are free as long as they are not againts public order, or the rules of ethics and laws concerning these subjects*". Dalam

kerangka kebebasan ini, banyak di antara masyarakat Muslim yang melaksanakan pendidikan khusus di bidang keislaman. Umumnya pendidikan swasta ini mencakup pelajaran Al-Qur'an bagi anak-anak, analisis, komentar dan terjemahan Al-Qur'an serta Hadis Nabi saw. lembaga pendidikan agama swasta ini menciptakan kesempatan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti program pelatihan resmi.

Masyarakat Turki tergolong taat beragama. Hal itu dapat dilihat dari kehadiran mereka di Masjid di hari Jum'at atau hari Raya. Bulan suci Ramadhan merupakan contoh baik bagi ukuran seberapa besar keyakinan agama mereka. Beragam upacara keagamaan dibuat, sekelompok masyarakat mempersiapkan kamar khusus di apartemen untuk ibadah shalat selama Ramadhan, kadang kala mereka mengundang *imam* tertentu untuk tujuan ini. Selama upacara perkawinan ini, Al-Qur'an amat berarti bagi hadiah bagi mempelai perempuan, termasuk karpet khusus untuk shalat. Banyak Masjid didirikan di Turki. Tidak ada satu desa pun di Anatolia tanpa adanya Masjid. Jumlah Masjid terus bertambah seiring dengan luas wilayah desa dan jumlah penduduknya. Data statistik juga membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah *jama'ah* haji secara signifikan. Kota besar di Turki memberi contoh mengesankan bagi seni dan peradaban Islam-Turki. Gelombang kebangkitan Islam di Turki sebenarnya telah mulai menampakkan aktifitasnya sejak 1950-an, selama diberlakukannya multi-partai.

Para petinggi militer (jenderal), meskipun berjanji untuk memulihkan Kemalisme ke posisinya semula, mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan kehidupan agama bagi masyarakat. Mereka menggunakan sumber-sumber negara untuk memperkenalkan wajib belajar agama di lingkungan sekolah dasar dan menengah, serta sejumlah sekolah pelatihan *imam* dan *khatib* yang kian bertambah jumlahnya dari 258 menjadi 350 lembaga selama tiga tahun masa jabatan. Jumlah murid yang masuk ke sekolah tersebut juga naik secara drastis menjadi 270.000, termasuk 40.000 di antaranya adalah murid perempuan. Lulus dari sekolah ini, umumnya mereka memperoleh pekerjaan di ribuan Masjid dimana mereka dapat digaji sebagai pegawai negeri.

Sebenarnya, banyak anak-anak yang tidak memahami Islam, sebab mereka sedikit sekali belajar Islam di rumah. Itu sebabnya pihak *National Security Council* (NSC) memutuskan bahwa negara mestilah mengajarkan agama di sekolah. Menurutny, Islam hendaknya diajarkan di sekolah, sebagaimana sekolah mengajarkan sejarah, geografi, matematika dan sebagainya. Para petinggi militer beserta penasehatnya memandang bahwa Islam merupakan faktor pemersatu bangsa, bila diperlakukan secara tepat, diharapkan dapat mengatasi atau paling tidak mengurangi berbagai perbedaan dalam masyarakat Turki. Itu sebabnya mereka melakukan upaya serius dalam meningkatkan kehidupan agama, dan kebijakan itu diadopsi oleh Partai Ibu Pertiwi (*The Motherland Party*) dalam pemerintahan 1983. Mereka berdalih bahwa rejim

Kemalis telah gagal untuk menyediakan identitas baru bagi bangsa Turki, dan justru dengan memisahkan Islam, berarti telah menciptakan krisis identitas. Kebangkitan Islam di Turki, dengan begitu, berartimerupakan upaya untuk memulihkan identitas sejati dari bangsa tersebut.

Di antara yang paling besar jasanya bagi re-Islamisasi, baik sebagai gerakan maupun partai, adalah Said Nursi, seorang *muballigh* dan penulis buku *Risale-i Nur* (Pancaran cahaya), yang mampu meraih pengaruh bagi gerakan bawah tanah di Turki, sekalipun pemerintah berusaha keras melawan dan menghukumnya. Agaknya buku tersebut dapat menggerakkan semangat memperjuangkan Islam. Dengan mengintegrasikan sains, tradisi, teosofi dan mistitisme, karya tersebut mengajak warga terpelajar untuk mempelajari ide-ide ilmiah Barat. Selain itu, Partai Keselamatan Bangsa (*The National Salvation Party*), berdiri pada 1960-an, bukan hanya partai agama melainkan juga bermaksud mendirikan kembali negara Islam Turki, meskipun pada 1970-an partai ini prosentase suara kecil.

Profile

Bediuzzaman Said Nursi. Lahir pada 1293 H atau 1876 M di Kampung *Nursi*, sebelah Timur Anatolia. Ayahnya bernama Mirza, seorang *sufi* yang sangat *wara'*, karena terkenal tidak pernah makan barang haram. Pendidikan pertamanya diperoleh dari Muhammad Afandi di desa Thag, lalu belajar pada kakaknya, Abdullah. Pada 1888, ia pergi ke Bitlis dan masuk sekolah Syaikh Amin Afandi, tapi hanya sebentar karena ditolak dengan alasan usianya belum memadai. Ia tergolong cerdas dan kuat hafalan. Beliau mampu menghafal kitab *Jam'ul Jawami'* karya Ibn as-Subki hanya dalam tempo satu minggu, sehingga gurunya Syaikh Fathullah Afandi menulis catatan dalam sampul kitab tersebut: *laqad jama'a fi hifdzihi Jam'ul Jawami', jami'ih fi jum'atin* (sungguh ia telah menghafal kitab *Jam'ul Jawami'* secara keseluruhan hanya dalam waktu satu minggu). Karya spektakulernya, *Risale-i Nur* setebal enam ribu halaman, berisi tentang keimanan, ketauhidan, keikhlasan dan kesabaran. Kini, pengikutnya mendirikan Yayasan Nesil (*Nesil Foundation*), yang di antara programnya adalah memperkenalkan perjuangan dan pemikiran Bediuzzaman Said Nursi ke dunia Islam. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerima misi Yayasan Nesil ini dalam *International Conference* yang diadakan di kampus tersebut pada 11-12 Agustus 2001.

Gejala meningkatnya kehidupan agama Islam di Turki akhir-akhir ini tercermin dari hasil *pooling* oleh Ali Carkoglu, dosen Universitas Istanbul, Turki, pada 1998-1999. Berdasarkan *survey* tersebut, satu dari empat responden (sekitar 20 %) menyatakan persetujuannya untuk diberlakukan syari'at Islam di Turki. Berikut ini adalah ilustrasi sebagian dari hasil *survey* tersebut.

TABEL 5
DAFTAR PERSETUJUAN RESPONDEN
TERHADAP BERBAGAI MASALAH AGAMA ISLAM

URAIAN	SETUJU	TIDAK TENTU	TIDAK SETUJU	TIDAK JAWAB
Tiap perempuan Muslim harus menutup kepala (dengan <i>jilbab</i> , dsb).	58,9	6,4	32,6	2,1
Saya tidak setuju anak lelaki dan wanita usia belasan tahun dididik bersama dalam satu kelas.	38,5	6,8	51,9	2,7
Saya tidak setuju para gadis dan wanita muda memakai rok pendek.	57,1	8,8	31,6	2,5
Pegawai negeri perempuan seharusnya dibolehkan menutup kepalanya, jika mereka mau.	74,2	5,8	17,4	2,5
Para gadis mestinya dibolehkan memakai penutup kepala di universitas, jika mereka mau.	76,1	5,6	16,0	2,3
Saya tidak setuju pria dan wanita duduk bersebelahan saat naik bis antar kota.	60,2	7,1	30,7	1,9
Menjual alkohol pada bulan Ramadhan harus dilarang	70,5	5,4	22,3	1,8
Bimbingan keagamaan dalam masalah kenegaraan dan politik adalah merusak.	67,2	9,5	16,4	6,9
Jam kerja mestilah diatur sesuai dengan shalat Jum'at.	66,4	7,5	22,2	3,9
Memperoleh bunga dari investasi uang di bank adalah dosa.	62,6	6,1	28,1	3,2
Reformasi kaum Republik di negeri ini mengalami kemajuan.	77,3	9,0	8,3	5,4

Sumber : Ali Carkoglu, "Religion and Public Policy in Turkey" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 8/2001, h.29.

Sistem pendidikan. Sistem perjenjangan sekolah yang dianut Turki saat ini mengikuti pola 5-3-3-6 tahun, yakni 5 tahun jenjang Sekolah Dasar. Pendidikan dasar ini dimulai sejak usia 7 hingga 11 tahun atau lebih. Tahap ini merupakan tahap wajib belajar. Akan tetapi, sering terjadi, karena kesulitan tertentu anak dalam menyelesaikan belajarnya ada yang menempuhnya hingga 14 tahun, bahkan 17 tahun. Antara satu daerah dengan lainnya, bentuk sekolah dasar ini bisa berbeda-beda, mulai dari sekolah besar di kota sampai sekolah kecil yang memiliki satu kelas dengan satu orang guru. Khusus untuk daerah yang jarang penduduknya didirikan badan pendidikan daerah, dan bagi penduduk nomadik diadakan sekolah keliling.

Jenjang berikutnya 6 tahun untuk sekolah menengah yang dibagi atas dua tahap: 3 tahun pada Sekolah Menengah Pertama (*Ortaokul*), yang menerima anak usia 12-14 tahun, dan 3 tahun pada tahap tinggi (*Lycee*), untuk usia 15-17 tahun. *Ortaokul* merupakan sekolah umum sebagai persiapan ke perguruan tinggi. Kebanyakan orang tua menghendaki anaknya masuk ke sekolah umum ini, lalu setamatnya mengambil spesialisasi pendidikan kejuruan. Sedangkan *Lycee* juga bersifat umum dan kejuruan, di samping teknik. Sebagian dari *Lycee* ini menerapkan sistem *co-education*, sebagian khusus untuk laki-laki sebagian lagi khusus untuk perempuan.

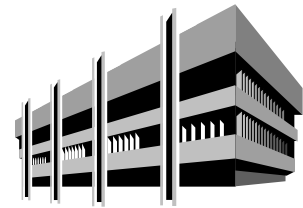
Adapun pendidikan tinggi ditempuh selama 6 tahun. *Dar al-Funun* atau *House of Sciences* merupakan perguruan tinggi modern Turki yang pertama kali, didirikan pada 1900 dengan tiga fakultas: Teologi, Matematika dan Sastra. Lalu pada 1908, ditambah lagi Fakultas Hukum dan Kedokteran. Sekarang, Turki mempunyai 7 universitas, sejumlah Sekolah Tinggi dan Institut. Total universitas tersebut memiliki 30 fakultas. Di samping di lingkungan perguruan tinggi, sejumlah lembaga riset menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Feroz. *The Making of Modern Turkey*. London and New York: Routledge, 1993.
- Carkoglu, Ali. "Religion and Public Policy in Turkey" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 8/2001.
- Cleveland, William L. *A History of the Modern Middle East*. USA: Westview Press, Inc., 1994.
- Djainuri, Achmad. *Pendidikan dan Modernisasi Dunia Islam*. Surabaya: al-Ikhlash, 2001.
- Lapidus, Ira. M. "Sejarah Sosial Umat Islam". Terj. Ghufroon A. Mas'adi dalam *A History of Islamic Societies*. Bagian ketiga. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Mughni, Syafiq A. *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*. Jakarta: Logos, 1997.
- Olson, Robert. *The Kurdish Nationalist Movement in the 1990s: Its Impact on Turkey and the Middle East*. USA: University Press of Kentucky, 1996.
- Order, Sylvia Wing. "Indigenous Evaluation of Health Care in Turkey" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 5/2000.
- Raudvere, Catharina. "Space, Place and Visibility: Islamic Women in Turkey" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 7/2001.
- Strasser, Sabine. "Impurity as Criticism: Reports from a Black Sea Village in Turkey" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 5/2000.
- Tadjab. *Perbandingan Pendidikan: Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Moderen, Islam dan Nasional*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- The Press & Information Department of Ankara. "Religion in Turkey" dalam *Journal of Muslim World League*. Mecca: Rabithah al-Alam al-Islami, Vo.6 Shawwal 1399 H/ No.11 September 1979.

□ MALAYSIA

MALAYSIA memproklamasikan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957, dan tidak lama kemudian pada 16 September 1963, Malaysia membentuk negara federal yang meliputi Malaya, Serawak, Sabah dan Singapura. Selanjutnya pada 1965, Singapura memisahkan diri dari negara federal Malaysia. Sekarang ini Malaysia mencakup beberapa negara bagian, yakni: Malaysia (329.758 km²), Semenanjung Malaysia (131.598 km²), Serawak (124.449 km²), dan Sabah (73.711 km²). Berdasarkan sensus 1990, populasi total penduduk Malaysia sekitar 50.292.000 penduduk. Tiap negara bagian mempunyai gubernur terpilihnya sendiri-sendiri. Kepala Tertinggi Negara Federal Malaysia dipimpin oleh Yang Dipertuan Agung, yang dipilih melalui konferensi para pemerintah di antara mereka, untuk masa jabatan lima tahun atau sampai masa kematian dan pengunduran dirinya. Yang Dipertuan Agung juga merupakan Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang bertindak atas nasehat Parlemen dan Kabinet.



Mayoritas penduduk Malaysia beragama Islam (6.918.307), sisanya beragama Budha (2.265.456), Confusius (1.518.683), Hindu (920.393), Kristen (842.990), tidak beragama (275.338), Kaum Suku (259.455) dan lain-lain (69.750). Selain itu, Malaysia, seperti tergambar dari data statistik di atas, berkomposisi penduduk yang multi-etnis, terdiri dari orang Melayu (55%), China (30%), India (7%), Dayak, Eropa dan lain-lain. Penduduk asli Malaysia bertalian erat dengan orang Philipina dan Indonesia. Selain itu terdapat penduduk Cina, India, Pakistan, Srilangka, Bangladesh serta beberapa suku asli yang kebanyakan tinggal di Serawak dan Sabah. Bahasa nasional Malaysia adalah Bahasa Malaysia (Melayu). Namun, sebagai negara yang multi-rasial seperti Malaysia ini, komunikasi bahasa lain seperti Bahasa Inggris, dan beragam dialek setempat, lazim digunakan sehari-hari. Bahkan sekolah-sekolah di Malaysia mewajibkan masuknya mata pelajaran Bahasa Inggris ini.

Masing-masing negara bagian memiliki ibu kotanya sendiri. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, terletak di Selangor. Kuala Lumpur menjadi pusat komunikasi. Berbagai jaringan jalan yang menghubungkan antar kota ke seluruh penjuru negara telah dibangun. Sebuah kota dengan gedung pemerintahan yang megah yang didirikan dengan gaya arsitektur *Moorish*, bersebelahan dengan berbagai hotel pencakar langit, pemukiman dan taman yang indah, sebagian di antara jalannya berciri khas ala China atau kampung Melayu. Di sekeliling kota terdapat banyak perkebunan karet dan tambang timah. Sedang ibu kota Sabah adalah Kinabalu, dan ibu kota Serawak adalah Kuching.

Lebih dari sepertiga suplai timah dunia berasal dari Malaysia. Selain timah, Malaysia juga penghasil besi, bauksit, dan kayu. Industri kasyu Malaysia kian meluas dan menjadi penghasilan ekspor ke luar negeri terbesar ketiga bagi ekonomi Malaysia. Kayu tersebut diproduksi baik dari Malaysia Timur maupun Barat. Di samping itu masih ada hasil ekspor dan produksi niaga terbesar lainnya di Malaysia, yakni minyak kelapa. Pohon kelapa banyak ditemukan di negeri ini, khususnya sepanjang tepi pantai. Kelapa ini dipasarkan dalam bentuk kelapa segar untuk bahan makanan, namun sebagian besarnya dijual dalam bentuk kopra kepada industri penggilingan minyak untuk dalam maupun luar negeri. Demikian luasnya lahan perkebunan kelapa ini hingga banyak tenaga kerjanya yang didatangkan dari luar negeri, semisal Indonesia, untuk bekerja di sana. Tidak heran bila penduduk Malaysia 40 % nya bermata pencaharian sebagai petani. Malaysia memiliki tanah yang subur dan didukung oleh iklim yang kondusif. Malaysia umumnya beriklim Katulistiwa dengan suhu yang umumnya tinggi, curah hujan lebat, khususnya selama akhir musim gugur dan awal musim dingin. Sedangkan rata-rata hujan lebih dari 240 cm per tahun. Siang hari panas dan lembab, sedang malam hari sejuk karena angin laut. Sementara di pegunungan suhu lebih sejuk dan kelembaban berkurang.

Kondisi ekonomi Malaysia, dibandingkan dengan negara berkembang lainnya terutama untuk kawasan Asia Tenggara, tergolong *tahan banting*. Meskipun dampak krisis ekonomi yang melanda Asia berimbas pada ekonomi Malaysia, sehingga Malaysia mengalami kontraksi ekonomi sekitar 6,7 % serta kegiatan manufaktur dan konstruksi ikut terpukul, namun pada paroh 1998, indikator investasi swasta menunjukkan beberapa perbaikan. Resesi yang terjadi telah banyak memulihkan keseimbangan posisi pembayaran. Pada 1998, Malaysia mengalami *surplus* sebesar 13,8 persen dari GNP-nya, meskipun dalam sektor pelayanan terjadi defisit. Sampai pada pertengahan 1998, Malaysia menerapkan kebijakan uang ketat: rata-rata bunga dan biaya belanja tetap tinggi. Kebijakan fiskal diperketat secara bijak, dan pembelanjaan negara dikurangi hingga 18 %. Dengan menerapkan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (*National Economic Recovery Plan*) pada Juli 1998, Malaysia mampu mengabaikan pendekatan pengawasan IMF (*International Monetary Fund*). Dalam rencana pemulihan ekonomi tersebut terdapat enam tujuan, yakni: menstabilkan nilai tukar ringgit, memulihkan kepercayaan pasar, menjaga kestabilan keuangan pasar, memperkuat fundamental ekonomi, melanjutkan agenda nasional bagi peningkatan pemerataan ekonomi-sosial masyarakat, serta melakukan revitalisasi berbagai sektor yang terkena dampak krisis. Pada September 1998, untuk mengurangi spekulasi terhadap ringgit, pemerintah Malaysia mematok ringgitnya pada level 3.80 RM per dolar AS. Suatu langkah yang cukup berani, bila dibandingkan dengan negara lain yang terkena krisis dan mengandalkan pola pemulihan ekonomi IMF, yang belum tentu membawa hasil nyata.

Kebijakan pendidikan. Setelah Perang Dunia II, saat Malaysia masih di tangan kekuasaan Inggris, pada 1955, dibentuklah satu Komisi di bawah pimpinan A. Rezak yang isinya mempersiapkan usul-usul bagi sistem pendidikan Malaysia. Di antara usul tersebut ditetapkan bahwa Bahasa Melayu dan Inggris dijadikan sebagai bahasa wajib bagi semua murid di sekolah-sekolah, selain dari Bahasa Tamil dan Cina. Setelah kemerdekaan, pada 1961, melalui hasil Komisi A. Rahman, ditetapkan Bahasa Melayu dan Inggris sebagai bahasa wajib yang diberikan sampai dengan kelas enam Sekolah Dasar. Sedang Bahasa Tamil dan Cina diberikan pada Sekolah Tingkat Menengah.

Organisasi pendidikan di pusat terdiri dari Menteri Pendidikan. Kementerian yang dikepalai oleh sekretaris tetap pendidikan, bertanggungjawab langsung untuk pendidikan sekolah menengah dan Purna Sekolah Menengah, Sekolah Teknik dan pengawasan *grant* atau pemberian dana kepada negara-negara bagian. Kementerian Pendidikan ini terdiri dari dua bagian. Bagian administrasi yang mengurus perencanaan, keuangan, administrasi, personil dan pelajaran terpadu, dan pengawasan terhadap pelajaran Agama Islam. Sedang bagian kedua berada di bawah pimpimam Penasehat Kepala Bagian Pendidikan yang terdiri dari inspektorat federal, pendidikan guru, bagian sekolah, sindikat ujian, pendidikan teknis, registrasi guru dan perencanaan pendidikan dan penelitian. Kepala pendidikan di tiap negara bagian bertanggungjawab atas pengadministrasian Sekolah Rendah dan Menengah di tingkat wilayah dan mereka bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian yang tetap, yaitu sekretaris.

Pada 1974, Malaysia membentuk Jawatan Kuasa Kabinet yang bertugas mengkaji semua pelaksanaan pendidikan. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet ini telah mulai terbit sejak 1979. Lalu, atas dasar laporan tersebut Kementerian Pendidikan melancarkan reformasi pendidikan dengan memperkenalkan program KBSR pada tahun 1982/1983 diikuti dengan pelaksanaan KBSM pada tahun 1988/1989. pada dekade 1990-an, Malaysia mengadakan perubahan kebijakannya secara berarti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan pendidikan persekolahan dalam Sekolah Rendah.
2. Mengurangi tahun lama sekolah di Sekolah Rendah dari 6 tahun menjadi 5 tahun bagi murid yang cerdas, dan sebaliknya menambah tahun lama sekolah menjadi 7 tahun bagi murid yang lambat.
3. Memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan waktu pelajaran mereka dari 9 hingga 12 tahun, yaitu sampai tingkat 5 di peringkat Sekolah menengah.
4. Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahaan, perdagangan dan ekonomi.
5. Mengubah sistem pemeriksaan SRP kepada Penilaian Menengah Rendah (PMR).

Pendidikan di Malaysia bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini dimaksudkan agar dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, keterampilan, berakhlak mulia, dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

Sistem pendidikan. Terdapat empat tingkat perjenjangan sekolah: Sekolah Rendah selama 6 tahun, lulusannya dapat diterima tanpa ujian di sekolah menengah komprehensif, selama 3 tahun. Pada tingkat Sekolah Menengah diadakan ujian umum yang dilakukan dalam Bahasa Melayu dan Inggris. Namun pada 1964, keadaan sekolah menengah ditinjau kembali untuk kemudian diadakan sekolah komprehensif. Pada akhir sekolah menengah komprehensif baru diadakan ujian. Setaraf dengan sekolah menengah komprehensif ini adalah Sekolah Menengah Rendah, lalu melanjutkan ke Menengah Atas, masing-masing 3 tahun. Selanjutnya pendidikan akademik atau teknis selama 2 tahun. Lulus dari sini dapat mencari pekerjaan atau meneruskan pendidikan ke sekolah purna komprehensif selama 2 tahun lagi, yang terdiri dari dua kelompok: akademis dan kejuruan. Kelompok akademis dibagi dalam aliran-aliran kesenian, sains, pertanian, teknik, pergadangan dan kerumah tanggaan. Adapun kelompok kejuruan terdiri dari berbagai aliran dagang dan kejuruan. Pada akhir pendidikannya mereka mengambil sertifikat Cambridge seberang Lautan. Yang ingin melanjutkan pelajarannya harus melakukan ujian untuk pendidikan "Purna Sekolah Menengah" selama 2 tahun. Selesaiannya mereka dianggap telah siap menempuh ujian Sertifikat Sekolah Cambridge. Dari lulusan ini, universitas menyeleksi mahasiswanya. Kalau diterima, berarti ia telah masuk ke jenjang pendidikan tinggi.

Di Malaysia, terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang representatif, di antaranya adalah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), dan Universitas Islam Internasional Malaysia (*International Islamic University Malaysia*). Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mempunyai simbol "Ilmu Memimpin" dengan filosofi memadukan iman kepada Allah dan pengetahuan yang bermanfaat. Kehadiran Universitas ini sebenarnya melalui proses panjang, bahkan sebelum kemerdekaan, pada 1920, melalui gagasan Abdul Kadir Adabi. Hingga 1930-an ide pendirian universitas nasional Malaysia ini masih menjadi kajian, dan baru pada 18 Mei 1970, universitas ini secara resmi didirikan. Lokasi UKM terletak di daerah Bangi, sekitar 25-30 km dari Kuala Lumpur. UKM menyelenggarakan berbagai fakultas dan jurusan. Di antara fakultasnya adalah fakultas ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora, *Islamic*

Studies, fisika dan ilmu terapan, teknik, kedokteran, ilmu hayat, ilmu alam, pendidikan, hukum, dan komputer.

Universiti Malaya memiliki slogan “Ilmu Puncak Kemajuan”, berdiri pada 1 Januari 1962 di Kuala Lumpur di bawah Undang-undang Persekutuan Tanah Melayu. Universiti Malaya memiliki beberapa fakultas, yaitu fakultas kejuruteraan, sains, pertanian, pendidikan, komputer, ekonomi dan pentadbiran, hospital, pergigian, undang-undang, kebudayaan, serta fakultas syari’ah dan ushuluddin. Selain itu, Universiti Malaya ini juga membuka program Pusat Bahasa, Pusat Kebudayaan, Pusat Asasi Sains dan Pusat Sukan, serta beberapa akademi.

Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang berdiri pada 14 Maret 1972 dengan nama Universiti Teknologi Kebangsaan, yang pada 1975, diganti menjadi Universiti Teknologi Malaysia. Universitas ini punya beberapa fakultas, yaitu; Fakulti Alam Bina, Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Ekektrik, Kejuruteraan Jentera, Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli, Fakulti Sains, fakulti Ukur, Fakulti Sains Komputer & Sistem Malkumat dan Fakulti Pengurusan & Pembangunan Sumber Manusia. Tiap fakultas tersebut memiliki sejumlah jurusan baik berupa program diploma maupun sarjana.

Selain itu terdapat juga Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), dan Universitas Islam Internasional Malaysia (*International Islamic University Malaysia*).

Profile

International Islamic University (IIU) Malaysia. Didirikan pada 1983 sebagai institusi pendidikan tinggi yang bersifat *co-education*. Pendiriannya diinspirasi oleh Konferensi Pertama se-Dunia tentang Pendidikan Islam tahun 1977 di Makkah. IIU berjuang untuk menguatkan moral dan intelektual Umat Islam dan bagi pembentukan keutamaan Islam bagi semua prilaku manusia. IIU sementara ini menempati lokasi dua kampus, di daerah Petaling Jaya dan Kuala Lumpur. Saat ini, kampus utama IIU terletak di Jalan Petaling Jaya. IIU melatih berbagai disiplin ilmu dan menerima perwakilan dari 32 negara, 30 % di antaranya berasal dari luar negeri. Jenjang Magister ditawarkan melalui 7 jurusan, sedang jenjang Doktor hanya diberikan untuk Kuliah Hukum (*the Kulliyat of Law*). Gelar yang diberikan meliputi: *Doctor of Philosophy of Law, Master of Comparative Laws, master of Arts in Islamic Revealed Knowlegde and Heritage, Master of Education, Master in Library and Information Sciences, Master of Arts in Arabic, Master of Arts in English, dan Master of Economics.*

Pendidikan Dasar di Malaysia diberikan secara gratis. Para gurunya berasal dari berbagai Sekolah Tinggi Pelatihan Para Guru Sekolah Dasar Menengah. Ada banyak Sekolah Tinggi, misalnya: Sekolah Tinggi Pertanian di Serdang (*Serdang College of Agriculture*), Institut Teknologi Mara (*the Mara Institute of Technology*), Sekolah Tinggi Tenku Abdul Rachman (*Tenku Abdul Rachman College*), Sekolah Tinggi Islam (*Islamic College*) dan lain-lain.

Pendidikan Islam. Sejak merdeka pada 1957, ilmu pengetahuan Agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional di Malaysia, diberikan selama 120 menit per minggunya. Akan tetapi, karena pemerintah tidak melakukan penekanan atau kewajiban lulus ujian ilmu pengetahuan Agama Islam, pelajaran ini tidak mendapat perhatian serius dari siswa. Lalu pada 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam di negara ini telah ditempuh oleh Departemen Pendidikan. Pada 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan. Dengan demikian peran Islam kian penting dalam negara. Islamisasi pemerintahan ini bisa dibuktikan dengan adanya pembentukan Bank Islam, Sistem Asuransi Islam, Universitas Islam Internasional Penyempurnaan Keagamaan Islam, dan lain-lain. Setahun kemudian, pada 1983, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan bagi pelajar non-Muslim, sementara itu ilmu pengetahuan agama akan diajarkan pada para pelajar Muslim. Apa akibatnya ?

Sebagaimana diamati oleh Claudia Derichs menjelang akhir 1990-an, secara drastis para mahasiswi kian meningkat dalam memakai *tudung* atau *jilbab*, sementara kaum lelakinya memakai *kopiah*. Para guru mengakui bahwa kecenderungan menyatakan identitas sebagai seorang Muslim telah muncul, sedemikian hingga guru perempuan yang tidak bertudung adalah perilaku perkecualian, karena banyaknya yang memakai *tudung*. Berbagai kegiatan kampus semisal pertemuan tahunan acap kali diiringi dengan musik *nasyid* secara keras, yakni sejenis musik pop Islami versi Melayu yang belakangan juga populer di Indonesia. Sementara itu, usulan untuk merayakan lentera bagi orang China di lingkungan kampus ditunda oleh otoritas kampus. Di Sekolah Dasar yang didominasi oleh orang Melayu, aturan baru tentang makanan *non-halal* dinyatakan secara tegas, agar tidak dibawa oleh non-Muslim, pada saat istirahat. Hal ini berlanjut terus, bahkan di tembok kantin terdapat catatan peringatan seperti itu. Sebaliknya, tak seorang pun menaruh perhatian bilamana seorang siswa Muslim dengan suka cita memakan *sandwiches* daging sapi sambil duduk bersebelahan dengan rekan sekelasnya yang beragama Hindu asal India.

Perkembangan Masjid dan *surau* di Malaysia mencerminkan semaraknya aktivitas Umat Islam. Di Bandar Baru Bangi, sekitar 25 km dari Kuala Lumpur, misalnya, merupakan daerah yang memiliki Masjid dan *surau* dengan perkembangan pesat, seiring dengan makin meluasnya pemukiman penduduk,

perkantoran, pertokoan dan industrialisasi, jumlah Masjid dan *surau* pun bertambah. Di dalamnya bukan saja dilaksanakan praktek ibadah shalat tetapi juga sebagai lembaga pendidikan Islam. *Surau an-Nur* di Bandar Baru bangi, misalnya, merupakan tempat kajian Al-Qur'an dan Tafsir baik bagi lelaki maupun perempuan. Kadang kala diadakan *tahlil* serta perbincangan keagamaan yang terjadual secara sistematis tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah spiritual dan problem yang dihadapi masyarakat masa kini.

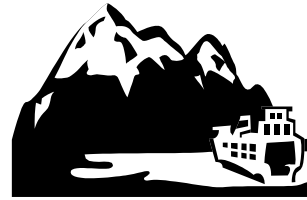
Agaknya corak Islami ini tidak hanya terjadi di bidang pendidikan semata, di lingkungan elit politik dan parpol juga seolah berlomba menyatakan ciri kelislamannya. Partai yang sedang berkuasa di Malaysia saat ini, misalnya, yakni *the United Malays' National Organization* (UMNO) pimpinan Mahathir Muhammad, telah membuka *website* untuk menunjukkan berbagai upaya *jihadnya*. Upaya menciptakan *website* demikian, apapun isinya, akhir-akhir ini mengindikasikan hadirnya kompetisi untuk "menjadi Islami" di Malaysia. Karena hal ini didukung oleh parpol, maka Islamisasi di Malaysia menjadi isu politik dari pada akibat langsung dari munculnya gerakan sosial. PAS, sebuah Partai Islam Malaysia dukungan Anwar Ibrahim, menjadi bukti terjadinya kompetisi ini. Baik UMNO maupun PAS, keduanya hendak meraih kemenangan mendapat predikat "partai Muslim terbaik".

Daftar Pustaka

- Abdoelrachman, K. *Knowing Countries*. Jakarta: Penerbit Djambatan, [1976].
- Abu Bakar, Mohammad. "Islam in Malaysia's Foreign Policy" dalam *Hamdard Islamicus*. USA: American Theological Association, VolXIII/Number 1/Spring 1990.
- Andersen, Arthur. *Pacific Economic Outlook 1999-2000*. San Fransisco: The Asia Foundation, 1999.
- Buku Panduan Akademi Islam Universiti Malaya tahun Akademik 1992/1993.
- Buku Panduan International Islamic University Malaysia.
- Buku Panduan Universiti Kebangsaan malaysia.
- Buku Panduan Universiti Teknologi Malaysia.
- Derichs, Claudia. "Politizing Islam in Malaysia" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 7/2001.
- Haji Abdullah, Abdul Rahman. *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Hasan, Chalidjah. *Kajian Pendidikan Perbandingan*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Lapidus, Ira. M. "Sejarah Sosial Umat Islam". Terj. Ghufroon A. Mas'adi dalam *A History of Islamic Societies*. Bagian ketiga. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Mehden, Fred R. Von der. "Malaysia: Islam and Multiethnic Politics" dalam Esposito, John L(Ed.). *Islam in Asia: Religion, Politics, & Society*. New York: Oxford University Press, 1987.
- Mohd. Hasyim, Omar. *Pengisian Misi Pendidikan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991.
- Muhammad Zin, Abdullah. "Akhlak Islam dalam Kehidupan Masyarakat Muslim di Malaysia Kini: Permasalahan dan Cabaran" dalam *Makalah Seminar Internasional tentang Agama dan Perkembangan Kontemporer (Suatu Pembahasan Perbandingan)*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1992.
- Nagata, Judith. *The Reflowering of Malaysian Islam: Modern Religious Radicals and their Roots*. Vancouver: University of British Columbia Press, 1984.
- Zaleha, Sharifah. "Surau and Mosques in Malaysia" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 3/1999.

□ PAKISTAN

PAKISTAN muncul dalam peta dunia sebagai negara merdeka pada Agustus 1947, sebagai akibat dari pembagian wilayah kekuasaan Inggris atas India. Pakistan memiliki dua sayap wilayah, Pakistan Barat dengan luas 310.403 mil² dan Pakistan Timur dengan luas 55.126 mil². Dua wilayah tersebut dipisahkan satu sama lain oleh lebih dari seribu mil teritorial India, sementara dipisahkan oleh laut sepanjang sekitar 3.000 mil. Bahasa nasional Pakistan sebelah Barat adalah Urdu, dan Bahasa Bengali untuk Pakistan Timur. Sejak awalnya, Pakistan merupakan negara dengan dua kondisi ekonomi yang berlainan. Sebenarnya, Pakistan Barat dan Timur memiliki perbedaan di hampir semua bidang.



Selama bertahun-tahun, disparitas ekonomi antara Pakistan Barat dan Timur kian nyata perbedaannya. Cepat atau lambat, perbedaan tersebut akhirnya mengarah pada konflik antar dua wilayah. Ini terjadi pada 1971, ketika pecah perang antar dua wilayah Pakistan tersebut, lalu Pakistan Timur menganggap dirinya bukan lagi bagian dari Pakistan. Pada 26 Maret 1971, stasiun radio di Chittagong, melalui Maj. Zia Rahman, menyiarkan proklamasi kemerdekaan Pakistan Timur, bicara atas nama Syeikh Mujibur Rahman. Nama Pakistan Timur lalu diganti dengan Bangla Desh, yang berarti Bengal Merdeka (*free Bengal*). Pada 10 April 1971, pemerintah Bangla Desh dibentuk secara resmi. Akibatnya, negara Pakistan yang berdiri sejak 1947 kini telah menjadi dua negara, Pakistan dan Bangla Desh.

Pakistan memiliki areal tanah yang luas, 310.403 mil², kaya dengan beragam lahan dan budaya. Sebagian besar peradabannya tumbuh di negeri ini yang masih meninggalkan bekasnya hingga kini. Secara historis, Pakistan merupakan salah satu negara kuno. Di sebelah selatan lembah Hindustan, peradaban telah mencapai puncaknya pada 4.500 tahun yang silam. Di sebelah utara stupa Budha, biara dan kuil Taxila dan Takht-i-Bahi, mengingatkan kita pada tradisi agung akan seni Budha. Lahore, Multan dan Thatta juga merupakan kota penting bagi keberadaan benteng, Masjid, tempat-tempat bersejarah, kebun dan makam Bangsa Mughal. Di luar kota, perbukitan mengesankan orang akan keagungan bukit Himalaya. Di sini terletak banyak lembah indah dengan dihiasi tempat peristirahatan di pegunungan yang nyaman.

Penduduk Pakistan sekitar 122,8 juta jiwa (perkiraan 1993), merupakan bangsa Muslim terbesar kedua di dunia. Meskipun mereka berasal dari lima kelompok etnis yang berbeda, Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch dan Muhajir (imigran berbahasa Urdu dari India sebelum perpecahan), mayoritas orang Pakistan (97 %) adalah Muslim, sisanya beragama Kristen, Hindu, Budha dan Parsi. Di antara Muslim, 10-15 persennya adalah *Syi'ah Itsna Asy'ariyah*, dan

sebagian kecil *Syi'ah Isma'iliyah* yang kebanyakan tinggal di Karachi dan wilayah Barat Laut Gilgit dan Bohoras dengan markas spiritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas Muslim Sunni menganut Madzhab Hanafi dan sebagian kecil pengikut Madzhab Hanbali. Bahasa nasionalnya adalah Urdu, dimana dipakai sebagai sarana komunikasi sehari-hari oleh seluruh penduduk negeri. Meskipun begitu, Bahasa Inggris dipakai secara ekstensif untuk urusan resmi, kalangan dagang dan kota. Pakistan terkenal dengan hasil kerajinan tangannya. Beragam ornamen kerajinan tangan, seperti emas dan perak, baki kayu ukiran yang indah, sekatan lampu kulit onta yang berwarna-warni, barang perak yang cantik, pecah belah yang halus, dompet bordiran, barang tembaga dalam segala bentuk, hasil kaleng, selendang yang dibordir secara manual, serta karpet mewah, semuanya diproduksi di Pakistan. Gemerlap kota di Pakistan tercermin dari kehidupan kota Karachi, Lahore, Rawalpindi dan Islamabad.

Karachi, yang semula selama dua abad menjadi ibu kota Pakistan, telah tumbuh dari daerah pantai pemancingan menuju ke kota metropolis. Dengan areal wilayah sebesar 230 mil², Karachi menjadi kota Pakistan yang luas dan padat. Karachi juga menjadi pusat bisnis, perdagangan dan industri. Karachi berhubungan dengan dunia luar melalui wilayah penerbangan pesawat, jalur darat dan kapal kargo. Jalan raya di kota ini amat sibuk sepanjang tahun menuju ke berbagai bagian negara lain, sementara jalur kereta api menyediakan sistem transportasi lain lintas negara.

Lahore, merupakan kota perkebunan dan kota kuno yang memiliki monumen bersejarah, termasuk contoh-contoh hasil arsitek Indo-Muslim yang indah. Lahore merupakan pusat akademi dan budaya Pakistan. Universitas tertua, sejumlah Sekolah Tinggi dan Institut yang menyiapkan semua fasilitas bagi kemajuan seni dan pengetahuan, ada di Lahore ini. Saat ini, Lahore telah berkembang menjadi kota dengan munculnya banyak kota satelit yang mengitarinya.

Rawalpindi, terletak 171 mil arah barat daya Pakistan, memiliki iklim yang serupa dengan Lahore. Sedang Islamabad yang menjadi ibu kota baru bagi Pakistan sekarang, terletak sekitar 10 mil dari Rawalpindi.

Kebijakan pendidikan. Sejak awal kemerdekaannya pada 1947, Pakistan menekankan pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Itu disebabkan karena Pakistan adalah negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dan Hadis dalam kehidupan modern, termasuk bidang pendidikan. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan yang dikembangkan dijiwai dengan semangat Islam, *ukhuwah Islamiyah*, keadilan sosial dan toleransi. Pada 1951, dalam konferensi pendidikan nasional, Pakistan berusaha untuk memodernisir sistem pendidikan yang ada dalam bentuk pendidikan terpadu dan komprehensif. Presiden Pakistan Moh.

Ayub Khan, pada 1959, dalam pengarahannya di depan Komisi Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

“Our educational system must play a fundamental part in the preservation of the ideals which led to the creation of Pakistan, and strengten the concept of it as a unified nation. The desire for the homeland for Muslims on the subcontinent arose out of their wish to be in a position to govern themselves according to their own set of values. In other words, our country arose from the striving to preserve the Islamic way of life ...”.

Karakter ideologi Pakistan yang khas berdasarkan Islam mewujudkan sistem pendidikan yang utuh, dan penting bagi warga Muslim. Pendidikan agama wajib bagi semua pelajar Muslim untuk semua tingkat. Kebijakan pendidikan integratif dan komprehensif yang ditempuh oleh pemerintah Pakistan, sebagaimana disebut di atas, terwujud dengan penciptaan sistem pendidikan nasional yang terpadu yakni menjembatani dua sistem pendidikan yang telah berjalan lama, sistem pendidikan tradisional dan keagamaan dan sistem pendidikan modern dan ilmiah. Bagi pelajar yang masuk ke *maktab*, *madrrasah* atau *Dar al-Ulum*, yang merupakan bentuk institusi tradisional-keagamaan, akan disubsidi sebagaimana hal itu juga diberikan kepada institusi pendidikan modern. Persiapan untuk memperkenalkan kurikulum umum kepada pelajar yang berasal dari dua aliran ini, sekarang sudah berjalan baik. Akibat kebijakan tersebut adalah munculnya mobilitas horizontal dan vertikal antara lembaga tradisional dan modern.

Pemerintah Pakistan menetapkan kebijakan *non co-education*, sebab *co-education* dipandang sebagai bertentangan dengan konsep Islam. Namun demikian, pendidikan untuk wanita secara modern juga diberikan. Didirikannya lembaga *The Pakistan Girl Guides Association* (PGGA) sejak kemerdekaan Pakistan pada 1947, menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan nasib pendidikan bagi kaum perempuan. Lembaga ini dibentuk sebagai proyek peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi kaum wanita. Lalu, pada April 1981, setelah melalui persetujuan Kabinet, dibangunlah berbagai kampus khusus bagi kaum wanita yang lokasinya terletak di Lahore dan Karachi. Akan tetapi, berdasarkan indikator pendidikan yang ada, Pakistan tertinggal di belakang dari negara-negara tetangganya di Asia Selatan. Pakistan masih menghadapi rerata *melek huruf* terendah, paling rendah partisipasi kaum perempuannya dalam pendidikan, dan sebaliknya, untuk jenjang Sekolah Dasar (*Primary School*), kaum perempuan mengalami angka rerata *drop out* tertinggi. Akibatnya, pendaftaran kaum perempuan untuk pendidikan jenjang selanjutnya, yakni Pendidikan Menengah (*Tertiary Education*), juga terendah.

Upaya meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan juga dilakukan oleh kalangan swasta dan *Non-Gevermental Organization* (NGO atau LSM). Di Pakistan, sekolah swasta bertebaran dimana-mana, jumlahnya jauh melebihi sekolah-sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Sementara LSM yang khusus

bergerak bagi pengembangan lingkungan, termasuk kemajuan pendidikan kaum perempuan yang tinggal di pedesaan, adalah PIEDAR (*Pakistan Institute for Environment Development Action Research*), sebuah LSM pimpinan Syed Ayub Qutub. Sejak kemunculan PIEDAR pada 1994, sekitar 1400 gadis telah ikut serta dalam program pengajaran baca-tulis Bahasa Urdu dan Inggris, serta belajar melakukan perhitungan matematika dasar secara langsung tanpa alat bantu.

Sampai sesudah perang, sistem pendidikan di Pakistan mengikuti pola pendidikan sebelumnya, yakni penerapan atas undang-undang pendidikan *Hunter Commission 1882-1884; Lord Curzens University Act (1904), Government of India Resolution (1913)*, dan *Calcuta University Commission Report (1919)*. Akan tetapi setelah merdeka pada 1947, melalui konferensi para pemuka pendidikan dengan pihak instansi pemerintah, dihasilkan Komisi Ahli Pendidikan Rendah dan Menengah dengan menetapkan ideologi pendidikan sebagai berikut:

1. *Education should be based on the Islamic conception of universal brotherhood of man, social democracy and social justice.*
2. *It should be compulsory for students to learn the fundamental principles to their religion.*
3. *There should be proper integration of spiritual, social and vocational elements in education.*

Sistem pendidikan nasional Pakistan dibentuk berdasarkan Islam. Setiap kebijakan pendidikannya selalu menekankan bahwa sistem pendidikan Islam dan studi keislaman (*Islamiyat, Islamic Studies*) dijadikan sebagai pelajaran wajib bagi semua pelajar Muslim, dari tingkat rendah, menengah pertama, menengah atas dan perguruan tinggi. Di perguruan tinggi, *Islamiyat* ini bertujuan untuk mendidik mahasiswa memahami Islam secara rasional. Secara lengkap tujuan *Islamiyat* dijabarkan sebagai berikut:

1. *To give an understanding on the basic principles of Islam.*
2. *To inculcate faith in and reverence for God, the Qur'an and the Prophet.*
3. *To inculcate respect for other Prophet and the revealed books.*
4. *To emphasize the Islamic conception of dignity of man, equity and universal brotherhood.*
5. *To inspire the students to achieve high standard of individual and social virtues and to live a good life, clean in thought and correct in action.*
6. *To inculcate Islamic virtues like truthfulness, justice, tolerance, forgiveness, mercy, honesty, readiness to enforce the right and resist the wrong, simplicity, self-sacrifice, social service and research for knowledge.*
7. *To bring out clearly the Islamic criterion of excellence as distinct from birth, wealth, ect.*
8. *To emphasize the importance of practical goodness in Islam in preference to dogma and superstitions.*
9. *To present Islam as a progressive social system and a universal code of morality which can meet the demands of all times.*

Dalam mencapai tujuan di atas, tenaga pengajar *Islamiyat* dipersiapkan memiliki pandangan objektif dan kemampuan menguasai metode ilmiah, baik kealaman maupun sosial, lalu menerapkannya dengan interpretasi Islam. Diharapkan, tenaga pengajar selain menguasai ajaran Islam, juga mendalami paling tidak satu cabang pengetahuan modern dari ilmu-ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, psikologi, filsafat atau politik, serta ilmu alam atau sains modern. Tujuan demikian, meskipun nampak sebagai bentuk ideal yang tidak selamanya terwujud, patut dihargai sebagai sebuah *ultimate goals* atau cita-cita, dan untuk mencapainya tidak semua pihak menerima rumusan di atas. *Ulama* yang mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya muncul sebagai tantangan dari model pendidikan tersebut.

Tantangan lain yang muncul dari kalangan *ulama* ini adalah modernisasi pendidikan, termasuk masalah *co-education*. Seperti diketahui, Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim, yang diangkat sebagai direktur Institut Penelitian Islam (*Islamic Research Institute*), pada 1962, harus mundur dari jabatannya karena demonstrasi terhadapnya. Gagasan modernisasinya menyebabkan kontroversi besar di Pakistan, dan sikap berbalik terhadap institusi tersebut juga berkembang dalam pikiran publik. Meskipun, sementara kalangan lainnya berapresiasi terhadap kontribusi (*Islamic Research Institute*) selama di bawah kepemimpinan Fazlur Rahman. Mereka menemukan bahwa institut tersebut berupaya menggunakan pengetahuan alam dan sosial dalam kerjanya. Sejak Fazlur Rahman, karakter institut tersebut telah berubah.

Sistem pendidikan. Sistem perjenjangan pendidikan di Pakistan yang ada sekarang ini menganut hasil Keputusan Komisi Pendidikan Nasional tahun 1959, yaitu: pendidikan dasar (*Primary Education*), usia 6 sampai 11 tahun yang terdiri dari tingkat I sampai V. Jadi, pendidikan dasar ditempuh selama lima tahun. Kemudian, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (*Junior Secondary*), usia 12-15 tahun yang terdiri dari tingkat VI sampai VIII. Sedangkan Sekolah Menengah Tingkat Atas (*Secondary High School*), usia 16-18 tahun terdiri dari tingkat IX dan X. Jenjang ini memiliki tiga jenis sekolah: Sekolah Umum (*general*) sebagai persiapan pendidikan di perguruan tinggi, Sekolah Kejuruan (*vocational*) dan Sekolah Teknik, yang seperti halnya di Indonesia berorientasi kerja. Pendidikan tingkat XI dan seterusnya merupakan jenjang perguruan tinggi. Sebelum masuk ke perguruan tinggi, terlebih dahulu memalui pendidikan Sekolah Persiapan selama dua tahun (*Higher Secondary* atau *Intermediate College*), yaitu pendidikan tingkat XI dan XII. Khusus untuk perguruan tinggi yang bersifat kejuruan, Sekolah persiapan ini tidak perlu ditempuh. Adapun tingkat *Bachelor of Arts* (B.A.) dicapai setelah tingkat pendidikan ke XIII sampai XV. Tingkat selanjutnya, yakni ke XVI dan XVII, adalah jenjang Magister, sedang jenjang Doktor atau Ph.D. di atas tingkat XVII.

Agar mudah dipahami, berikut ini disajikan tabel sistem perjenjangan pendidikan di Pakistan:

TABEL 6
SISTEM PERJENJANGAN PENDIDIKAN DI PAKISTAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TINGKAT	WAKTU
1	Primary Education	I - V	5 tahun
2	Yunior Secondary	VI - VIII	3 tahun
3	Secondary High School	IX - X	2 tahun
4	Higher Secondary atau Intermideate College	XI - XII	2 tahun
5	University		
	a. Bachelor of Arts	XIII – XIV	3 tahun
	b. Magister (S-2)	XVI – XVII	2 tahun
	c. Ph.D (S-3)	XVII ke atas	

Khusus untuk jenjang perguruan tinggi ini, sejak pemisahannya dengan India pada 1947, Pakistan hanya memiliki satu universitas saja, yakni Universitas Punjab di Lahore. Mata kuliah agama diberikan sebagai mata kuliah dasar umum. Setelah berdirinya Pakistan, kajian tentang keislaman meningkat pesat. Universitas Punjab mendirikan sebuah Departemen Islamiyat pada 1950. Selain itu berdiri berbagai perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Sind yang membuka Fakultas Sejarah dan Kebudayaan Islam sejak awal tahun 1950-an. Pada 1963, sebuah lembaga pendidikan tinggi didirikan lagi, yang semula berupa *madrasah* lalu diubah menjadi *Jami'ah Abbasiyah*. Dalam hal kurikulumnya, lembaga ini dipengaruhi oleh Universitas Al-Azhar, Mesir. Kajian tradisional-keagamaannya dimasukkan ilmu ekonomi, sejarah, geografi, statistik dan filsafat. Untuk kepentingan *recruitment* pegawai pemerintah, ijazah dari lembaga ini diakui sama dengan sekolah pemerintah. Baru-baru ini Pemerintah Pakistan mendirikan satu Akademi *Jinnah Public School and College* (JPSC) di Islamabad, yang bergerak di bidang pelatihan dan sekolah menengah atas. Pada 1980, di Islamabad didirikan Universitas Islam Internasional yang berupaya menyatukan dua sistem pendidikan keagamaan dan umum (sekuler). Sangat dimungkinkan bahwa ide munculnya Universitas Islam Internasional yang berciri *integrated curriculum* ini diilhami oleh hasil Konferensi Pertama se-Dunia tentang Pendidikan Islam di Makkah pada 1977, yang salah satu rekomendasinya menyangkut masalah Islamisasi Ilmu. Gerakan pendirian Universitas Islam yang sama juga dilakukan oleh Malaysia, segera setelah Konferensi Makkah tersebut, yakni International Islamic University (IIU) Malaysia pada 1983.

Profile

International Islamic University (IIU), Islamabad. Berdiri sejak 1980. Untuk jenjang *Sarjana*, IIU Islamabad membuka program ekonomi (BSc.) yang dikhususkan bagi lelaki, sedangkan program *Shariah & Law* (LL.B.), Arabic (B.A.), dan *Ushuluddin* atau *Islamic Studies* (B.A.) dengan jurusan: *Tafseer & Hadith, Aqidah & Comparative Religions, Islamic Dawah & Civilization*, bisa diikuti baik oleh lelaki maupun perempuan. Untuk jenjang *Magister*, IIU Islamabad membuka program *computer science, economy, Arabic* (khusus untuk lelaki), sedang *program Shariah & Law*, dan *Ushuluddin*, untuk lelaki maupun perempuan. Dan, untuk jenjang Doktor (Ph.D), dibuka program *Economic, Arabic, Shariah*, dan *Ushuluddin*. Semuanya khusus untuk lelaki. Para pendaftar diseleksi melalui test tertulis dan wawancara. Peserta luar negeri mengambil formulir dari Kedutaan setempat.

Suatu gerakan pembaharuan pendidikan di Pakistan, mewakili sektor swasta yang dalam perkembangannya kemudian mempengaruhi dunia Islam lainnya adalah *Jamaat Islami* yang didirikan oleh Sayid Abul A'la al-Maududi pada 2 Sya'ban 1360 H atau 26 Agustus 1941 M. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh gerakan ini diterbitkan dalam 22 bahasa internasional, seperti Bahasa Urdu, Arab, Persia, Turki, Inggris, Prancis, Jerman, Swahili, India, Bengal, Tamil, dan sebagian telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. *Jamaat Islami* mendasarkan gerakannya pada Al-Qur'an Hadis dan pola hidup Islami sebagaimana telah diamalkan pada masa Nabi saw dan *khulafa' al-rasyidin*, sedemikian hingga mampu mempengaruhi secara demokratis, damai dan konstitusional, negara Pakistan dalam menerapkan nilai-nilai Islam. *Jamaat Islami* juga bergerak di bidang riset, yang ditandai dengan pembentukan berbagai institut, yaitu: *Institute of Politics Studies* (Islamabad), *Islamic Research Academy* (Lahore dan Karachi), dan *Institute of Religion Studies* (Peshawar).

Jamaat Islami, dengan demikian, tergolong gerakan pembaharu, namun berkarakter *puritan*. Masyarakat ideal dalam pandangan gerakan ini adalah sebagaimana dicontohkan pada masa Nabi saw, *khulafa' rasyidin* dan kejayaan Islam. Oleh karena itu, ciri *back to basic* yang berarti kembali kepada Al-Qu'an dan Hadis, mewarnai gerakan ini. Untuk memodernisir Umat Islam saat ini, sebagai konsekuensi dari karakter *puritan* dan *back to Qur'an and Sunnah*, gerakan ini menawarkan pola *salaf*.

Selain *Jamaat Islami*, di Pakistan terdapat beberapa gerakan kebangkitan agama lainnya, seperti *Jamaat Tabligh* oleh Maulana Muhammad Ilyas, gerakan sufi-reformasi dari Maulana Asyraf Ali Tsanvi, gerakan *Khilafat* dari Maulana Muhammad Ali Jauhar, dan gerakan *Khaksar* dari Allamah Inayatullah al-Masyriqi. Dengan karakternya masing-masing, gerakan keagamaan tersebut mampu menciptakan komunitas Muslim dengan berbagai bentuk lembaga pendidikannya.

Diperkirakan lebih dari 2000 madrasah tingkat menengah dan tinggi dengan jumlah murid sekitar 316.000 murid ada di negara ini. Madrasah memainkan peranan penting karena mampu melestarikan nilai ortodoks Islam, melatih banyak generasi *ulama* dan fungsionaris Islam. Madrasah di Pakistan mengajarkan kurikulum yang disebut *Dars-i-nizhami*, sebuah mata pelajaran standar bagi semua madrasah Sunni di India, Pakistan dan Bangla Desh. Dalam kurikulum tersebut terdapat dua puluh mata pelajaran, yang secara luas terbagi atas ilmu-ilmu yang diwahyukan (*al-ulum an-naqliyah*) dan ilmu-ilmu rasional (*al-ulum al-aqliyah*). Kebanyakan madrasah di Pakistan adalah swasta dan didukung oleh sumbangan agama (*waqf*) atau *amal jariyah* dari orang beriman. Otonomi finansial Masjid dan madrasah telah lama menjadi sumber besar bagi basis kekuasaan politik independen milik *ulama* Pakistan. Hal ini pula yang memberi andil dalam menggagalkan upaya otoritas negara untuk memperkenalkan reformasi dalam sistem madrasah dan untuk menjembatani jurang antara sistem tradisional pendidikan Islam dengan sistem sekuler modern.

Masjid, merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam di Pakistan, selain madrasah. Jumlah Masjid jauh melebihi total madrasah. Survei pemerintah memperkirakan terdapat lebih dari 200.000 Masjid dengan berbagai ukurannya, yang memiliki staf sekitar 350.000 fungsionaris agama, berupa *imam*, *khatib* dan *khadim*. Tidak seperti kebanyakan Negara Islam Timur Tengah, jaringan Masjid dan madrasah di Pakistan beroperasi di luar kendali negara, serta memiliki otonomi besar, meskipun belakangan ini negara berupaya melemahkan kemampuan mereka. Di banyak kota yang tidak mempunyai balai rakyat atau fasilitas sipil, Masjid bukan hanya difungsikan sebagai tempat beribadah melainkan pula sebagai forum diskusi masalah umum. Suatu kota kecil di Punjab, Sind atau Provinsi perbatasan barat laut biasanya memiliki setidaknya empat atau lima Masjid besar (*Jami'*) dan setidaknya satu Masjid kecil (*mushallah*) untuk tiap lingkungan.

Baik Pemerintah Pakistan maupun Indonesia, keduanya secara aktif melakukan intervensi terhadap kehidupan keagamaan, keduanya membantu menghasilkan munculnya komunitas keagamaan, dan mendukung berkembangnya lembaga pendidikan Islam. Namun demikian, dalam kasus madrasah dan Masjid, di Pakistan berjalan secara otonom, bahkan mampu mempengaruhi dimensi sosio-politik pemerintah. Berbeda dengan itu, madrasah

di Indonesia meskipun dilegitimasi oleh pemerintah, namun kurikulum pendidikannya mengikuti kebijakan pemerintah.

Daftar Pustaka

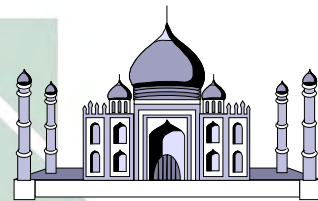
- Djainuri, Achmad. *Pendidikan dan Modernisasi Dunia Islam*. Surabaya: al-Ikhlās, 2001.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*. Jilid 4. Bandung: Mizan, 2001.
- Faruki, Kemal A. "Pakistan: Islamic Government and Society" dalam John L. Esposito (Ed.). *Islam in Asia: Religion, Politics, & Society*. New York: Oxford University Press, 1987.
- International Islamic University, Islamabad, 1994-1995 Session.
- K. Abdoelrachman. *Knowing Countries*. Jakarta: Djambatan, 1976.
- Mehdi, Rubya. *The Islamization of Law in Pakistan*. London: Curzon Press, Ltd., 1994.
- Muhammad, Mian Tufail. "The Jamaat-e-Islami of Pakistan" dalam *The Journal of Muslim World League*. Mecca: Rabitah al-Alam al-Islami, Vol.7 Dzulhijjah 1399 H/November 1979.
- Tadjab. *Perbandingan Pendidikan: Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Moderen, Islam dan Nasional*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Walbridge, Linda. "Inter-communal Violence in Pakistan and Indonesia" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 3/1999.
- Walnes, David. "Non-Formal Education in Pakistan: A Child's Approach" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 6/2000.
- Embree, Ainslie T. (Ed.). *Encyclopedia of Asian History*. Vol.3. London: Collier macmillan Publishers, t.t.

BAB III

BEBERAPA NEGARA LAIN

□ INDIA

INDIA memiliki luas tanah 3.287.263 km² dengan jumlah penduduk lebih dari 844 juta jiwa (1991). Negara ini tercatat sebagai negara terluas ke-7, dan terpadat ke-2 di dunia, setelah China. Mayoritas penduduknya beragama Hindu (83 %), Islam (12 %), dan sisanya Kristen, Sikhs dan Jains. Penduduk Muslim banyak yang tinggal di barat laut dan timur laut India, dimana sekarang, wilayah ini telah menjadi Negara Pakistan. Sebagian dari penduduk India ini berasal dari imigran, misalnya dari Afrika, yang kebanyakan tinggal di Gujarat, tempat dimana banyak Muslimnya. Sebagai pelengkap, berikut ini disajikan pertumbuhan populasi penduduk India per sepuluh tahun mulai 1901 sampai 1991.



TABEL 7: Perkembangan Populasi Penduduk India (1901-1991)

TAHUN	DESA	KOTA	TOTAL	RERATA
1901	212544454	25851873	238396327	-
1911	226151757	25941633	252093390	0.56
1921	223235043	28086170	251321213	(-)0.03
1931	245521249	33455989	278977238	1.05
1941	274507283	44153297	318660580	1.34
1951	298644381	62443709	361088090	1.26
1961	360298168	78936603	439234771	1.98
1971	439045675	109113977	548159652	2.24
1981	523866550	159462547	683329097	2.23
1991	628691676	217611012	846302688	2.16

Sumber: Census of India 1991.

Ekonomi India mengandalkan sektor pertanian dan peternakan, mencapai 34 % dari pendapatan negara. Sektor pertanian sendiri mampu menyerap 69 % tenaga kerja yang ada. Umumnya ekonomi India dipengaruhi oleh perubahan *Land Reform*, revolusi hijau, industrialisasi dan migrasi. Industri perfilman India tergolong besar dan sanggup merekrut banyak tenaga kerja. *Bollywood* merupakan contoh kongkritnya, di sana tiap kali alur cerita dibuat selalu diiringi dengan nyanyi dan tarian dalam bentuk massal, dan ternyata hal tersebut dapat menjaring penggemar terutama di kalangan Asia. Ibarat menyelam sambil meneguk air, dengan model alur cerita dalam film yang diiringi dengan nyanyi dan tarian tersebut, India selain mendatangkan *profit* juga melestarikan seni dan budaya lokal. Kain *sari* yang acap kali dikenakan oleh artis film *Bollywood* telah lama populer di Indonesia, kainnya halus dengan berbagai warna cemerlang, digemari banyak orang.

Selain itu film India mengandung misi pembauran budaya dan agama. Dari 183 biografi bintang film India, 50 di antaranya atau 27 % adalah Muslim, padahal, sebagaimana disebut di atas, kaum Muslim hanya menempati 12 % dari penduduk India. Alur ceritanya juga sering berbentuk roman percintaan yang isinya perkawinan silang antar agama. Satu hal yang cukup berbeda dengan perfilman di Indonesia, bintang India umumnya berpendidikan di universitas, meskipun jarang ada yang mengambil kajian bidang seperti itu. Bahkan di antaranya berasal dari universitas luar negeri. Shah Rukh Khan, misalnya, menempuh kuliah komunikasi massa di Jamiyya Milliyya Islamiyah di Delhi, Saif Ali Khan dari Oxford University, sedang Feroz Khan memperoleh gelar manajemen bisnis dari universitas di Amerika.

Pendapatan per Kapita India adalah 200 US \$ per tahun. Dari sensus 1987/1988 diketahui bahwa 30 % penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial cukup menyolok dalam hal ekonomi dan distribusi kesehatan. Bisa dimengerti, populasi penduduk yang amat besar tersebut, disamping sebagai *human capital*, juga merupakan beban negara. Terlebih bila diingat bahwa selama 150 tahun India berada dalam penjajahan Inggris, dan baru pada 1947 mengalami kemerdekaan.

Kondisi pendidikan. perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian, nutrisi, obat-obatan dan industri diakui oleh para pendidik India sebagai harus memiliki hubungan antara pendidikan dengan modernisasi. Ilmu-ilmu sosial dan perilaku belum digunakan secara efektif dalam menyelesaikan persoalan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat yang berubah.

Segera setelah 1947, Jawaharlal Nehru menyatakan bahwa seluruh dasar pendidikan mestilah dirubah secara revolusioner, namun para tokoh pendidikan mengakui bahwa sampai pada 1965 tidak ada perubahan apa pun yang telah dibuat. India merdeka mencoba untuk memodernisasi secara cepat dengan menempatkan banyak sumber dan kepemimpinannya untuk diprioritaskan pada

pelayanan pembangunan ekonomi, dan sistem pendidikan diijinkan untuk berkembang tanpa kritik yang berarti. Pada awal 1960-an, mulai tampak ketidakcakapan, akan tetapi pada 1964 pemerintah mengangkat komisi pendidikan tingkat tinggi untuk memberi nasehat pada pemerintah tentang pola pendidikan nasional di seluruh jenjang dan aspeknya. Laporan komisi pendidikan ini diterbitkan pada 1966, merupakan analisa pertama tentang kondisi sistem pendidikan di India dalam hubungannya dengan tujuan pembangunan. Laporan itu sendiri bukanlah sebuah rencana atau badan hukum, melainkan dirancang untuk melayani sebagai latar belakang bagi munculnya rencana dan peraturan baru. Salah satu kontribusi yang penting dari laporan tersebut telah diterbitkan dalam bentuk statistik pendidikan. Statistik tadi menunjukkan "apa yang dihabiskan" berupa angka *drop out* dan gagal sekolah, sehingga menguatkan argumen para pendidik untuk menuntut adanya perubahan mutu pendidikan. Berdasarkan laporan, diperkirakan bahwa pada 1960, sekitar 35 % mereka yang masuk kelas 1, 56 % kelas 2, dan 66 % kelas 5, serta 31 % kelas 6 hingga 8, tidak menyelesaikan usia sekolah. Seterusnya, 55 % murid kelas 10 dan 40 % murid kelas 11 gagal dalam ujian sekolah menengahnya. Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa sekitar 15,4 % dari 40,3 % anak berusia antara 6 dan 7 tahun yang semestinya masuk kelas 1 pada tahun 1955 seharusnya sudah berada di kelas 8. Kondisi ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebijakan pemerintah dalam menangani pendidikan. India tergolong cepat dalam mengambil inisiatif pembangunan di bidang pendidikan ini. Seperti terlihat pada data statistik dalam bab pertama, dalam satu juta penduduk di India (1997), terdapat 1.250 Doktor, Mesir 400 Doktor, dan Indonesia baru 65 Doktor dalam sejuta penduduknya.

Mungkin problem politik dan pendidikan yang paling kompleks bagi India adalah problem bahasa, sebab India mengguna 16 bahasa ibu dengan ratusan dialek. Para pendukung atau "penghubung" bahasa nasional, apakah itu Hindi atau Inggris, berargumen bahwa masalahnya terletak pada konteks politik regional atau kepentingan nasional. Sebaliknya, bagi para pendidik berpikiran bahwa bahasa dalam hubungannya dengan belajar dan komunikasi dengan masyarakat, kebanyakan tidak melakukan kontak komunikasi dengan atau berupa Bahasa Inggris. Komisi pendidikan merekomendasikan penggunaan bahasa daerah untuk seluruh tahap pendidikan, penggunaan Bahasa Hindi sebagai bahasa penghubung bagi semua lapisan masyarakat, dan penggunaan Bahasa Inggris sebagai bahasa penghubung kedua bagi pendidikan yang lebih tinggi.

Kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan dan pembangunan di India telah direview di bawah kawasan tujuan pembangunan nasional dan dari waktu ke waktu selalu mendapat prioritas tersendiri. Dalam resolusi Kebijakan Pendidikan Nasional 1968, dinyatakan penekanan pada perbaikan kualitas dan

pengembangan fasilitas pendidikan yang lebih sesuai dengan rencana. Kebutuhan pendidikan bagi kaum wanita juga ditekankan. Hampir dua dekade yang lalu, Kebijakan Pendidikan Nasional (the National Policy on Education, NPE-1986) telah dirumuskan yang kemudian diperbaharui pada 1992. Kebijakan ini menyatakan kerangka menyeluruh bagi pembangunan pendidikan hingga akhir abad ke-20 dan Rencana Aksi (a Plan of Action) 1992, yang menandai wewenang khusus untuk mengorganisir, melaksanakan dan membiayai proposalnya.

Komitmen India untuk menyebarluaskan pengetahuan dan kebebasan berpikir di kalangan penduduk direfleksikan dalam kebijakan atau undang-undangnya, The Directive Principle. Pada pasal 45 dinyatakan bahwa negara berupaya untuk menyediakan pendidikan wajib secara gratis selama sepuluh tahun, dan bagi anak-anak hingga mereka mencapai usia 14 tahun. Sedang pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki ragam bahasa dan tulisan mendapatkan perlakuan khusus secara ekonomi dan pendidikan berdasarkan perlakuan istimewa, khususnya bagi kasta dan suku tertentu, mereka berada di bawah wewenang negara sebagaimana disebut dalam pasal 46.

Sejak 1976, pemerintah pusat telah menetapkan bertanggungjawab atas pembiayaan dan pengaturan standar pendidikan dasar sampai menengah, dan mengadakan koordinasi dengan program pendidikan tinggi. Pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan umum, serta perlindungan keagamaan bagi minoritas. Sistem pendidikannya dipengaruhi oleh Mahatma Gandhi yang memiliki gagasan untuk membentuk "kepribadian yang utuh, kreatif dan produktif". Departemen yang menangani masalah pendidikan adalah Departemen Pendidikan dan Kesejahteraan (1966).

Pada 1985, pemerintah memutuskan bahwa kebijakan pendidikan diambil berdasarkan ketentuan parlemen federal, sedang pemerintah hanya bertindak sebagai pelaksana. Ide ini muncul berdasarkan usul dari Departemen Pengembangan SDM. Setahun kemudian, pada 1986, atas dasar telah meningkatnya kesenjangan sosial akibat konflik Muslim-Hindu, yakni kasus *Masjid Babri* di Kashmir, yang diklaim oleh umat Hindu bahwa kaum Muslim telah mendirikan Masjid di tanah kelahiran Dewa Rama yang dianggap suci, bahkan umat Muslim dianggap telah menghancurkan sebuah kuil Hindu di atas tanah tersebut, menyulut konflik berkepanjangan. Pada awal 1990-an, intensitas perilaku anti-Muslim meningkat, dan kaum nasionalis Hindu yang berpengaruh bicara soal dendam terhadap kaum Muslim yang diduga berkelakuan historis yang buruk dan meminta kaum Muslim berbaur, atau meninggalkan India. Sebagaimana kita saksikan, akhir-akhir ini, pada 2002, konflik tersebut memanas kembali.

Kaum Muslim banyak dibayangkan seperti minoritas lain yang berperan serupa di negara lain: mereka merupakan kepentingan yang memiliki *privilege* khusus yang diberikan oleh pemerintah, yang hubungannya dengan mereka

membuktikan ketidak-bermoralan pemerintah; mereka tidak setia kepada negara India, berhubung dengan kepentingan “asing” di Pakistan, negara-negara Teluk, dan lain-lain; dan mereka tidak mau menerima nilai-nilai moralitas Hindu. Pendeknya, kaum Muslim, di mata banyak orang India sekarang ini, berarti ketidakberesan di dalam masyarakat ---suatu peran yang bukan pilihan mereka dan yang tidak dapat diterima dengan nalar.

Relevan untuk disampaikan di sini adalah asal mula gerakan pembaharuan Islam di India. Sebenarnya akar gerakan reformasi Islam di India ini bisa dilacak pada abad ke-18 dan saat merosotnya Dinasti Mughal, serta pada saat munculnya kolonialisme Inggris. Yang layak dipandang sebagai sentral ide pembaharuan ini adalah Shah Wali Allah al-Dihlawi (1703-1763) dan putranya Shah Abdul Aziz (1746-1824). Pengaruhnya dirasakan melalui berbagai gerakan mulai dari gerakan Thariqa-i-Muhammadiyah oleh Sayid Ahmed Barelwi sampai pada ulama yang mendirikan lembaga pendidikan Darul Ulum di Deoband. Sejak itu gerakan reformasi Islam ini berkembang terus menurut kondisi zamannya. Hingga abad ke-20 ini gerakan reformasi Islam di India terbentuk dalam tiga gerakan utama, yaitu: *pertama*, Jam’iyatul Ulama-i Hind yang berdiri pada 1921 sebagai perhimpunan ulama di antara mereka adalah Maulana Husain Ahmad Madani (1897-1959) dan lain-lain dari pesantren di Deoband. Mereka berpaling dari sejarah panjang apolitisme mereka dan masuk konres untuk tujuan yang sama: mengusir Inggris dari India. *Kedua*, Jama’ah Tablighi, merupakan salah satu gerakan pada 1920-an yang berfokus pada tabligh, suatu neologisme yang membawa pesan Islam dengan tujuan memberi bimbingan atau mengajak orang masuk Islam. Kebanyakan gerakan sejenis ini ternyata berumur pendek. Akan tetapi, satu gerakan ---dipimpin oleh Maulana Muhammad Ilyas, yang berhubungan dengan Deobandi--- malah tumbuh subur. Sekarang, gerakan ini merupakan salah satu gerakan Muslim yang paling berpengaruh di anak benua ini dan merupakan gerakan diaspora. *Ketiga*, Jama’at-i Islami yang didirikan oleh Maulana Abu Al-A’la al-Maududi, memperlebar lingkup kepemimpinan religius dengan cara lain. Maududi mengajarkan gaya Islam yang skriptualis-nonsufi, yang secara eksplisit menawarkan Islam sebagai sebuah “sistem”, “jalan hidup yang sempurna”, yang kontras dengan Barat yang dekaden-materialis yang dilambangkan terutama sekali oleh kehidupan wanita yang tak teratur. Jama’at Islami berdiri pada 1941 sebagai sebuah kelompok inti yang sangat selektif yang dapat mengubah masyarakat. Gerakan Muslim bercorak sufistik hingga saat ini juga masih lazim dijumpai di India.

Berkaitan dengan konflik etnis dan akibat perbedaan agama ini, pemerintah memberlakukan kebijakan yang diharapkan dapat meredakan ketegangan kedua potensi konflik tersebut. Jauh sebelumnya, pemerintah telah mengambil kebijakan pendidikan antisipatif terhadap isu di atas, antara lain dengan jalan:

1. Membuka program penyetaraan pendidikan bagi Sekolah Dasar dan melakukan pemberantasan buta huruf. Sensus 1991 mengindikasikan bahwa tingkat *illiterate* telah mencapai 52,1 % yang meliputi anak berusia 7 tahun ke atas, dan 23 % di antaranya adalah wanita.
2. mengenalkan nilai warisan budaya India, persamaan derajat manusia, demokrasi, sekularisme, kesetaraan jender, pengenalan program keluarga kecil bahagia dan menanamkan pola pikir ilmiah.
3. Menyiapkan program pendidikan bagi siswa yang memiliki bakat khusus.
4. Pembaharuan kebijaksanaan pendidikan yang rutin dilakukan setiap jangka waktu 5 tahun sekali.

Kemudian, pada 1990, India membentuk Komite Modifikasi Kecil yang bekerja selama dua tahun untuk merevisi program jangka panjang dalam bidang pendidikan, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan desentralisasi perencanaan pendidikan.
2. Melakukan reformasi organisasi.
3. Mengembangkan pendidikan non-formal dan sistem pendidikan terbuka.
4. Mengarahkan hasil pendidikan bagi kebutuhan industri dan sektor pengembangan pembangunan.
5. Melakukan mobilisasi komunitas SDM dan alam serta perbaikan sistem sosial.
6. Target minimal diarahkan pada pendidikan sekolah dasar dan pemberantasan buta huruf.

Mengenai tujuan pendidikannya, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan umum dibuat atas pertimbangan politik, sosial, dan budaya bangsa. Program pendidikan nasional India diarahkan sebagai berikut:

1. *In the development of a vital democracy.*
2. *In the promotion of national integration.*
3. *In promoting faith in and respect for secularism.*
4. *In the advancement of science and technology.*
5. *In economic growth.*
6. *In the free and full development of the individual personality.*
7. *In the modernization of the social order.*
8. *In bringing about a cultural renaissance.*
9. *In continuing pursuit for excellence.*
10. *In developing better international understanding.*

Pembangunan pendidikan dihubungkan dengan program nasional pada rencana pembangunan. Komisi Perencanaan Nasional mulanya sepakat memprioritaskan pembangunan pertanian selama Repelita pertama (1951-1956), sedang bidang industri dilaksanakan pada Repelita kedua (1956-1961), pelayanan sosial seperti kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan dilaksanakan pada Repelita ketiga (1961-1966). Meskipun begitu, hal ini tampak terlalu sederhana lalu skema prioritasnya segera dimodifikasi, mengingat seluruh faktor

yang mempengaruhi pembangunan terbukti sama pentingnya, akibatnya, pembangunan pendidikan telah memperoleh prioritas sejak 1951. Karena kurangnya dana pada rencana pertama, pusat perencanaan pendidikan menyediakan pengembangan kepemimpinan lebih dahulu ketimbang bantuan dana. Sedikit sekali perluasan pendidikan yang menjadi tugas pemerintah yang berhasil dicapai sampai pada Repelita kedua dan ketiga. Umumnya, penekanan pembangunan pendidikan bergeser dari pengurangan buta huruf ke arah pembangunan dan perbaikan pendidikan menengah dan vokasional, serta untuk mendirikan agen-agen yang memfasilitasi masalah terkait. Repelita keempat berbeda dari sebelumnya dalam peningkatan anggaran dana (lebih besar 20 % dari tiga Repelita pertama yang dijumlah bersama) dan berbeda dalam penekannya pada pelatihan guru, pendidikan teknik, penelitian, dan pelatihan kepemimpinan. Kebutuhan perbaikan mutu lebih diperlukan dari pada upaya perluasan selanjutnya, karena hal itu menjadi perhatian utama bagi para pendidik, namun target rencananya diformulasikan dan dievaluasi sesuai dengan pendaftaran siswa yang masuk. Mereaksi atas warisan kolonial dengan peluang pendidikan yang terbatas, India mendesak perlunya sistem nasional tentang pendidikan universal.

Sistem pendidikan. Komisi pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10-2-3 tahun usia sekolah. Tingkat awal, 10 tahun sebagai pendidikan dasar terbagi dalam tiga jenjang, yaitu: *primary* (5 tahun), *upper primary* (3 tahun), dan *secondary* (2 tahun). Jenjang berikutnya ditempuh selama 2 tahun, sebagai persiapan memasuki pendidikan tinggi. Untuk pendidikan kejuruan, jurusan teknik dan bisnis sudah dimulai sejak *secondary school*.

Struktur pendidikan sekolah yang seragam tersebut, yakni sistem 10-2-3 tahun, telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India (Union Territory, UT). Meskipun begitu, di lingkungan pemerintah dan teritori India, masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar (Primary), menengah (Upper Primary), dan atas (High and Higher Secondary School) yang membolehkan kelas I mengikuti ujian umum, pengajaran Bahasa Inggris dan Hindi, beberapa hari kerja dalam setahun, sesi akademik, masa liburan, struktur biaya, pendidikan wajib dan lain sebagainya. Bila dijabarkan dalam tingkat usia sekolah akan nampak sebagai berikut:

1. Tingkat Dasar (Primary Stage) yang meliputi kelas I sampai V, yakni 5 tahun masa belajar. Ini dilaksanakan di 20 negara bagian dan teritori India, yaitu: Andra Pradesh, Arunachal Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Madya Pradesh, Manipur, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar Island, Chandigarh, Delhi dan Karaikal dan wilayah Pondicherry, Yanam. Sedangkan Tingkat Dasar yang hanya terdiri dari kelas I sampai IV diselenggarakan di Assam, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharastra,

- Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep dan Mahe, wilayah Pondicherry.
2. Pendidikan Tingkat Menengah (Middle Stage) meliputi kelas VI sampai VIII yang diselenggarakan di 18 negara bagian dan teritori India, yaitu: Arunachal Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar Island, Chandigarh, Delhi dan Karaikal dan wilayah Pondicherry. Sedangkan kelas V sampai VII diselenggarakan di Assam, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep dan Mahe, wilayah Pondicherry. Sementara kelas VI-VII diselenggarakan di Andhra Pradesh, Orissa dan Yanam, wilayah Pondicherry, dan di Nagaland diselenggarakan kelas V-VIII.
 3. Pendidikan Menengah Atas (Secondary Stage) meliputi kelas IX sampai X. Kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian dan teritori India, yakni: Arunachal Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Manipur, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar Island, Chandigarh, Delhi dan Karaikal dan wilayah Pondicherry. Sekolah Menengah Atas meliputi kelas VIII sampai X diselenggarakan di 13 negara bagian dan teritori, yaitu: Andhra Pradesh, Assam, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Meghalaya, Mizoram, Orissa, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep dan Mahe & Yanam wilayah Pondicherry. Walaupun begitu, Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari kelas XI sampai XII (pola 10-2 tahun) bisa diperoleh di seluruh negara bagian dan teritori India meskipun kelas-kelas ini berkaitan dengan universitas atau college.

Pendidikan kejuruan, baik jurusan teknik maupun bisnis, menerapkan pola pendidikan Gandhi, yaitu pembentukan "manusia berkepribadian yang utuh, kreatif dan produktif". Pada 1960, kemajuan minat siswa pada pendidikan kejuruan sangat kecil. Hingga 1992, siswa yang mengikuti pendidikan dalam bidang ini hanya 6 %. Tapi, pada 1995 terjadi lonjakan signifikan, yaitu sebesar 25 % dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil pendidikan kejuruan ini.

Pendidikan non-formal dilakukan dengan dibentuknya lembaga pendidikan yang bersifat terbuka bagi semua siswa, tidak terikat dengan proses pembelajaran secara langsung dan beban biaya yang tinggi.

Berkenaan dengan pendidikan Islam, strukturnya dilakukan berjenjang, pada tingkat rendah (*tahtania*) dilaksanakan selama 3 tahun, tingkat menengah (*watsania*) selama 4 tahun, dan tingkat atas (*fauqania*) selama 2 tahun. Kemudian, jenjang *maulvi* selama 2 tahun, *'alim* selama 2 tahun, dan *fadlil* selama 2 tahun. Bagan berikut ini mempermudah pemahaman kita lebih lanjut terhadap sistem perjenjangan pendidikan di India. Salah satu madrasah yang dikenal dengan

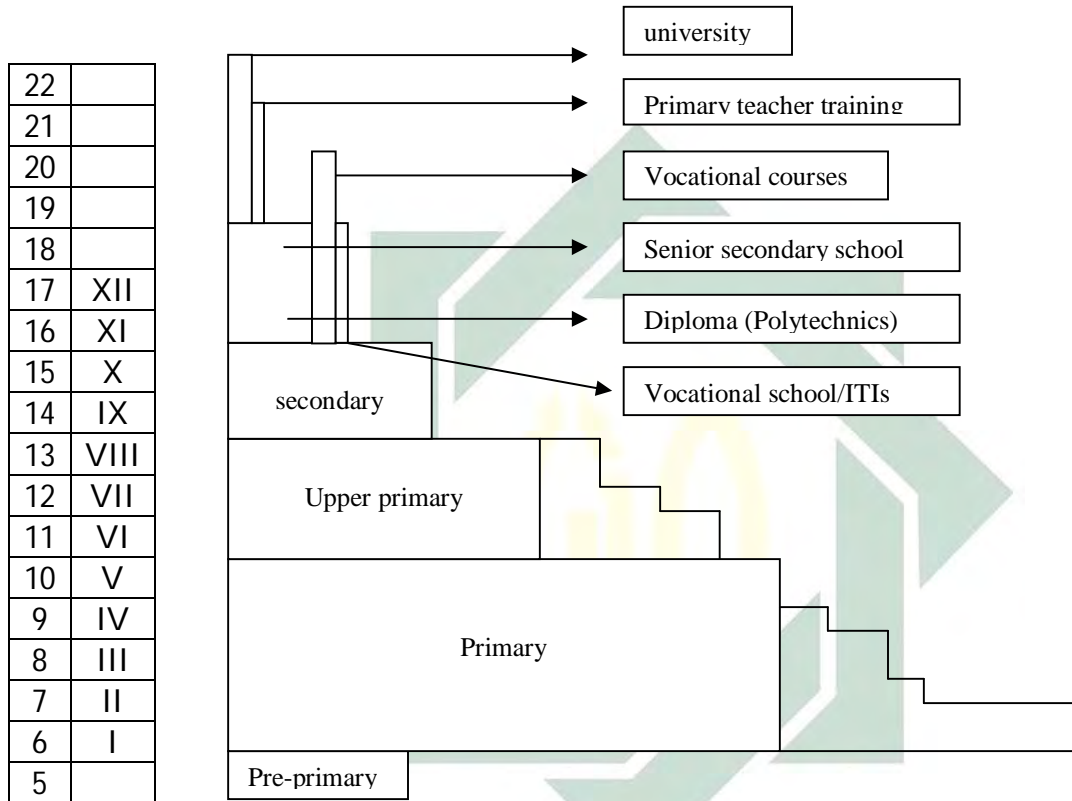
Jamiatul Banaat yang terletak di Hyderabad, bagian selatan India, memberikan pendidikan khusus untuk kaum putri dengan materi pelajaran Bahasa Arab, sastra Arab, Al-Qur'an, Tafsir, Hadis dan fiqh, di samping memberikan pelajaran pengetahuan kerumahtanggaan seperti perawatan anak, menjahit dan memasak.

Profile

Aligarh Muslim University. Didirikan pada 1920 sebagai universitas pusat residen secara penuh. Universitas ini memiliki total 92 jurusan, lembaga, dan pusat yang tergabung dalam 11 fakultas. Universitas ini juga memiliki 4 rumah sakit, 6 sekolah tinggi (termasuk Pengobatan, Kedokteran Gigi, dan Sekolah Tinggi Teknik Sipil), 2 politeknik dan 8 sekolah. Universitas ini menawarkan enam kuliah diploma khususnya bagi kalangan perempuan. Sejumlah 18.562 mahasiswa (termasuk sekolah perpanjangannya) terdaftar di perguruan tinggi ini. Potensi staf pengajar perguruan tinggi ini berjumlah 1.457 pengajar dan staf non-pengajar sejumlah 5.899 orang.

Jamia Milia Islamia, Jamia Nagar, New Delhi. Universitas ini berfungsi sebagai Universitas Kehormatan sejak 1962, dan memperoleh status sebagai Universitas Pusat sejak 1988 melalui keputusan parlemen. Universitas ini melaksanakan pendidikan mulai dari tingkat kanak-kanak sampai pascasarjana dan jenjang Doktorat. Di sini terdapat 6 fakultas dan 8 pusat beserta 5 sekolah. Pusat Penelitian Komunikasi Massa A.J. Kidwai (A.J. Kidwai Mass Communication Research Center, AJKMCR) menyiapkan pelatihan pada jenjang pascasarjana dalam bidang komunikasi massa yang menghasilkan bahan pendidikan untuk berbagai aspek pendidikan yang beragam bagi Program UGC dan INSAT. Penerimaan mahasiswa dilakukan atas dasar tes masuk.

BAGAN 2 SISTEM PENDIDIKAN DI INDIA



Pendidikan di India dibentuk oleh adanya tensi antara kelembaman tradisi ---yakni kewenangan *guru*, pengaruh Inggris, dan Gandhi--- dan tuntutan pembangunan. Tujuan pendidikan India tergantung pada pembentukan sistem pendidikan India modern, suatu tujuan yang susah dicapai dalam masyarakat dengan populasi amat besar sementara banyak yang masih buta huruf.

Sejak India merdeka pada 1947, prioritas pertama India pada pendidikan (sebagaimana dinyatakan dalam pasal 45 dari Undang-undangnya) dengan menyediakan pendidikan gratis dan wajib sekolah bagi semua anak sekurang-kurangnya sampai usia 14 tahun. Pemerintah berharap bahwa seluruh anak lelaki dan perempuan antara umur 7 dan 11 tahun harus masuk sekolah pada akhir Repelita keempat yang dimulai sejak 1969. Walaupun wajib sekolah tidak dapat terlaksana kecuali bila gratis, kebanyakan negara bagian menyediakan

pendidikan cuma-cuma bagi anak usia 7 hingga 11 tahun, bahkan di negara bagian lain menyediakan pendidikan secara gratis hingga antara usia 11 dan 14 tahun. Pelayanan sekolah menengah gratis yang meliputi seluruh lapisan bangsa bagi India ini merupakan tujuan yang amat susah dicapai. Di awal 1960-an, lebih dari 60 % murid sekolah menengah membayar sekolah; sebaliknya, kurang dari 4 % murid sekolah rendah (*lower primary school*) dan 16 % lebih sedikit dari murid sekolah rendah lanjutan (*higher primary school*) membayar uang sekolah.

Struktur dan kurikulum pendidikan di India secara esensial dipengaruhi oleh sistem pendidikan Inggris, karena latar belakang penjajahannya. Namun setelah merdeka, upaya pendidikan ditekankan pada ekspansi yang cepat ketimbang reformasi menyeluruh, maka konsitusi yang berlaku pada 1950 selanjutnya menegaskan prinsip bahwa pendidikan merupakan "penyampaian materi" dan oleh karenanya berada di bawah kebijakan pemerintah; sedang tugas Menteri Pendidikannya adalah membantu pemerintah melalui penyediaan bimbingan dan dana. Pasal dalam konstitusi India menyatakan perlindungan hak bagi lembaga swasta untuk menyelenggarakan pendidikan dan menerima bantuan dari pemerintah, serta menyediakan standart tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga tadi.

Jadi, masalah pendidikan pada dasarnya adalah tanggungjawab pemerintah. Kesatuan Menteri Pendidikan mencermati hal itu dengan melakukan koordinasi semua standar yang berlaku dalam pendidikan tinggi (melalui badan penyanggah dana dan komisi beasiswa universitas) dan melakukan promosi bagi kegiatan penelitian serta pendidikan teknik dan ilmiah. Seterusnya, Kementerian ini mengatur Universitas Aligarh, Banaras, Delhi dan Visvabharati, juga universitas serupa lainnya, karena pihak parlemen menyatakan hal tersebut telah menjadi kepentingan nasional. Perencanaan dan koordinasi pendidikan diimplementasikan melalui kebijakan umum yang telah diletakkan oleh Badan Penasehat Pusat Urusan Pendidikan.

Kementerian juga telah membentuk sejumlah institusi untuk membantu pemerintah dalam bidang penelitian dan publikasi. Badan ini meliputi Lembaga Pendidikan Pusat, Biro Pusat Pendidikan dan Bimbingan Vokasional, Biro Pusat Penelitian Buku Teks, Lembaga Nasional Pendidikan Dasar, Pusat Pendidikan Dasar Nasional, Direktorat Pengembangan Program Pendidikan Menengah, dan Lembaga Nasional Pendidikan Audiovisual. Dua lembaga yang penting, yakni Dewan Nasional Pelatihan dan Penelitian Pendidikan, dan Lembaga Pendidikan Nasional, keduanya didirikan pada 1961 untuk meningkatkan kegiatan penelitian, studi, pelatihan pada tingkat tinggi (*advanced level*), dan pengembangan pelayanan pendidikan yang efektif.

Pendidikan teknik dan vokasional, termasuk pelatihan, diberikan dalam lembaga yang berbeda. Program pendidikan guru umumnya dilakukan selama satu atau dua tahun pelatihan bagi rencana matrikulasi sekolah menengah atas, yang dipersiapkan untuk mengajar sekolah tingkat rendah, dan pelatihan selama

satu tahun bagi rencana sarjana lulusan Sekolah Tinggi untuk mengajar di tingkat sekolah menengah.

Tingkat universitas jenjang pertama (yakni tingkat bakaloriat) memerlukan pelatihan selama tiga tahun di atas tingkat 11, atau dua tahun studi bagi Sekolah Tinggi intermediate. Total periode pendidikan yang ditempuh adalah 14 atau 15 tahun (di Assam 16 tahun). Di akhir 1960, lebih dari 2.900 Sekolah Tinggi, yakni institusi pra-sarjana yang berafiliasi dengan universitas, dan lebih dari 70 universitas (yang memberi gelar dan menyediakan pembelajaran pasca-sarjana) menawarkan program pendidikan tinggi. Sejumlah 6 universitas memiliki afiliasi dengan lebih dari 100 Sekolah Tinggi. Universitas Calcuta saja memimpin lebih dari 200 Sekolah Tinggi.

Pendaftaran tergantung pada banyak faktor selain pelayanan fasilitas pendidikan. persekolahan tidak sekedar berfungsi untuk menarik seluruh keluarga, khususnya mereka yang terkait dengan pekerjaan pertanian dan keterampilan. Secara akademis, sekolah diorientasikan untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, sedang tujuan memperoleh pendidikan vokasional umumnya dihindari karena stigma tradisional yang terkait dengan kerja manual. Walaupun begitu, pendidikan dikenal secara luas sebagai jalan utama bagi kemajuan individu maupun masyarakat, dan kebanyakan orang tua berniat berkorban agar putra-putrinya dapat sekolah.

Pendaftaran murid meningkat tajam sejak India merdeka; lebih dari 70 juta murid mendaftar setiap tahunnya ke tingkat 1 sampai 12, dan lebih dari 2 juta mahasiswa mendaftar ke universitas. Pada akhir 1960-an, lebih dari 75 % anak dengan kelompok usia yang sesuai mendaftar sekolah tingkat 1 hingga 5, lebih dari 32 % siswa mendaftar sekolah tingkat 6 hingga 8, dan lebih dari 17 % di antaranya mendaftar ke sekolah tingkat 9 hingga 11. di beberapa negara bagian (Kerala dan Tamil Nadu) juga Delhi, prosentase pendaftaran bagi siswa usia sekolah dasar (*primary school*) lebih dari 100 %, dimana hal ini merefleksikan terjadinya pendaftaran di bawah umur maupun terjadinya kelas mengulang. Di wilayah seperti itu, hampir semua anak perempuan usia sekolah dasar masuk sekolah. Sekitar tahun pelajaran 1985-1986 pemerintah berharap dapat mencapai 110 % anak usia kelas 5 sampai 7 dapat masuk sekolah, 90 % di antaranya diharapkan bagi anak usia kelas 5 sampai 7, 46 % anak usia kelas 8 hingga 10, dan 20 % anak usia kelas 11 hingga 12 dapat mendaftar ke sekolah.

Kurikulum. Kurikulum dan standar sekolah dasar (*primary school*) mencakup pelajaran membaca, menulis, dan mengeja bahasa daerah, sejarah dan kebudayaan India, geografi, sastra, sains dan kesehatan. Di sekolah menengah (*secondary school*) kurikulum tersebut diteruskan dengan penekanan pada sejarah India, sedang pelajaran sastra masih menekankan pada sastra klasik Inggris dari pada sastra India. Para siswa sekolah menengah (*secondary school*) juga menerima pelajaran sains dan matematika; bahkan beberapa sekolah mengganti kajian ilmu-ilmu sosial dengan sejarah dan geografi, sedikit sekolah menengah atas

yang memiliki banyak tujuan yang menawarkan jenis pelatihan manual dan ilmu kerumahtanggaan (*home sciences*). Bahasa Hindi di diajarkan (meskipun tidak selalu diberikan, kecuali di India bagian selatan) di seluruh sekolah menengah atas, justru Bahasa Inggris diberikan bahkan kadang kala diperlukan bagi sekolah menengah tingkat atas (*upper secondary school*). Mata pelajaran eleksi tidak lazim dijumpai baik di tingkat dasar maupun menengah.

Bidang spesialisasi di jenjang pendidikan tinggi terkait dengan disiplin ilmu tradisional seperti sejarah, sastra Inggris dan ilmu politik. Pada saat seorang mahasiswa telah memilih jurusan tertentu, ia tidak dapat merubah spesialisasinya. Beberapa universitas telah mulai memberikan program studi umum atas dasar eksperimen. Mahasiswa yang cerdas cenderung masuk ke jurusan fisika, kimia, teknik atau kedokteran.

Metode pendidikan masi menekankan pada peranan hafalan; namun ada beberapa jurusan di universitas yang mendorong dilakukannya metode penelitian (*inquiry*). Komisi Beasiswa Universitas telah mendirikan berbagai pusat studi lanjutan di berbagai universitas, dari subsidi pusat-pusat inilah kemajuan riset dan pelatihan dikembangkan.

Lembaga pendidikan swasta. Lembaga pendidikan swasta memainkan peran yang penting dalam pendidikan di India. Sejumlah besar sekolah dasar favorit adalah swasta (biasanya disebabkan karena bahasa pengantarnya adalah Bahasa Inggris, karena kelasnya tidak terlalu padat, atau karena para gurunya dianggap lebih baik). Sebenarnya banyak sekolah menengah dan sekolah tinggi yang unggul adalah swasta. Sekolah swasta yang memenuhi standar pemerintah akan mendapat bantuan dana, suatu praktek yang menunjukkan persetujuan atau lebih kurangnya memastikan lembaga tersebut masih *survive*. Akan tetapi, sekolah-sekolah swasta kian menjadi subjek bagi peraturan pemerintah, dan standarnya bisa dibilang merosot tajam.

Daftar Pustaka

- Basu, Helene. "Going for visits with a Woman-Fakir: the African Diaspora in Gujarat" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 3/1999.
- Deighton, Lee C. *The Encyclopedia of Education*. Vol.4. USA: The Macmillan Company & The Free Press, 1971.
- Embree, Ainslie T. (Ed.). *Encyclopedia of Asian History*. Vol.2. London: Collier macmillan Publishers, t.t.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*. Jilid 2. Bandung: Mizan, 2001.
- Esposito, John L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Gabriel, Theodore. "The Sufi Tariqas of the Lakshdweep Islands, India" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 2/1999.
- Joshi, Manoj. "Islamic Reformism and Militancy in India" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 1/1998.
- K. Abdoelrachman. *Knowing Countries*. Jakarta: Djambatan, 1976.
- Khan, Abdul Karim. "The Servant of God in the North-West Frontier Province of British India" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 3/1999.
- Kosh, Bharat Shiksha. *ational Policy of Education in India*. India: Department of Education, Government of India, 1992.
- Sikand, Yoginder. "The Sufi Shrines of Jammu" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 5/2000.
- Winkelmann, Mareike Jule. "Visiting a women's Madras a in Southern India" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 7/2001.

▣ BELANDA

BELANDA tergolong salah satu negara yang paling padat penduduknya. Sekitar 16 juta penduduk (1999) menempati area dengan luas sekitar 37.000 km. Enam puluh persennya tinggal di bagian barat dari negeri ini, yakni Holland. Nama ini acap kali digunakan untuk mengacu pada *Netherlands* secara umum. Kata *Netherlands* sendiri secara literer berarti “negara/dataran rendah” (*the low countries*). Negeri ini menempati delta sungai yang luas, tempat dimana Sungai Rhine, Meuse dan Scheldt memancar dan mengalir ke Laut Utara. Permukaan tanah umumnya datar, namun masih terdapat beberapa bukit kecil, terutama di daerah pusat dan bagian selatan negeri. Iklimnya berubah-ubah tapi moderat, dengan angin musim dingin dan panas yang sejuk. Suhu udara sehari-hari pada musim dingin bisa mencapai di bawah titik beku, dan tergolong tidak lazim bila terjadi di atas 25 derajat Celcius pada musim panas.



Bahasa resminya adalah Belanda. Namun akibat lokasi geografisnya, maka kebanyakan warga Belanda juga berkomunikasi dalam Bahasa Jerman dan Inggris. Mengingat bahwa Belanda termasuk sebagai salah satu anggota dari masyarakat Uni-Eropa, negara ini dikelilingi oleh berbagai Negara Eropa, seperti: Prancis, Jerman, Belgia, Luxembourg dan Inggris. Amat mudah untuk melakukan perjalanan dan menemukan sejarah antar-budaya dan hubungan internasional melalui Belanda, karena posisi geografis Belanda juga menciptakan peluang untuk dapat mempelajari beragam bahasa. Paris, misalnya, bisa ditempuh hanya dalam tempo beberapa jam dengan kereta ekspres. Bila terbang dari Lanud Internasional Amsterdam ke London, Berlin, Paris dan Roma, hanya perlu waktu satu jam.

Beberapa kota utama di Belanda adalah Amsterdam, Hague dan Rotterdam. Ibu kota Belanda terletak di Amsterdam, sementara Hague merupakan kursi pemerintahan, dan Rotterdam dipandang sebagai jantung ekonomi negeri. Selama dua dekade terakhir, Rotterdam telah menjadi kota perguruan tinggi yang kian populer. Lima puluh tahun yang lalu, keseluruhan pusat kota telah dibangun kembali setelah mengalami kerusakan akibat Perang Dunia II. Program pembangunan kembali dilancarkan dengan segenap energi, dan itu sebagai wujud semangat kerja kota Rotterdam. Seluruh pusat kota tumbuh dengan ruang yang luas bagi perusahaan dan pertokoan. Sekolah Tinggi Ichthus (*Ichthus Hogeschool*) dibangun di antara gedung-gedung di Rotterdam. Didirikan pada 1986, universitas ini merupakan penggabungan dari berbagai institusi pendidikan tinggi, dimana sejarahnya terlacak kembali pada akhir abad

ke-19. Pada tahun akademik 1999/2000, *Ichthus Hogeschool* memiliki lebih dari 7000 mahasiswa. Uraian lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi di Belanda disampaikan tersendiri di bagian pendidikan tinggi.

Masyarakat Belanda berbentuk masyarakat majemuk, terdiri dari aneka ragam budaya dan etnis. Menyajikan beragam agama dan keyakinan, sedemikian hingga apapun yang anda yakini, anda dapat menemukan kelompok untuk berbagi rasa dengan mereka. Terlebih di kota-kota besar, anda akan menyaksikan bahwa Belanda sungguh merupakan negara dengan aneka warna. Para imigran datang dari berbagai penjuru dunia, utamanya dari Suriname, Indonesia, Marokko, dan Turki. Kehadiran masyarakat dari dua negara pertama di atas, yakni Suriname dan Indonesia, tergolong negara yang dulunya terkait dengan kolonial Belanda; sedang masyarakat asal Maroko dan Turki datang ke Belanda karena alasan keterbatasan ketenagakerjaan pada abad ke-16.

Dalam kaitannya dengan Indonesia saat ini, Belanda menjalin berbagai bentuk kerjasama. Di bidang komersial, Perkumpulan Indonesia Belanda (*Indonesian Netherlands Association* atau INA) didirikan dengan perwakilan di Jakarta maupun Belanda. Selama lebih dari 20 tahun INA telah mendukung banyak aktivitas bisnis perusahaan di dua negara. INA menerbitkan Buletin bulanan, majalah catur wulan, dan INA Website (www.ina.or.id), sehingga anggota INA dapat mengetahui secara *up to date* perkembangan hukum, pasar, serta peluang dan perolehan bisnis di kedua negara. Sistem informasi INA dapat dengan cepat diakses hingga detilnya. Informasi tentang semua perusahaan di Belanda dan sejumlah besar perusahaan di Indonesia dapat diperoleh di kantor INA di Jakarta. Kantor INA juga menyimpan informasi yang berguna bagi institusi swasta maupun umum yang amat penting, perkumpulan industri maupun lembaga-lembaga pendidikan, selain masalah dagang dan peristiwa penting lain yang terjadi di Indonesia dan Netherlands. Secara aktif INA sering menyelenggarakan seminar, konferensi dan misi niaga antar dua negara. Di bidang pendidikan, INA menawarkan program beasiswa dan pelatihan, sehingga perusahaan Belanda dapat mengundang para manajer dan profesional untuk datang ke Belanda dalam rangka mengikuti program pelatihan di institusi pendidikan tinggi dan program *on-the-job training*, sedang keseluruhan biaya ditutupi oleh pihak Belanda.

Bentuk kerjasama lainnya adalah dalam hal kajian keislaman. Dua perguruan tinggi negeri di Indonesia, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di bawah Departemen Agama Republik Indonesia, dengan pihak *The State University of Leiden* di bawah *Department of Languages and Cultures of South-East Asia and Oceania*, pemerintah Belanda, mendirikan Kerjasama Kajian Keislaman Indonesia Netherlands (*Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies* atau INIS) yang *Memorandum of Understanding* (MOU)-nya dilakukan secara periodik. Aktivitas INIS meliputi:

1. Menawarkan pendidikan Pancasarjana dalam *Islamic Studies* kepada para staf anggota Departemen Agama dan berbagai Universitas Islam Negeri baik di Indonesia maupun Belanda.
2. Menawarkan fasilitas riset bagi para sarjana Muslim Indonesia di Leiden, Belanda.
3. Memperbaiki koleksi perpustakaan di berbagai Universitas Islam Negeri dengan penyediaan perpustakaan bagi 14 IAIN secara tahunan dengan jumlah buku dan terbitan periodik lainnya di bidang kajian keislaman.
4. Mendistribusikan publikasi yang relevan di bidang kajian keislaman melalui bahan yang diterbitkan oleh INIS.
5. Menerbitkan INIS NEWSLETTER untuk memperbaiki keahlian komunikasi di kalangan sarjana Muslim Indonesia, dan antara sarjana Muslim Indonesia dengan sarjana Islam Barat.

Program pertukaran tenaga pengajar, dosen atau *visiting scholar* juga telah ditempuh oleh dua negara ini dalam *platform* INIS. Namun seiring dengan masa berlakunya kerjasama dan kesepakatan antar dua negara, program INIS akhir-akhir ini dialihkan dalam bentuk yang lain, dengan tetap menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral di bidang kajian keislaman.

Belakangan ini berkembang pula kajian dunia Islam modern oleh Universitas Leiden yang menghimpun masalah Islam di berbagai negara, yakni disponsori oleh *International Institute for the Study of Islam in the Modern World* atau ISIM. Bedanya dengan INIS, bila INIS hadir khusus untuk kajian Islam Indonesia, maka ISIM mengkaji berbagai negara. Sebagian dari tulisan buku ini mengambil manfaat dari sumber ISIM tersebut. Terima kasih untuk ISIM yang telah berkenan mengirim kami secara periodik *Newsletter*-nya langsung ke alamat rumah. Saya akui, di antara negara Eropa yang besar perhatiannya terhadap kajian keislaman, adalah Belanda. Islam di Indonesia, memang, saat kontakannya pada masa kolonial Belanda selama tiga setengah abad (1596-1942) dilalui oleh Belanda dengan berbagai kebijakan tentang pendidikan Islamnya, seperti *Guru Ordonantie*, *Wilde School Ordonantie*, *rust and order* dan lain-lain, yang mengalami pasang surut. Pasca kolonial, hubungan dua negara ini ternyata berlanjut sampai sekarang dengan intensitas kajian keislaman yang tidak mengendor. Bentuk-bentuk kerjasama pendidikan dan penelitian terus berjalan. Penerbitan buku-buku keislaman, pertukaran dosen, seminar regional dan internasional, dan kerjasama penelitian, juga terbukti masih berjalan hingga kini.

Imigran asal Suriname, Indonesia, Turki dan lainnya yang datang ke Belanda dan membentuk komunitas Muslim tersendiri mendapat tempat untuk mendirikan sekolah berpola Islam. Di Nijmegen, misalnya, dibangun *Islamische Basisschool Abibakr* oleh komunitas ini. Bahkan sebagian anggota komunitas Muslim tersebut ada yang masih menerapkan cara pengobatan berbasis agama (*religious healing*) yang menggunakan *dzikir* dan *wirid* serta amalan tertentu untuk menyembuhkan penyakit, sebagaimana hal ini masih sering di jumpai di

Indonesia. Para imam Masjid, seperti halnya yang lazim berlaku di negara-negara Islam, di Belanda, ternyata juga masih memiliki pengaruh kuat bagi jama'ahnya. Masalah kontemporer, semisal isu jilbab dan homoseksual, direspon oleh sebagian imam ini. Meskipun kebijakan Belanda dalam menghadapi fenomena ini *plus-minus*, kadang kala disertai dengan *image* negatif dan kurang berpihak bagi eksistensi Muslim di sana, terlebih setelah serangan 11 September 2001, umumnya kesan ini berkembang seiring dengan makin kenalnya negara-negara Eropa dan Barat terhadap latar belakang Muslim dan substansi ajaran Islam.

Sistem pendidikan. Sekolah-sekolah Belanda semua jenjangnya merupakan sekolah umum (*public school*) atau sukarela (*voluntary school*). Sekolah umum diselenggarakan oleh negara, atau sebagaimana yang terjadi pada umumnya, diselenggarakan oleh pemerintah kotamadya. Sekolah sukarela diselenggarakan oleh yayasan atau pihak gereja. Di sekolah yang menerapkan sistem yang diatur oleh negara, tidak ada satu sekolah pun yang diselenggarakan oleh personil swasta.

Sekolah Umum Negeri tidak mendasarkan pembelajarannya pada filosofi agama tertentu, akan tetapi, gereja dan yayasan yang memiliki tujuan memberikan pelajaran agama memperoleh kesempatan untuk mencapai tujuannya menurut sekolah tersebut. Sebaliknya, sekolah sukarela dibagi tidak berdasarkan hukum melainkan atas kecenderungan kemampuannya, yakni ke dalam kategori Sekolah Roman Katolik, Protestan dan Sekolah Netral. Sekolah Sukarela Netral amat menyerupai sekolah umum.

Biaya pembangunan dan operasional sekolah umum dan sukarela dipandang oleh pemerintah menurut prinsip persamaan keuangan. Pengakuan negara atas sekolah sukarela didasarkan pada norma objektif. Pada pendidikan pra-sekolah dan sekolah dasar, pendaftaran bagi sekolah jenjang tertentu merupakan faktor penentu bagi status pengakuan; sekolah menengah sukarela diakui oleh pihak yang berwenang atas dasar tujuan rencana pembangunan regional.

Menteri Pendidikan dan Sains memiliki kewenangan terhadap pendidikan tinggi dalam hal peraturan, keuangan dan supervisi, melalui sistem pengawasan terhadap masing-masing sekolah umum dan sukarela tadi. Menteri juga mendamaikan pertikaian yang berkenaan dengan implementasi hukum serta merancang ujian negara. Kewenangan langsung pihak sekolah diwakili oleh dewan kotamadya atau badan pemerintah gereja maupun yayasan, mereka dapat membangun dan mengatur administrasi sekolah. Dalam hal tersebut, kewenangan eksekutif semisal mengajar dan menguji siswa dilakukan oleh kepala sekolah dan para guru. Para guru ini diangkat oleh pejabat langsung di tingkat pendidikan pra-sekolah, sekolah dasar, dan menengah, mereka harus

memenuhi kualifikasi apakah mereka bermaksud mengajar di lembaga pendidikan umum atau sukarela.

Sistem sekolah Belanda dibagi atas jenjang pra-sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Pendidikan Tinggi dan jenjang khusus. Wajib belajar mulai diberikan setelah anak usia tujuh tahun. Namun demikian, dalam prakteknya, hampir semua anak mendaftar sekolah setelah usia enam tahun. Sesudah anak menyelesaikan delapan tahun sekolah atau lulus sekolah pada usia 15 tahun, ia lepas dari usia wajib belajar. Berikut ini urian tentang sistem pendidikannya.

Pendidikan pra-sekolah. Pendidikan pra-sekolah diatur oleh Undang-undang 1955. Pendidikan pra-sekolah dimulai saat anak berusia 4 tahun dan berakhir ketika ia melanjutkan ke Sekolah Dasar dalam umur 6 atau 7 tahun. Tujuan pendidikan pra-sekolah adalah untuk menyiapkan anak dalam melanjutkan ke Sekolah Dasar. Materi pelajaran yang diberikan di jenjang ini berupa bermain dan latihan fisik, membedakan warna, bilangan, membentuk tanah liat, menggambar dan musik. Para murid juga diajarkan beberapa ayat dan mendengarkan cerita. Tiap sekolah memiliki rencana bermain atau bekerja sendiri-sendiri yang harus diajukan kepada pihak inspektorat untuk mendapat persetujuan.

Pendidikan dasar. Pendidikan primer berakhir selama 6 tahun di Sekolah Primer (*primary school*), dan hal itu diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Primer 1920. Menurut aturan ini, para murid Sekolah Primer umum diajarkan materi "yang sesuai dan bermanfaat" bagi intelektual, keterampilan fisik, dan nilai moral yang hendak dikembangkan. Pada awal 1970-an, setelah dilakukan revisi atas UU Pendidikan Primer 1920, jenjang sekolah ini dikenal sebagai Pendidikan Dasar (*basic education*). Kurikulum Sekolah Dasar memberikan spesifikasi atas materi yang hendak diajarkan, dan alokasi waktu pada tiap materi pelajaran, serta bahan (termasuk buku teks) yang digunakan. Kurikulumnya dibuat oleh kepala sekolah dengan konsultasi bersama staf pengajar lalu diajukan ke inspektorat untuk mendapat persetujuan. Aturan menyebutkan bahwa para murid harus dilatih membaca, menulis, aritmatika, Bahasa Belanda, sejarah, geografi, aturan lalu lintas, kajian alam (Ilmu Pengetahuan Alam), menyanyi, menggambar, pendidikan fisik, dan menjahit (bagi perempuan). Materi pilihan meliputi Bahasa Prancis, Jerman, Inggris, matematika dan kerajinan tangan (bagi lelaki).

Pendidikan menengah. Sekolah menengah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan menengah 1963. Sejak 1968, sistem sekolah menengah telah dibagi dalam tiga bagian. *Bagian pertama*, dikenal sebagai *voorbereidend wetenschappelijk onderwijs* (pendidikan enam tahun untuk menyiapkan murid memasuki pendidikan tinggi), yang mencakup pembelajaran yang diberikan di *gymnasiums*, *atheneums* (yang berhubungan dengan *hogere burgerschool*), dan *lyceums* (yang tersusun dari *gymnasium* dan *atheneum*).

Di sekolah yang menyiapkan para murid untuk memasuki program pendidikan tinggi, sekolah satu tahun dikenal sebagai kelas jembatan (*the bridge class*) yang dirancang untuk meningkatkan kemungkinan murid melakukan transfer dari satu bentuk sekolah (*gymnasium, atheneum, lyceum* baik tingkat menengah umum intermedit maupun tinggi) ke bentuk sekolah lain dengan jalan memperoleh kurikulum yang sama pada tiap sekolah. Kelas jembatan, yang merupakan produk peraturan yang diberlakukan pada 1968, sekarang masih berpengaruh, diberlakukan sebagai kebijakan untuk memperkenalkan sebagai kajian sosial sebagaimana materi lain dalam semua bentuknya dalam pendidikan menengah, memberikan perhatian lebih bagi materi yang mengekspresikan diri pribadi (sehingga meskipun kegiatan akademik di *gymnasium*, para murid belajar keterampilan manual) memerlukan hanya lima materi wajib dan dua materi pilihan saat ujian akhir, dan menjadikan sekolah *atheneum* bersifat lebih teoritis karena menempatkan buku pegangan, aritmatika niaga, dan keterampilan dagang dengan pelajaran hukum dan pengetahuan ekonomi.

Para murid dalam tahun jembatan ini diberikan pelajaran Bahasa Belanda, Inggris, Prancis, sejarah, geografi, dan kajian sosial. Setelah tahun kelas jembatan ini dilalui, para murid di *gymnasium* dan *atheneum* dibagi dalam kelas jurusan A dan B. Murid yang ada di jurusan A *gymnasium* menerima pendidikan klasik dengan perhatian khusus diberikan pada mata pelajaran matematika. Sedang murid pada kelas jurusan A *atheneum* menerima pelajaran yang menekankan pada sastra, ekonomi, dan budaya serta tidak menerima bahasa klasik. Adapun murid kelas jurusan B menerima pelajaran yang menekankan mata pelajaran matematika dan tidak menerima mata pelajaran bahasa klasik.

Bagian kedua meliputi tiga tingkat pendidikan menengah umum yang tidak mempersiapkan para murid untuk studi lanjut ke pendidikan tinggi. Tiga tingkat ini dikenal sebagai *lager algemeen voortgezet onderwijs* (pendidikan menengah umum tingkat rendah selama satu sampai dua tahun), *middlebaar algemeen voortgezet onderwijs* (pendidikan menengah umum tingkat intermedit selama tiga sampai empat tahun), dan *hoger algemeen voortgezet onderwijs* (pendidikan menengah umum tingkat tinggi selama lima sampai enam tahun).

Bagian ketiga meliputi pendidikan profesional atau kejuruan. Pendidikan kejuruan Belanda menunjukkan berbagai variasi dalam masa pelajarannya dan meliputi sekolah-sekolah pendidikan teknik, pengetahuan domestik, distribusi niaga dan pendidikan tata niaga yang terkait, pendidikan seni, serta pendidikan kerja masalah sosial. Semua murid yang termasuk dalam bagian kedua dan ketiga di atas, menerima mata pelajaran Bahasa dan Sastra Belanda, Prancis, Jerman, Inggris, matematika, kimia, sejarah, geografi, ilmu-ilmu sosial, dan pendidikan fisik.

Berbagai bentuk sekolah menengah tersebut bisa dikombinasikan ke dalam sekolah masyarakat. Apabila satu atau lebih sekolah bagian pertama dan

kedua dipadukan, mereka bisa dinyatakan sebagai pendidikan program satu tahun yang umumnya dikenal sebagai kelas jembatan (*the bridge class*).

Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diatur dalam Undang-Undang Universitas 1960. di bawah peraturan ini, para mahasiswa boleh memasuki program pendidikan tinggi setelah menyelesaikan program pendidikan menengah di *gymnasium, atheneum* atau *lyceum*. Pendidikan tinggi disediakan oleh universitas dan institusi tertentu yang dilengkapi dengan pelatihan para mahasiswa untuk mampu mengaplikasikan pelajarannya secara mandiri dan agar dapat menyiapkan para mahasiswa untuk menduduki posisi dalam masyarakat dimana peran pendidikan universitas tersebut amat diperlukan dan berguna.

Lama studi di pendidikan tinggi beragam menurut program yang dipilih. Meskipun begitu, tidak ada program studi yang berakhir kurang dari lima tahun.

Lembaga pendidikan tinggi umum meliputi Universitas Negeri di Leiden, Groningen, dan Utrecht, Universitas Amsterdam, Universitas Teknik di Delft, Universitas Pertanian di Wageningen, dan Universitas Teknik Twente di Enschede. Lembaga pendidikan tinggi yang bersifat sukarela (dikelola oleh yayasan Kristen) di antaranya meliputi Universitas Merdeka di Nijmegen (Katolik), Universitas Merdeka di Amsterdam (Kalvinis), Sekolah Ekonomi Belanda di Retterdam (Netral), dan Sekolah Ekonomi di Tilburg. Belakangan ini berdiri beberapa perguruan tinggi lain yang juga mengalami perkembangan pesat, di antaranya adalah *Ichthus Hogeschool*, dan *The International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences*.

Fakultas dalam universitas meliputi fakultas hukum, kedokteran obat-obatan dan gigi, matematika, ekonomi, ilmu-ilmu sosial, pengetahuan tentang hewan, dan filsafat. Berbagai universitas teknik memiliki jurusan teknik elektro, mesin, aeronatik, sains dan kimia, arsitek, teknik sipil dan jurusan umum filsafat, sosiologi dan ekonomi.

Profile

International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC). Didirikan pada 1950 dan umumnya dikenal sebagai ITC karena asal mula namanya adalah *International Training Centre for Aerial Survey*. Perguruan tinggi ini termasuk institusi pendidikan tinggi internasional tertua dan terbesar di Belanda. ITC mengkhususkan dalam hal pengumpulan, interpretasi, manajemen dan pengembangan kebijakan. Dengan cara ini, pengamatan masalah bumi secara ilmiah dapat mendukung pengambilan keputusan pembangunan, dan bermanfaat bagi pengentasan

kemiskinan di negara sedang berkembang. ITC berupaya meningkatkan aplikasi teknologi geo-informasi melalui program pendidikan, riset dan pelayanan bimbingan. Program yang ditawarkan di ITC ini ada enam, baik dalam jenjang MSc maupun Magister, masing-masing dengan spesialisasi yang berbeda, yaitu: *Geo-informatics (GFM)*, *Geo-information Management (GIM)*, *Urban Planning and Land Administration (UPLA)*, *Natural Resources Management (NRM)*, *Earth Resources and Environmental Geo-sciences (EREG)*, dan *Water Resources and Environmental Management (WREM)*.

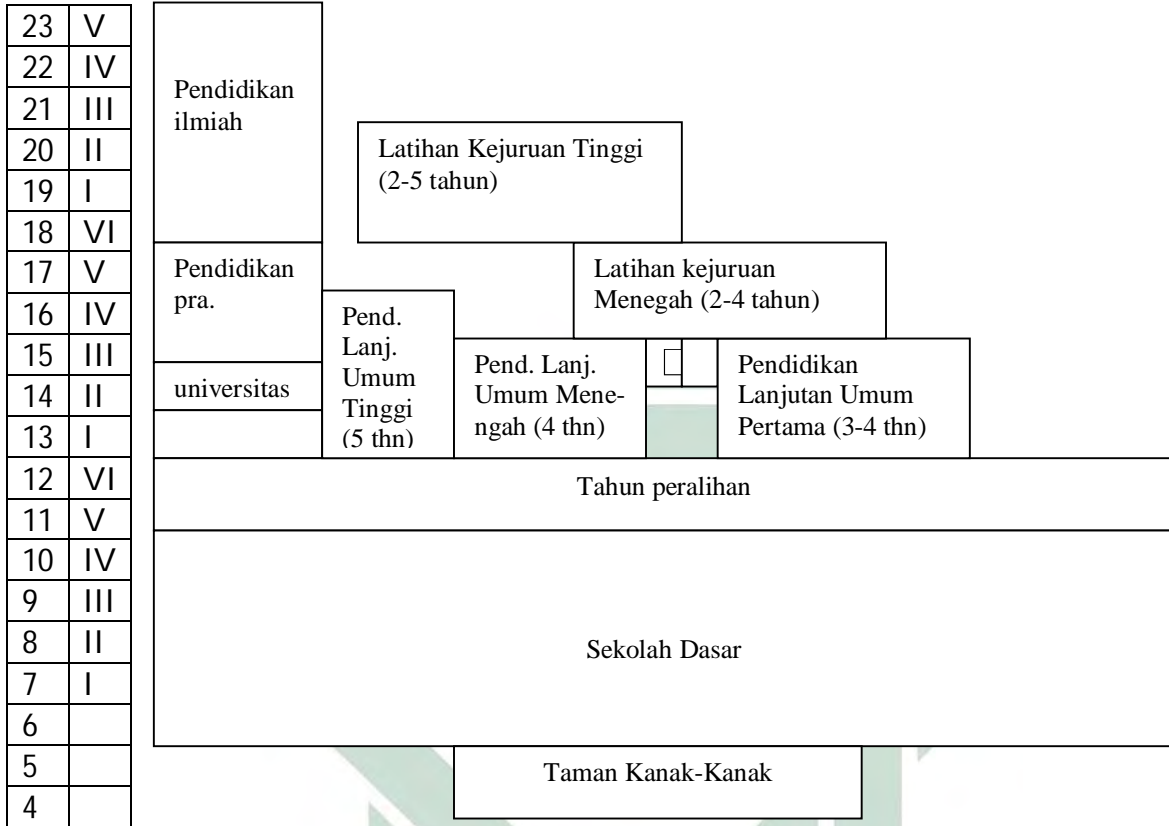
Pendidikan khusus. Pendidikan khusus diatur melalui Keputusan Kerajaan tentang Pendidikan Khusus 1967, yang menyediakan keterampilan bagi anak-anak secara fisik, mental dan emosional untuk perlindungan anak di rumah. Termasuk dalam pendidikan khusus ini adalah pendidikan guru.

Pelatihan para guru untuk mengajar di Taman Kanak-kanak (pendidikan pra-sekolah) dibagi dalam dua tahap selama dua tahun. Para pelajar masuk pada tahap pertama setelah menyelesaikan pendidikan menengah umum tingkat intermedit atau setelah menyelesaikan tiga tahun studi di sekolah *gymnasium*, *atheneum* atau *hoger algemeen voorgezet onderwijs* atau yang telah lulus dari tahap pertama pelatihan dan diterima di tahap kedua. Pelatihan ini diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Pra-Sekolah 1955.

Pelatihan guru untuk sekolah dasar dibagi dalam tiga tahap dan berakhir selama lima tahun. Empat tahun pertama dari program tersebut persis sama dengan mereka yang mengikuti pelatihan pelajar untuk menjadi guru Taman Kanak-kanak (pendidikan pra-sekolah). Tahap ketiga, meliputi tahun kelima dari pelatihan, diperlukan bagi pelajar yang ingin dipilih sebagai kepala sekolah dasar atau ingin mengajar di sekolah *lager algemeen voorgezet onderwijs* atau sekolah *middlebar algemeen voorgezet onderwijs*.

Pelatihan para guru bagi sekolah *gymnasium*, *atheneum*, dan *hoger algemeen voorgezet onderwijs* dilaksanakan melalui program universitas secara *full-time*, kuliah universitas secara *part-time*, kuliah non-universitas secara *part-time*. Semua calon guru harus melakukan latihan mengajar. Bila digambarkan dalam bentuk bagan, sistem pendidikan di Belanda tampak sebagai berikut.

BAGAN 3 SISTEM PENDIDIKAN DI BELANDA



Daftar Pustaka

- Abdoelrachman, K. *Knowing Countries*. Jakarta: Penerbit Djambatan, [1976].
- Deighton, Lee C. *The Encyclopedia of Education*. Vol.6. USA: The Macmillan Company & The Free Press, 1971.
- Der Veer, Peter van. "Lecture in the Netherlands and Islam" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 9/2002.
- Elbers, Jos M.M. *Marketing and International Management; Communication and Design Management: School of Business 1999-2000*. Rotterdam: Ichthus Hogeschool, 2000.
- Hasan, Chalidjah. *Kajian Pendidikan Perbandingan*. Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995.
- Heijer, Johannes den dan Zaini Muchtarom. *INIS Newsletter*.
- Hoffer, Cor. "Religious Healing Methods among Muslims in the Netherlands" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 6/2000.
- Indonesian Netherlands Association brochures 1999.
- International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences. *Educational Information*. Netherlands: ITC, 1999.
- Landman, Nico. "Imams in the Netherlands: Home-made Better than Import" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 2/1999.
- Meuleman, John. "Headscarves, Homosexuals, and Imams in the Netherlands" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 8/2001.
- Netherlands Education Centre. *Under Graduate Courses in Holland*. Netherlands: NEC, 1999.
- Nuffic. *Study in the Netherlands: Your Gateway to Europe*. Netherlands: Nuffic, 1999.

▫ JEPANG

SENIN, 6 Agustus 1945, merupakan awal era baru bagi sejarah kemanusiaan. Setelah bertahun-tahun melakukan riset dan eksperimen intensif, para ilmuwan dari berbagai bangsa, di antaranya berkebangsaan Jepang, berhasil menemukan sebuah bom atom yang telah siap digunakan, dan pada hari itu juga manusia menggunakannya. Di Amerika, program pengembangan bom atom saat itu dikenal dengan nama *Manhattan Project* yang bekerja secara amat rahasia. Atas keputusan penguasa militer Amerika, meskipun menghadapi protes para ilmuwan yang bekerja pada proyek tersebut, bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima, Jepang.

Sebagai akibat langsungnya, sekitar 60.000 rakyat Jepang menjadi korban, sementara 100.000 di antaranya mengalami luka-luka. Hampir seluruh bandar, dan sebuah kota dengan 250.000 penduduk, hancur. Menurut para ahli, bola api yang meledak di permukaan bumi yang ditimbulkan dari bom atom tersebut, berdiameter sekitar 150 meter dengan temperatur inti 20.000 derajat Celsius. Kecepatan benturannya antara 500 hingga 1000 km per jam, dan lama panas radiasinya berkisar dua detik. Bom yang dijatuhkan di Hiroshima menggunakan fisi inti uranium tersebut memiliki kekuatan 20.000 ton TNT. Tak pelak lagi, beberapa hari kemudian, Jepang mengaku menyerah kalah, dan berakhirilah Perang Dunia II.

Setelah Perang Dunia II, Jepang mengalami kemerosotan di segala bidang. Sektor pendidikan dibiayai oleh pajak, bantuan luar negeri dan pengalihan sebagian besar anggaran pertahanan dan keamanan yang tidak lagi merupakan prioritas, karena perang sudah usai. Menyadari keterpurukan rakyatnya, pemerintah berupaya membiayai hampir semua kebutuhan pendidikan siswa. misalnya, membebaskan uang sekolah, menyediakan buku pelajaran secara cuma-cuma, memberi makan siswa agar tetap bergizi dan sebagainya. Sebuah titik untuk memulai berangkat membangun negara kembali. Kekalahan Jepang menyadarkan arti pentingnya hidup damai dan sejahtera. Tak selang berapa lama, Jepang membangun kembali puing-puing akibat serangan nuklir tersebut.

Saat krisis ekonomi melanda Asia sejak 1997, Jepang yang tidak luput dari imbas krisis tersebut, melakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi, efisiensi dan memperkenalkan paket pemulihan. Pada Nopember 1998, LDP dan kebanyakan partai oposisi utama Jepang menyetujui dilakukannya suntikan dana sekitar 30 terilyun yen dari dana publik kepada ekonomi negara. Sejak itu, banyak bank komersial utama mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan dana publik sejumlah 8 trilyun yen. Pada Maret 1999, 15 bank menerima 7,4 trilyun yen dari dana publik, dan seluruh bank telah melakukan konsolidasi atas posisi keuangan mereka. Ternyata hal ini secara

siknifikan mampu mengurangi ketidakpastian situasi ekonomi negara. Jepang tergolong sebagai salah satu di antara negara maju, industri otomotif dan elektroniknya mampu meraup pasar global. Siapa gerangan Jepang itu ?

Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik, lepas pantai Asia Timur. Negara-negara yang letaknya paling dekat dengan Jepang adalah Rusia, RRC dan Republik Korea. Negeri Jepang terdiri lebih dari 6.800 pulau. Kebanyakan pulau tersebut sangat kecil, hanya 340 yang luasnya lebih dari 1 km². Empat pulau mencakup 96 % dari negeri ini, yakni Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Areal daratan seluruh Jepang luasnya hampir 378.000 km². Kepulauan Jepang membentang sebagai garis kurva yang tipis sepanjang 3.500 km. Sebagai perbandingan, Australia mempunyai luas total 7.710.000 km², Madagaskar 594.000 km², Kerajaan Inggris 244.000 km², dan AS 9.370.000 km².



Pulau-pulau Jepang yang sekarang ini, terbentuk melalui tabrakan perlahan berbagai bagian kulit bumi yang bergerak, kegiatan gunung api, dan pergeseran garis pantai Samudera yang diakibatkannya. Sejarah geologis yang dramatis tersebut terlihat dalam bentuk daratan Jepang. Banyak dari bagian Jepang terdiri dari pegunungan-pegunungan tinggi dengan lembah-lembah sempit di antaranya. Kenyataannya 68 % Jepang bergunung-gunung. Kebanyakan rakyat memilih hidup di kawasan datar atau kawasan yang sedikit berbukit di mana pertanian dan angkutan barang mudah dilakukan. Pegunungan di Jepang merupakan salah satu ciri alam yang paling indah yang dimilikinya. Gunung Alpen di pulau Honshu sangat termasyhur, namun gunung yang paling dikenal orang di Jepang tentu saja adalah Gunung Fuji, setinggi 3.776 meter, tertinggi di Jepang. Sepersepuluh dari semua gunung api yang ada di dunia terdapat di Jepang. Lingkungan alamnya sangat molekul, tapi bukan tanpa kesulitan tertentu, dan orang Jepang harus belajar hidup bersamanya. Misalnya, kota Kobe dan beberapa kawasan sekelilingnya sering dilanda gempa bumi besar. Gempa pada bulan Januari 1995 menelan 6.279 jiwa. Setelah gempa, kalangan umum dan swasta bekerja sama untuk membangun kembali kawasan tersebut sebagai bagian vital dan dinamis dari perekonomian Jepang.

Penduduk. Meskipun merupakan sebuah negara kecil bila diukur dari luas daratannya, dengan 125,6 juta orang penduduk (sensus 1995), Jepang merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-8 di dunia; dengan demikian menjadi salah satu negara yang berpenduduk paling padat di dunia. Rata-rata terdapat lebih dari 332 orang untuk setiap satu kilometer persegi. Dan karena kebanyakan daratan Jepang tidak cukup datar untuk rumah atau jalan, maka di beberapa kawasan tingkat kepadatan sebenarnya bahkan lebih tinggi. Sebagian besar orang Jepang tinggal di pantai timur yang telah berkembang ramai, atau di

kawasan sebelah selatan di mana berlokasi kebanyakan kota besarnya. Begitulah, empat dari setiap lima orang Jepang tinggal di kota besar. Lebih dari seperempat penduduk Jepang tinggal di Tokyo dan di prefektur-prefektur yang saling berdekatan. Kawasan-kawasan metropolitan di seputar kota besar, Tokyo, Osaka dan Nagoya, kini merupakan tempat tinggal bagi hampir 45 % penduduk Jepang.

Rakyat Jepang berasal dari berbagai tempat. Rakyat dari daratan Asia dahulu kala datang dan tinggal bersama kaum pribumi di pulau-pulau Jepang serta pulau-pulau Pasifik yang berdekatan. Kemudian para pendatang dari Cina dan Korea membawa pengaruh adat-istiadat, festival, cerita rakyat serta makanan khas masing-masing. Misalnya, rakyat di kawasan Kanto termasuk Tokyo kerap makan *natto*, yang mirip tempe/tauco, sementara rakyat kawasan Kansai yang meliputi Osaka menyantap *natto* hanya sesekali saja. Setiap kawasan mempunyai dialek tersendiri; kota dan ungkapan berlainan dari satu tempat ke tempat lainnya.

Pemerintahan. Jepang menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis. Semua warganegara yang sudah dewasa berhak memberikan suara dan mencalonkan diri dalam pemilihan nasional dan pemilihan daerah. Sistem pemerintahan Jepang didasarkan pada Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang kadangkala disebut Konstitusi Perdamaian karena menegaskan komitmen Jepang terhadap perdamaian dan penolakannya terhadap perang. Konstitusi Perdamaian juga menentukan peranan Kaisar, hak-hak dan kewajiban rakyat, tanggungjawab berbagai instansi pemerintah, serta berbagai aturan mengenai bagaimana pemerintah dijalankan.

Badan legislatif nasional Jepang disebut *Diet* yang mempunyai dua majelis, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan *House of Councillors*. Kebanyakan undang-undang nasional harus disahkan oleh kedua majelis tersebut. Akan tetapi, untuk sebagian undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat yang memutuskan, apabila kedua majelis tidak mencapai kata sepakat.

Perdana Menteri adalah seorang anggota *Diet*. Perdana Menteri mengangkat Kabinet. Kebanyakan anggota Kabinet mengepalai sebuah kementerian atau badan pemerintahan. Adapun Kaisar, berdasarkan Konstitusi Jepang, merupakan lambang negara dan kesatuan rakyat. Kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan. Keluarga kekaisaran berasal dari berabad-abad yang lalu dan merupakan dinasti tertua yang tak pernah terputus di dunia. Kaisar Akihito, Kaisar yang sekarang, naik tahta pada tahun 1989. Beliau dan istrinya, Permaisuri Michiko, mempunyai tiga orang anak. Kaisar dan Permaisuri tinggal di istana Kekaisaran di Tokyo. Sejak 1868, Tokyo merupakan ibu kota Jepang, sebuah kota metropolitan yang terpadat penduduknya di dunia, namun tetap bersih dan aman.

Keluarga. Orang Jepang secara tradisional mempunyai ikatan keluarga yang erat. Hingga kini masih ada anak-anak, orang tua dan kakek-nenek yang tinggal serumah bersama. Keluarga tiga generasi demikian masih merupakan sekitar 12 % rumah tangga Jepang. Perceraian tidak begitu umum dibandingkan dengan keadaan yang terjadi di banyak negara Barat. Angka perceraian hanya 1,57 untuk setiap 1000 orang, berbanding 4,8 di AS atau 2,9 di Kerajaan Inggris.⁹ Dewasa ini kebanyakan keluarga mempunyai satu atau dua anak. Oleh karena itu, usia rata-rata populasi Jepang meningkat dengan pesat. Anak-anak berusia di bawah 15 tahun sekarang berjumlah 20,42 juta, sedangkan orang-orang tua berusia di atas 64 tahun berjumlah 17,59 juta. Makin banyak orang-orang berusia lanjut tinggal sendirian, dan orang-orang muda menikah lebih lambat. Usia menikah rata-rata adalah 29,7 tahun untuk pria dan 27,1 untuk wanita. Dengan demikian Jepang sedang belajar cara-cara baru untuk membantu baik kaum muda maupun kaum tua untuk hidup dalam masyarakat moderen.

Kaum muda juga mendapatkan cara-cara baru untuk hidup dan bekerja. Beberapa pasangan muda suami istri memilih tidak punya anak, dan ada pasangan --tidak peduli apakah punya anak atau tidak-- memilih membina dua karier. Makin banyak wanita bekerja di luar; 40,5 % dari jumlah semua karyawan Jepang pada 1994 adalah wanita. Mayoritas besar wanita yang bekerja adalah mereka yang sudah menikah, dan mereka tengah mencari cara-cara baru untuk memberi keseimbangan antara kerja dan anak-anak. Adapun prosentase perusahaan yang menyediakan cuti untuk perawatan anak kini hampir empat kali lipat dari jumlah 20 tahun yang lalu. Banyak wanita yang kembali bekerja ketika berusia antara akhir tigapuluhan dan akhir empatpuluhan, setelah anak-anak lebih besar. Kebanyakan kaum muda merasa bahwa menikah itu penting untuk membina kebersamaan dan cinta, dan semakin banyak ayah yang ikut serta dalam tugas membesarkan anak serta tugas-tugas rumah tangga lainnya.

Sistem pendidikan. sistem pendidikan umum ditetapkan di Jepang lebih dari satu abad yang lalu dan keberadaannya berlangsung lebih lama daripada di kebanyakan negara. Belajar selalu dianggap sebagai suatu kebajikan. Dewasa ini, 99 % murid SD belajar di sekolah-sekolah umum, dan untuk tingkat sekolah menengah sekalipun hanya 30 % siswa yang belajar di sekolah swasta. sistem administrasi pendidikan di Jepang dibangun atas empat tingkat: pusat, prefektural (antara propinsi dan kabupaten), *municipal* (antara kabupaten dan kecamatan), dan sekolah. Sistem administrasi tersebut menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based*

⁹ Majalah *Tempo* edisi Maret 2002 menyebutkan bahwa satu di antara dua pasangan di AS, atau 50 % darinya, berakhir dalam perceraian. Sementara di Inggris telah meningkat menjadi 40 % pasangan mengalami perceraian. Di Indonesia, meskipun jauh di bawah negara-negara tersebut, yakni di bawah 10 %, yang terjadi terutama di kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan Yogyakarta, ternyata terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Management), dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, terdapat asosiasi-asosiasi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua yang mendukung pengembangan sekolah. Dalam sistem tersebut terdapat peran dan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, asosiasi-asosiasi tersebut, dan masyarakat yang saling mengisi sehingga tercipta sinergi yang memungkinkan sistem tersebut menjadi relatif efisien dan efektif. Hal ini merupakan faktor utama pencapaian mutu pendidikan di Jepang yang relatif tinggi.

Kehidupan sekolah. Tahun ajaran Jepang mulai pada bulan April. Ada liburan musim panas selama beberapa minggu, dan liburan dua minggu waktu Tahun Baru. Tahun ajaran berakhir pada bulan Maret, kemudian sekolah libur selama dua minggu sebelum mulai tahun ajaran baru selanjutnya.

Siswa biasanya bersekolah lima atau enam hari seminggu. Pengajaran memakai metode konvensional maupun teknik-teknik moderen, seperti pengajaran dengan media komputer. Pelajaran di kelas berlangsung dari jam 8.30 pagi hingga sekitar jam 3.00 atau 3.30 sore pada hari kerja. Bila ada pelajaran pada hari Sabtu, maka biasanya berakhir pada tengah hari. Banyak siswa mengikuti bimbingan belajar di *juku*, ikut serta dalam kegiatan olahraga atau kegiatan ekstra-kurikuler lainnya pada sore hari.

Satu kelas bisa saja cukup besar dan terdiri dari 40 orang siswa di SD. Dengan demikian kelompok-kelompok siswa di tiap-tiap kelas bergiliran membersihkan ruang kelas, lorong antar kelas, kamar kecil, lapangan bermain serta bagian-bagian lainnya dari sekolah.

Kerapian merupakan bagian penting dari aturan berpakaian. Sejumlah sekolah mengharuskan siswa mengenakan pakaian seragam. Secara tradisi, siswa putra mengenakan pakaian seragam hitam berleher tegak dan kancing keemasan, namun sekarang seragam siswa putra berwarna biru dan warna-warna lain; seragam untuk musim panas kerap mencakup pula celana pendek. Seragam siswa putri kebanyakan berwarna biru tua dengan rok berlepit-lepit, tapi model ini pun sekarang tengah mengalami perubahan. Para siswa kecil kini ada yang mengenakan topi yang berwarna terang agar mudah terlihat oleh pengendara mobil. Seragam dewasa ini lebih nyaman dikenakan dan lebih menarik daripada seragam di masa lampau, tapi tetap penting peranannya seperti sebelumnya, yaitu agar para siswa berpakaian rapi ke sekolah.

Dalam hal sekolah umum, biasanya siswa diterima di sebuah sekolah umum di kawasan dekat tempat tinggalnya. Tapi apabila siswa memilih sekolah swasta, maka siswa tidak harus memilih sekolah yang ada di kawasan dekat tempat tinggalnya. Siswa banyak menghabiskan waktu bersama, baik di kelas maupun untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti piknik ke luar kota dan piknik perpisahan, olahraga dan pertandingan atletik serta berbagai kegiatan setelah jam sekolah.

Pendidikan pra-sekolah. Taman Kanak-kanak menerima murid berusia 3 sampai 5 tahun, untuk lama pendidikan 1 sampai 3 tahun. Anak berusia 3 tahun diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedang usia 4 tahun berarti menempuh pendidikan pra-sekolah ini selama 2 tahun, begitu seterusnya, bagi pendaftar usia 5 tahun berarti menempuh pendidikan hanya selama satu tahun. Lebih dari 50 % Taman Kanak-kanak di Jepang dikelola oleh swasta, sisanya oleh pemerintah kota dan hanya sebagian kecil merupakan TK negeri. Selain TK, ada pula lembaga untuk anak-anak yang disebut *Hoiku-jo* (Pusat Perawatan Siang Hari). Meskipun termasuk lembaga kesejahteraan sosial, *Hoiku-jo* juga berfungsi sebagai tempat pendidikan pra-sekolah. Anak-anak yang masuk ke *Hoiku-jo* mulai dari bayi hingga usia 5 tahun yang memerlukan perawatan siang hari, karena kedua orangtuanya bekerja atau kesibukan lainnya. Mereka yang berusia 3 tahun ke atas biasanya mendapat pendidikan sama seperti di TK. Kebanyakan pusat penitipan anak seperti ini dikelola oleh pemerintah daerah.

Pendidikan wajib. Wajib sekolah berlaku bagi anak usia 6-15 tahun, namun kebanyakan anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak sekolah di SD pada usia 6 hingga 12 tahun, lalu di SLTP hingga usia 15 tahun. Pendidikan wajib ini bersifat cuma-cuma atau tanpa bayar bagi semua anak. Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat dan daerah untuk biaya makan siang di sekolah, piknik, kebutuhan belajar, perawatan kesehatan dan lain-lain. Seorang anak yang telah tamat Sekolah Dasar diwajibkan meneruskan pendidikannya ke sekolah menengah pertama

Satu kelas bisa saja cukup besar dan terdiri dari 40 orang siswa di SD. Dengan demikian kelompok-kelompok siswa merupakan bagian yang penting dari kegiatan belajar serta kegiatan lainnya. Kelompok-kelompok siswa di tiap-tiap kelas bergiliran membersihkan ruang kelas, lorong antar kelas, kamar kecil, lapangan bermain serta bagian-bagian lainnya dari sekolah.

Hampir semua siswa Jepang belajar Bahasa Inggris, yakni sejak tahun pertama mereka di SLTP dan kebanyakan mempelajarinya paling tidak selama enam tahun. Tentu saja Bahasa Jepang juga merupakan bagian yang penting dari pelajaran mereka. Diperlukan waktu yang lama dan latihan praktek terus-menerus guna belajar menulis Bahasa Jepang. Mata pelajaran wajib di SLTP adalah Bahasa Jepang, Ilmu-ilmu Sosial, matematika, sains, musik, seni rupa, pendidikan jasmani dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Berbagai mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu sehingga jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda.

Sejumlah sekolah mengharuskan siswa mengenakan pakaian seragam. Secara tradisi, siswa putra mengenakan seragam hitam berleher tegak dan kancing keemasan, namun sekarang seragam putra berwarna biru dan warna-

warna lain; seragam untuk musim panas kerap mencakup pula celana pendek. Seragam siswa putri kebanyakan berwarna biru tua dengan rok berlepit-lepit, tapi model ini pun sekarang tengah mengalami perubahan. Para siswa kecil kini ada yang mengenakan topi yang berwarna terang agar mudah terlihat oleh pengendara mobil. Seragam dewasa ini lebih nyaman dikenakan dan lebih menarik dari pada seragam di masa lampau, tapi tetap penting peranannya seperti sebelumnya, yaitu agar para siswa berpakaian rapi ke sekolah. Sekolah wajib ditempuh selama 9 tahun, 6 tahun di Sekolah Dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama, setelah itu meneruskan ke sekolah menengah atas.

Pendidikan Menengah Atas. Sekitar 97 % siswa meneruskan studi di SMA dan lulus ketika mereka berusia delapan belas. Tiga perempat dari siswa tersebut bersekolah di sekolah menengah umum, sementara yang seperempat lainnya bersekolah di sekolah menengah khusus kejuruan.

Ada tiga jenis sekolah menengah atas: *full-time*, *part-time* (terutama malam hari), dan tertulis. Sekolah menengah yang *full-time* berlangsung selama tiga tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya menghasilkan diploma yang setara. Bagian terbesar siswa mendapat pendidikan menengah atas di sekolah menengah atas *full-time*. Jurusan di sekolah menengah atas dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berikut ini berdasarkan pola kurikulum: jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, *home economic*, perawatan dan lain-lain. Untuk masuk ke salah satu jenis sekolah tersebut, siswa harus mengikuti ujian masuk dan membawa surat referensi dari sekolah menengah tempat ia lulus sebelumnya.

Hampir semua SLTP dan SMU serta universitas swasta menentukan penerimaan siswa melalui ujian masuk, dan setiap sekolah menjalankan ujian masuk sendiri. Siswa yang ingin masuk sekolah yang bersangkutan harus mengikuti ujian, kecuali bila berasal dari tingkat yang lebih rendah di sekolah yang sama. Ada siswa bersekolah di sekolah yang sama mulai dari SD, SLTP, hingga SMU. Karena ujian masuk sangat sulit, siswa kerap mengikuti les tambahan (bimbingan belajar) di *juku* atau *yobiko* pada akhir minggu atau pada sore/malam hari biasa, selain pelajaran di sekolahnya. Mengikuti les di *juku* dapat dilakukan bahkan sebelum memasuki SD.

Tahun ajaran baru sekolah di Jepang mulai pada bulan April. Ada liburan musim panas selama beberapa minggu, dan liburan dua minggu waktu tahun baru. Tahun ajaran berakhir bulan Maret. Kemudian sekolah libur selama dua minggu sebelum mulai tahun ajaran baru selanjutnya. Siswa biasanya bersekolah lima atau enam hari seminggu. Pengajaran memakai metode konvensional maupun teknik-teknik moderen, seperti pengajaran dengan media komputer. Pelajaran di kelas berlangsung dari jam 8.30 pagi hingga sekitar 3.00 atau 3.30 sore pada hari kerja. Bila ada pelajaran pada hari Sabtu, maka biasanya berakhir

pada tengah hari. Banyak siswa mengikuti bimbingan belajar di *juku*, ikut serta dalam kegiatan olah raga atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya pada sore hari.

Pendidikan Tinggi. Sekitar 22 % lulusan sekolah menengah atas melanjutkan studi ke *college* (akademi) atau universitas, dan banyak yang juga ke *junior college* atau *college teknik*. Ada tiga jenis lembaga pendidikan tinggi, yakni: universitas, *junior college* (akademi), dan *technical college* (akademi teknik). Di universitas terdapat pendidikan sarjana (S-1) dan pasca sarjana (S-2 dan S-3). Pendidikan S-1 selama tahun menghasilkan sarjana bergelar *Bachelor's degree*, kecuali di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi selama 6 tahun. Pendidikan pascasarjana dibagi dalam dua kategori, yakni *Master's degree* (S-2), dan *Doctor's degree* (S-3). S-2 berlangsung sekitar dua tahun sesudah tamat S-1, sedang S-3 berlangsung lima tahun.

Junior College memberikan pendidikan selama dua atau tiga tahun bagi para lulusan sekolah menengah atas. Kredit yang diperlukan di *Junior College* dapat dihitung sebagai bagian dari kredit untuk memperoleh gelar *bachelor's degree* (S-1). Lulusan sekolah menengah (setingkat SLTP) dapat masuk ke *technical college* (akademi teknik). Pendidikan di lembaga ini berlangsung selama 5 tahun (*full-time*) untuk mencetak tenaga teknisi. Universitas dan *junior college* memilih mahasiswanya berdasarkan hasil ujian masuk serta hasil prestasi belajar dari sekolah menengah atas. Untuk universitas negeri dan umum daerah, sejak 1979, diberlakukan "tes gabungan kecakapan" yang seragam, sebagai tahap pertama dari sistem ujian masuk. Tahap kedua, berupa ujian masuk universitas yang bersangkutan sebagai seleksi final.

Pendidikan tinggi di Jepang berada di bawah pengelolaan tiga lembaga, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak swasta. Ada lima jenis pendidikan tinggi yang bisa dipilih mahasiswa asing di negeri *sakura* ini, yaitu: program sarjana, pasca sarjana, diploma (non-gelar), akademi dan sekolah kejuruan. Program sarjana atau *daigakugakubu* menerima tiga macam mahasiswa, yaitu mahasiswa reguler (*seikesei*), mahasiswa pendengar (*choukousei*) dan mahasiswa pengumpul kredit (*kamokutourishuusei*). Mahasiswa reguler adalah mereka yang belajar selama 4 tahun kecuali jurusan kedokteran umum, kedokteran gigi dan kedokteran hewan yang harus menempuh waktu studi selama 6 tahun. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang diijinkan mengambil mata kuliah tertentu dengan syarat dan jumlah kredit yang berbeda di setiap universitas tapi kredit itu tidak diakui. Sedangkan mahasiswa pengumpul kredit hampir sama dengan mahasiswa pendengar, tapi kreditnya diakui. Program pasca sarjana atau *daigakuin* terdiri dari program Master (*shuushikatei*), Doktor (*hakasekatei*), mahasiswa peneliti (*kenkyuusei*), mahasiswa pendengar dan pengumpul kredit. Mahasiswa peneliti adalah mahasiswa yang diijinkan melakukan penelitian dalam bidang tertentu selama 1 semester atau

satu tahun tanpa tujuan mendapatkan gelar. Program yang ketiga adalah diploma (*tankidaigaku*), lama pendidikannya 2 tahun. Enam puluh persen dari program ini diperuntukkan bagi pelajar perempuan dan mengajarkan bidang-bidang seperti kesejahteraan keluarga, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Akademi (*senshuugakko*) atau *special training academy* adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan bidang-bidang khusus seperti keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari dengan lama masa pendidikan antara 1 sampai 3 tahun. Sedangkan sekolah kejuruan (*koutousenmongakka*) adalah program khusus untuk lulusan SLTP dengan lama pendidikan 5 tahun dan bertujuan membina teknisi yang mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dewasa ini mahasiswa asing cenderung terkonsentrasi di Tokyo, padahal wilayah lain sebenarnya memiliki kelebihan tersendiri seperti harga barang dan sewa pondokan yang lebih murah, jumlah siswa lebih sedikit dan kurikulum khusus. Kanto di Pulau Honshu merupakan wilayah dimana universitasnya diminati mahasiswa asing. Beberapa universitas yang ada di wilayah ini antara lain adalah Tsukuba International University, University of Tsukuba, Tokyo International University, Chiba University, Nihon University, Risho University dan The University of Tokyo. Pendidikan tinggi Jepang mengenal istilah *tokyoroku daigaku*, yang artinya 6 universitas tradisional di Tokyo. Keenam universitas dengan latar belakang sejarah yang kental dan terkenal ini adalah University of Tokyo, Waseda University, Keio University, Meiji University, Hosei University dan Rikkyo University. Bentuk keakraban yang sering dilakukan keenam universitas ini adalah mengadakan berbagai kompetisi olah raga, salah satunya adalah *baseball* yang kerap diadakan pada musim semi dan gugur di *Jingu Stadium, Shibuya-ku*. Kebudayaan Jepang menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa asing yang sedang belajar di lembaga pendidikan tinggi di Jepang mencapai 51.298 orang dan 90 % berasal dari negara-negara Asia. Bidang studi yang mereka ambil adalah sosial, humaniora dan teknik. Sepuluh universitas nasional penerima beasiswa asing terbanyak (per 1 Mei 1998) menurut data AIEJ (*Association of International Education, Japan*) adalah Universitas Tokyo, Kyoto, Tsukuba, Nagoya, Osaka, Institut Teknologi Tokyo, Universitas Kyushu, Tohoku, Chiba, dan Hiroshima.. sedangkan universitas swastanya adalah Universitas Waseda, Nihon, Takushoka, Keio, Risho, Meikai, Daito Bunka, Kyushu Sangyo, Jochi (Shofia) dan Universitas Ritsumeikan. Semua perkuliahan di lembaga pendidikan Jepang menggunakan Bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar dan hanya sedikit sekali yang menggunakan Bahasa Inggris. Itu sebabnya mahasiswa asing disarankan untuk belajar bahasa dulu selama 6 bulan sampai 2 tahun sebelum mereka mendaftar ke lembaga pendidikan tinggi yang diinginkan. Bila disajikan dalam bentuk bagan, secara keseluruhan sistem pendidikan di Jepang tampak sebagai berikut.

BAGAN 4 SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG

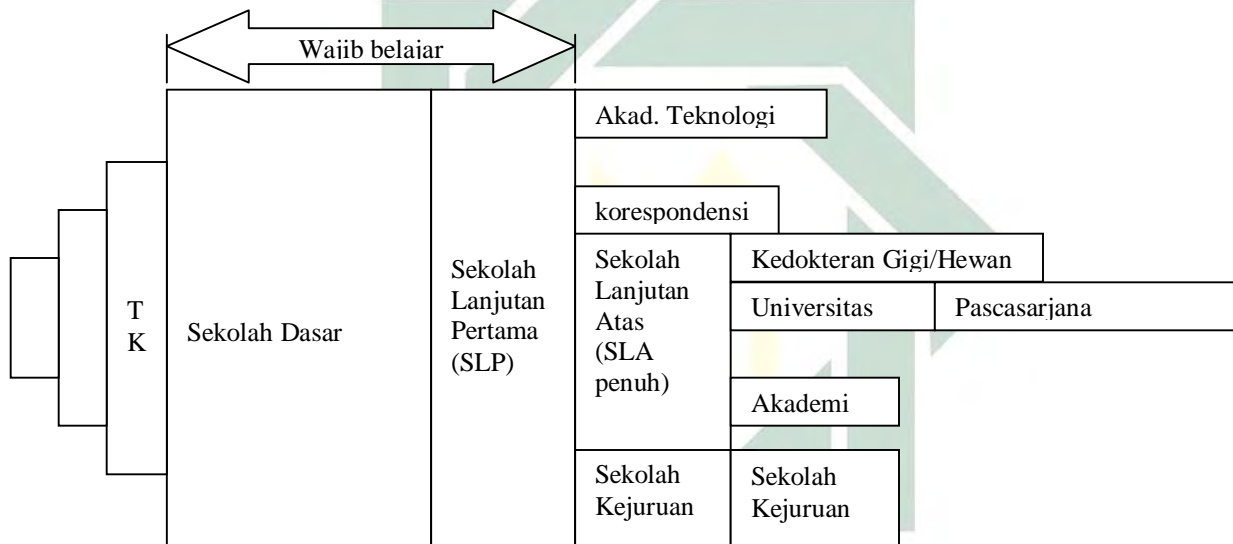
Usia standar

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Tahun pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Pra-sekolah	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah	Pendidikan Tinggi
-------------	------------------	---------------------	-------------------



Beasiswa bagi mahasiswa asing pada umumnya diperuntukkan bagi mahasiswa di universitas dan mahasiswa peneliti atau jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan bantuan beasiswa untuk siswa akademi atau lembaga kursus bahasa bisa dikatakan hampir tidak ada. Permohonan beasiswa umumnya dilakukan setelah mahasiswa tiba di Jepang. Namun ada juga beberapa jenis beasiswa yang bisa diperoleh sebelum kedatangan di Jepang, misalnya beasiswa pemerintah Jepang (*Monbusho*) untuk mahasiswa peneliti, program pelatihan guru, program Diploma 3, Diploma 2 dan program studi mengenai Jepang, berasal dari beasiswa pemerintah daerah dan lembaga swasta serta beasiswa studi jangka pendek. Sedangkan beasiswa yang lain bisa diperoleh setelah mahasiswa tiba di Jepang, berupa beasiswa *Monbusho*, beasiswa penghargaan bagi mahasiswa asing biaya sendiri, beasiswa pemerintah daerah, beasiswa lembaga swasta, beasiswa dari lembaga pendidikan tertentu, dan program pengurangan biaya

kuliah. Pemerintah Jepang juga membuka kesempatan bekerja di negara tersebut bagi mahasiswa asing yang sudah lulus dari salah satu lembaga pendidikan tinggi Jepang. Mereka yang ingin bekerja setelah lulus ini kian bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Data dari kantor imigrasi Jepang tahun 1997 menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa asing yang mengajukan permohonan perubahan status tinggal agar dapat bekerja di Jepang mencapai 2.775 kasus, dan 94,6 persennya dikabulkan.

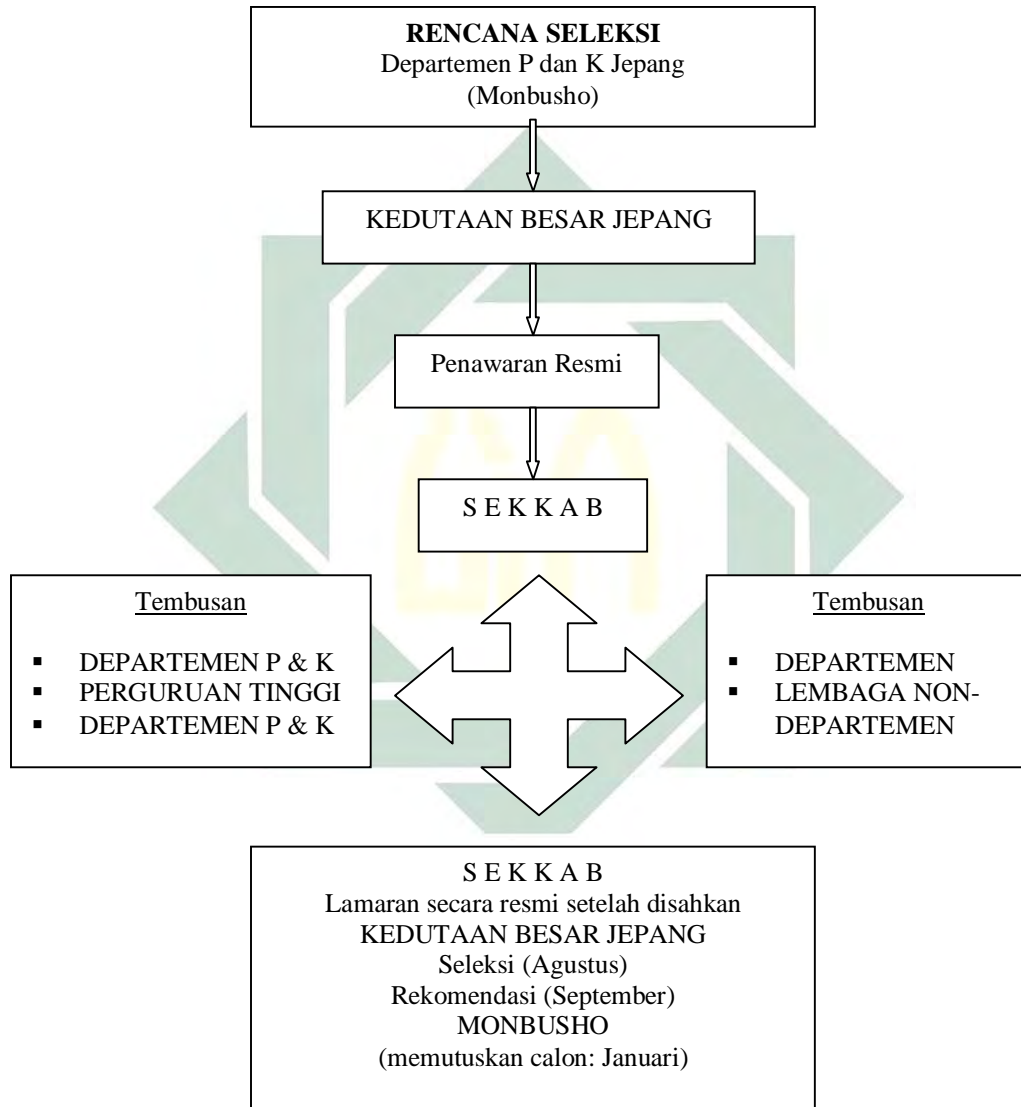
Departemen Pendidikan Jepang (*Monbusho*) memberikan beasiswa bagi orang-orang berprestasi di setiap negara untuk melanjutkan pendidikan tingkat pasca sarjana ke Jepang. Keputusan mengenai pemberian beasiswa diberikan sebelum penerima beasiswa datang ke Jepang. Ada dua macam prosedur untuk pelamaran beasiswa *Monbusho* tingkat pasca sarjana yaitu, pertama, calon penerima beasiswa direkomendasikan oleh Kedutaan Besar Jepang ke *Monbusho* yang dinamakan *Government to Government Program (G to G)*. Kedua, dari Perguruan Tinggi di Jepang (misalnya *Tokyo Institute of Technology*) yang merekomendasikan calon penerima beasiswa dari perguruan tinggi yang mempunyai kerjasama dalam bidang akademis (misalnya Institut teknologi Bandung) kepada *Monbusho* yang dinamakan *University to University Program (U to U)*. Namun bagi pelamar yang almahaternya tidak menjalin kerjasama dengan universitas negeri di Jepang, tetap terbuka kemungkinan untuk mencoba program U to U. Setiap tahun dari Indonesia terpilih kira-kira 45 orang untuk menerima beasiswa melalui program G to G, dan 50 orang melalui program U to U. Khusus untuk program G to G, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Indonesia, para pelamar harus berstatus pegawai negeri. Bagi mereka yang berstatus pegawai negeri tetapi mengajar di universitas/perguruan tinggi swasta, juga dapat melamar beasiswa ini.

Umumnya mahasiswa yang kuliah ke Jepang asal Indonesia mengambil bidang yang dikategorikan umum, artinya bukan kajian keislaman. Akan tetapi perkembangan belakangan ini cukup menarik, karena beberapa universitas dan lembaga independen di Jepang mulai berminat terhadap kajian ini. Sarjana Jepang yang melakukan penelitian Islam di Indonesia bahkan menulis referensi tentang Islam juga terus berkembang. Memang, diakui bahwa hampir seluruh IAIN di Indonesia tidak ada, untuk tidak menyebut sedikit sekali, yang mengambil studi lanjut di Jepang, khusus bidang ini. Sangat berbeda dengan negara-negara semisal Belanda, Kanada, Australia dan lain-lain. Sesuatu yang masih harus dipertimbangkan oleh kedua negara.

Sebaliknya, untuk program U to U pelamar tidak harus berstatus pegawai negeri. Bagi mereka yang berminat dan universitasnya mempunyai kerja sama dengan salah satu universitas negeri di Jepang, dapat berkonsultasi dengan dosennya. Bagi mereka yang universitasnya tidak mengadakan kerja sama harus dapat mencari sendiri seorang professor atau *associate* yang pada saat itu aktif mengajar di universitas negeri di Jepang. Untuk program U to U hal ini

merupakan langkah terpenting karena *application form* akan dikirimkan oleh professor, bukan dari Kedutaan maupun maupun Konjen. Agar lebih mudahnya, berikut ini disajikan bagan proses studi ke Jepang, jalur G to G maupun U to U.

BAGAN 5 G TO G PROGRAM

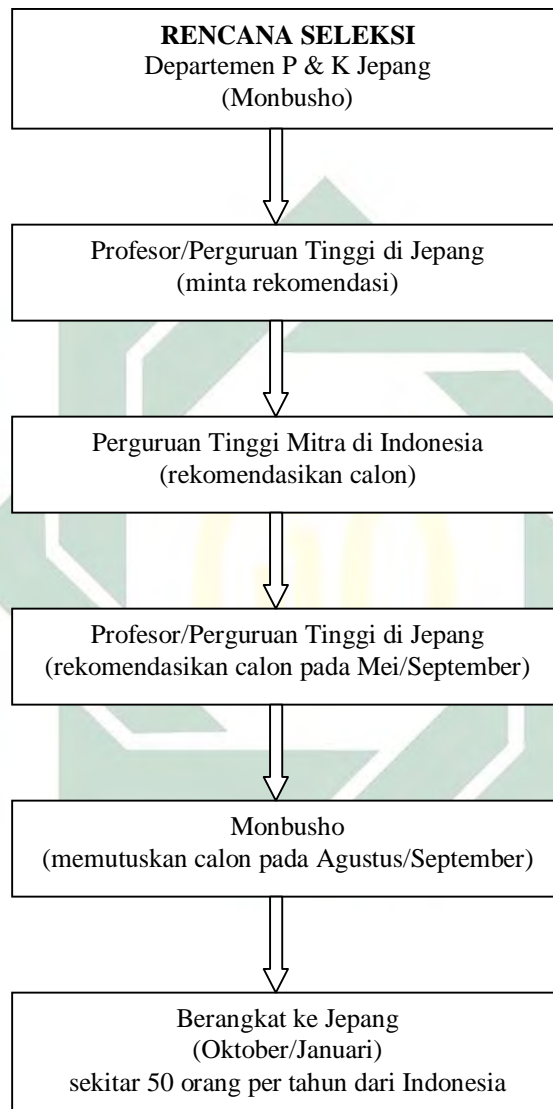


Sumber: *Mari Belajar di Jepang (untuk tingkat pasca sarjana)*, Jakarta: Kedutaan Jepang, 1999. h.6.

Sedang jalur U to U lebih sederhana, terutama bila telah terjalin kerja sama antar universitas di kedua negara, baik universitas negeri maupun swasta,

keduanya memiliki peluang yang sama untuk studi di Jepang. Berikut ini adalah bagan proses penerimaan mahasiswa baru via jalur U to U.

BAGAN 6 U TO U PROGRAM



Sumber: *Mari Belajar di Jepang (untuk tingkat pasca sarjana)*, Jakarta: Kedutaan Jepang, 1999. h.7.

Hal yang penting diketahui oleh calon mahasiswa asing di Jepang adalah bagaimana menghadapi gempa bumi, karena gejala alam ini memang cukup sering terjadi di Jepang. Yang perlu diingat adalah mebel/peralatan rumah tangga harus direkatkan ke dinding menggunakan *folder* yang dapat diperoleh di

toko serba ada atau toko mebel. Semua barang berharga sebaiknya disimpan di bank dan sebaiknya harus mengetahui lokasi pengungsian yang terdekat, serta persiapan lain.

Profile

Chiba University. Didirikan pada Mei 1949 dengan misi dasar menanamkan para mahasiswa agar memiliki wawasan luas dan kemampuan penelitian akademik. Saat ini Chiba University mempunyai 9 fakultas: Fakultas Sastra, Pendidikan, Hukum dan Ekonomi, Sains, Kedokteran, Sains Farmasi, Sekolah Perawatan, Teknik dan Fakultas Holtikultura. Fasilitas penelitian dan pendidikan, perpustakaan dan rumah sakit serta lainnya, tersebar di tiga kampus dalam prefektur Chiba, yaitu: kampus Nishi-Chiba, kampus Inohana, dan kampus Matsudo. Didasarkan pada program penelitian dan pendidikan jenjang pendidikan tinggi, Universitas Chiba memiliki 6 jurusan yang menawarkan program Master dengan jurusan: Humaniora, Pendidikan, Ilmu-ilmu Sosial, Sains, Teknik, dan jurusan Holtikultura. Sedang pada program Doktor ditawarkan 5 jurusan, yaitu: Kedokteran, Sains Farmasi, Jurusan Perawat, Sains dan Teknologi, Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Jumlah mahasiswa dan para peneliti asing di Universitas Chiba terus bertambah secara pesat. Pada 1995, terdapat 700 mahasiswa asing yang mendaftar di universitas ini. Mulai Oktober 1996, Universitas Chiba melancarkan program jangka pendek (*short-term program*) yang dirancang bagi para mahasiswa asing, dimana semua perkuliahannya disampaikan dalam Bahasa Inggris.

Kebijakan pendidikan. Peraturan pendidikan di Jepang dapat dibedakan dari dua periode, sebelum dan sesudah Perang Dunia II. Sebelum perang, kebijakan pendidikan yang berlaku adalah Salinan Naskah Kekaisaran tentang Pendidikan (*Imperial Rescript on Education*). Dinyatakan bahwa para leluhur Kaisar terdahulu telah membangun Kekaisaran dengan berbasis pada nilai yang luas dan kekal serta menanamkannya secara mendalam dan kokoh. Materi pelajarannya dipadukan dalam bentuk kesetiaan dan kepatuhan dari generasi ke generasi yang menggambarkan keindahannya. Itulah kejayaan dari karakter Kaisar, dimana ia juga telah mengendalikannya dengan sumber-sumber pendidikan. Pendidikan hendaknya mampu mengafiliasikan seseorang kepada orang tuanya, kasih sayang kepada saudara lelaki maupun perempuan, suami-istri secara harmoni, sebagai sahabat sejati, menjadi diri sendiri yang sederhana dan moderat, mencurahkan kasih sayang pada semua pihak, dan menuntut

belajar dan memupuk seni. Dari situlah pendidikan tersebut dapat mengembangkan daya intelektual dan kekuatan moralnya yang sempurna, selalu menghormati konsitusi dan menjalankan hukum. Dalam kondisi darurat sekalipun, diharapkan dapat mempersembahkan keberanian demi negara, melindungi dan menjaga kesejahteraan Istana Kaisar seusia langit dan bumi. Maka, janganlah menjadi orang yang baik dan setia semata, melainkan mampu melanjutkan tradisi leluhur yang amat mulia sebagaimana digambarkan di atas.

Sesudah perang, mulai 3 Nopember 1946, konstitusi baru Jepang menetapkan kebijakan pendidikannya atas dasar hak asasi manusia (pasal 14), jaminan kebebasan berpikir dan hati nurani (pasal 19), kebebasan beragama (pasal 20), kebebasan akademik (pasal 23), dan hak bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka (pasal 26). Dan, pada Maret 1947, melalui Peraturan Pendidikan Sekolah (*School Education Law*) ditetapkan susunan dasar sistem pendidikan keseluruhan atas dasar 6-3-3-4 berserta tujuan khusus pada tiap jenjangnya.

Lalu, pada Maret 1947 juga, berlaku Hukum Dasar Pendidikan (*Fundamental Law of Education*) yang pada hakekatnya merupakan *statement* filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan *Imperial Script on Education*. Misalnya, dalam *Imperial Script on Education* disebutkan bahwa dalam hal hubungan antara warga dengan negara, disebutkan bahwa setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersembahkan keberaniannya demi negara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan Istana Kaisar, maka dalam *Fundamental Law of Education* disebutkan bahwa tiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal usul keluarga, bantuan finansial bagi yang memerlukan, kebebasan akademik, dan tanggungjawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai. Perbedaan yang lain mengenai tujuan pendidikan. dalam *Imperial Rescript on Education* disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi Kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat di bawah ayah yang sama, yakni Kaisar. Sedangkan tujuan pendidikan menurut *Fundamental Law of Education* disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individual, dan menanamkan jiwa yang bebas.

Agama. Dua agama utama di Jepang adalah Shinto dan Budha. Meskipun banyak orang Jepang dewasa ini mengatakan bahwa mereka tidak menganut suatu kepercayaan secara khusus, ternyata banyak yang ambil bagian dalam adat-istiadat dan ritual Shinto maupun Budhis. Misalnya, kebanyakan upacara pernikahan diselenggarakan berdasarkan ritual Shinto, sedangkan upacara pemakaman biasanya mengikuti cara Budhis. Shinto merupakan kepercayaan

pribumi Jepang yang bermula pada sejarah kuno dan mitos-mitos dimana orang percaya bahwa kekuatan-kekuatan spiritual (*kami*) memang ada dalam alam –di pohon-pohon atau di gunung-gunung, di laut atau dalam angin.

Dengan perkembangan Shinto, *kami* mulai mencakup tokoh-tokoh pahlawan serta mereka yang dihormati. Sebelum adanya kuil Shinto, rakyat mendatangi berbagai tempat alam untuk memuja *kami*. Dewasa ini, ada rumah-rumah yang mempunyai “altar pemujaan dewa” yang kecil dimana disajikan makanan kepada para dewa.

Agama Budha berasal dari India dan masuk ke Jepang (melalui China dan Korea) pada sekitar pertengahan abad ke-6. Ada banyak sekte Budhis yang berbeda-beda. Di kuil-kuil Budhis terdapat patung suci (*butsuzo*). Di depan patung-patung tersebut, para pengunjung biasanya menyalakan dupa. Di rumah banyak keluarga Jepang mempunyai altar Budhis dimana mereka menyatakan rasa hormat kepada nenek-moyang.

Agama Kristen dibawa masuk ke Jepang oleh para misionaris Spanyol dan Portugis pada pertengahan abad ke-16. orang Kristen hanya mencakup prosentase kecil dari populasi Jepang. Di Jepang juga terdapat sejumlah kelompok kepercayaan baru yang kebanyakan didirikan oleh pemimpin-pemimpin karismatik dalam dua abad belakangan ini. Dewasa ini, selain kuil-kuil Budhis dan Shinto, terdapat pula kelompok dan tempat sembahyang bagi kaum Katolik, Protestan, Kristen Ortodoks Timur, Mormon, Yahudi, Hindu, Muslim, serta para pengikut berbagai agama dan kepercayaan lainnya.

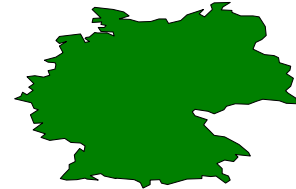
Sejalan dengan meningkatnya kontak antar bangsa dan internasionalisasi pendidikan, belakangan ini para pelajar dan mahasiswa Muslim di seluruh dunia berdatangan untuk studi di Jepang. Pada 1994, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Jepang, baik dengan status beasiswa pemerintah Jepang, beasiswa pemerintah Indonesia maupun biaya sendiri, untuk jenjang S-1, S-2, S-3 dan lain-lain, mencapai 1178 orang. Dibandingkan dengan negara lain dalam periode yang sama, meskipun angka ini tergolong kecil, yang ditekankan dalam konteks ini adalah bahwa pelajar dan mahasiswa Indonesia yang kebanyakan beragama Islam terus berdatangan ke Jepang, lalu membentuk komunitas Muslim tersendiri bersama dengan rekan-rekan seagamanya dari belahan dunia yang lain. Studi keislaman di Jepang juga menunjukkan peningkatan. Di Universitas Tokyo telah didirikan *Islamic Area Studies Project* di bawah pimpinan Sato Tsugitaka. Masjid dan *Islamic Center* menjadi tempat rujukan kaum Muslim yang tinggal di Jepang untuk saling bertemu. Praktek ibadah haji asal Jepang terus meningkat dan diorganisir secara resmi oleh pemerintah Jepang. Beberapa sarjana Jepang mulai menunjukkan minatnya terhadap kajian keislaman atau Islam konteks keIndonesiaan, seperti yang dilakukan oleh Toshohiko Isutzu, Mitsuo Nakamura, Akira Nagazumi, dan masih banyak lainnya.

Daftar Pustaka

- Abdoelrachman, K. *Knowing Countries*. Jakarta: Penerbit Djambatan, [1976].
- Andersen, Arthur. *Pacific Economic Outlook 1999-2000*. San Fransisco: The Asia Foundation, 1999.
- Association of International Education, Japan (AIEJ). *Japanese Colleges and Universities 1995-1997*. Tokyo: AIEJ, 1995.
- Association of International Education, Japan (AIEJ). *Panduan Mahasiswa ke Jepang 1996*. Jakarta: AIEJ, 1996.
- Association of International Education, Japan (AIEJ). *Scholarships for International Students in Japan*. Tokyo: AIEJ, 1997.
- Barnadib, Imam. *Dasar-Dasar Pendidikan Perbandingan*. Yogyakarta: Institute Press IKIP, 1986.
- Chiba University 1995-1996.
- Kedutaan Jepang. *Mari Belajar di Jepang*. Jakarta: Bagian Pendidikan Kedutaan Jepang, [1997].
- Kedutaan Jepang. *Wajah Jepang Dewasa Ini*. Jakarta: Bagian Pendidikan Kedutaan Jepang, [1997].
- Toyofumi, Ogura. *The Atomic Bomb and Hiroshima*. Tokyo: Liber Press, 1994.
- Tsugitaka, Sato. "Islamic Area Studies Project" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM, 1/1998.

▣ JERMAN

R EPUBLIK Federal Jerman terletak di jantung Eropa, berpenduduk sekitar 82 juta jiwa (1998), 7,2 juta jiwa, di antaranya berasal dari warga negara asing. Saat ini, Jerman memiliki sembilan negara tetangga, dikelilingi oleh Belanda, Prancis, Austria, Chechnya dan lain-lain.



Republik Federal Jerman berdiri pada 1949, bersamaan dengan kelahiran negara tersebut, di tahun yang sama telah terlahir sebanyak 793.095 bayi. Sejak 1914 hingga 1949, atau dalam kurun waktu 35 tahun, Jerman mengalami dua kali Perang Dunia. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, Jerman mengalami goresan yang dalam akibat pendudukan tentara asing, pelarian, pengusiran dan akhirnya pemisahan tanah (Jerman Barat dan Jerman Timur). Kemudian, melalui perjanjian Paris, Republik Federal Jerman pada 1955 menjadi anggota dari negara kesatuan negara-negara Barat yang liberal. Keputusan tersebut tidak dapat ditarik kembali karena sebagai jaminan bagi kebebasan dan perdamaian di Eropa. Politik dalam dan luar negeri Jerman berada di bawah gagasan pokok, yakni suatu tatanan damai yang membuat seluruh bangsa Eropa, termasuk seluruh Jerman, secara bersama-sama memasuki kebebasan.

Pada 1952, Republik Demokrasi Jerman (DDR) atau Jerman Timur menutup wilayah perbatasannya dengan Republik Federal Jerman. Namun setahun kemudian, pada 1953, terjadi protes demokrasi di Berlin Timur. Pada 17 Juni di seluruh Jerman Timur terjadi huru-hara menuntut pembebasan dan penyatuan Jerman Timur dan Barat. Peristiwa ini akhirnya dapat ditumpas oleh pasukan Uni Soviet. Tanggal 17 Juni tersebut di Republik Federal Jerman dirayakan sebagai "Hari Kesatuan Jerman" dan diundangkan sebagai hari raya resmi. Namun pada 1961, Jerman Timur menutup perbatasan Berlin Barat dan Timur, lalu mulai membangun tembok untuk menghindari larinya penduduk secara massal. Hubungan tarik-menarik antar dua bagian Jerman ini pada akhirnya berhenti pada 1990, ketika Jerman Timur dan Barat bersatu, dan tembok Berlin yang semula sebagai simbol perbatasan dijebol ramai-ramai oleh warga kedua Jerman yang telah merindukan persatuan sejak lama tersebut, bersamaan dengan itu Berlin dijadikan sebagai ibu kota Jerman. Pada 2000, pusat pemerintahan pindah dari Bonn yang berpenduduk 400.000 penduduk ke kota metropolitan Berlin yang berpenduduk 3,4 juta jiwa. Melalui Hukum Dasar, setiap orang dijamin hak fundamentalnya dalam hal kebebasan beragama, kebebasan bicara dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Kerjasama Indonesia-Jerman di bidang pendidikan bisa dibilang telah berlangsung sejak lama, dan terus meningkat intensitasnya. Pada 1988, Badan Kerjasama Teknik Jerman (GTZ) melakukan kerjasama pendidikan dengan Indonesia dalam rangka pembaharuan sistem pengajaran di Sekolah Menengah Pertama (sekarang SLTP) melalui pengadaan peralatan sains dan praktek di laboratorium. Dengan pembaruan tersebut, sistem pengajaran tidak semata bersifat verbalistik yang mengandalkan catatan di papan tulis, melainkan melalui peragaan gambar dan praktek di laboratorium. Bantuan biaya studi di Jerman berupa beasiswa, sebagaimana dikelola oleh Dinas Pertukaran Akademis Jerman (*Deutscher Akademischer Austauschdienst* atau DAAD) berjalan secara periodik dan informasinya dapat diperoleh melalui perwakilan DAAD di Jakarta. Dari Dinas ini telah melahirkan banyak sarjana Indonesia alumni Jerman.

Kerjasama antar kedua negara juga meliputi bidang non-pendidikan. Bantuan kerjasama teknis berupa pengalihan pengembangan sektor pertanian dan pedesaan yang mengarah pada bidang industri (*Technical Cooperation for Area development*) berlangsung pada 1987 untuk proyek pengembangan wilayah Kalimantan Timur.

Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Jerman Barat. Jerman memang unik, karena dapat dibedakan antara pendidikan di Jerman Barat dengan Jerman Timur, terutama sebelum penyatuannya pada 1990. Meskipun saat ini telah bersatu, beberapa perbedaan dalam praktek pendidikannya masih terlihat. Oleh karena itu, uraian berikut ini menengahkan dalam perspektif historis kondisi pendidikan di Jerman sebelum bersatu, agar diketahui akar historisnya. Adapun pendidikan di Jerman saat ini, diuraikan segera setelah bagian ini.

Republik Federal Jerman atau Jerman Barat terdiri dari federasi 11 *Länder* (negara bagian), dimana masing-masing di antaranya memiliki pemerintahan, parlemen dan administrasi sendiri. Menurut pasal 7 konstitusi Jerman Barat, otonomi budaya dijamin keberadaannya bagi *Länder*; ini berarti bahwa pendidikan di Jerman Barat, termasuk pendidikan tinggi, menjadi tanggungjawab *Länder*. Jadi, sekolah dan pembangunan sistem pendidikannya merefleksikan tingkat situasi politik yang sesuai dengan masing-masing *Länder*. Untuk meningkatkan persatuan Jerman yang lebih tinggi lagi, para menteri pendidikan sejak 1948 melakukan pertemuan bulanan dan mendirikan Konferensi Permanen Para Menteri Pendidikan bagi *Länder*. Konferensi ini merupakan Badan Penasehat yang rekomendasinya dipublikasikan, namun perlu diberikan kekuatan hukum dalam peraturan oleh tiap parlemen, atau dalam beberapa hal, menyangkut keputusan para menteri pendidikan.

Para menteri pendidikan mendirikan kurikulum (*Lehrpläne*) namun sering kali hanya sebatas pada kerangka kerja semata. Para menteri ini menerbitkan daftar buku teks yang sesuai dimana sekolah dapat memilih judul buku yang

mereka kehendaki. Masing-masing komunitas (*Gemeinde*) mempunyai panitia sekolah (*Schulausschuss*) yang mengurus pengangkatan para guru dan kepala sekolah. Panitia bertanggungjawab bagi upaya perawatan gedung dan peralatan sekolah.

Di seluruh sekolah negeri, sekolah diberikan secara gratis dengan menyediakan pendidikan umum dan kejuruan. Sekolah swasta bisa menerima bantuan dari *Land* jika upaya yang dilakukan dalam memenuhi minat masyarakat dan jika mereka berganti menjadi sekolah negeri. Sebagai aturannya, gaji guru dibayar oleh *Lander*. Biaya konstruksi sekolah dan transportasi pelajar disubsidi oleh *Lander*.

Struktur dan Organisasi. Di beberapa *Lander*, sekolah dasar dibagi menurut aliran keagamaan dari orang tua. Lebih dari setengah populasi penduduknya beragama Kristen Protestan; dan sekitar 44 persen beragama Kristen Roman Katolik. Hubungan antara gereja Katolik dengan pihak sekolah di tiap *Lander* ditentukan oleh perjanjian yang disepakati dengan pihak Vatikan. Para orang tua dapat menentukan sekolah mana yang akan mereka pilih untuk mengirim anak mereka. Di beberapa *Lander* terdapat pemisahan antara sekolah dasar dengan sekolah yang berafiliasi pada aliran agama tertentu (*Bekennntnisschulen*); sementara di *Lander* lainnya terdapat sekolah komunitas Kristen (*Gemeinschaftsschulen* atau *Simultanschulen*), dimana pelajaran keagamaan diberikan menurut aliran keagamaan para muridnya. Sekolah menengah umumnya berupa komunitas sekolah Kristen; namun terjadi perkembangan ke arah orientasi sekolah utama (*Hauptschulen*), bahkan di beberapa wilayah yang dominan warga Katolik, seperti Bavaria, dan Rhine-Bavaria Utara, juga demikian. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku, pelajaran keagamaan merupakan bagian dari kurikulum semua sekolah.

Pendidikan pra-sekolah. Pendidikan pra-sekolah dilaksanakan secara sukarela (oleh Yayasan swasta, pen). Kebanyakan Taman Kanak-kanak (*Kindergarten*) bagi anak-anak antara usia tiga dan enam tahun dilaksanakan oleh lembaga swasta dan pihak gereja dan disupervisi oleh pejabat sosial, yakni para menteri dan badan kesejahteraan sosial.

Pendidikan dasar. Sekolah dasar (*Grundschule*) wajib dilalui oleh semua anak. Lamanya berkisar antara usia empat tahun hingga 6 tahun, dengan diberikan pelajaran agama, Bahasa Jerman, menyanyi, geografi, aritmatika, pendidikan fisik, seni kreativitas, dan sains. Bagi perempuan diberikan pelajaran menjahit.

Pendidikan Menengah. Murid sekolah menengah harus masuk sekolah hingga usia 15 tahun. Mereka dapat masuk ke salah satu dari tiga jenis sekolah:

sekolah utama (*Hauptschulen*), sekolah intermediate (*Realschule*), atau sekolah menengah klasik (*Gymnasium*).

Pelaksanaan sistem sekolah menengah tergolong selektif dan penyebaran murid ke sekolah ini dilakukan melalui prosedur pindahan (*Schulerauslese*) yang parakteknya berbeda dari satu *Land* dengan *Land* yang lain. Pada umumnya dianggap termasuk tanggungjawab para guru *Grundschule* untuk mengevaluasi kecerdasan, kemampuan dan prestasi anak; laporan guru ini menjadi dasar bagi keputusan pindah. Jika orang tua tidak sepekat dengan laporan guru tersebut, ia bisa mengajukan ujian bagi anaknya. Rata-rata 65 sampai 70 persen para pelajar masuk ke *Hauptschule*, 15 persen mendaftar masuk ke *Realschule*, dan 15 hingga 20 persen diterima di *Gymnasium*. Berikut kelengkapan uraian mengenai ketiga jenis sekolah menengah tersebut.

Pertama, *Hauptschule*. Di kebanyakan *Länder*, sekolah ini berada di bawah akar yang sama dengan *Grundschule*; sistem ini disebut *Volksschule* (pendidikan primer dan elementer bagian atas) yang dimaksudkan bagi para pelajar yang mampu dan menaruh minat pada pelatihan praktek kejuruan selanjutnya. Pendidikan pra-kejuruan (*Arbeitslehre*) merupakan salah satu kegiatan utama yang ditempuh bagi tingkat akhir (sekolah meliputi tingkat 5 hingga 9).

Para pelajar *Hauptschule* menerima pelajaran agama, Bahasa Jerman, Bahasa Inggris, sejarah, geografi, biologi, fisika, kimia, aritmatika, geometri, menggambar dan kerajinan, menjahit (bagi wanita), pengetahuan domestik, musik dan pendidikan jasmani.

Kedua, *Realschule*, yang meliputi tingkat 5 (atau 7) hingga 10, telah mengalami perluasan sejak 1960 untuk memenuhi kebutuhan komersial dan industrial bagi pekerja trampil, dan untuk memenuhi kebutuhan penduduk bagi pendidikan yang lebih baik. Di kebanyakan *Länder*, Pendidikan *Realschule* berakhir selama 6 tahun. Di tiga kota dan Bavaria hanya diberikan empat tahun pelatihan (pendidikan primer ini menawarkan 6 tahun). Kebanyakan *Länder* tidak memberikan ujian akhir. Sertifikat tanda lulus diberikan sama dengan yang diberikan kepada para pelajar yang menyelesaikan *Gymnasium* setelah tingkat 10.

Ketiga, *Gymnasium*. Kebanyakan para pelajar *Gymnasium* ini melanjutkan ke universitas, dan 90 persen dari lulusannya masuk ke berbagai bentuk pendidikan tinggi. Ada dua bentuk *Gymnasium*, *Gymnasium sains* dan *Gymnasium eksperimental*. *Gymnasium sains* memberikan pelajaran bahasa klasik tradisional, bahasa modern, matematika, *Gymnasium eksperimental* memberikan mata pelajaran komersial, pedagogi, teknik, kewanitaan, seni, ekonomi, dan kajian sosial. Semua jenis *Gymnasium* mempunyai tingkat rendah umum yang ditempuh selama lima atau enam tahun pelatihan, tujuan dan bidang studinya sama persis, sedemikian hingga melakukan perpindahan dari satu jenis *Gymnasium* ke *Gymnasium* yang lain mudah dilakukan selama pelajar tersebut masih berada pada masa studi empat atau lima tahun pertama. Mengenai

spesialisasinya terjadi hanya pada *Gymnasium* tingkat atas (tingkat 11 sampai 13). *Gymnasium sains* yang memberikan pelajaran bahasa modern dan matematika umumnya amat disukai oleh para pelajar.

Pendidikan teknik dan Kejuruan. Pendidikan kejuruan memiliki tradisi yang lama di Jerman Barat. Umumnya, tiga jenjang sekolah dapat dibedakan sebagai berikut: sekolah kejuruan paroh waktu (*part time*), yakni *Berufsschulen* dan penuh waktu (*full time*), yakni *Berufsfachschulen*, sekolah teknik (*fachschulen*), dan sekolah teknik lanjutan (*Hohere Fachschulen, Akademien*).

Latihan kejuruan bagi mereka yang lulus dari *Hauptschule* berlangsung secara simultan di lingkungan firma atau industri dan di sekolah kejuruan. Persekolahan kejuruan dilaksanakan selama sehari dalam seminggu (*part time*) dan wajib diikuti bagi remaja yang telah menyelesaikan pendidikan wajib penuh waktu (*full time*) namun tidak mengikuti sekolah penuh waktu yang diselenggarakan oleh yayasan swasta, usia di bawah 18 tahun, dan belum menyelesaikan kerja magangannya. Organisasi sekolah kejuruan paroh waktu (*Berufsschulen*) bergantung pada struktur individual dan kepadatan populasi penduduk di daerah tersebut. Sejauh ini para murid dikelompokkan ke dalam kelas menurut jenis pekerjaannya. Lagi pula, untuk menerima pendidikan kejuruan secara teoritik, para pelajar menerima pelatihan Bahasa Jerman, kajian sosial, dan agama. Ujian magangannya dikembangkan dan diatur oleh sekolah dan oleh badan komersial dan industri. Setelah enam bulan kehadiran, para pelajar dapat mengajukan permohonan ke kuliah lanjutan, *Berufsaufbauschule*, yang arahnya mendapat sertifikat yang memeberikan pelajar tadi akses ke sekolah teknik lanjutan.

Sekolah teknik lanjutan mengarah ke kerja semi-profesional. Persyaratan masuk meliputi ijazah *Realschule* atau *Fachschulreufe*, dan dua tahun pengalaman praktek bekerja. Pelatihan berakhir dari dua setengah dan tiga tahun, menuju ke ujian negara dalam bidang komersial, kerja sosial, pertanian, pengetahuan domestik, fotografi dan optik atau menerjemah. Sekolah teknik menyediakan pelatihan dalam bidang teknil lanjutan dan diarahkan ke gelar sarjana teknik.

Pendidikan Tinggi. Lembaga pendidikan tinggi meliputi universitas, universitas teknik, sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi pelatihan guru, dan akademi seni, musik dan olah raga. Persyaratan pendaftaran bagi semua institusi, kecuali beberapa akademi seni dan musik, menyerahkan sertifikat *Abitur*. Universitas bekerja menurut empat prinsip dasar: melaksanakan pengaturan administrasi akademik sendiri, berhubungan dengan penelitian mengajar, kebebasan meneliti dan mengajar dari pengaruh politik dan ideologi, dan kebebasan para mahasiswa untuk memilih kuliah aturan yang seminim mungkin.

Universitas tradisional diorganisasi menjadi beberapa fakultas atau jurusan dan dikelola oleh rektor atau presiden yang dipilih oleh senat (mewakili baik pihak fakultas maupun mahasiswa). Sebaliknya, universitas modern diorganisasir menjadi beberapa jurusan yang dipimpin oleh presiden (di Indonesia disebut rektor). Ada 34 universitas, 28 universitas umum, 9 universitas teknik, dan sisanya mewakili bidang kedokteran, ekonomi, dan pertanian. Semua universitas tergolong lembaga pemerintah.

Pelatihan Guru. Pelatihan semua guru, kecuali para guru Taman Kanak-kanak, dilaksanakan di universitas dan lembaga pendidikan tinggi lain (*Padagogische Hochschulen*). Lama pelatihan beragam dari tiga hingga lima tahun menurut tipe sekolah dimana mahasiswa tersebut dilatih. Seluruh tipe guru, pelatihan akademik diberikan di universitas atau sekolah tinggi, dan diarahkan untuk mengikuti ujian negara yang pertama. Pendahuluan praktek mengajar, tahapan pelatihan guru (*Referendarzeit, Vorbereitungsdienst*), biasanya memerlukan waktu dua tahun dan diarahkan untuk mengikuti ujian negara yang kedua. Bagi guru *Grundschulen* dan *Hauptshulen* menerima sejumlah praktek mengajar sebagai bagian dari pelatihan universitas atau sekolah tingginya, dan oleh sebab itu mereka dapat segera memulai pekerjaannya di sekolah setelah lulus dari ujian negara yang kedua tadi. Tahap *Referendarzeit* saat ini menjadi lazim bagi para guru *Gymnasium* dan sekolah kejuruan, wajib diikuti oleh para guru *Volksschule* bilamana ketersediaan guru telah teratasi.

Sekolah tinggi pelatihan guru (*Pedagogische Hochschulen*) di kebanyakan *Lander* dikaitkan atau merupakan bagian dari universitas, sebagian besar di antaranya berstatus *Wissenschaftliche Hochschule* namun tidak diperkenankan untuk memberikan gelar Doktor. Pelatihan guru bagi sekolah *Gymnasium* dan sekolah kejuruan dilaksanakan di universitas umum dan universitas teknik. Guru yang prospektif mestilah melaksanakan studi sekurang-kurangnya selama 4 tahun. Mereka harus menerima dua kuliah pokok dan beberapa kuliah tambahan di bidang filsafat, psikologi pendidikan dan/atau sosiologi. Persiapan mengajar (*Referendariat*) berakhir selama satu setengah tahun dan dibentuk di lembaga khusus (*Studienseminare*). Selama pelayanan persiapannya ini *Referendar* diberi ijin memperoleh sedikitnya sepertiga bagian dari gaji awalnya.

Untuk lebih jelasnya, bagan mengenai sistem perjenjangan pendidikan di Jerman Barat ini, dapat dilihat di bagian akhir dari sub-bab ini.

Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Jerman Timur. Sistem pendidikan umum di Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur ini merefleksikan berbagai unsur dari tradisi pendidikan di Jerman, namun adaptasi bentuk Soviet bisa pula diamati. Sistem pendidikan satu tangga yang didirikan pada 1945 pada awal pendudukan pasca-perang Soviet, telah menghapuskan pembagian para siswa dalam sekolah yang terpisah setelah sekolah primer empat tahun, suatu

pembagian yang dibuat sejalan dengan kondisi sosio-ekonomi. Seluruh elemen sosialis nasional yang jelas ada juga dihapus karena alasan reformasi sekolah secara menyeluruh tersebut.

Karena penguasa menghendaki untuk mensejahterakan pekerja dan mengembangkan keterampilan teknis yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk daerah pertanian, dan pendidikan politeknik dibuat dengan pendekatan kurikulum umum. Putra-putri petani dan pekerja sekarang telah siap memperoleh akses masuk ke sekolah menengah dan pendidikan tinggi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengubah struktur kelas sosial sehingga sesuai dengan model komunis umumnya. Seluruh sistem pendidikan berada di bawah pengawasan pusat di tingkat nasional. Seperti halnya yang berlaku di semua negara komunis, sekolah mulai digunakan untuk mencapai sasaran ekonomi yang dibentuk melalui rencana nasional, di samping sasaran politik yang diturunkan dari ideologi komunis. Sekarang, kemampuan teknis, pengetahuan alam, pola pikir Marxis Ortodoks dan berbagai dialeknya lebih mendapat perhatian ketimbang ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu perilaku. Berbeda dengan perkembangan pendidikan di Jerman Barat, peluang pendidikan lebih luas dan menyebar hingga mencapai masyarakat kelas pekerja lebih banyak dan kalangan perempuan. Pendidikan di semua tingkatnya dilaksanakan secara cuma-cuma dan banyak disubsidi oleh negara.

Tujuan pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-undang adalah untuk membentuk individu yang maju secara fisik, moral, intelektual dan politeknik, dan manusia yang kreatif secara sosial yang memiliki minat terhadap sajak sebagaimana terhadap matematika, teknologi, politik dan ekonomi. Kurikulum yang menyeluruh bagi semua sekolah telah diberlakukan dengan menanamkan tujuan tersebut dalam pikiran pelajar.

Taman Kanak-kanak. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, murid Taman Kanak-kanak disekolahkan di Jerman. Melalui permainan anak dapat memperoleh pengetahuan fundamental tentang hidup, pekerjaan, perjuangan manusia, dan tentang lingkungannya. Kekuatan manusia untuk mengamati dan berpikir didorong, dan dia belajar untuk bekerjasama, saling menolong, dan mengerjakan tugas yang telah diberikan. Ketangkasan manualnya, imajinasi kreatif, dan daya rasa anak diwujudkan melalui lukisan, nyanyian, seni dan keterampilan. Perkembangan fisik dan kesehatan ditumbuhkan melalui permainan dan aktivitas atletik yang sesuai.

Pendidikan Dasar. Sekolah rendah dalam sekolah menengah politeknik umum menekankan pada kemampuan dasar membaca, menulis, keterampilan bahasa secara umum, aritmatika, dan prinsip dasar tentang alam semesta serta mengenai kehidupan dan pekerjaan di negara Sosialis. Materi pembelajaran

yang diberikan adalah Bahasa Jerman, aritmatika, kerajinan tangan, menggambar, pendidikan fisik dan menjahit.

Sekolah Menengah Politeknik Umum. Semua anak di Jerman Timur mulai sekolah setelah usia enam tahun. Mereka masuk ke sekolah menengah politeknik umum periode sepuluh tahun, suatu upaya co-edukasi yang dibagi dalam beberapa tahap: sekolah rendah (*lower school*) empat tahun dan sekolah menengah (*upper school*) atas enam tahun. Sebagian murid lulus dari sekolah setelah empat tahun magang. Seperti halnya di Jerman Barat, sistem magang ini menerima pendidikan kejuruan tambahan, biasanya sehari seminggu, selama tiga tahun. Sebagian besar pelajar meneruskan ke sekolah menengah politeknik dimana mereka menerima pendidikan umum selanjutnya seiring dengan pelatihan pra-kejuruan. Setelah lulus dari sekolah menengah sepuluh tahun ini mereka bisa masuk ke sekolah kejuruan yang berhubungan dengan tempat pekerjaan atau sekolah uang dijalankan demi kegunaan sebagian kecil pekerja. Sekolah ragam selanjutnya mengkususkan pada bidang semisal niaga, sales, dan pertanian.

Sebagian siswa tingkat 9 hingga 11 melanjutkan pendidikan umum dan kejuruan mereka di kelas khusus selama tiga tahun. Mereka lalu diberi sertifikat kejuruan, sebuah pengakuan bagi mereka yang telah mencapai tingkat pengembang bidang kejuruan. Mereka juga mengikuti *Abitur*, yakni ujian akhir akademik yang menjadikan mereka sah untuk mendaftar belajar di lembaga pendidikan tinggi.

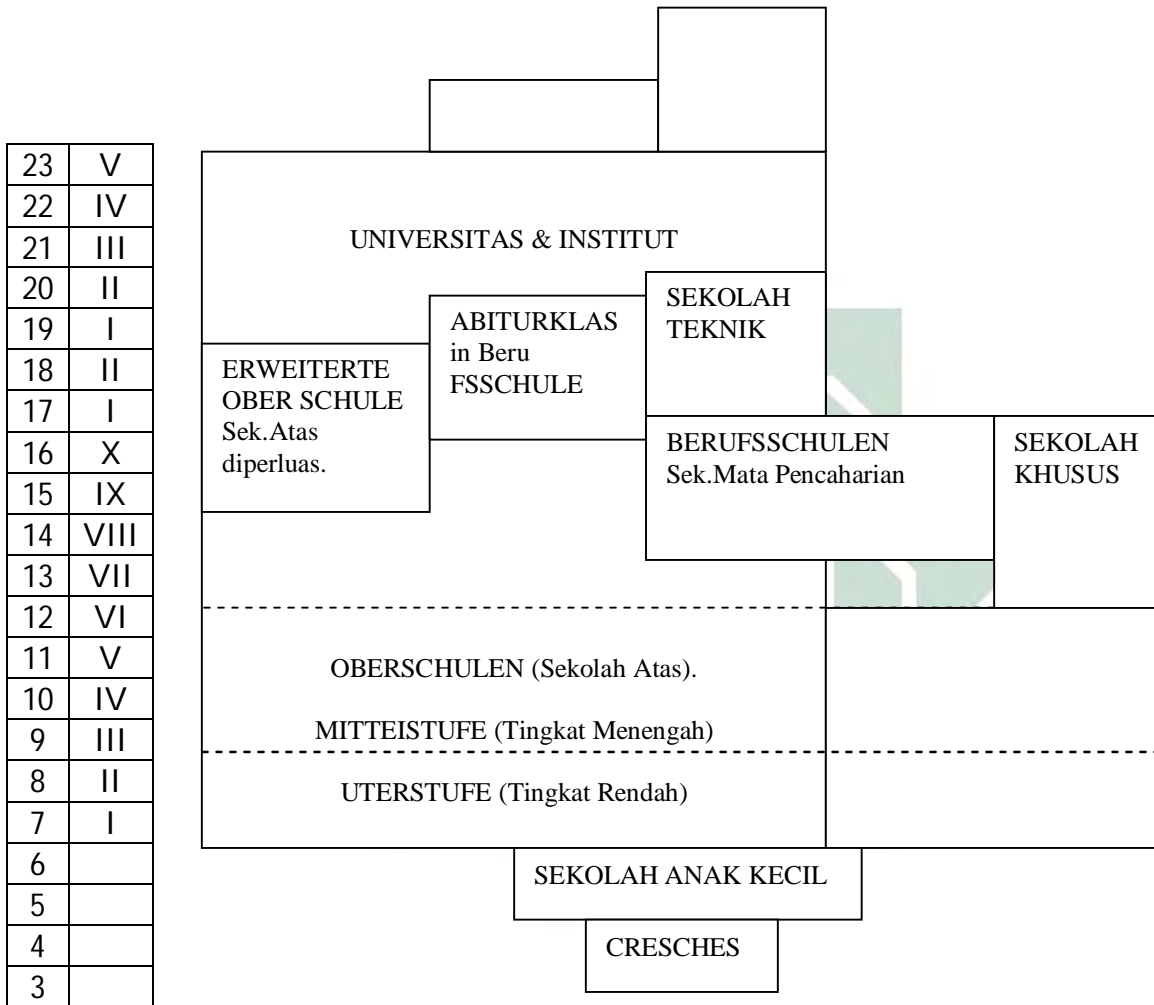
Termasuk dalam jenjang sekolah menengah ini adalah sekolah menengah yang diperluas (*extended secondary school*). Sekelompok siswa tingkat sembilan dapat melanjutkan ke sekolah menengah yang diperluas selama 12 tahun, yakni empat tahun pada bagian sekolah menengah politeknik lanjutan. Siswa tersebut melakukan antisipasi untuk dapat masuk ke universitas setelah mereka lulus dari sekolah menengah. Mereka bisa memilih jurusan bahasa modern, jurusan sains matematika dan ilmu alam, atau jurusan sekolah menengah klasik. Pada tingkat 9 dan 10 dari sekolah menengah yang diperluas, para siswa melanjutkan pendidikan kejuruan, dimana dasar-dasarnya telah diletakkan pada waktu ia ada di tingkat 7 dan 8. meskipun begitu, mereka utamanya mempersiapkan ujian *Abitur*, ujian akhir yang harus dilalui sebelum seorang siswa masuk ke universitas Jerman.

Pendidikan Tinggi. Universitas merupakan tahapan tangga pendidikan tertinggi di Jerman Timur. Tujuh universitas yang ada di Jerman ini seluruhnya didirikan sebelum 1945. Universitas Leipzig didirikan pada 1409, Universitas Rostock pada 1419, dan Universitas Geifswald pada 1456, ketiganya tergolong universitas tertua di Jerman, sedang Universitas Jena didirikan pada 1558 saat kebangkitan Reformasi Protestan, Universitas Halle didirikan pada 1690

berbarengan dengan masa pencerahan, Universitas Humbolt di Berlin berdiri pada 1810 sebagai universitas pertama yang berorientasi pada riset dengan tujuan untuk memajukan masyarakat industrial dan modern, dan Universitas Teknik Dresden yang didirikan pada 1828. berbeda dengan itu, kebanyakan dari 37 sekolah tinggi teknik sipil, sekolah kedokteran dan akademi seni didirikan setelah 1945. semua institusi pendidikan tinggi umumnya menumbuhkan aktivitas pengajaran dan penelitian.

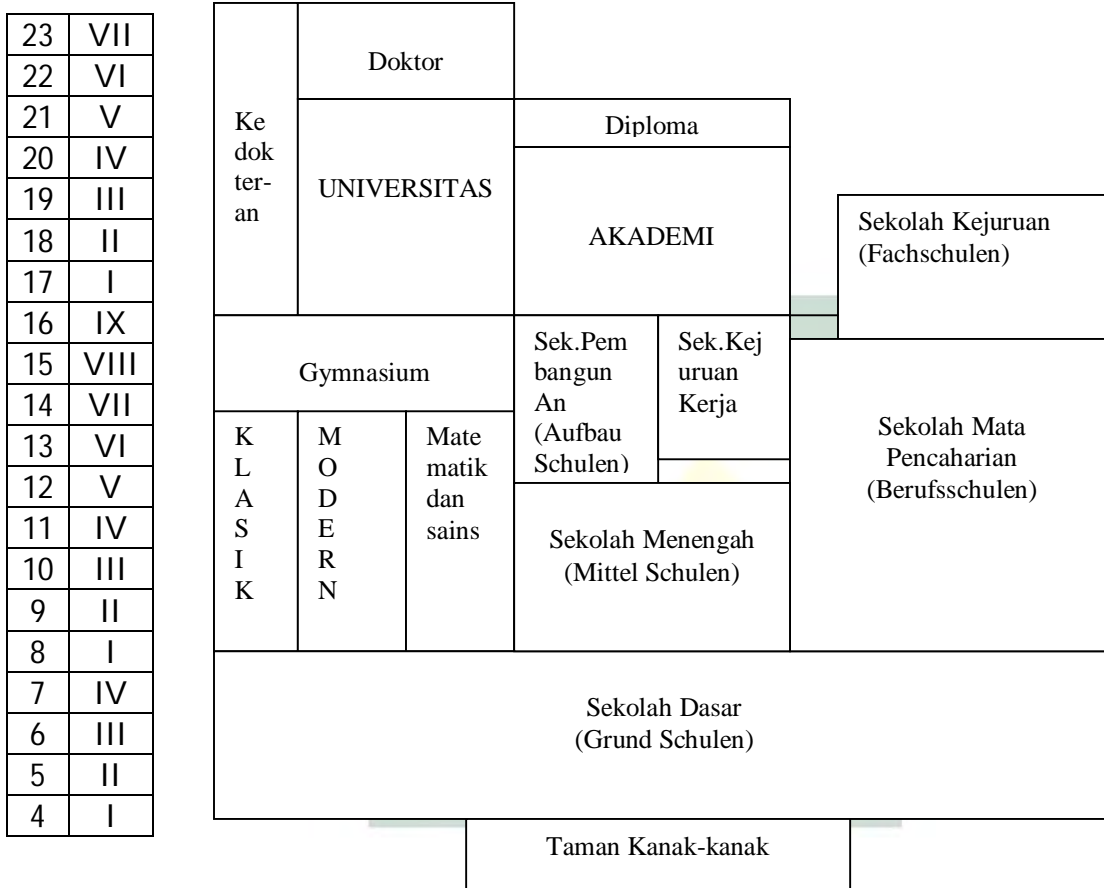
Pendidikan tinggi bisa ditempuh oleh mahasiswa usia lebih dari 35 tahun yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan 12 tahun di sekolah menengah yang diperluas atau dari lembaga teknik. Di sini ujian masuk tetap diperlukan. Sebuah komite yang mewakili fakultas, persekutuan, dan kelompok mahasiswa universitas menyeleksi calon mahasiswa yang berhasil lulus ujian, lalu memberinya pilihan bagi mereka yang memiliki pendidikan kejuruan yang utuh serta pelayanan menwa. Pendidikan tinggi juga bisa diperoleh via kuliah korespondensi, kehadiran secara periodik dalam seminar, dan studi penuh waktu selama enam bulan di universitas sebelum dilaksanakannya ujian menyeluruh. Kuliah sore hari bagi mahasiswa paroh waktu juga diberikan di sebagian universitas. Berikut adalah perbandingan bagan sistem perjenjangan pendidikan di kedua Jerman tersebut.

**BAGAN 7
SISTEM PENDIDIKAN DI JERMAN TIMUR**



Sumber: Chalidjah Hasan, *Kajian Pendidikan Perbandingan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h.76-77.

BAGAN 8
SISTEM PENDIDIKAN DI JERMAN BARAT



Sumber: Chalidjah Hasan, *Ibid*, h.17.

Studi di Jerman Saat Ini. Bila anda berminat untuk belajar di Jerman, sejak di negeri asal perlu mempersiapkan beberapa hal berikut: paspor yang sah untuk tinggal selama kurun waktu studi di Jerman. Bila ini tidak dilakukan, anda harus pulang ke negara asal guna memperpanjang ijin tinggal di Jerman, suatu persiapan yang tidak antisipatif. Setelah itu, anda perlu menyiapkan surat pengakuan atau konfirmasi lamaran dari lembaga pendidikan tinggi di Jerman, mendapat persetujuan atas sumber biaya studi, visa belajar, dokumen asli dan sah yang telah diterjemahkan, keterangan kesehatan, serta beberapa perkara teknis lainnya. Kalau itu semua telah anda persiapkan, anda bisa memulai berangkat untuk studi di Jerman.

Disarankan anda tidak tiba di Jerman pada akhir pekan (*weekend*) sebab di hari itu semua kantor pelayanan administrasi lagi tutup. Dan mulai Sabtu sore seterusnya, anda akan mendapatkan seluruh toko juga tutup. Jadi, kalau anda bisa mengatur kedatangan ke Jerman selama seminggu, khususnya di pagi hari, Kantor Mahasiswa Asing di lembaga yang anda pilih, sedang buka dari pukul 9 sampai 12, siap melayani anda dengan semua informasi yang diperlukan untuk mengatur beberapa hari pertama anda di Jerman.

Beberapa hari pertama tinggal di Jerman, sebuah negara baru yang mungkin belum pernah anda kunjungi sebelumnya, dengan budaya dan kebiasaan yang berbeda, mungkin berpadu dengan berbagai pertanyaan yang belum terjawab serta perasaan tidak menentu, pada mulanya kehadiran anda di sana diliputi dengan formalitas birokratis yang tidak bisa tidak, harus diselesaikan, namun anda bisa meminta bantuan pada tutor, rekan mahasiswa, dan Kantor Mahasiswa Asing. Pertama-tama, hal yang amat penting adalah menyelesaikan masalah di Kantor Pendaftaran Tempat Tinggal dan Dinas Pendaftaran Mahasiswa Asing. Setelah ini seselai, anda bisa tenang melakukan niat anda belajar di Jerman.

Menguasai Bahasa Jerman bukanlah segala-galanya. Jika anda telah memutuskan untuk mengambil kuliah internasional, bahasa pengajarannya di hampir seluruh kuliah semester pertama adalah Bahasa Inggris. Di saat yang sama anda dapat memanfaatkan waktu untuk belajar Bahasa Jerman. Beberapa kuliah Pascasarjana menggunakan Bahasa Inggris secara keseluruhan, sementara sebagian yang lain mensyaratkan kemampuan Bahasa Inggris yang baik, bahkan kemampuan Bahasa Prancis, Spanyol dan Jerman, khususnya bila anda memilih studi Perbandingan Hukum, Ekonomi, dan kajian lingkungan.

Lebih dari 140.000 mahasiswa asing datang ke Jerman hanya untuk beberapa semester. Agar minat mereka tinggal lebih lama lagi, lembaga pendidikan tinggi memperkenalkan kuliah dengan perspektif internasional. Akhirnya, anda bisa belajar jenjang sarjana muda maupun magister, meskipun tidak di semua insitusi di Jerman menawarkan hal itu. Kuliah pra-sarjana memakan waktu antara 6 hingga 8 semester, 1 atau 2 semester di antanya biasanya dipakai di lembaga partner di luar negeri. Mereka meraih gelar sarjana muda. Adapun kuliah pascasarjana berakhir dari 3 hingga 5 semester dan mendapat gelar diploma atau magister. Dalam beberapa kuliah dimungkinkan untuk mengambil program Doktor setelah melanjutkan dari semester 6.

Bila menyangkut soal buku, mahasiswa tidak usah risau. Anda dapat membelinya di berbagai toko buku. "Jika anda memerlukan buku kuno yang tidak mudah didapat di suatu perpustakaan, petugas perpustakaan biasanya berkenan membantu anda mendapatkannya di perpustakaan lain", demikian pengakuan Lili dari Indonesia. Keristimewaan lainnya, baik penduduk Jerman maupun warga asing, termasuk orang Indonesia, bisa belajar dengan gratis di semua jenjang pendidikan di negara itu. Menurut Memet Suratmadi, bila

berhasil dan bernasib mujur, ia akan bisa melejit menjadi orang terkenal seperti Bapak BJ Habibie atau Bapak Wardiman Djojonegoro. Sebaliknya, bila seseorang tidak sungguh-sungguh belajar atau sekedar iseng, maka ia akan tertinggal, bahkan berurusan dengan birokrasi macam-macam. Misalnya saja, bila seorang mahasiswa di sebuah Universitas Jerman telah dua kali gagal dalam ujian, maka pada ujian akhir yang ketiga ia terlebih dahulu harus meminta izin dari Menteri Pendidikan di negara bagian tempat ia belajar.

Permasalahan lain, menurut hasil penelitian Kelompok Kerja Studi (KKS), yakni panitia *ad hoc* yang dibentuk oleh bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bonn, antara 1 Nopember 1993 sampai 28 Agustus 1994, antara lain adalah penyetaraan ijazah, ketidaksesuaian bidang studi dan kemampuan Bahasa Jerman yang tidak memadai. Kemampuan Bahasa Jerman yang kurang memadai ini juga dirasakan oleh mahasiswa Indonesia saat ia harus memberikan presentasi atau menulis laporan dan disertasi. Pada awal studi, penyetaraan ijazah adalah masalah utama yang dihadapi mahasiswa Indonesia, baik yang berijazah S-1 maupun S-2. dalam proses itu diputuskan mengenai tingkat pendidikan serta jumlah beban studi yang harus ditempuh mahasiswa Indonesia sehingga dapat diakui sebagai *Doktorand*. Pengakuan ini diperlukan agar ia dapat melakukan penelitian program doktoral.

Profile

Humboldt Research Fellowship. Yayasan Alexander von Humboldt menawarkan beasiswa kepada para sarjana yang berkualitas tinggi untuk melakukan proyek penelitian menurut pilihan mereka di berbagai institusi penelitian di Jerman. Lamaran bisa diserahkan sewaktu-waktu oleh para ilmuwan dari seluruh negara dan disiplin akademik (tanpa kuota). Pertemuan seleksi dilakukan pada tiap bulan Maret, Juni, Juli dan Nopember. Beasiswa ini pada mulanya diberikan untuk periode 6 sampai 12 bulan; pengembangan sampai ke 24 bulan bisa diberikan menurut permohonannya. Sampai 6 bulan dari periode ini bisa digunakan di lembaga penelitian di negara-negara Eropa Lainnya.

Persyaratan:

1. Gelar akademik yang setaraf dengan Doktor (Ph.D, C.Sc. atau yang ekuivalen).
2. Memiliki publikasi akademik yang bermutu.
3. Membuat rencana penelitian secara detail.
4. Mampu berbahasa Jerman (untuk humaniora dan sosial) dan Inggris yang baik (ilmu alam, kedokteran dan teknik sipil).
5. Usia pelamar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pelamar harus sudah bekerja secara tetap.

Sumber: DAAD Jakarta, 1998.

Kajian Islam di Jerman. Sebelum sampai pada inti persoalan kajian Islam di Jerman, terlebih dahulu perlu diketahui bagaimana keadaan Muslim di negeri tersebut ? Populasi Muslim di Jerman tercatat sejumlah 3,2 juta jiwa (2001), sekitar 75 % Muslim di Jerman berasal dari keturunan Turki, sisanya dari belahan negara Islam lainnya. Umumnya Muslim di Jerman berafiliasi pada madzhab Sunni aliran Imam Abu Hanifah. Pada awal 1960-an, sekelompok Muslim Jerman membentuk perkumpulan yang kemudian dikenal dengan Arsip Islam Jerman. Melalui upaya kelompok ini aturan pertama dari asosiasi Islam lokal ditulis dan didaftar di bawah hukum Jerman. Di saat yang sama, warga Jerman mengadakan pertemuan di Hamburg, Munich, Cologne dan Aachen, lalu mulai mengatur fasilitas bagi keperluan ibadah sehari-hari. Selama 1970-an, kelompok ini memanfaatkan keanggotaannya dalam organisasi sosial lainnya, semisal parpol, persekutuan dan sejenisnya, untuk membahas perkembangan situasi yang dihadapi komunitas Muslim di Jerman. Pembahasan ini diawali dengan penyampaian menteri pendidikan tentang pertanyaan seputar pendidikan agama yang sesuai dengan konstitusi negara dan federasi.

Pada saat yang sama, perwakilan resmi Turki sering melakukan intervensi agar dapat menghalangi akses kebebasan yang lebih besar bagi warga sejawatnya, termasuk perempuan. Dengan cara ini Muslim asal Turki dapat belajar menikmati keuntungan kebebasan sekuler. Pada 1980-an, muncul dua payung organisasi Muslim di Jerman. Pertama, didirikan pada 1986, yang disebut Dewan Islam bagi Republik Federal Jerman (*the Islamic Council for the Federal Republic of Germany*), sedang yang kedua didirikan setahun kemudian, berupa Pusat Dewan Muslim Jerman (*the Central Council of Muslim in Germany*). Selama bertahun-tahun kemudian, sejumlah asosiasi Islam lokal bergabung membentuk koalisi, dan sekarang, Dewan Islam ini memiliki 38 anggota asosiasi.

Sekarang, dua payung organisasi yang telah disebut di atas, yakni *the Islamic Council for the Federal Republic of Germany* dan *the Central Council of Muslim in Germany*, memiliki komitmen untuk mengorganisasi masa depan kaum Muslimin di Jerman dalam kerangka masyarakat Jerman dan konteks yang sah. Langkah penting ke arah ini adalah munculnya yayasan tentang komite pendidikan agama yang terbentuk pada musim gugur 2000 yang lalu.

Pada Nopember 1998, pengadilan Berlin memutuskan terhadap sejumlah federasi Islam lokal ke dalam sistem sekolah. Dari 71 Masjid, yakni 53 Masjid --- termasuk di antaranya yang beraliran Syi'ah dan Muslim Kurdi madzhab Syafi'i, menyatakan pengakuannya bahwa mereka telah terwakili oleh federasi tersebut. Namun hingga saat ini, keputusan pengadilan belum terujud dalam praktek. Karena hubungannya dengan Milli Gorush, sebuah organisasi Muslim Turki,

federasi ini belum sempat memperoleh akses masuk ke sekolah Berlin manapun. Lagi pula, saat ini masih dalam proses mempersiapkan para guru dan jadualnya. Selain itu, keputusan pengadilan 1998 telah memberikan insentif bagi Muslim seluruh negeri untuk mengembangkan rencana pendidikan dan bagi administrasi lokal dalam mengembangkan sarana komunikasinya.

Survey tentang kajian Islam di Jerman berkembang secara intensif terutama pada 1996, ditandai dengan hadirnya *Institute for Advanced Study (Wissenschaftskolleg)* di Berlin yang menelurkan gagasan untuk melakukan survey terhadap kajian Islam dan masyarakat Muslim di Jerman kontemporer, baik dulu maupun kini. Proyek ini muncul berkat berbagai diskusi tentang Kelompok Pekerja Modern dan Islam yang mempersatukan berbagai ilmuwan terutama dari dua Universitas di Berlin, yakni Universitas Freie dan Humboldt, dan Institut Jerman Masalah Ketimuran (*Deutsches Orient Institut*) di Hamburg, beserta rekan peneliti dari berbagai negara Islam. Umumnya survey yang dilakukan adalah semua masalah tentang kajian Timur Tengah dan Dunia Islam secara keseluruhan di Universitas Jerman dan di luar lembaga penelitian. Dengan dukungan Menteri Pendidikan dan Sains, survey tersebut harus mampu mengidentifikasi masalah krusial dan kekosongan dalam isi dan struktur penelitian yang relevan. Akhirnya, diberikan rekomendasi bagi badan *Lander* atau negara bagian Jerman dan Pemerintah Federal yang berwenang sebagai sarana untuk memperkuat peningkatan kerjasama di masa depan.

Kajian secara mendalam dilakukan selama 1997 yang merupakan proyek Institut Jerman Masalah Ketimuran di Hamburg. Daftar pertanyaan bagi lebih dari 300 ilmuwan dan peneliti di sekitar 60 lembaga dianalisa, lalu dijadikan sebagai bagian dari inti survey. Selanjutnya, koordinator proyek melakukan interview pribadi dengan sejumlah ilmuwan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai situasi yang sedang berkembang saat ini.

Upaya berbagai organisasi Muslim di Jerman dan kajian masalah Ketimuran membawa pembaharuan bertahap. Pembelajaran Islam di Jerman dilaksanakan secara mandiri, mendapat tempat dalam hukum dan pengakuan pemerintah. Berharap bahwa kondisi ini akan terus berkembang, bahkan di negara Eropa lainnya.

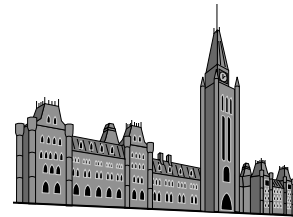
Bila dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, seperti Belanda, sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh Universitas Leiden dengan INIS atau ISIM-nya, Jerman atau Universitas yang ada di sana, belum melakukan kontak kerjasama yang cukup bermakna terhadap kajian Islam, khususnya dengan IAIN. Memang telah ada beberapa dosen IAIN yang meneruskan studi dan riset di Jerman, namun ditinjau dari sisi kuantitasnya masih terlalu minim, apalagi bila ditinjau dari data mahasiswa yang belajar di Jerman yang masih dominan di bidang teknik.

Daftar Pustaka

- Aries, Wolf D. Ahmed. "Muslim in Germany" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 5/2000.
- Association of Universities and other Higher Education Institutions in Germany. *Studi di Jerman: Kesan-kesan dari beberapa Wartawan Indonesia*. Bonn: DAAD, 1998.
- Bock, Verlag Karl Heinrich. *Degree Courses at Institutions of Higher Education in the Federal Republic of Germany*. Bonn: DAAD, 1988.
- Deighton, Lee C. *The Encyclopedia of Education*. Vol.3. USA: The Macmillan Company & The Free Press, 1971.
- De Ley, Herman. "Islam and Racism in Europe" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 7/2001.
- Jonker, Gerdien. "Connecting Muslim Knowledge to the German School System" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 8/2001.
- Kedutaan Besar Republik Federal Jerman. "Forty Years Federal Republic of Germany" dalam *Scala*. Jakarta: Kedutaan Besar Republik Federal Jerman Bagian Penerangan, 2/1989.
- . "ADP: Proyek Kerjasama Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman" dalam *Scala*. Jakarta: Kedutaan Besar Republik Federal Jerman Bagian Penerangan, 4/1988.
- . "Proyek Kerjasama Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman: TAD" dalam *Scala*. Jakarta: Kedutaan Besar Republik Federal Jerman Bagian Penerangan, 1/1988.
- Lich, Linda. *Living and Studying in Germany*. Bonn: DAAD, 1998.
- Mohr, Irka-Christin. "Self-Positioning and Islamic Instruction in Germany" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 9/2002.
- Rudolph, Ekkehard. "Survey of Islamic Students in Germany" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 1/1998.
- Stover, Michael (Ed.). *postgraduate Courses in the Federal Republic of Germany*. Bonn: DAAD, 1990.
- Universitat Bayreuth 1999.
- Universitat Hannover 1998/1999.
- Wizemann, Monika J. *Studi di Jerman: Berbagai Fachschule*. Bonn: DAAD, 1998.
- . *Studi di Jerman: Fachschule*. Bonn: DAAD, 1998.
- . *Studi di Jerman: Universitas*. Bonn: DAAD, 1998.

□ KANADA

KANADA memiliki luas wilayah 9.976.140 km² dengan populasi penduduk 27.769.993 jiwa (1993). Negara dengan ibukota Ottawa ini memiliki tingkat pengangguran 11,5 % (Desember 1992), laju inflasi 1,5 % dan APBN 111,8 milyar dolar Amerika untuk tahun fiskal 1990. Mitra ekspor utama Kanada adalah Amerika, Jepang, Inggris, Jerman, Korsel, Belanda dan Cina. Sedang mitra impor utamanya adalah Meksiko, Taiwan dan Korsel. Perkembangan pendidikan di Kanada sejalan dengan pengaruh gereja atau pihak keagamaan. Bahkan, secara historis, kebanyakan perguruan tinggi di sana dirintis oleh kaum tersebut. Berikut ini tinjauan historisnya.



Sekolah pertama di Kanada didirikan oleh kaum keagamaan, seperti kaum Capuchins, Recolets, Jesuits dan Moravian, sejak awal abad ketujuhbelas. Kaum tersebut dan misi yang mereka bangun kala itu menyebar dari Atlantik ke Pasifik, dan hingga kini masih dijumpai di Yukon serta wilayah Barat Laut. Kepentingan keagamaan kelompok ini dan kepentingan pendidikan organisasi tersebut adalah terwujudnya masyarakat dengan tujuan propaganda Injil bagi Wilayah Asing dan masyarakat dengan tujuan promosi ajaran Kristen sebagai dasar bagi konflik yang belakangan muncul antara mereka yang menerapkan sistem pendidikan sekuler dukungan pemerintah propinsi dan mereka yang menghendaki pendidikan terpisah (antara agama dan negara, pen), dengan sekolah agama, baik yang menerima atau tidak, bantuan dana dari negara.

Selama kekuasaan rejim Prancis di Kanada, dari 1534 hingga 1763, pendidikan merupakan upaya kalangan swasta dari pihak keagamaan. Setelah Inggris menguasai Kanada pada 1763, beragam peraturan legislatif di propinsi Atlantik, Quebec dan Ontario, terbentuklah sistem sekolah dasar dan menengah di propinsi-propinsi ini, agar dapat mengakomodasi tanggungjawab kaum agamawan yang telah dianggap berpengaruh selama bertahun-tahun oleh kaum Anglikan dan Katolik atau semisalnya. Dengan berlakunya Peraturan Inggris-Amerika Utara pada 1867, prinsip sistem pendidikan sekuler dan terpisah (antara agamawan dan negara, pen) yang didanai oleh negara diterima untuk berlaku di seluruh Kanada dengan sedikit pengecualian.

Sejak 1867, masyarakat Kanada telah mengembangkan mosaik masyarakat dari seluruh penjuru dunia. Sistem pendidikan bagi propinsi sebelah barat, seperti Manitoba, Saskatchewan, Alberta dan British-Colombia, mengikuti pola pendidikan yang dicanangkan di Ontario, meskipun, penekanan lebih diberikan untuk memenuhi kebutuhan semua orang, tidak hanya bagi kaum

Anglikan dan Katolik semata. Prinsip negara mendukung sekolah terpisah umumnya dapat diterima di Kanada bagian timur, namun menyulut reaksi di Sekolah Manitoba pada 1896 sehingga membiarkan propinsi tersebut dengan tradisi tak mendukung kebijakan sekolah terpisah, yang kemudian mempengaruhi hubungan Prancis-Inggris di seluruh Kanada. Tradisi dan bahasa Prancis semakin berpengaruh, mendominasi sistem pendidikan di Quebec dan bagian New Brunswick serta Manitoba atau yang serupa dengannya, hal ini dapat memainkan pengaruh yang makin penting di masa datang.

Pengaruh sosial, ekonomi, politik dan agama yang membentuk pendidikan di Kanada sebagian ditentukan oleh berbagai aspek yang jauh, dengan menerapkan konsep baru tentang kesempatan pendidikan bagi semua orang, dari pada memilih sebagiannya atau dengan pola administrasi pusat. Etos kerja masyarakat yang ada bagi warga Kanada yang terus menuju ke arah Barat membangkitkan proses sosialisasi yang memeberikan penekanan pada peranan yang dimainkan oleh sekolah maupun sekolah tinggi dalam membaurkan masyarakat Kanada.

Sistem pendidikan. Di Kanada, pendidikan dibagi atas tiga tingkat: *pertama*, tingkat dasar (*elementary*) yang meliputi pendidikan pra-sekolah di Taman Kanak-kanak maupun pra-Taman Kanak-kanak, dan di Sekolah Dasar. Untuk Sekolah Dasar ini, di Quebec diselenggarakan dari kelas 1 sampai 6, tapi di propinsi lain ada yang dari kelas 1 sampai 8. Kurikulum di Sekolah Dasar meliputi materi pelajaran bahasa, matematika, sosial, dan pengenalan pada ilmu dan seni. *Kedua*, tingkat menengah (*secondary*), yang umumnya berlaku di Kanada adalah sistem 6-3-3, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama (*junior high school*), serta 3 tahun sekolah menengah atas (*senior high school*), namun perbedaan lama waktu yang ditempuh di sekolah menengah ini bisa terjadi antara satu propinsi dengan propinsi lainnya. Pendidikan menengah ini diarahkan kepada dua jalur, yakni: sebagai persiapan masuk ke perguruan tinggi, dan menyiapkan keahlian tertentu. *Ketiga*, pendidikan tinggi (*post secondary*) yang meliputi universitas, sekolah tinggi dan yang selevel dengan itu.

Pada tingkat pendidikan tinggi, beberapa universitas menggunakan Bahasa Inggris, misalnya Universitas di Alberta, British-Columbia, dan Toronto, namun ada pula yang menggunakan Bahasa Prancis, misalnya adalah Universitas Montreal dan universitas di Quebec. dan ada pula yang menggunakan keduanya, misalnya Universitas Ottawa.

Di Kanada terdapat lebih dari 165 *community college*, serta 80 universitas dan sekolah tinggi, yang memberikan gelar kesarjanaan. Perguruan tinggi yang memberikan gelar kesarjanaan di Kanada ini berbentuk:

1. *University*: yang memberikan gelar sarjana (B.A.; B.Sc.), gelar magister (M.A.; M.Sc.; MLIS) dan gelar Doktoral (Ph.D.; dan lainnya).

2. *Liberal Art College*: yang memberikan gelar Bachelor, Magister dan Doktor.
3. *Institute*: yang bersifat khusus dan memberikan gelar kepada bidang tertentu, misalnya bidang kajian Islam atau *Islamic Studies*. Yang terakhir ini seperti yang dilakukan oleh Universitas McGill di Montreal, Kanada.

Studi Islam di universitas di Kanada telah menjadi bagian penting bagi Indonesia, terutama IAIN. Setelah gelombang pertama pendidikan Islam Indonesia berorientasi ke Makkah, lalu gelombang kedua ke Kairo, gelombang ketiga dirintis sejak tahun 1970-an, orientasi kajian Islamnya mulai bergeser ke Barat dan Eropa, termasuk Kanada ini. Universitas McGill merupakan universitas yang selama beberapa dekade ini menjadi rujukan studi bagi para mahasiswa atau dosen di lingkungan IAIN se-Indonesia. Bisa dikatakan bahwa pada awal kemunculan IAIN tampak jelas kajian Islamnya “bercorak Mesir, yakni Al-Azhar”, kini meskipun nama fakultas dan sebagian kurikulumnya tetap menggunakan referensi Timur Tengah, pola manajemen dan administrasinya telah banyak bercorak McGill University.

Di Universitas McGill, penawaran studi keislaman dikonsentrasikan di *Institute of Islamic Studies*. Pola ini diprakarsai oleh Prof. William Cantwell Smith, karena disadari perlunya didirikan sebuah institut atau lembaga tersendiri untuk bidang kajian Islam ini. Pada mulanya program studi keislaman ini merupakan bagian dari studi yang ditawarkan di *Department of Religious Studies* (Jurusan Studi-studi Agama) yang juga berinduk ke Universitas McGill. Universitas ini memiliki perpustakaan tersendiri yang mengoleksi buku-buku tentang Islam dari berbagai disiplin ilmu, kajian sejarah dan kawasan yang terdapat di dunia Islam, dari masa klasik, abad tengah maupun modern kontemporer.

Upaya *Institute of Islamic Studies* dilakukan sebagai bentuk kerjasama, membawa bersama-sama antara Muslim dan non-Muslim dalam sebuah usaha untuk memahami peradaban Islam. Staf pengajar dan para mahasiswa Institut ini meliputi peserta Muslim dan non-Muslim dari sejumlah negara. Susana yang penuh dengan hubungan internasional ini mampu menyediakan peluang untuk saling berhadapan melakukan pertukaran antar ilmuwan di berbagai tingkat. Selama perkuliahan dalam tahun akademik yang sedang berjalan, Institut ini secara terus-menerus mengundang para sarjana yang ahli di bidang kajian Islam untuk menyampaikan kuliah yang juga terbuka untuk umum. Sepanjang sejarahnya, institut ini menyediakan pelayanan khusus yang telah membawa para mahasiswa menuju ke pintu masuk dari sejumlah negara Afrika, Asia dan Timur Tengah. Keutamaan pokok dari upaya tersebut adalah program pertukaran *visiting professor* yang telah membantu mendirikan hubungan yang erat dengan berbagai universitas Islam lainnya. Upaya ini telah didukung oleh Perwakilan Pengembangan Internasional Kanada (*the Canadian International Development Agency* atau disingkat CIDA), Yayasan Ford (*the Ford Foundation*), Yayasan Rockefeller (*the Rockefeller Foundation*) dan Yayasan Aga Khan (*the Aga Khan Foundation*).

Profile

McGill University. *Institute of Islamic Studies* Universitas McGill didirikan sejalan dengan berdirinya perpustakaan *Institute of Islamic Studies* pada 1952. Keduanya ditempatkan di kampus utama di Morrice Hall sejak 1983. Perpustakaan Kajian Islam (*The Islamic Studies Library* atau ISL) telah tumbuh dari koleksi jurusan yang sederhana menjadi bagian yang teramat penting di bidangnya, saat ini memiliki lebih dari 100.000 buku. ISL merupakan perpustakaan riset, dengan dilengkapi bagian Referensi, dimaksudkan untuk dapat digunakan utamanya bagi para mahasiswa pascasarjana dan pihak fakultas. Koleksi ISL dapat dikategorikan dalam tiga bagian: cetakan, manuskrip dan bahan audio visual. Ketiga kategori ini terdiri dari bahan-bahan berbahasa Eropa dan Islam, yakni: Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, Itali, dan Rusia, di samping Bahasa Arab, Persia, Turki (Utsmani dan modern), Bahasa Urdu dan Indonesia. Seluruh koleksi bukunya merupakan refleksi dari kepentingan akademik institusi tersebut, seperti halnya pengajaran dan penelitian di bidang Tafsir Al-Qur'an, Hadis, Ushul Fiqh, Filsafat, Teologi, Sufisme, Madzhab Syi'ah, Sejarah dan perkembangan dunia Islam, serta pembelajaran dalam berbagai bahasa Islam.

Sumber: A. Urner Turgay, Director of the Institute of Islamic Studies, McGill University, ISIM Newsletter, 1/1998

Guru dan kurikulum. Para guru tingkat dasar dilatih di sekolah tinggi dan umumnya sekolah dikelola oleh Departemen Pendidikan, sedang para guru sekolah tingkat menengah dipersiapkan di berbagai fakultas pendidikan di universitas. Alumni dari lembaga ini diberi sertifikat oleh Departemen Pendidikan, satu-satunya badan yang memberi lisensi mengajar. Departemen Pendidikan bertanggungjawab bagi perencanaan dan distribusi kurikulum program sekolah tingkat dasar dan menengah, sebagaimana telah disiapkan oleh panitia yang terdiri dari para guru, kepala sekolah, pengawas, dan personalia universitas. Program penulisan buku teks disiapkan oleh para penerbit dengan perjanjian para gurulah yang menulis buku tersebut.

Setiap propinsi mempunyai perkumpulan guru, asosiasi, organisasi sekolah dan rumah, serta badan pendidikan tinggi dan teknik, semuanya terkait dengan upaya perbaikan dalam administrasi dan pendidikan. karena semua organisasi tersebut merupakan bentuk perluasan dan berafiliasi dengan badan

nasional, maka sangat dimungkinkan untuk ikut serta mengembangkan kebijakan nasional dan membantu mengatasi keterbatasan propinsi. Sebagian besar organisasi ini tidak menerima dana dari pemerintah, sehingga mereka dapat berbuat secara independen.

Meskipun pemerintah federal tidak memberi bantuan langsung pada pendidikan, selama bertahun-tahun pemerintah memainkan peran yang amat penting dengan jalan memberi bantuan secara langsung pada para mahasiswa di program perguruan tinggi; mengembangkan dan mendukung pendidikan kesehatan, teknik dan kejuruan; serta mendanai penelitian, publikasi dan program bantuan luar negeri.

Metode dan Materi. Metode dan materi pelajaran di sekolah dan sekolah tinggi Kanada sebagian besar berorientasi pada buku, walaupun praktek akhir-akhir ini lebih menekankan penggunaan alat bantu *audiovisual*, *team teaching*, pembelajaran terprogram, dan radio dan televisi program pendidikan. Terdapat kecenderungan makin meningkatnya pelayanan sumber perpustakaan untuk sekolah tingkat dasar, menengah, sekolah tinggi maupun universitas. Demikian pula perhatian lebih banyak diberikan pada bimbingan, perpustakaan, dan program laboratorium, semuanya dirancang untuk mendorong belajar mandiri dan menghubungkan belajar di sekolah terhadap perkembangan di masyarakat. Dalam banyak contoh, para guru dan siswa bekerjasama dalam merancang dan mengembangkan program dan proyek pendidikan, sebuah pendekatan yang kian banyak dijumpai di semua tingkat sistem pendidikan di Kanada.

Tiap propinsi di Kanada memiliki kebijakan pendidikan sendiri. Pelajaran umumnya diberikan dalam Bahasa Inggris, kecuali di Quebec yang berpenduduk mayoritas berbahasa Prancis. Tiap sistem pendidikan berada dalam pengawasan Departemen Pendidikan Tingkat Propinsi atau Teritorial. Pemerintah Kanada langsung menangani pendidikan anak-anak Indian, Anak-anak Angkatan Bersenjata dan para penghuni lembaga permasyarakatan Federal.

Daftar Pustaka

Deighton, Lee C. *The Encyclopedia of Education*. Vol.1. USA: The Macmillan Company & The Free Press, 1971.

Turgay, A. Uner. "Institute of Islamic Studies (McGill University)" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 1/1998.



□ AMERIKA SERIKAT

A MERIKA, sebuah negara dengan julukan “Paman Sam” yang beribukota di Washington ini memiliki luas wilayah 9.372.610 km² dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, yakni lebih dari 258.103.721 jiwa (1993). Penduduk Amerika berlipat dua kali lebih antara tahun 1910 dan 1980, sementara itu jumlah tanah yang produktif hampir tetap saja. Sebagai negara dimana gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, *International Monetary Fund* atau IMF, *World Bank*, serta badan dunia lainnya tinggal di dalamnya, menjadikan Amerika berfungsi sebagai sentral politik dan ekonomi internasional, bahkan memposisikan dirinya sebagai *superpower* yang mengungguli negara-negara lain. Status demikian diperkuat dengan apatatus militer yang canggih, teknologi modern dan kemajuan di hampir semua bidang.



Sejarah Amerika menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis, sejak masa koloni, perang kemerdekaan sampai pembentukan pemerintahan oleh negara, perubahan demi perubahan berjalan terus. Awal tahun 1600-an merupakan permulaan terjadinya gelombang emigrasi dari Eropa ke Amerika Utara, berkembang selama lebih dari tiga abad, membentuk peradaban di anak benua yang masih liar ini. Para imigran Inggris ke apa yang saat ini dikenal sebagai Amerika Serikat, telah menyebrangi Laut Atlantik jauh setelah koloni Spanyol berdiri di Mexico, Indian Barat, dan Amerika Selatan. Perjumpaan ini lantas membentuk interaksi lintas kultural yang sering kali diwarnai dengan berbagai konflik antar koloni, sampai terjadi perang kemerdekaan dan berdirinya Amerika sebagai negara modern.

Amerika modern dibangun terutama setelah Perang Dunia Kedua, suatu fase yang mengakhiri perang, namun mengawali era nuklir. Justru Perang Dunia Kedua diakhiri dengan nuklir itu sendiri. Setelah itu, kolonialisme negara-negara di dunia secara fisik-militer, melalui deklarasi PBB, dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM terbesar. Ironisnya, langsung atau tidak, tahap hegemoni politik, infiltrasi budaya dan *economic pressure* terus melaju seiring dengan derasnya kemajuan sarana komunikasi dan transportasi yang menjangkau bukan saja antar kota dan negara, melainkan antar benua secara global. Bisa dibilang negara maju seperti Amerika dan lainnya inilah yang kemudian bertindak sebagai *explorer* bagi kehidupan di bumi ini, bahkan tidak jarang sebagai penata dunia. Bagaimana kondisi alam Amerika ini ?

Keadaan alam. Keragaman Amerika berasal dari kenyataan bahwa negeri ini sangat luas dan memiliki berbagai jenis daratan, iklim dan manusia. Amerika

Serikat membentang sepanjang 2.575 km dari utara ke selatan, dan 4.500 km dari timur ke barat. Hutan belantara di pegunungan pantai timur laut mendapat curah hujan lebih dari 250 cm setiap tahun. Sebaliknya, padang pasir di barat daya mendapat curah hujan kurang dari 13 cm setiap tahun. Pengunjung dari hampir negara mana pun akan menemukan bagian-bagian Amerika Serikat yang mengingatkan pada negaranya. Ada hutan-hutan cemara berbintik-bintik danau, dan puncak-puncak gunung yang diselimuti salju. Ada padang-padang rumput dengan sungai-sungai kecil dan pohon-pohon, karang-karang laut yang terjal, daratan-daratan luas yang berumput, bentangan luas tanaman anggur pantai-pantai berpasir, dan sungai yang luas dan panjang menghiasi kekayaan alamnya.

Mississippi, misalnya, merupakan salah satu sungai benua terbesar di dunia, seperti Sungai Amazon di Amerika Selatan, Sungai Congo di Afrika, Sungai Volga di Eropa, atau sungai Gangga di India, dan Yangtze di Asia. Air sungai-sungai itu terkumpul dari dua per tiga luas Amerika Serikat, dan bersama-sama dengan Sungai Missouri (anak sungai utamanya di barat), di bagian utara Pegunungan Rocky sampai ke Teluk Mexico, sehingga menjadi salah satu jalur air terpanjang di dunia. Sungai Mississippi ini disebut "bapak sungai". Di sepanjang alirannya di dataran rendah sungai ini berbelok-belok, tampak malas dan tidak berbahaya. Akan tetapi orang-orang yang mengenal sungai ini tidak tertipu dengan penampilannya yang ramah, karena mereka telah sering berjuang dengan pahit menghadapi banjir sungai tersebut. Akhirnya mereka harus menyadari bahwa tidak ada yang dapat dicapai dengan bergelut melawan amukan arus sungai yang luar biasa itu. Untuk menjinakkannya orang Amerika harus menerima sebagian sifat-sifat sungai ini dan dengan sabar melestarikan dan membangun kembali tanah, padang-padang rumput dan hutan-hutan, jauh di belakang bagian hulu sungai.

Pemerintahan. Negara Amerika berdasarkan pada konstitusi. Perjalanan konstitusi Amerika terus menerus berubah dan berkembang, sejak 1789 atau masa *enlightenment* hingga kini, konstitusi Amerika mengalami 26 kali amandemen, dan tetap dimungkinkan untuk direvisi lagi di masa depan. Perubahan paling luar biasa terjadi dalam dua tahun setelah persahannya. Dalam kurun itu, 10 amandemen pertama, dikenal sebagai *Bill of Rights* (Pernyataan Hak Asasi), ditambahkan. Ke-10 amandemen itu disetujui sebagai suatu kesatuan oleh Kongres pada September 1789, dan diratifikasi oleh 11 negara bagian pada akhir 1791. Amandemen-amandemen ini tetap utuh sampai sekarang, sebagaimana ketika ditulis dua abad yang lalu. Amandemen pertama menjamin kebebasan beragama, berbicara dan pers, hak untuk berserikat dengan damai, dan hak untuk mengajukan petisi kepada pemerintah untuk memperbaiki kesalahan. Amandemen kedua menjamin hak warga negara untuk mempunyai senjata. Amandemen ketiga menetapkan bahwa tentara tidak boleh ditempatkan di rumah pribadi tanpa izin pemiliknya. Amandemen keempat

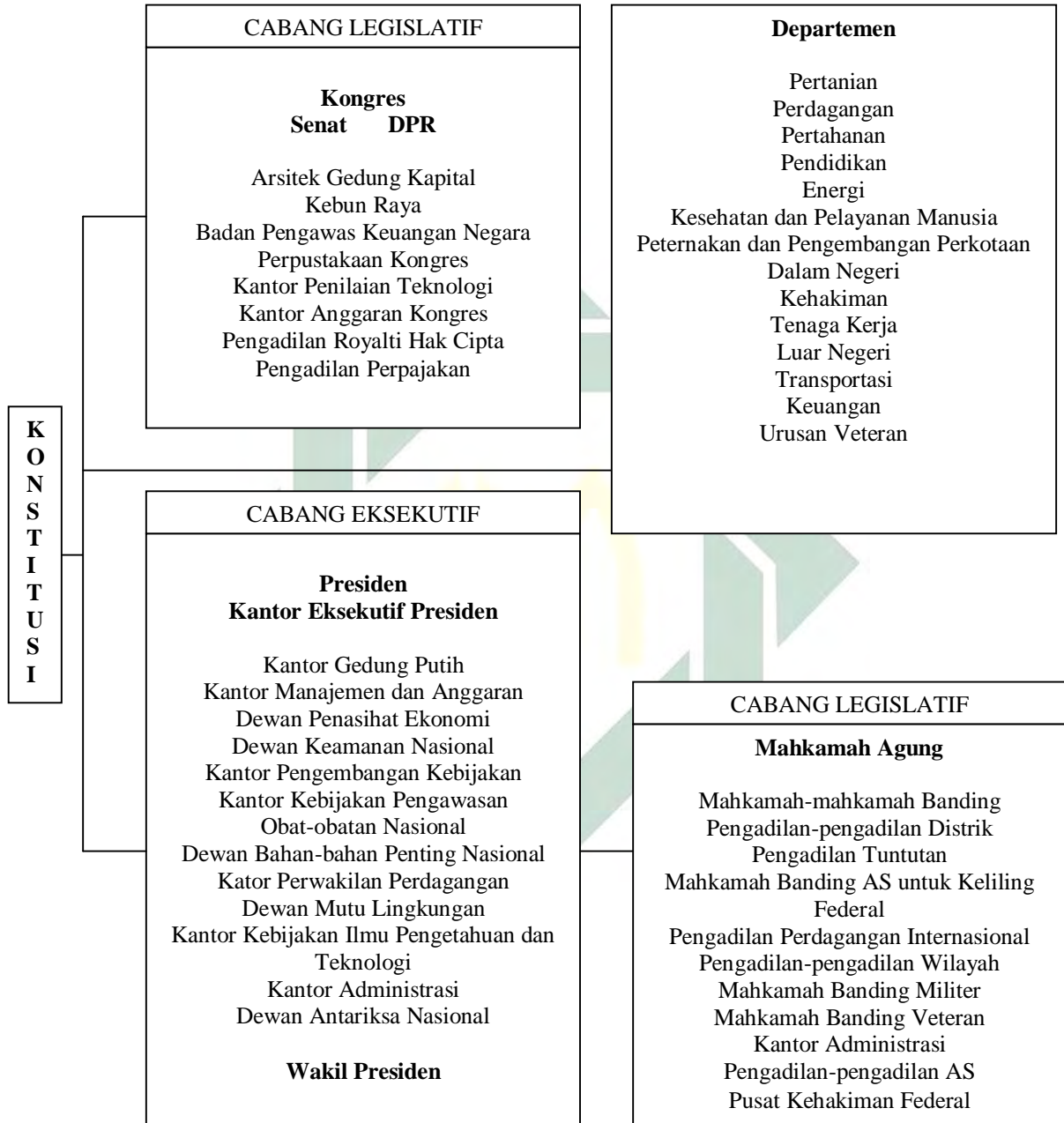
memberi perlindungan terhadap penggeledahan, penahanan dan penyitaan harta benda dengan sewenang-wenang.

Empat emandemen berikutnya berkaitan dengan sistem pengadilan: amandemen kelima melarang pengadilan atas kejahatan besar kecuali sesudah ada dakwaan dari dewan juri. Amandemen ini melarang pengurangan pengadilan atas tindak pidana yang sama; melarang penghukuman tanpa proses hukum yang wajar dan menyatakan bahwa seorang tertuduh tidak boleh memberi kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri; amandemen keenam menjamin pengadilan terbuka yang cepat bagi tindak pidana. Amandemen ini mewajibkan pengadilan oleh dewan juri yang tidak berprasangka, menjamin hak tertuduh untuk mendapat pembela, dan menetapkan bahwa saksi harus mau diajukan ke pengadilan dan memberi kesaksian di depan tertuduh. Amandemen ketujuh menjamin pengadilan oleh dewan juri dalam perkara yang menyangkut apa saja bernilai lebih dari 20 dolar AS. Amandemen kedelapan melarang uang jaminan atau denda berlebihan, dan hukuman yang kejam atau tidak lazim.

Dua amandemen terakhir dari 10 amandemen itu berisi pernyataan yang sangat luas mengenai wewenang konstitusional: amandemen kesembilan menyatakan bahwa daftar hak individu itu tidak dimaksudkan mencakup semuanya; bahwa rakyat masih mempunyai hak-hak lain yang tidak secara khusus diuraikan dalam konsitusi. Amandemen kesepuluh menetapkan bahwa kekuasaan yang tidak diserahkan oleh konsitusi kepada pemerintah federal atau yang tidak dilarangnya bagi negara bagian diserahkan kepada negara bagian atau rakyat.

Pada dasarnya, konsitusi menetapkan pembagian kekuasaan dan wewenang antara negara-negara bagian dan pemerintah federal. Struktur dasar masing-masing cabang pemerintah federal --- yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif ---ditetapkan dalam konstitusi, tetapi bentuk sesungguhnya untuk masing-masing cabang tidak dirinci. Sebaliknya, masing-masing cabang telah berkembang menanggapi perubahan kebutuhan bangsa. Masing-masing cabang pemerintah federal di atas menangani kantor, dewan, dan badan yang dapat dibedakan satu sama lain. Cabang legislatif terdiri dari Kongres, Senat dan DPR menangani Arsitek Gedung Kapital, Kebun Raya AS, Badan Pengawas Keuangan Negara, Kantor Percetakan Negara, Perpustakaan Kongres, Kantor Penilaian Teknologi, Kantor Anggaran Kongres, Pengadilan Royalti Hak Cipta, dan Pengadilan Perpajakan. Sedang cabang eksekutif terdiri dari Presiden dan wakil Presiden dengan seluruh unsur yang terdapat dalam Kantor Eksekutif Presiden. Adapun cabang yudikatif merupakan representasi dari Mahkamah Agung yang menangani masalah hukum dan pengadilan. Secara lengkap struktur konsitusi Amerika ini bisa disajikan dalam bagan berikut.

BAGAN 9 KONSITUSI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT



Sumber: Schroeder, Richard C, *Garis Besar Pemerintah Amerika Serikat*, (Jakarta: United States Information Agency, 1989), h.54-55.

Presiden Amerika dipilih oleh rakyat melalui dewan pemilih, untuk masa jabatan empat tahun; terbatas sampai dua kali masa jabatan. Syarat menjadi presiden Amerika adalah warga negara kelahiran Amerika, sedikitnya berusia 35 tahun dan sekurang-kurangnya sudah menjadi penduduk Amerika selama 14 tahun. Tugas utama presiden adalah melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Kongres. Kekuasaan lainnya adalah merekomendasikan pertundang-undangan kepada Kongres, memanggil sidang khusus Kongres, menyampaikan amanat kepada Kongres, memveto RUU, mengangkat hakim federal, mengangkat kepala-kepala berbagai departemen dan instansi federal serta pejabat penting federal lainnya, mengangkat wakil-wakil di luar negeri, menjalankan tugas resmi dengan negara-negara asing, menjalankan fungsi panglima tertinggi angkatan bersenjata, dan memberikan ampunan atas kejahatan terhadap Amerika Serikat. Meskipun kekuasaan bagi Presiden Amerika begitu luas, bukan berarti kinerjanya bersifat *immune* dan tanpa kontrol dari Dewan. Pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dapat diseret ke pengadilan untuk diajukan *impeachment* oleh pihak yudikatif. Dengan demikian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, berjalan bersama-sama secara seimbang.

Kondisi ekonomi. Ekonomi Amerika mengikuti pola kapitalis dalam arti *usaha bebas*. Pada umumnya, pemerintah federal telah dipengaruhi oleh konsep *laissez faire* atau usaha pasar bebas, dan karena itu sektor swasta memainkan peran yang amat penting bagi pertumbuhan ekonomi Amerika. Pemerintah terlibat dalam ekonomi negara tersebut pada batas tertentu dalam pengaturan dan pembinaan, sedang individu selalu dapat memilih untuk siapa mereka bekerja dan apa yang akan mereka beli. Ini yang disebut dengan "ekonomi pasar". Di Amerika, kebanyakan orang adalah konsumen sekaligus produsen; mereka juga pemilih yang turut mempengaruhi keputusan pemerintah. Campuran antara konsumen, produsen dan pemerintah senantiasa berubah sehingga menghasilkan ekonomi yang dinamis. Dalam ekonomi Amerika dewasa ini, jumlah penyedia jasa jauh lebih besar daripada penghasil barang pertanian maupun barang pabrik.

Dari tahun 1960 sampai September 1980, angkatan kerja meningkat dari 70 menjadi 105 juta jiwa, termasuk 7,5 juta yang melaporkan bahwa mereka tidak bisa mendapat pekerjaan. Dari sisanya yang 97,2 juta lainnya bekerja di bidang pertanian. Sisa 86,8 juta orang Amerika bekerja untuk orang lain dengan upah atau gaji jam-jaman dalam industri, bisnis, perkumpulan sukarela, atau pemerintah. Statistik ini mengungkapkan pergeseran yang cukup mengagetkan dari bekerja untuk diri sendiri ke bekerja untuk orang lain.

Secara umum ada tiga jenis usaha: *pertama*, yang didirikan dan dikelola langsung oleh satu pemilik atau wiraswastawan; *kedua*, kongsi dengan dua orang atau lebih yang berbagi risiko atau laba dalam sebuah usaha, dan *ketiga*,

perusahaan besar dengan para pemegang saham sebagai pemilik yang dapat membeli atau menjual sahamnya setiap saat di pasaran bebas. Bentuk yang paling akhirilah, yang jelas paling penting yang memungkinkan terhimpunnya uang dalam jumlah besar dengan cara menggabungkan modal banyak orang, yang memungkinkan pelaksanaan usaha besar-besaran. Umumnya perusahaan besar Amerika menjangkau pasar internasional melalui ekspor-impor komoditi yang vital bagi kebutuhan masyarakat. Amerika sebagai negara dengan teknologi dan industri maju, mengimpor bahan mentah semisal kayu, karet, mineral, bahan tambang sampai minyak mentah, dari berbagai negara sedang berkembang yang memang memiliki sumber daya alam yang belum banyak terolah tersebut karena kurang menguasai teknologi modern, untuk kemudian diproses menjadi barang jadi, lalu dipasarkan kembali ke negara sedang berkembang tersebut oleh Amerika.

Ekspor selalu memegang peran penting dalam beberapa sektor kehidupan ekonomi Amerika, terutama pertanian. Impor mempunyai peran yang sedikit lebih kecil. Mulai 1973 impor Amerika telah naik menjadi lebih dari 7 %, dan menjelang pertengahan 1980 sudah di atas 10 %. Pada 1993, ekspor Amerika mencapai 442,3 milyar dolar AS dengan komoditi utama berupa barang modal, kendaraan, barang-barang konsumen, produk pertanian dan bahan mentah. Mitra utama impor Amerika adalah Eropa Barat sebesar 27,3 %, Kanada 22,1 % dan Jepang 12,1 % (data 1989). Akan tetapi di tahun yang sama angka impor Amerika lebih tinggi, yakni mencapai 544,1 milyar dolar AS dengan komoditi utama minyak mentah dan produk-produk minyak sulingan, mesin, kendaraan, bahan mentah, serta minuman dan makanan, dengan mitra utama impornya sama dengan mitra ekspornya. Sampai 1992, PDB Amerika mencapai 5,951 triliun dolar AS, PNB per kapita 23,240 dolar AS, APBN berupa pendapatan negara mencapai 1.092 milyar dolar AS dan pengeluaran 1.328 milyar dolar AS. Pada tahun tersebut tingkat pengangguran Amerika sebesar 7 persen, dan inflasi 3 persen.

Pada milenium ketiga, sejalan dengan krisis ekonomi yang melanda Asia, Amerika Latin, bahkan Korea dan Jepang, yang hingga kini belum pulih, imbasnya merembet ke Amerika juga. Kelumpuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang seperti disebut di atas bila berlangsung berkepanjangan akan menurunkan daya beli dan produktivitasnya, jelas dapat mempengaruhi kegiatan ekspor-impor negara maju. Para pekerja tambang di beberapa negara bagian Amerika belakangan ini melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan kesejahteraan, angka pengangguran terus meningkat, kurs dolar mengalami guncangan dan ketidakstabilan, dan IMF sendiri telah berkali-kali diprotes sebagai biang ketidakadilan ekonomi dunia. Produk Amerika bergantung pada kondisi ekonomi global, maka untuk menumbuhkan ekonominya, Amerika perlu memperlakukan mitra usaha yang umumnya negara sedang berkembang

sebagai *partner* yang saling membutuhkan, bukan intervensi atau eksploitasi alam oleh kekuasaan ekonomi monopoli negara tertentu.

Sistem dan kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan di negara Amerika Serikat bukanlah merupakan suatu sistem yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah federal dan juga tidak diatur oleh pemerintah negara bagian secara langsung. Pelaksanaan dan pengaturan sistem pendidikan di negara adidaya ini dijalankan oleh apa yang disebut dengan *Unified School District (USD)*. Misalnya, USD Los Angeles merupakan salah satu sekolah distrik yang terbesar di Amerika yang mempunyai lebih dari 700 ribu siswa dengan lebih dari 600 sekolah dan sekitar 30.000 staf pengajar beserta administrasinya. Anggaran belanja tahunan USD di Los Angeles saja telah mencapai 3 miliar \$ atau sekitar 30 triliun, yang berarti melebihi anggaran belanja Departemen Pendidikan Republik Indonesia atau sekitar 40 % dari APBN Republik Indonesia tahun 2001.

Dari mana anggaran sebesar itu ? anggaran belanja USD sebagian besar dibiayai oleh *property tax revenue* atau pajak atas hasil bumi dan bangunan (PBB), sebagian lagi dari dana anggaran belanja yang datang dari pemerintah negara bagian dan dana yang datang dari pemerintah federal berupa subsidi. Dengan kata lain, sekolah yang baik dan bermutu akan dijumpai di pemukiman elit seperti Beverly Hills atau kompleks-kompleks perumahan kelas menengah. PBB daerah ini akan berkisar sebesar 1 hingga 2 % dari nilai pembelian rumah baru atau nilai rumah lama yang ditaksir oleh pegawai pajak. Biasanya pajak properti ini akan naik seiring dengan naiknya inflasi yang menyebabkan naiknya nilai properti. Bagi orang tua yang mampu dan ingin memperoleh mutu pendidikan yang bagus untuk anak-anak mereka di masa depan, akan membeli rumah di daerah yang paling sedikit disebut kelas menengah agar mereka dapat menikmati kualitas pendidikan yang mereka inginkan. Dana yang diberikan oleh pemerintah negara bagian juga bersyarat, yaitu bahwa USD tersebut harus sejalan dengan tata cara pengelolaan pendidikan yang sudah digariskan oleh pemerintah negara bagian dan federal. Misalnya sekolah tersebut harus menerima siswa tanpa melihat latar belakang etnis, agama dan ras.

Di samping itu juga setiap sekolah di bawah pengelolaan USD harus memenuhi standar minimum mutu sekolah tersebut. Setiap sekolah akan mendapat evaluasi berkala dari negara bagian maupun federal. Biasanya USD ini mengelola SD (*Elementary School*), SMP (*Junior High School*) dan SMA (*High School*), pendidikan SD memakan waktu selama 6 tahun, SMP selama 2 tahun dan SMA selama 4 tahun.

kebanyakan warga Amerika mengikuti pendidikan dasar dan menengah selama dua belas tahun. Dengan bekal diploma sekolah menengah atas (*high school*) seorang siswa dapat masuk ke sekolah tinggi, universitas, sekolah kejuruan, sekolah administrasi sekretaris maupun sekolah keahlian lainnya.

Sekolah dasar dan menengah. Dimulai sekitar usia 6 tahun bagi anak-anak Amerika, mereka dapat mengikuti sekolah dasar selama 5 atau 6 tahun. Setelah itu, mereka dapat masuk ke sekolah menengah yang terdiri dari program dua dan tiga tahun, atau program tiga dan empat tahun. Program demikian disebut dengan sekolah menengah, *junior high school* atau sekolah menengah pertama, dan *senior high school* atau sekolah menengah atas, atau sering disebut dengan *high school* saja, atau dikenal dengan sekolah tingkat dua belas.

Pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan *high school* atau tingkat dua belas, para siswa bisa meneruskan belajar ke sekolah tinggi atau universitas. Studi di Sekolah tinggi maupun universitas dikenal sebagai menempuh pendidikan tinggi. Anda dapat menentukan jenjang pendidikan apa yang sesuai dengan tingkat dua belas tersebut di Amerika. Anda juga bisa bertanya pada konsultan anda apakah anda perlu menggunakan waktu setahun atau dua tahun untuk persiapan belajar di Amerika. Di beberapa negara, para pekerja dan pemerintah tidak mengakui pendidikan Amerika bilamana seorang mahasiswa memasuki sekolah tinggi atau universitas Amerika sebelum dia masuk ke universitas dalam negerinya. Belajar di sekolah tinggi dan universitas bertujuan meraih gelar B.A. atau *Bachelor* sebagai pendidikan tingkat sarjana strata satu. Jenjang setelah itu dikenal sebagai kuliah sarjana (*graduate*) atau pendidikan pasca-sarjana (*postgraduate*).

Pendidikan tinggi dapat ditempuh di berbagai lembaga:

1. Sekolah Tinggi atau Universitas Negeri (*State College or University*). Sekolah Negeri adalah sekolah yang diselenggarakan dan didukung oleh negara atau pemerintah lokal. Tiap 50 negara bagian Amerika melaksanakan sedikitnya satu universitas negeri dan bisa terdapat beberapa sekolah tinggi negeri. Sebagian sekolah negeri menyebukan kata "negeri" dalam nama sekolahnya.
2. Sekolah Tinggi atau Universitas Swasta (*Private College or University*) sekolah ini diselenggarakan oleh swasta, bukan oleh cabang pemerintah. Umumnya biaya pendidikannya lebih tinggi dari pada sekolah negeri. Sering pula, sekolah tinggi dan universitas swasta ukurannya lebih kecil dari pada sekolah negeri.
3. Sekolah Tinggi Dua tahun (*Two Year College*) . Sekolah Tinggi Dua Tahun menerima lulusan *high school* dan penghargaan gelar *Associate*. Sebagian sekolah tinggi dua tahun didukung oleh negara atau umum; sebagian yang lain adalah swasta murni. Anda akan menjumpai jika gelar *Associate* dapat memenuhi syarat untuk mencari kerja di negara anda. Namun di beberapa negara lain, seorang siswa memerlukan gelar *Bachelor* untuk mendapat pekerjaan yang layak. Lulusan sekolah tinggi dua tahun atau biasanya meneruskan ke sekolah tinggi atau universitas selama empat tahun, dimana mereka dapat menyelesaikan gelar *Bachelor* selama dua tahun tambahan lagi.

4. Sekolah Tinggi Komunitas (*Community College*). Ini adalah sekolah tinggi negeri atau umum yang berlangsung selama dua tahun. Sekolah Tinggi Komunitas melayani masyarakat lokal, biasanya wilayah kota atau daerah kabupaten. Kebanyakan para mahasiswanya adalah penduduk lokal yang tinggal di rumah, atau kuliah petang karena para mahasiswanya bekerja sepanjang hari. Acap kali, sekolah tinggi komunitas ini menerima para mahasiswa luar negeri. Banyak dari sekolah ini menawarkan pelayanan khusus bagi para mahasiswa internasional semisal tutorial cuma-cuma. Sebagian sekolah tinggi komunitas ini juga menawarkan program ESL atau *Intensive English Program*.

Beberapa sekolah tinggi komunitas menyediakan perumahan dan pelayanan bimbingan yang diperlukan oleh mahasiswa internasional. Sekali lagi, anda perlu memperhatikan apakah sekolah tinggi komunitas dapat memberikan pekerjaan bagi anda setibanya di negara asal. Banyak, walaupun tidak seluruh pemerintah, mengakui sekolah tinggi komunitas ini.

5. Sekolah Keahlian (*Professional School*). Sekolah Keahlian melatih para mahasiswa dalam bidang seperti seni, musik, teknik sipil, dan keahlian lain. sebagian bidang tersebut dijumpai di universitas. Sebagian yang lain dijumpai di sekolah lain, dan sebagiannya menawarkan gelar sarjana.
6. Institut Teknologi (*Institute of Technology*). Ini merupakan lembaga yang menawarkan pendidikan sekurang-kurangnya empat tahun dalam bidang Sains dan teknologi. Beberapa institut teknologi memiliki program sarjana, sementara sebagian yang lain memberikan kuliah untuk masa pendek.
7. Institut Teknik (*Technical Institute*). Institut teknik melatih para mahasiswa dalam bidang seperti teknik kedokteran atau teknik sipil industri. Walaupun kuliahnya bisa mempersiapkan anda dalam meraih karier yang dicita-citakan, gelarnya bisa atau tidak bisa disamakan dengan sekolah tinggi dan universitas. Sebagian sekolah tinggi dan universitas tidak menerima kredit dari para mahasiswa yang mengikuti institut teknik dan bermaksud pindah atau *kuliah transfer*.
8. Sekolah yang terkait dengan gereja. Banyak sekolah tinggi dan universitas Amerika yang didirikan oleh kelompok keagamaan. Hubungan antara sekolah dan organisasi keagamaan ini bisa sangat fleksibel. Kadang kala, sekolah ini suka mengakui para mahasiswa yang menjadi anggota dari kelompok keagamaan yang mendukungnya. Hampir semua sekolah ini menerima semua agama dan kepercayaan. Biasanya, sekolah yang terkait dengan gereja ini mensyaratkan para mahasiswanya untuk mengambil kuliah Bible dan menghadiri pelayanan *chapel*. Namun, praktek ini menjadi kurang populer.

Kompetisi Masuk Universitas. High School merupakan suatu wadah untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia universitas. Persiapan yang

terarah dan terpadu merupakan kunci kesuksesan seorang calon mahasiswa dalam penggondol gelar kesarjanaannya. Kunci keberhasilan juga terletak pada kedisiplinannya dalam mengerjakan PR secara konsisten dan kegigihannya menguasai mata pelajaran tertentu dan kegemarannya untuk membaca. Pepatah Amerika mengatakan bahwa *the reader of today is the leader of tomorrow*. Benar, bahwa mereka yang gemar membaca saat ini akan menjadi pemimpin di kemudian hari.

Penguasaan ilmu alam, eksakta, sastra dan sosial merupakan kunci keberhasilan. Mereka yang menguasai bidang ilmu eksakta dan Bahasa Inggris dapat memilih fakultas yang populer seperti Kedokteran atau Emgineering dengan mudah. Umumnya di negara Paman Sam ini ada beberapa jenis perguruan tinggi yang tersedia dan dikelola oleh pemerintah negara bagian dan swasta. Di sini hanya akan dibahas perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah saja.

Junior College hanya memberikan Associate Degree atau Associate Science Degree dari berbagai disiplin. Kemudian, sistem universitas negeri yang dapat memberikan gelar Sarjana Muda, Sarjana dan Doktoral. Dengan waktu belajar 4-1-3 tahun. Kecuali untuk mengambil program Dokter Umum (*Medical Doctor*) membutuhkan waktu 4 tahun lagi setelah gelar B.Sc.

Di negara bagian California ada dua grup pengelolaan perguruan tinggi, satu yang disebut sebagai Universitas Negeri California dan sistem College yang mempunyai puluhan kampus yang tersebar di negara bagian California mulai dari bagian utara hingga ke selatan.

Nah sekarang, bagaimana caranya agar dapat diterima masuk ke universitas yang top seperti UCLA atau Berkeley ini ? Mudah saja. Jika seorang siswa sudah mempersiapkan dirinya secara dini mulai dari kelas9 atau sophomore di high school dengan mendapatkan angka rata-rata atau GPA (Grade Point Average, Index Prestasi Kumulatif atau IPK) 3,5 atau B+ dengan nilai SAT minimum 1000, maka ia sudah memenuhi syarat untuk diterima di universitas ini. Namun, karena banyaknya siswa yang mempunyai GPA 3,5, maka terjadilah kompetisi. Jadi agar dapat masuk ke universirtas pilihan, maka siswa tersebut harus mengunci dirinya untuk mendapat GPA 4 pada setiap tahun mulai dari sophomore hingga senior (kelas 12) dengan nilai SAT di atas 1200.

Biasanya seorang siswa yang sudah duduk di kelas 11 atau junior sudah harus memasukkan lamarannya ke University of California dengan preferensi kampus yang diinginkan seperti UCLA atau Berkeley. Bagi siswa yang mempunyai GPA 4 hingga kelas 11 atau junior, sudah akan mendapatkan surat tawaran dari berbagai universitas terkemuka baik swasta maupun pemerintah dari seluruh negara ini. Juga pada kelas 11, siswa tersebut sudah harus mengambil ujian SAT (*Scholastic Assessment Test*) dengan harapan bahwa nilainya akan diatas 1200. hal ini dimungkinkan karena adanya database anak-anak berbakat yang dapat diakses oleh seluruh perguruan tinggi di Amerika

Serikat. Biasanya tawaran ini akan disertai dengan beasiswa mulai dari beasiswa yang kecil hingga penuh untuk studi selama 4 tahun. Adapun bagi siswa dengan GPA sekitar 2 hingga 2,5 akan secara otomatis diterima di College lokal dan Sistem Universitas Negeri California, jika yang bersangkutan melamar untuk menjadi mahasiswa dengan catatan selama kuliah mereka harus mempertahankan rata-rata C atau GPA = 2 agar diijinkan menyelesaikan gelar sarjana muda atau BA dan Bsc. Di samping itu, mereka masih berhak mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah jika mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bagi lulusan high school dengan nilai GPA sekitar 2 sampai 2,5, diwajibkan untuk mengambil Scholastic Assessment Test (SAT) dengan nilai maksimum tes yang berkisar antara 800-1600. Jika angka GPA lebih rendah maka nilai SAT ini akan lebih tinggi. Bagi mereka yang mempunyai GPA 3,5 – 4 dapat mengambil SAT dan dapat juga tidak mengambil. Namun bagi mereka yang ingin masuk ke universitas terkemuka, kebanyakan akan mengambil SAT dengan nilai tinggi agar dapat dipastikan masuk dengan harapan akan menerima beasiswa yang paling tinggi.

Pendidikan pasca-sarjana. Agar supaya memperoleh jabatan profesional, lulusan sekolah tinggi dengan gelar *Bachelor* biasanya saat ini mereka hendak mempertimbangkan studi lanjut tingkat sarjana strata dua. Para mahasiswa dari berbagai negara hanya diperkenankan untuk belajar ke luar negeri pada jenjang sarjana ini. Karena persyaratannya berbeda-beda di beberapa negara, sebaiknya perlu mendapatkan surat kepercayaan atau mandat untuk mendapat pekerjaan di negara asal sebelum melamar ke pendidikan pasca-sarjana di Amerika.

Sebagian besar para mahasiswa internasional mampu meraih pekerjaan yang mereka cita-citakan setelah mereka menempuh gelar Magister. Gelar ini biasanya diperoleh dalam bidang seperti pengetahuan perpustakaan, teknik sipil, atau kerja sosial. Gelar M.B.A. atau *Master of Business Administration* merupakan gelar yang amat populer yang biasanya ditempuh selama dua tahun. Sebagian program magister, semisal jurnalis, ditempuh hanya selama setahun. Dalam program akademik magister, para mahasiswa mengikuti kuliah dalam bidang seperti sejarah dan filsafat. Gelar ini dipandang sebagai batu loncatan bagi jenjang berikutnya, yakni jenjang Doktor (Ph.D.). Sebagian besar waktu studi jenjang magister ini ditempuh di kelas. Seorang kandidat magister biasanya harus menyiapkan makalah penelitian panjangnya yang disebut dengan tesis jenjang magister.

Kalau tadi disebutkan bahwa sebagian kuliah sarjana menganggap gelar magister sebagai langkah awal menuju perolehan gelar Doktor (Ph.D.), sebagian mahasiswa lain bisa mempersiapkan secara langsung bagi pendidikan Doktor bahkan tanpa memperoleh jenjang magister. Hanya dibutuhkan waktu selama tiga tahun atau lebih untuk mendapat gelar Ph.D. ini. Bagi para mahasiswa internasional, kurun waktu ini bisa ditempuh selama lima atau enam tahun. Selama dua tahun pertama, kebanyakan para kandidat Doktor mendaftar kuliah

di kelas dan seminar. Sedikitnya selama setahun kemudian, para peserta akan melakukan penelitian pendahuluan, lalu menulis tesis atau disertasi. Karya ilmiah ini mestilah terdiri dari gambaran umum, rancangan atau penelitian yang belum diterbitkan. Disertasi Doktor merupakan bahasan dan ringkasan dari beasiswa yang berlangsung mengenai topik tertentu. kebanyakan universitas penyandang dana juga mensyaratkan kandidatnya untuk menguasai pengetahuan dua bahasa asing, untuk menggunakan rentang waktu yang diperlukan "tetap tinggal" menghadiri kelas secara rutin, agar dapat lulus ujian yang secara resmi mengakui kandidat tersebut sebagai calon program Ph.D., serta dapat lulus dari ujian lisan pada masalah yang sama saat ujian disertasi.

Untuk memudahkan pemahaman tentang sistem perjenjangan pendidikan di Amerika tersebut, berikut ini disampaikan bagannya.

BAGAN 10 : SISTEM PENDIDIKAN DI AMERIKA

Usia	Tingkat				
		<i>Postdoctoral Study and Research</i>			
25	8	<i>Graduate School</i> (menuju ke Ph.D. selama 2, 3 tahun atau lebih)		<i>Professional Schools</i> (<i>Dentistry, Medicine, Pharmacy, Law, ect., 4,5 tahun atau lebih</i>)	
24	7				
23	6				
22	5	<i>Graduate School</i> (menuju ke M.A. selama 1 atau 2 tahun)			
21	4	<i>Junior to Community College</i> (2 thn)	<i>Technical Institute</i> (2 atau 3 tahun)	<i>Liberal Arts or General</i> (4 tahun)	<i>Professional Liberal Arts</i> (1-4 tahun)
20	3				
19	2				
18	1				
17	12	<i>High School</i> (4 tahun)	<i>Senior High School</i>	<i>Combined Junior & Senior High School</i>	
16	11				
15	10		<i>Junior High School</i>		
14	9				
13	8				
12	7				
11	6				
10	5				
9	4				
8	3				
7	2	<i>Elementary or Primary School</i>			
6	1				
5	K	<i>Kindergarten</i> (1 atau 2 tahun)			
4	NS			<i>Nursery School</i> (1 atau 2 tahun)	
3	NS				

Sumber : Institute of International Education, *Study America*, (US: Institute of International Education, 1999), h.12. dengan penyesuaian dari penulis.

Di Amerika, tiap sekolah memiliki persyaratan dan kebijakan penerimaan sendiri-sendiri. Normalnya, para siswa harus menyelesaikan pendidikan 12 tahun di sekolah dasar dan menengah. Untuk dapat masuk ke program sarjana, para siswa harus menyelesaikan mata kuliah yang ditempuh di jenjang *Bachelor*. Para siswa ini juga harus lulus dengan nilai baik, khususnya di bidang studi pokok. Bagi kebanyakan program jenjang magister, seperti MBA, pengalaman pekerjaan yang sesuai bisa bermanfaat bagi penerimaannya. Saat mempertimbangkan studi di Amerika, perlu direncanakan total biaya pendidikan selama belajar di sana. Biaya pendidikan di Amerika bervariasi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya, demikian pula dengan biaya tinggal, berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Pada umumnya, biaya riil rata-rata per tahun bagi peserta pra-sarjana adalah 17.000 US \$, sedang bagi peserta sarjana adalah 23.000 US \$.

Ketika belajar di Amerika, anda perlu memahami perkuliahan, membaca buku teks, menulis ujian dan makalah serta dapat berpartisipasi di kelas, di samping dapat berkomunikasi sehari-hari. Itu sebabnya, keterampilan penguasaan Bahasa Inggris yang baik diperlukan. Cara yang tepat untuk mengukur kemampuan tersebut adalah dengan mengambil TOEFL (*Test of English as a Foreign Language*) sedikitnya selama setahun sebelum anda berencana mendaftar ke suatu sekolah. Banyak lembaga yang menerima skor TOEFL 500 sampai 550. bagi para pelamar pendidikan sarjana, persyaratan skor TOEFL biasanya sekitar 550.

Setelah persyaratan TOEFL dapat dipenuhi, sekarang bergantung pada latar belakang akademik dan sumber biayanya. Anda bisa mempertimbangkan tipe lembaga yang dikehendaki. Pertama kali, perlu diperhatikan mengajukan aplikasi untuk sekolah tinggi dua tahun atau empat tahun. Pada sekolah tinggi dua tahun biasanya persyaratannya kurang ketat, biayanya juga relatif lebih murah, dan bisa jadi lebih menekankan pada pengajaran ketimbang penelitian di lingkungan fakultas. Sebaliknya, seringkali tidak ada perumahan bagi sekolah tinggi dua tahun, dan tidak ada jaminan ketika anda pindah ke universitas tiap kuliah yang telah ditempuh akan diperhitungkan. Sebagai alternatifnya, sebaiknya anda langsung mengajukan aplikasi ke sekolah tinggi empat tahun atau universitas. Dengan cara ini anda tidak menyia-nyiakan waktu untuk proses aplikasi lagi dua tahun berikutnya.

Anda juga dapat mempertimbangkan perbedaan antara sekolah umum dengan sekolah swasta. Perbedaan utama antara keduanya adalah pada biaya. Sekolah umum atau negeri menerima subsidi dari pemerintah, sehingga mereka sanggup mengenakan biaya lebih murah. Itu sebabnya, dalam banyak hal, biaya

masuk ke sekolah umum atau negeri lebih murah ketimbang sekolah swasta. Bilamana dilihat dari sisi biaya sekolah umum dalam bahan referensi atau katalog sekolah, perlu diyakinkan untuk melihat biaya mahasiswa “selain negeri”, sebab tempat negara bagian di mana sekolah itu berada kadang dikenakan biaya rendah atau bahkan gratis. Sebaliknya, universitas swasta bisa memperoleh bantuan biaya yang diperuntukkan bagi mahasiswa internasional.

Ukuran sekolah bisa jadi faktor yang perlu dipertimbangkan pula. Di Amerika, sekolah beragam dari kurang dari 100 mahasiswa sampai lebih dari 50.000 mahasiswa. Di sekolah yang lebih kecil, kelasnya pun umumnya kecil dan para mahasiswa bisa menerima perhatian lebih dari anggota fakultas. Sedang di sekolah yang lebih besar, mungkin saja lebih beragam di antara mahasiswanya. Di sini, fasilitas dan peralatan riset bisa lebih baik, dan yang demikian ini menjadikan sekolah tersebut menarik minat bagi mahasiswa program sarjana. bila anda menghadapi persoalan biaya, anda perlu memperhatikan biaya sekolahnya, dan pertimbangkan pula apakah sekolah tersebut menawarkan bantuan biaya bagi peserta internasional atau tidak. Bantuan biaya untuk mahasiswa pra-sarjana jarang diberikan, sedang bagi mahasiswa program sarjana lebih lunak, biasanya tidak diberikan kecuali setelah menempuh program studinya selama setahun kemudian. Bekerja sambil di Amerika dengan visa belajar normalnya tidak mungkin terjadi.

Tahun ajaran kuliah/sekolah biasanya diawali dari bulan Agustus atau September dan berlanjut sampai Mei atau Juni. Dalam setahun terdapat dua atau tiga semester. Sistem satu semester terdiri dari 18 minggu. Biasanya seorang mahasiswa mengambil 8 semester dalam masa empat tahun untuk memperoleh gelar *Bachelor*. Sedang sistem kuartal terdiri dari tiga kali 12 minggu. Jadi, seorang mahasiswa bisa mengambil sebanyak 12 kuartal dalam waktu empat tahun yang sama dengan sistem semester di atas untuk meraih gelar *Bachelor*. Adalah baik bagi mahasiswa internasional untuk masuk ke universitas di Amerika pada musim gugur. Kebanyakan mahasiswa masuk kuliah pada waktu tersebut, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri. Sebagian kuliah juga dirancang sedemikian hingga para mahasiswa akan menempuhnya mulai dari musim gugur dan terus berlanjut sepanjang tahun. Tahun akademik di kebanyakan sekolah tersusun dari dua semester. Sekolah lain ada yang menerapkan sistem tri-semester. Bahkan ada juga sekolah yang membagi sistem kalender akademiknya ke dalam empat semester atau sistem kuartal, termasuk musim panas yang merupakan kuliah pilihan.

Kuliah di ruang kelas bervariasi dari kuliah umum untuk beberapa ratus mahasiswa sampai pada kelas yang lebih kecil dan seminar atau diskusi kelas yang hanya dihadiri oleh beberapa mahasiswa. Para mahasiswa yang mendaftar kuliah biasanya dibagi menjadi kelas-kelas atau bagian yang lebih kecil. bagian ini bertemu secara terpisah untuk mendiskusikan topik perkuliahan dan bahan lainnya. Seorang professor biasanya memberi tugas buku teks dan bacaan

lainnya tiap minggu. Mereka juga dipersyaratkan menyusun laporan tertulis pada tiap semester. Diharapkan mahasiswa dapat memperoleh ilmu yang *up to date* melalui bacaan yang disyaratkan tadi agar dapat bergabung dengan diskusi kelas dan memahami kuliah. Mahasiswa jurusan sains biasanya banyak meluangkan waktunya di laboratorium.

Dalam banyak hal sistem pendidikan di Amerika berbeda dengan yang berlaku di Indonesia, termasuk masalah metode pembelajaran dan tingkat pendidikan. nilai-nilai individualisme dan kejujuran amat ditekankan dalam konteks kebijakan dan metode pendidikan di Amerika. Beberapa metode instruksional yang umumnya diterapkan di Amerika adalah:

1. *Kuliah*. Metode pembelajaran yang paling umum adalah kuliah di ruang kelas. Perkuliahan ini didukung oleh diskusi kelas (khususnya apabila kelas kecil), dan "diskusi kelompok" (khususnya bila kelas besar, kelas pra-sarjana dimana asisten pengajaran membantu seorang professor yang hadir memberi kuliah), dengan membaca tugas buku teks atau buku perpustakaan, serta bisa jadi melakukan tugas tertulis yang sifatnya rutin.

Penting bagi seorang mahasiswa untuk ikut serta terlibat dalam diskusi di ruang kelas. Di beberapa negara mungkin saja hal ini dipandang sebagai "tidak sopan" bagi mahasiswa untuk bertanya atau berlawanan pendapat dengan guru. Di Amerika, sebaliknya, bertanya atau berbeda pendapat dengan guru dipandang sebagai tanda memiliki minat, perhatian, dan berpikir mandiri. Di banyak kelas, sebagian nilai mahasiswa ditentukan oleh kontribusi mahasiswa dalam diskusi kelas. Bila anda hanya duduk dengan "sopan" karena diam, hal itu dianggap bahwa anda tidak berminat pada apa yang sedang dibahas dalam kelas, atau anda tidak memahaminya.

Jika kelas teramat besar untuk dapat kesempatan bertanya dan berdiskusi, atau jika karena alasan lain anda tidak mendapat peluang untuk mengajukan pertanyaan di kelas, anda dapat mengunjungi dosen secara pribadi selama jam dinasnya atau membuat janji agar dapat menjumpainya di kantor. Biasanya seorang dosen mengumumkan jam kantornya pada saat pertemuan pertama di ruang kelas. Jika karena alasan kelas besar, kelas pra-sarjana, biasanya terdapat asisten pengajar sarjana yang dapat menjawab pertanyaan anda.

2. *Seminar*. Seminar merupakan kelas kecil, bentuk ini biasanya terdapat di jenjang sarjana. Dalam seminar dicurahkan seluruhnya ke arah diskusi. Para mahasiswa sering dipersyaratkan untuk mempersiapkan presentasi seminar atas dasar bacaan atau penelitian mandiri mereka.
3. *Laboratorium*. Sebagian kuliah memerlukan praktek di laboratorium, dimana teori yang dipelajari di ruang kelas diterapkan untuk menyelesaikan masalah praktis.
4. *Riset*. Dalam banyak perkuliahan sering kali dipersyaratkan untuk menulis "penelitian" atau "makalah". Makalah didasarkan atas kajian atau penelitian

yang dikerjakan di perpustakaan atau laboratorium. Seorang dosen biasanya memberi tugas membuat makalah sejak awal perkuliahan pertama. Mahasiswa diharapkan mengerjakan tugas tersebut selama satu semester lalu menyerahkannya menjelang akhir semester. Nilai yang anda peroleh dari makalah merupakan bagian penting dari tahap perkuliahan. Adalah bijak untuk menyelesaikan makalah sesegera mungkin sehingga ada waktu luang untuk bertanya pada orang lain dalam mereview makalah tersebut dan mengadakan revisi.

Profile

- ❖ **Boston University.** Didirikan pada 1839, universitas ini termasuk salah satu universitas swasta terbesar di Amerika Serikat, terdiri dari 15 sekolah tinggi yang menawarkan lebih dari 250 program. Lokasi universitas ini berada di jantung kota Boston, terkenal dengan kurikulum seni liberalnya di samping program kesehatan, pendidikan, teknik sipil, komunikasi, hukum dan kedokteran yang inovatif dan progressif. Universitas Boston beralamatkan di 175 Forest Street, Waltham, MA 02452, USA. Tel: (781)-2108; Fax: (781)891-2464 atau gradadm@Bentley.edu.
- ❖ **The University of Chicago.** Berlokasi di Danau Michigan di Hyde Park yang bersejarah, universitas ini menampung lebih dari 10.555 mahasiswa, termasuk sejumlah 3.756 mahasiswa pra-sarjana. universitas ini didirikan pada 1892, merupakan salah satu universitas swasta terkemuka, khususnya dikenal karena kekuatan fakultasnya serta komitmennya terhadap peningkatan pendidikan. universitas ini terhitung memenangkan 69 hadiah Nobel yang diraih di antara para mahasiswa terdahulunya, anggota fakultas, termasuk 8 pemenang yang saat ini mengabdikan diri di fakultas. Universitas ini beralamat di 1010 E. 59th Street, Classics 19, Chicago, IL 60637, USA. Tel: (773)702-1029; Fax: (773)834-1204 atau hdmeunie@midway.uchicago.edu.
- ❖ **Temple University.** Universitas riset dan pembelajaran ini memiliki 16 sekolah dan sekolah tinggi dengan 137 bentuk yang beragam dari konsentrasi kegiatan akademiknya. Sejumlah 1200 mahasiswa internasional dari lebih dari 100 negara mendaftar di Universitas Temple. Universitas ini menawarkan persyaratan masuk bagi mahasiswa yang skor TOEFLnya kurang dari 535. Para mahasiswa tersebut harus hadir, sebagai tambahan antar

kuliah regulernya, program Bahasa Inggris Intensif. Alamat universitas ini adalah Conwell Hall 103 [041-09], Philadelphia, PA 19122, USA. Tel: (215)204-6961; Fax: (215)204-5694 atau amnongf@astro.temple.edu.

Islam di Amerika. Ketika seorang Muslim asal Timur Tengah tiba di Amerika, ia tidak menyadari bahwa asal mula Islam datang ke Amerika adalah dari Afrika, bukan dari Arab, dan itu telah ada sejak abad ke-17 M. Selama hampir 300 tahun, puluhan juta lelaki, perempuan, dan anak-anak yang berasal dari Afrika dibawa ke pantai Amerika sebagai budak, yang kebanyakan ---kalau tidak dikatakan seluruhnya--- berkulit hitam. Para budak tersebut, serta imigran liar, yang merupakan elit penguasa urban di Afrika Barat menempati sedikitnya 15 % dari populasi budak di Amerika Utara pada abad ke-18 dan 19. Agama dan asal etnis mereka dapat dilacak pada kerajaan Islam di Ghana, Mali dan Sohay. Sebagian dari budak Muslim Afrika Barat ini membawa aqidah dan amaliah Islam arus pertama dengan cara tetap menjaga nama-nama Muslim, tulisan Arab, berpuasa di bulan Ramadhan, shalat lima waktu dalam sehari, memakai busana Muslim, dan menulis serta membaca Al-Qur'an.

Pada akhir abad ke-19, muncul ide Pan-Afrika oleh Edward Wilmot Blyden (1832-1912) yang mengkritik Kristen karena dianggap rasial dan memandang Islam sebagai agama alternatif bagi warga Amerika asal Afrika. Sejak itu muncul berbagai gerakan Islam yang terutama dirintis oleh Muslim asal Afrika tersebut. Pada awal abad ke-20, akar Muslim Sunni warga kulit hitam dapat dikenal dari dua komunitas: *pertama*, Misi Islam Amerika (*Islamic Mission of America*) yang dipimpin oleh Shaykh Dauod Ahmed Faisal di New York. Atas pengaruh komunitas imigran Muslim melalui pelaut Muslim asal Yaman, Somalia dan Madagaskar, serta atas pengaruh terjemahan Al-Qur'an versi Ahmadiyah, Shaykh Dauod, yang lahir di Maroko dan datang ke Amerika lewat Granada, lalu mendirikan Misi Islam Amerika tersebut. *Kedua*, Masjid pertama di Pittsburgh, Pennsylvania yang didirikan pada 1945 oleh warga Muslim Amerika asal Afrika yang bermaksud untuk menyebarkan ajaran Islam, mendirikan Masjid, melaksanakan shalat Jum'at bagi komunitasnya, membantu anggotanya ketika tertimpa musibah kematian atau sakit, dan melakukan upaya persatuan dengan komunitas Muslim lainnya di Amerika. Umumnya, kedua komunitas Muslim Amerika asal Afrika ini dikenal sebagai Muslim Bilali. Banyak Muslim Amerika asal Afrika yang beralih ke praktek Islam sejak Malcolm X's berubah menjadi Muslim Sunni pada 1964 dan berdirinya Masjid Muslim di New York. Mereka belajar Bahasa Arab, berpuasa di bulan Ramadhan, dan shalat lima waktu sehari. Pertumbuhan yang dramatis bagi Muslim Sunni di Amerika

adalah ketika lebih dari sejuta Muslim tiba di Amerika setelah Undang-undang Imigrasi Amerika direformasi pada 1965.

Elijah Muhammad, lalu putranya Warith Deen Mohammed, juga memainkan peran yang penting bagi perkembangan Islam di Amerika. Dia menjadi pemimpin dari The Nation of Islam. Pada tahun pertama kepemimpinan Warith Deen Mohammed melakukan perubahan mendasar, melanjutkan upaya ayahnya terdahulu. Jika Elijah Muhammad melakukan konsolidasi lokal terhadap dakwah Islam bagi Muslim asal Afrika, misi Warith Deen Mohammed tidak hanya ditujukan pada warga kulit hitam, melainkan bagi seluruh lingkungan di Amerika. Islam lantas menyebar dan bertambah banyak jumlahnya di Amerika. Islam tergolong agama yang berkembang pesat di Amerika, mengungguli posisi jumlah penganut agama Yahudi, dan bahkan berada pada urutan nomor dua setelah Kristen dari sisi jumlah penganutnya.

Kajian Islam di Amerika. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa di banyak negara Islam saat ini, mengirimkan para pelajar, mahasiswa dan dosennya untuk studi Islam ke dunia Barat, termasuk Amerika Serikat. Hal tersebut menggeser opini yang berasumsi bahwa studi Islam hanya bisa diperoleh di Timur Tengah, tempat munculnya Islam pertama kali. Sebenarnya dari aspek substansi, memang belajar Islam di Timur Tengah didukung oleh referensi yang memadai, apalagi menggunakan Bahasa Arab dan komunitas masyarakatnya pun hidup dalam suasana dan semangat nilai-nilai keislaman, namun studi Islam di Barat umumnya, dan Amerika khususnya, juga tidak dapat diabaikan adanya keistimewaan lain yang tidak dijumpai di dunia Timur. Misal saja, pola pikir yang berorientasi pada pengembangan metodologi ilmiah dan penelitian atas kajian Islam kontemporer, justru lebih banyak dikembangkan di dunia Barat. Kita ambil contoh studi sejarah Islam klasik. Bila kita tilik dari kurikulum yang berlaku di Indonesia, bahkan di banyak negara Islam lainnya, yang dijadikan sebagai referensi primer dari kajian sejarah Islam klasik tersebut adalah tulisan dari para penulis kontemporer yang hidup amat jauh setelah periode Islam klasik, padahal dalam kajian sejarah hal itu tergolong sebagai sumber sekunder. Berbeda dengan itu, di Barat justru sebaliknya. Kajian sejarah Islam klasik menggunakan referensi dan buku kuno yang ditulis oleh penulis yang lebih dekat hidupnya dengan peristiwa bersejarah tersebut, bahkan oleh pelaku sejarah sendiri sebagai sumber primer. Sebaliknya bila kajian Islam diarahkan untuk pengembangan hukum, umumnya lembaga pendidikan di dunia Timur menggunakan referensi abad ke-4 hingga 6 Hijriah, sebagaimana tertuang dalam *fiqh imam madzhab*. Kajian Islam bidang hukum di dunia Barat tidak demikian, justru masalah hukum diambil dari referensi yang ditulis oleh penulis saat ini, jadinya kontemporer dan kontekstual. Saya tidak ingin mengklaim bahwa apakah hal itu sebuah kelemahan atau kelebihan, biarlah ini sebatas pada perbandingan saja, selebihnya bisa dianalisa sendiri.

Saya juga berkeyakinan bahwa mengkaji Islam di Barat itu plus-minus. Belajar di Barat itu tidak bisa diabaikan kemungkinan terjadinya proses asosiasi budaya, di samping adanya misi dan *hidden curriculum* yang di hampir semua lembaga pendidikan tentu memilikinya. Apalagi bila diingat bahwa *image* negara-negara Eropa dan Barat terhadap Islam tidaklah selamanya utuh, acap kali Muslim digambarkan sebagai primitif, fanatik, radikal, malaise, barbar, atau bahkan teroris, dan untuk menjadikan mereka beradab, cara utama yang harus diterapkan adalah senjata. Wajar saja jika studi di Barat menimbulkan rasa curiga. Aktivis mahasiswa Muslim di California merasakan perlakuan dan *image* negatif terhadap Islam dan Muslim seperti ini. Buktinya, Hani, seorang penasehat dari kalangan mahasiswa Muslim menerangkan bahwa: "Meskipun para mahasiswa ini terlahir di sini, makan apel seperti halnya yang lain, mereka tetap dipandang sebagai para imigran. Tempat utama dimana para mahasiswa mengalami penolakan atas identitasnya adalah di ruang kelas --di sana sering terjadi salah pengertian terhadap siapa sebenarnya mereka. Di situ para mahasiswa digambarkan sebagai teroris. Para guru biasa berucap semisal, 'Muslim itu lebih tertarik menjadi teroris karena bila mereka mati mereka akan masuk surga, dan seorang teroris Muslim tidak menderita sakit, sebagaimana hal itu dirasakan bagi budaya lain' ... atau dikatakan ... 'Bagi Muslim lelaki, mereka itu tidak takut mati, karena bilamana mereka mati mereka yakin akan dikaruniai 75 gadis di surga nanti'. Hal tersebut biasa dibahas di kelas, lalu para mahasiswa bertanya padaku bagaimana jawaban atas persoalan tersebut".

Bisa jadi hal itu sekedar karena *image* yang keliru terhadap Islam, atau dengan kata lain tidak memahami esensi ajaran Islam yang penuh damai, tentram dan *rahmatan lil alamin*, tetapi bisa jadi pula Amerika memang dalam posisi berbenturan budaya dengan Islam,¹⁰ bahkan sebagai ancaman, setelah mereka memenangkan perang dinginnya dengan Uni Soviet yang notabene berideologi komunis. Pengalaman di negara lain membuktikan hal ini, dimana sikap *double standard* diberlakukan oleh Amerika dalam menghadapi konflik di berbagai negara yang berbasis penduduk Muslim, sebut saja Perang Iran dan Irak, perang Irak dan Kuwait, kasus Palestina-Israel, Afghanistan-Rusia, Bosnia-Herzegovina dan saat ini adalah agresi Amerika terhadap Irak. Walaupun kebijakannya diakui banyak kalangan dan tokoh sebagai tidak terkait dengan agama, tetapi perilaku kekerasan Barat terhadap dunia Muslim, mempengaruhi kehidupan beragama mereka. Invasi AS ke Irak sejak 20 Maret 2003, misalnya, Amerika membungkus misinya dengan label memusnahkan senjata kimia dan massif yang dimiliki Irak, tetapi meskipun motif ini tidak terbukti, toh Amerika

¹⁰ Samuel P. Huntington menyebutnya sebagai *The Clash of Civilization*, dimana ia memandang bahwa Islam merupakan peradaban tersendiri yang mengalami peningkatan intensitas secara signifikan dalam hal perjumpaannya dengan peradaban Barat, terlebih setelah kekalahan Uni Soviet yang berideologi komunis terhadap Barat, terutama Amerika Serikat. Lihat karya tulisnya *The Clash of Civilization and the Remarking of World Order*, New York: Simon & Schuster Rokefeller Center, 1996.

terus membombardir Irak untuk menggulingkan pemerintahan yang berdaulat dan digantikan dengan pemerintahan boneka yang dapat melapangkan jalan bagi kebutuhan kilang minyaknya di wilayah ini. Tak pelak lagi, agresi AS ke Irak ini mempengaruhi sikap beragama Umat Islam. Ulama al-Azhar, Syiria, Yaman, Iran, dan lain-lain memandang perang ini adalah perang suci dan merestui *Jihad shahid* sebagai perjuangannya. Sementara itu, Bangsa Arab terutama yang Muslim yang tinggal di Amerika diawasi secara ketat untuk mencegah meluasnya perang, bahkan jauh sebelum meletus perang teluk II ini.

Lubna, seorang Amerika asal Palestina, yang tinggal di San Francisco, California, pada Mei 2001, dalam sebuah tulisannya mengatakan bahwa: "Bosnia telah membuat orang menyadari bahwa anda bisa menjadi seorang Muslim, berkulit putih, dan masih terbunuh atas dasar anda beragama Islam. Padahal mereka berambut pirang, bermata biru, dan tinggal di Eropa, namun mereka pun masih dipenggal, dibunuh dan dicampakkan ke pemakaman umum, hanya karena mereka adalah Muslim. Itulah yang terjadi, sudah bukan sekedar sebagai orang Arab lagi..."

Bagi sebagian orang, Amerika dipenuhi dengan kehidupan *glamour* , materialistik, dan serba kesenangan duniawi. Sayyid Qutb misalnya, ketika datang pertama kali ke Amerika pada 1949 dalam rangka studi ke Wilson's Teacher College, yang saat ini menjadi the University of the District of Columbia, ia untuk pertama kalinya menderita rindu tanah air. Dalam suratnya kepada penulis Mesir terkemuka Taufiq al-Hakim, Sayyid Qutb menjelaskan betapa ia rindu terhadap "jiwa keTimuran" dan butuhnya terhadap seseorang yang bisa diajak berdiskusi masalah sastra dan pandangan dunia. Sayyid Qutb menulis: "Betapa aku membutuhkan seseorang untuk berbincang tentang masalah selain uang, bintang film dan model mobil". Baginya, orang Amerika begitu dungu, umumnya tidak tertarik dengan kehidupan estetika dan dimensi spiritual. Karya sastra Amerika, menurut Sayyid Qutb, selalu dihisai dengan berbagai anekdot yang menyatakan keprihatinan kuat terhadap isu moral, khususnya yang terkait dengan masalah sexual.

Akan tetapi, tentu saja, bagi sebagian orang yang lain, Amerika merupakan tempat yang lebih baik untuk mempraktekkan Islam, karena justru di Amerika seorang Muslim menghirup udara kebebasan atas pengakuan hak-hak individualnya yang tidak mudah didapat di negara lain. Di sana mereka merasa dapat bebas berpikir dan berbuat, demokratis, bahkan untuk menggunakan hak politiknya.

Kajian Islam di Amerika tidak hanya dilakukan dan disponsori oleh penganut Islam, di beberapa Universitas telah mengembangkan program kajian dan penelitian masalah Islam dan keTimuran. American Academy of Religion (AAR), misalnya, melakukan kajian tentang buku teks dan Kitab Suci Islam, Muslim di berbagai wilayah dan budaya, metodologi dan pendekatan studi Islam, isu jender, teologi pembebasan, HAM, mistisisme, hukum, teologi, filsafat

dan lain sebagainya. Kajian ini diorganisir oleh Dr. T. Kassam dari Department of Islamic Studies and Religion, Colorado College, Amerika. Selain itu, University of California Humanities Research Institute juga menyadari betapa penting kajian tentang Islam dan Muslim belakangan ini. Pada 1997, institusi ini mengajukan dan menerima *grant* dari Kantor President Universitas California untuk mencairkan dana bantuan dalam rangka pengembangan gagasan selama beberapa tahun. Agaknya, Amerika akhir-akhir ini semakin berminat melihat Islam dan Muslim lebih jauh. Di masa depan, apakah Amerika akan diIslamkan, atau Islam itu yang diAmerikakan?. *wallahu a'lam !*



Daftar Pustaka

- Ali, A. Mukti. *Muslim Bilali dan Muslim Muhajir di Amerika Serikat*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- AMINEF Educational Advising Service, 2000.
- Barazangi, Nimat Hafez. "The Equilibrium in Islamic Education in the US" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 5/2000.
- Calvert, John. "Sayyid Qutb in America" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 7/2001.
- Huchel, Donna (Ed.). *Bound for America: for Foreign Students and Scholars Planning to Study in the United States*. Washington: MACEE, 1984.
- Institute of International Education. *Study America*. USA: Institute of International Education, 1999.
- Kassam, Tazim. "The Study of Islam: American Academy of Religion" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 2/1999.
- McCan, Robert L. *An Outline of American History*. Jakarta: AMINEF, 1999.
- , *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*. Jakarta: AMINEF, 1999.
- , *Garis Besar Geografi Amerika*. Jakarta: AMINEF, 1999.
- , *Garis Besar Pemerintah Amerika Serikat*. Jakarta: AMINEF, 1999.
- Mudzhar, M.Atho. *Belajar Islam di Amerika*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Naber, Nadine. "Muslim Student Activism: Americanizing Islam or Islamizing America" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 9/2002.
- Printz, Peggy J. *Study in the USA*. USA: ELS Educational Services, 2000.
- , *Boarding School in the USA: Secondary School and Summer Programs*. USA: ELS Educational Services, 2000.
- Siaran Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat (*Public Affairs Section*) sebagaimana dikutip dalam: http://www.usembassyjakarta.org/press_rel/islamic_school.html
- Turner, Richard Brent. "Mainstream Islam in the African-American Experience" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 3/1999.
- University of California. "University of California Humanities Research Institute: Multiyear Research Initiative on Islam dan Muslims" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 1/1998.
- Volkman, Angelika P. *University of California, Irvine 1999-2000*. USA: University of California, 2000.

Wormser, Richard. *American Islam: Growing Up Muslim in America*. New York: Walker and Company, 1994.



BAB IV

PENDIDIKAN DI INDONESIA: Sebuah Refleksi

“Pendidikan (di suatu negara) itu tidak bisa ditransplantasikan (bagi negara lain), melainkan diinventori (sendiri oleh negara tersebut)”. --- Paulo Freire---

I BARAT untaian mutiara, kepulauan Indonesia membentang sekeliling equator, kadang kala dikatakan bahwa kepulauan Nusantara yang amat luas ini terdiri dari ribuan pulau yang selalu hijau yang menyelimuti daratan seluas 735.000 dan lautan seluas 1.263.000 mil persegi. Di antara pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya. Pusat pemerintahan terletak di Pulau Jawa dengan Jakarta sebagai ibu kotanya. Di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, Pulau Jawa ini tergolong paling padat penduduknya. Sebagian besar negeri ini terdiri dari pegunungan yang aktif. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Gunung Jayawijaya di Irian Jaya dengan tinggi sekitar 153.000 kaki. Dataran rendah sering dijumpai di sepanjang pantai dari pulau-pulau besar dan sepanjang lembah sungai. Kebanyakan sungai di Indonesia adalah kecil dan tidak terlalu panjang. Namun begitu, ada sejumlah sungai yang dapat dilayari, semisal Sungai Musi, Batanghari di Sumatera, Sungai Kapuas, Barito di Kalimantan, dan Sungai Digul di Irian Jaya. Sebagian besar danau dijumpai di daerah pegunungan, seperti Danau Toba di Sumatera, Danau Tondano di Sulawesi, Danau Sentani di Irian Jaya. Seluruhnya amat penting bagi sumber perikanan ikan tawar.

Di Indonesia hanya dikenal dua musim, musim kering (panas) dari Mei sampai Oktober dan musim basah (hujan) dari Nopember sampai April. Selain angin musim yang mengendalikan cuaca, angin pasat juga bertanggungjawab atas terjadinya hujan lebat selama musim basah dari Desember hingga Januari. Kadang kala hujan lebat tersebut dapat menimbulkan banjir di daerah-daerah tertentu. Curah hujan yang cukup menyebabkan kebanyakan tanah di Indonesia subur dan kondusif bagi lahan pertanian. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan potensi pertanian besar. Hasil pertanian berupa padi, gula, karet, kopra, teh, kopi, tembako, minyak kelapa, lada, cengkeh, mangan, kayu manis dan lainnya melimpah di negara yang dilewati Garis Karulistiwa ini. Indonesia juga menyimpan hasil tambang



berupa timah, bauksit, nikel, tembaga, emas, perak dan batu bara yang banyak. Tidaklah mengherankan, karena daratan Indonesia meliputi dua per tiga dari total wilayah daratan.

Kekayaan alam Indonesia diimbangi dengan keragaman budaya sebagaimana terlihat pada kemajemukan suku, etnis, bahasa dan agama. Indonesia yang terdiri dari 17.800 pulau baik kecil maupun besar telah mengakibatkan kemajemukan suku dan etnis menurut daerahnya masing-masing. Dalam hal keragaman bahasa, pemakaian bahasa dan dialek sehari-hari, tiap suku atau daerah memiliki logat dan dialek khasnya masing-masing. Lebih dari 525 bahasa dan dialek diucapkan oleh beragam suku dan etnis yang ada di Indonesia. Di antara ragam bahasa daerah yang dipakai tersebut, satu bahasa umum yang dikembangkan, yaitu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Melayu ini memudahkan komunikasi antar negara tetangga yang dekat dengan rumpun Melayu, sehingga menjadikannya sebagai *lingua franca*. Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa *lingua franca* ini merupakan hasil budaya yang amat penting bagi keutuhan negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia saat ini tidak hanya sekedar bahasa resmi yang digunakan oleh pejabat pemerintah, melainkan juga bahasa pembelajaran di sekolah, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bahasa Indonesia juga dipakai dalam sejumlah besar surat kabar dan tebitan lain di seluruh nusantara. Kemajemukan agama terlihat dari pemeluknya. Dengan populasi lebih dari 210 juta penduduk, saat ini sekitar 87,21 % adalah Muslim, 6,04 % Kristen Protestan, 3,58 % Kristen Katolik, 1,83 % Hindu, 1,03 % Budha dan 0,31 % animisme. Pemerintah secara resmi mengakui lima agama besar, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, semuanya memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama melalui Departemen Agama. Melihat jumlah Muslim di atas, dapat dikatakan bahwa penganut Agama Islam di Indonesia adalah mayoritas, bahkan di antara 50 negara Islam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah penduduk Muslimnya.

Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Dalam hal ini ada dua *grand-theory* tentang masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, *pertama*, teori yang menyatakan bahwa Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, salah satu daerah di India Selatan, pada abad ke-13 Masehi. Teori yang didukung dengan argumen adanya makam raja-raja dan batu nisan baik yang ditemukan di Samudera Pasai, Aceh, maupun lainnya ini banyak dikemukakan oleh Ilmuwan asal Belanda semisal Snouck Hurgronje, Drewes, Ricklef, dan lain-lain. *Kedua*, teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab sejak abad pertama Hijriyah atau ketujuh Masehi, dan mengalami perkembangan pesat terutama pada abad ke-13 Masehi. Berbeda dengan yang pertama, teori kedua ini banyak didasarkan pada sumber-sumber Cina dan temuan arkeologis lainnya. Tulisan ini tidak diniatkan untuk mempertajam perbedaan kedua teori tersebut, melainkan untuk menguatkan asumsi bahwa

Agama Islam telah berakar sejak lama di bumi nusantara ini, dan sejak itu Islam berkembang pesat di Indonesia serta menjadi agama dengan jumlah penganut terbesar baik secara nasional maupun internasional. Selang beberapa lama setelah Islam masuk ke Indonesia, barulah Bangsa Eropa masuk ke Indonesia.

Perjumpaan Bangsa Indonesia dengan Eropa baru terjadi mulai abad ke-15, ketika Portugis datang ke Maluku dan Ternate lalu tinggal selama hampir satu abad, disusul kemudian oleh Spanyol, Inggris, dan kolonialisme Belanda selama tiga setengah abad (1596-1942), lalu pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun (1942-1945), hingga tercapai kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selama masa kolonialisme tersebut praktek pendidikan bagi Bangsa Indonesia berjalan secara tradisional dan amat sederhana. Tekanan dari pihak penjajah berpengaruh besar terhadap jumlah guru, murid, lembaga dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendidikan nasional baru menampakkan perubahan mendasar setelah Indonesia merdeka, sebagaimana dapat dilihat dari data statistik tentang jumlah guru, murid, dan sekolah yang menunjukkan lonjakan drastis partisipasi rakyat terhadap pendidikan. Selama masa kemerdekaan hingga kini, Indonesia mengalami beberapa orde dan fase politik. Mulai 1945 sampai 1965 dikenal sebagai Orde Lama yang bisa dipecah dalam beberapa fase, yaitu: *pertama*, fase awal kemerdekaan (1945-1950), *kedua*, fase demokrasi liberal (1950-1959), dan *ketiga*, fase demokrasi terpimpin (1959-1965). Setelah gagalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), maka terjadi suksesi kepemimpinan yang dibarengi dengan perubahan konstelasi politik dari Orde Lama ke Orde Baru (1966-1998). Orde baru yang populer disebut sebagai Era Pembangunan ini mencatat perkembangan berarti dalam hal partisipasi rakyat di bidang pendidikan. Uraian tentang kondisi ekonomi-politik nasional berikut ini sengaja dimulai dari Orde Baru agar pembahasannya tidak terlalu melebar ke aspek historis yang amat jauh.

Refleksi kondisi ekonomi-politik. Sejak 1966 Indonesia diperintah oleh Orde Baru. Peralihan dari Orde Lama ke Orde baru membawa konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada dasarnya Orde Baru adalah suatu koreksi total terhadap Orde sebelumnya yang didominasi oleh PKI dan dianggap menyelewengkan Pancasila.

Fokus perhatian Orde Baru ditujukan pada empat tahap strategi politik. Semuanya berpengaruh langsung bagi kebijakan pendidikan nasional, yaitu: *tahap pertama*, penghancuran PKI beserta ideologi Marxisme dari kehidupan politik bangsa, serta membersihkan semua lembaga dan kekuatan sosial-politik dari kader-kader PKI dan proses de-Nasakomisasi seluruh aspek kehidupan bangsa. *tahap kedua*, konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila dan UUD 1945; *tahap ketiga*, menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional; dan *tahap keempat*, mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan

pembangunan. Itu sebabnya maka Orde Baru ini diidentikkan dengan masa pembangunan.

Apa implikasi keempat tahap strategi politik yang dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru tersebut bagi kebijakan pendidikan nasional ?

Implikasinya, pada *tahap pertama*, pembubaran PKI, menimbulkan penutupan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PKI dan organisasi yang ada di bawahnya. Karenanya, pada tahun 1966 sampai 1971 terdapat gejala penurunan sekolah.¹¹ Setelah resmi dibubarkan, PKI praktis tidak terlibat dalam birokrasi pemerintahan maupun parpol lagi. Kondisi ini menguatkan posisi kelompok nasionalis dengan aksi pemurnian Pancasila melalui Orde Baru, dan kelompok Muslim yang semula tersingkir dari keterlibatannya di arena politik. Tidak seperti Orde Lama, Kebijakan pendidikan agama kini wajib diberikan mulai SD sampai Universitas. Status madrasah disejajarkan dengan sekolah umum. Kurikulum yang semula terurai dalam Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana, yang berkarakter kiri tersebut, diganti dengan kurikulum bermuatan pembinaan Pancasila. Prestasi penting lainnya adalah diberlakukannya UUSPN No.2 Tahun 1989. Dan kurikulum 1994, menutup produk kebijakan pendidikan masa Orde Baru.

Tahap kedua, mengadakan konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila, hal ini berpengaruh besar bagi perubahan redaksi tujuan pendidikan nasional. Konsolidasi pemerintahan dilakukan dengan pembentukan kabinet baru dan penyusunan program pembangunan. Sedang upaya pemurnian Pancasila menjadi prioritas. Sebagaimana telah disebut pada bagian sebelumnya, ketika pengaruh ide Manipol masih kuat, maka tujuan pendidikannya diarahkan *supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia*,¹² dan seterusnya, maka ketika PKI dibubarkan, kembali pada UUD 1945 dan pemurnian Pancasila, tujuan pendidikannya pun menjadi *membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945*.¹³ Perubahan mendasar di atas menunjukkan bahwa ide Manipol USDEK telah diganti secara tegas menjadi falsafah Pancasila. Lantas, upaya pemurnian Pancasila.

Orde Baru diwarnai dengan semangat serba Pancasila. Semangat ini selalu ditekankan, baik dalam bidang politik maupun pendidikan. Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) harus diberikan kepada siswa/mahasiswa yang diterima di sekolah atau PT, di samping masih adanya

¹¹ Masa antara tahun 1960 sampai 1965 adalah masa kejayaan PKI. Pada masa tersebut banyak sekolah didirikan untuk menarik perhatian masyarakat dan untuk membina kader yang diperlukan. Dalam hal ini sekolah yang bersifat umum seperti SMP dan SMA merupakan sekolah yang banyak didirikan oleh PKI melalui PGRI nonvaksentral.

¹² Keputusan Presiden Republik Indonesia No.145 Tahun 1965 tentang Nama dan Rumusan Sistem Pendidikan Nasional.

¹³ TAP MPRS RI No.XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 3 tentang tujuan pendidikan.

mata pelajaran Pancasila. Mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila) termasuk yang mempengaruhi kenaikan kelas atau kelulusan sekolah. Setelah EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) diberlakukan, PMP menjadi komponen bidang studi yang mempengaruhi nilai kumulatif DANEM (Daftar Nilai EBTANAS Murni), padahal DANEM berfungsi sebagai standar memasuki jenjang pendidikan di atasnya. Penataran P-4 juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di tingkat desa pun, penduduk didata untuk memperoleh pembinaan P-4. Sejak 1984, semua parpol dan ormas diharuskan menganut asas tunggal, Pancasila. Orde Baru diwarnai dengan semangat serba Pancasila

Pada *tahap ketiga*, menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional. Untuk itu diadakan Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 dengan hasil diangkatnya Soeharto sebagai Presiden, juga menghapuskan dualisme penafsiran tentang Pancasila dan UUD 1945.

Implikasi *tahap keempat*, mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan. Strategi ini dilakukan dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan ekonomi serta mengembalikan wibawa pemerintah dari pusat sampai desa. Pembangunan dilaksanakan pada semua bidang, utamanya ekonomi dan pendidikan.

Konsentrasi pembangunan ekonomi menunjukkan *record* yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru meningkat secara rata-rata sebesar 6,8 % per tahun. Laju pertumbuhan ini adalah lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi rata-rata yang ditetapkan di setiap Pelita, yaitu sebesar 5 %. Pendapatan perkapita naik secara mencolok, dari Rp.20.000,00 pertahun pada tahun 1969 menjadi Rp.1.038.000,00 pertahun pada 1991, yang berarti meningkat lebih dari 51 kali lipat. Penduduk miskin telah berkurang secara drastis dari sebanyak 54,2 juta orang atau 40,1 % dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1976 menjadi tinggal sebanyak 27,2 juta orang atau 15,1 % dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1990. Belanja pembangunan selama Repelita I meningkat dari 1,3 trilyun rupiah menjadi hampir 78 trilyun rupiah pada Repelita V, atau meningkat 61 kali lipat. Peranan tabungan juga meningkat dari 44,5 % dalam Pelita I menjadi 49,5 % dalam Repelita V. Di lain pihak peranan bantuan luar negeri semakin menurun dalam periode yang sama, yaitu dari 55,5 % menjadi 50,5 %. Sampai pada 1996, pertumbuhan ekonomi berkisar 7,5 %, atau lebih rendah dari 1995 yang mencapai rata-rata 8,07 % pertahun, namun perolehan ini masih dipuji bahkan menurut *East Asian Standard*,¹⁴ walaupun di saat yang sama, sebagai isyarat mulai turunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ini menandakan bahwa kemampuan dalam negeri makin meningkat dan ketergantungan pada bantuan luar negeri makin berkurang.

¹⁴ R. William Liddle dan Rizal Mallarangeng, "Indonesia in 1996: Pressure from Above and Below", dalam *Asian Survey*, (USA: University of California Press, Vol.XXXVII, No.2 February 1997), h.172.

Secara makro, dinamika pembangunan nasional menunjukkan kemajuan yang mengesankan, terutama kehadiran pertumbuhan ekonomi.¹⁵ Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler tersebut dicatat sebagai *economical miracle*, dimana bukan hanya dialami oleh Indonesia saja tapi juga Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Menteri Keuangan Malaysia, waktu itu adalah Anwar Ibrahim, sebelum ia belakangan dijebloskan ke dalam penjara karena kasus moral, bahkan menyebut kebangkitan ekonomi Asia ini sebagai *The Asian Renaissance*. Kebanggaan pembangunan ekonomi Indonesia dinikmati, meskipun tidak merata, sampai 1996. Setelah itu pada 1997, terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga kini.

Semasa pertumbuhan ekonomi Indonesia era Orde Baru dampaknya dirasakan bagi bidang pendidikan. Kemajuan sektor pendidikan juga tampil dengan *record* positif. Selama PJP I (1969-1991), sekolah, guru dan murid SD meningkat secara mencolok, lebih dari 3,5 kali lipat. Kelembagaan SLTP juga mengalami peningkatan lebih dari 4 kali lipat, dan kelembagaan SLTA meningkat lebih dari 5,5 kali lipat. Terlebih jumlah guru dan murid SLTA, keduanya meningkat lebih dari 8 kali lipat. Di lingkungan PT, jumlah kelebagaannya meningkat lebih dari 3,5 kali lipat.¹⁶ Jumlah dosen meningkat lebih dari 9 kali lipat, sementara jumlah mahasiswa juga meningkat hampir 9 kali lipat. Semua peningkatan tersebut dicapai pada 1991, bila dibandingkan dengan awal Repelita I, 1969. Bisa jadi perkembangan kuantitatif kelembagaan pendidikan ini berarti peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat atas pendidikan, tapi, di balik itu, bukankah jumlah penduduk secara nasional juga meningkat tajam? Data mengenai perubahan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan nasional selama masa Orde Baru nahkan menunjukkan angka yang lebih besar. Tabel berikut ini dibuat untuk mengilustrasikan hal tersebut.

TABEL 8
PARTISIPASI PENDIDIKAN PADA MASA ORDE BARU

NO	JUMLAH MURID	1967/1968	1997/1998	% KENAIKAN
1	SD	13.023.000	29.239.238	224,59
2	SLTP	1.000.000	9.227.891	902,30
3	SLTA	500.000	4.932.083	1.000,00
4	PT	230.000	2.703.896	1.176,00

Diolah dari sumber: Suyanto dalam Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, (Yogyakarta: AdiCita, 2000), h.5.

¹⁵ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h.97.

¹⁶ Data terkini mengenai jumlah PT, meliputi nama, alamat, fakultas dan lain-lain, dapat dilihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Mengenal Pendidikan Tinggi di Indonesia*, Jakarta: Pusat Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

Sekarang bagaimana dengan pembangunan bidang (Pendidikan) Agama Islam ? masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah: pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga Universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966), madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum, pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan, berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada 1975, pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an. Pemerintah juga pada akhirnya memberi ijin pada pelajar Muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya dengan rok pendek dan kepala terbuka, terbentuknya UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, *Bank Muamalat Islam* yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BAZIS (Badan Amal Zakat Infak dan Sedekah) yang idenya telah muncul sejak 1968, berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pemberlakuan label *halal* atau *haram* oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan. Selanjutnya, pemerintah juga memfalisasi penyebaran *da'i* ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi, mengadakan MTQ (*Musabaqah Tilawatil Qur'an*), mencetak dan mengedarkan *Mushhaf Al-Qur'an* dan buku-buku Agama Islam untuk kemudian diberikan ke Masjid atau Perpustakaan Islam, terpusatnya jama'ah haji dalam Asrama Haji, berdirinya MAN Program Khusus mulai 1986, dan pendidikan Pascasarjana untuk dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri, merupakan keberhasilan lainnya. Khusus mengenai Kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka Program Pascasarjana IAIN sejak 1983 dan *join cooperation* dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun Doktor. Selain itu, penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI dilakukan sejak 1990, serta berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada 1990,¹⁷ dan sebagainya. Akibat semua kebijakan tersebut, pembangunan bidang Agama Islam yang dilaksanakan Orde Baru mempercepat peningkatan jumlah Umat Islam terdidik dan kelas menengah Muslim perkotaan. Setelah Reformasi bergulir sejak 1998, kebangkitan gerakan Islam khususnya oleh para pemuda dan mahasiswa makin terbuka, sebagaimana tercermin dari maraknya aksi demo semisal protes menolak eksploitasi seksual kaum perempuan, pornografi, anti narkoba, lokasi perjudian dan tempat-tempat yang dipandang maksiat. Isu nasional seputar produk makanan yang diduga haram, kasus Ambon, Pontianak, Sampit, Poso dan beberapa daerah lain, membangkitkan solidaritas umat dan bangsa untuk segera mendapat penyelesaian. Sementara itu, peristiwa internasional seperti tabrakan pesawat

¹⁷ David McKendrick, "Indonesia in 1991: Growth, Privilege and Rules" dalam *Asian Surveys* (USA: University of California Press, 1992), h.108.

atas gedung WTC pada 11 September 2001, serangan Amerika ke Afganistan, serbuan Israel atas Palestina, memicu aksi protes dari berbagai gerakan Muslim.

Kemajuan di bidang pendidikan agama pada masa tersebut dipengaruhi oleh konstelasi politik yang berlaku saat itu. Sayangnya prioritas pembangunan diarahkan untuk pengembangan bidang ekonomi dan industri. Hanya saja pembangunan ekonomi Orde Baru berjalan tidak seimbang dengan demokrasi. Konsentrasi pembangunan ekonomi menyebabkan kehidupan demokrasi agak terlantar. Pemilu dilaksanakan tanpa sistem multipartai sebagaimana Pemilu 1955, bahkan sejak 1973 jumlah partai disederhanakan menjadi tiga kontestan,¹⁸ yang pada 1984 semua parpol harus berasas tunggal, Pancasila. Kebebasan pers dan mimbar diawasi secara ketat, dan di penghujung tahun 1960 sampai 1980, terjadi banyak insiden kekerasan yang diklaim oleh pemerintah sebagai *ekstrim kanan*, dimana hal itu dijadikan oleh pemerintah untuk mewaspadai gerakan Islam militan. Termasuk dalam hal ini adalah peristiwa pembajakan pesawat Garuda, pengeboman bank-bank milik etnis Tionghoa, pengeboman Candi Borobudur di Jawa Tengah, ketegangan sosial di berbagai daerah antara kelompok Muslim dengan pemerintah lokal, serta protes para pekerja Muslim di Tanjung Priok, Jakarta, terhadap pengotoran Masjid oleh tentara beragama Kristen. Kulminasi kekerasan kian meningkat di penghujung Orde Baru, tahun 1996 diwarnai dengan kekerasan, seperti: pelanggaran hak-hak politik oleh aparat menimbulkan aksi kekerasan massal, pelanggaran HAM dan kerusuhan antar agama terjadi di berbagai tempat, seperti Situbondo, Tasikmalaya, Pekalongan dan Purwakarta. Lebih dari itu kasus pertanahan, aksi kaum buruh dan kekerasan terhadap perempuan meningkat.¹⁹

Ketimpangan antara pembangunan ekonomi dengan demokratisasi demikian menjadikan pembangunan bersifat *artificial* atau semu karena yang tampak di permukaan adalah gedung dan menara yang tinggi, melambangkan kemampuan usaha dan ekonomi yang unggul, sementara pada lapis bawah (*grass-root*), rakyat tidak merasakan pemerataan hasil pembangunan ekonomi. Akibat lain berimbas pada bidang pendidikan. Pendidikan tidak menjadi *headline*, karena alokasi dana pendidikan jauh lebih kecil²⁰ bila dibandingkan dengan alokasi dana bidang pembangunan ekonomi dan industri. Meskipun bidang ekonomi dan pendidikan, keduanya dirancang melalui Repelita (Rencana

¹⁸ Lihat Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h.48. Tiga kontestan Pemilu dimaksud adalah Golongan Karya, Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kebijakan ini berlaku sejak 1973. PPP merupakan bentuk penyederhanaan atau gabungan dari parpol Islam: NU, Parmusi, PSII, dan Perti.

¹⁹ Selengkapnya lihat A. Made Tony Supriatma (Ed.), *1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997.

²⁰ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Bagian I (Permasalahan), (Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1979), h.167.

Pembangunan Lima Tahun) dan PJP²¹ (Pembangunan Jangka Panjang), kebijakan yang ditempuh adalah sektoral, ternyata tidak mampu saling menutupi. Ketimpangan ekonomi tersebut memuncak pada awal 1997 saat Indonesia terpukul oleh krisis multi-dimensional yang mengakibatkan runtuhnya Orde Baru dan mengawali bangkitnya era Reformasi.

Begitu terjadi krisis ekonomi, bidang pendidikan pun kena getahnya. Ketika kurs dolar terhadap rupiah bahkan pernah mencapai level di atas Rp. 15.000,00 per dolar, mengakibatkan harga barang terutama komponen impor melambung tinggi. Alat stasionari dan administrasi perkantoran sekolah yang umumnya menggunakan komputer tidak urung naik berlipat ganda. Angka *drop out* siswa sekolah meningkat, tercatat lebih dari 8.000.000 siswa Sekolah Dasar terancam putus sekolah. Sekedar menambah data, saat awal krisis pada 1998, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Tarbiyah pada tiap jurusan yang ada, terdapat sedikitnya 20 mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah. Harga kertas yang juga ikut naik, mempengaruhi kenaikan harga buku, surat kabar, majalah serta media cetak lain yang merupakan kebutuhan bagi proses pencerdasan anak bangsa. Semasa akhir Orde Baru diklaim terdapat sekitar 25.000.000 penduduk dalam status di bawah garis kemiskinan, waktu itu sekitar 10 % dari total penduduk, ketika krisis tak kunjung selesai, angka tersebut meningkat menjadi 80.000.000 penduduk atau sekitar 40 % penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Tuntutan kenaikan gaji guru serta pegawai datang bergelombang hingga ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta. Kondisi Sekolah Dasar di berbagai daerah seperti Madura, Jember, Brebes serta lainnya banyak yang rusak dan tak layak pakai, baik karena usia bangunannya maupun akibat bencana banjir yang menimpa Indonesia pada Pebruari-Maret 2002, sedang rehabilitasinya terhambat oleh kondisi ekonomi masyarakat. Sekolah di daerah rusuh dan kaum pengungsi juga sangat memprihatinkan.

Kondisi gizi anak cukup memprihatinkan, bahkan bila dibandingkan dengan negara tetangga di wilayah Asia Tenggara. Angka kematian ibu dan anak saat melahirkan bayinya walaupun secara nasional sampai 1997 menunjukkan angka penurunan yang berarti, namun begitu dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya masih terhitung paling tinggi. Berikut ini disajikan data dimaksud. Angka kematian akibat kelahiran (*Immortality* atau disingkat IMR) umumnya terjadi karena faktor perkawinan dini (terlalu muda), kelahiran usia lanjut (tua), seringnya melahirkan dan jarak kelahiran yang terlalu dekat. Di lingkungan ASEAN, Indonesia termasuk tertinggi angka IMR dan MMR (*Mature Mortal Reproduction*), sebagaimana nampak dalam tabel berikut.

²¹ Repelita I efektif mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974; Repelita II mulai 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979; Repelita III mulai 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984; Repelita IV mulai 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989; dan Repelita V mulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Kelima Repelita ini disebut dengan masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I). Penelitian ini membatasi diri dalam kurun waktu sampai pada masa PJP I di atas.

TABEL 9
DATA IMR & MMR ASEAN 1997

NEGARA	IMR	MMR
Indonesia	50	390
Singapura	5	10
Malaysia	11	59
Thailand	30	50
Philipina	36	100
Vietnam	38	120

Sumber: Siswatiningsih B, Dinamika Kependudukan: Kaitannya dengan Variabel Agama, Yogyakarta: BKKBN Prop. D.I.Y., 2002.

Sistem pendidikan. India dan Malaysia merupakan contoh bagi hadirnya pengaruh sistem pendidikan kolonial Inggris atas kelanjutan sistem pendidikan yang berlaku di kedua negara tersebut. Beberapa praktek pendidikan yang dilaksanakan oleh Inggris, ternyata diteruskan, bisa jadi karena dianggap masih relevan, oleh India maupun Malaysia. Pengalaman yang sama bisa dipakai untuk menjelaskan akar sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Bedanya, meskipun pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia telah berlangsung sepanjang tiga setengah abad, justru sistem pendidikan yang banyak diteruskan adalah masa pendudukan Jepang. Sebut saja tentang sistem penjenjangan pendidikan di Indonesia pasca-kemerdekaan. Ketika akhir pendudukan Jepang, pola sistem perjenjangan yang berlaku adalah 6-3-3-4, begitu Indonesia merdeka ternyata sistem perjenjangan ini diteruskan dengan menerapkan 6 tahun bagi Sekolah Dasar, 3 tahun Sekolah Menengah Pertama, 3 tahun Sekolah Menengah Atas, dan 4 sampai 6 tahun di Perguruan Tinggi. Tentu saja menyebut pengaruh kolonial tersebut tidak dimaksudkan sebagai totalitas karena terlalu banyaknya perbedaan yang dikembangkan oleh negara tersebut setelah merdeka. Pasca-kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia mengalami serangkaian transformasi, dan sistem persekolahannya dapat dijelaskan berdasarkan kondisi saat ini sebagai berikut.

Pendidikan pra-sekolah. Disebut pra-sekolah karena anak pada usia antara 3 sampai 5 tahun yang dimaksudkan menjadi peserta pendidikan tadi diarahkan untuk persiapan dan adaptasi bagi pendidikan berikutnya di Sekolah Dasar. Metode dan materi pelajarannya pun berpola *learning by doing*, dengan memperbanyak permainan untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Itu sebabnya disebut sebagai Taman Kanak-Kanak (TK). Umumnya TK ini terdiri dari dua tingkat yaitu TK Kecil usia 4 tahun dan TK Besar usia 5 tahun. Namun tidak semua orang tua mengikuti ketentuan tersebut secara ketat, di antara mereka ada yang hanya memasukkan anaknya ke TK Besar selama setahun, lalu

ke Sekolah Dasar menjelang anak usia 6 tahun. Bahkan dalam kasus tertentu, seorang anak diterima masuk ke Sekolah Dasar tanpa melewati pendidikan pra-sekolah ini. Hanya saja bila terjadi seperti itu, biasanya para guru Sekolah Dasar mengeluhkan kemampuan adaptasi anak dalam suasana sekolah, terlebih bila di lingkungan keluarga anak tersebut tidak dibekali dengan kemampuan baca-tulis atau pendidikan yang memadai.

Bisa dibilang semua TK di Indonesia dikelola oleh swasta, kalau toh ada yang negeri hanyalah dalam struktur kepegawaian lembaga tertentu, semisal Dharma Wanita dari unit lembaga tertentu mendirikan TK, atau kadang kala dengan subsidi dari pemerintah. Tapi, hal ini tidak banyak terutama bila dibandingkan dengan TK yang dikelola oleh swasta.

Umumnya kegiatan belajar di TK adalah sederhana, materi pelajarannya berkisar pada pengenalan warna, benda, huruf dan angka, selebihnya diberikan permainan dan keterampilan untuk kreativitas anak, semisal menggunting, melipat, membentuk bunga dan sebagainya. Kegiatannya disesuaikan dengan perkembangan psikologis anak. Demikian pula dengan pola pengaturan kelas yang disusun berkelompok menyerupai *buzz group* disengaja untuk menciptakan suasana kerjasama yang harmonis antar anak. Hanya saja, praktek yang terjadi belakangan ini mulai terjadi bergeseran. Beberapa TK yang diasumsikan oleh masyarakat sebagai "maju" berupaya untuk memperkenalkan lebih jauh materi di atas dengan menambah materi baca-tulis Arab dan Latin, sedemikian hingga anak ketika masuk ke Sekolah Dasar sudah memiliki bekal untuk bisa membaca dan menulis. Bahkan di beberapa TK kategori "elit" ada pula yang menambahkan pengenalan Bahasa Inggris dasar. Perkembangan baru yang lain adalah munculnya TK Terpadu, dimana dimaksudkan oleh penyelenggara sebagai perpaduan antara TK dengan TPO (Taman Pendidikan Al-Qur'an), biasanya selesai dari TK Terpadu ini anak ditargetkan telah menamatkan Buku Iqra' sebanyak 6 jilid, yang berarti sekurang-kurangnya telah mampu membaca Juz 'Ammah atau juz ke-30 dari Al-Qur'an dengan *fasih*.

Pendidikan Dasar. Pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun yang terdiri atas program pendidikan enam tahun yang diselenggarakan di sekolah dasar dan program pendidikan tiga tahun yang diselenggarakan di sekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Kurikulum pendidikan dasar menerapkan sistem catur wulan yang membagi waktu belajar 1 tahun ajaran menjadi tiga bagian waktu yang masing-masing disebut catur wulan (3 catur wulan). Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar-mengajar di SD (Madrasah Ibtidaiyah atau MI) dan SLTP (Madrasah Tsanawiyah atau MTs).

Padanan dari SD adalah MI, sedang SLTP adalah MTs. Bedanya, SD dan SLTP berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), sedang MI dan MTs dikelola oleh Departemen Agama (Depag). Di samping itu, komposisi kurikulum agamanya lebih banyak di MI dan MTs dengan rasio 70 % umum : 30 % agama, sedang di SD dan SLTP hanya memberikan pelajaran agama sebanyak dua jam pelajaran dalam satu minggu. Jam belajar di SD lebih panjang dari TK, normalnya siswa masuk kelas pukul 07.00 dan pulang pada pukul 12.00. meskipun demikian, sebagian SD, terutama yang bernaung di bawah ormas Islam semisal NU atau Muhammadiyah, menambah jam belajarnya baik untuk kegiatan ekstrakurikuler maupun pelajaran yang menjadi ciri khas ormas Islam tersebut, sehingga siswa bisa pulang sekolah pada pukul 13.30. Di beberapa SD Unggulan kadang kala memperpanjang jam belajarnya hingga sore hari atau biasa dikenal dengan *full days school*. Di sini anak masuk mulai pukul 08.00 dan pulang pada pukul 15.00, sementara istirahat, shalat dan makan siang dimasukkan dalam program pendidikan oleh lembaga tersebut. Eksistensi SD Unggulan ini ternyata mampu menarik minat besar dari masyarakat, khususnya bagi mereka yang mampu, karena pertimbangan efisiensi waktu maupun lainnya. Di sadari atau tidak, SD Unggulan ini telah menciptakan sekolah "kelas elit" yang hanya dapat dikunjungi oleh kaum berduit.

Isi kurikulum pendidikan dasar memuat mata pelajaran sebagai berikut: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia (termasuk membaca dan menulis); Matematika (termasuk berhitung); Ilmu Pengetahuan Alam (pengantar sains dan teknologi); Ilmu Pengetahuan Sosial (termasuk ilmu bumi, sejarah nasional dan sejarah umum); Kerajinan Tangan dan Kesenian (termasuk menggambar); Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; Bahasa Inggris; dan Muatan Lokal (sejumlah mata pelajaran).

SD menggunakan sistem guru kelas, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Sedang Bahasa Inggris dimasukkan sebagai Muatan Lokal. Adapun di SLTP menggunakan sistem guru bidang studi. Namun, di kebanyakan SD yang berada di bawah yayasan atau pihak swasta, penerapan sistem guru kelas ini tidaklah mutlak, yang terjadi justru sebaliknya, hampir semua SD Swasta justru menerapkan sistem guru bidang studi.

Yang menarik dari perkembangan pendidikan dasar saat ini adalah dihapuskannya EBTANAS untuk SD mulai tahun ajaran 2001/2002. Sebagai konsekuensinya, bagi murid SD yang akan melanjutkan ke SLTP, sistem seleksi yang berlaku tidak menggunakan DANEM lagi, melainkan berdasarkan test masuk. Hemat saya, dihapuskannya EBTANAS merupakan langkah maju untuk pendidikan yang egaliter, demokratis dan populis. Sebab, siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dapat bersama-sama bersaing lewat test masuk. Selama ini praktek penerapan EBTANAS selalu diwarnai dengan berbagai masalah, apakah isu kebocoran soal, isi soal yang tidak kontekstual dengan kondisi lokal

sekolah di berbagai daerah, penerapan biaya ujian dan perkara validitas DANEM yang tidak selamanya mencerminkan kondisi akademik siswa seutuhnya. Akan tetapi, di samping itu, penghapusan EBTANAS membuka potensi munculnya persaingan tidak sehat antar sekolah, karena masing-masing sekolah berniat untuk meraih nilai tinggi agar muridnya dapat diterima di sekolah lanjutannya. Hal ini bisa memicu dongkrakan nilai dari pihak sekolah tertentu sehingga nilai yang muncul tidak objektif menggambarkan kemampuan akademik siswa yang semestinya. Selain itu “pendekatan terselubung” antara wali murid dengan pihak sekolah agar putranya dapat diterima di sekolah tersebut, sebagaimana hal ini terbukti sering terjadi sebelum diberlakukannya EBTANAS, bisa jadi muncul kembali. Beberapa kekuatiran tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan penerapan sanksi yang tegas dan *social-control* dari masyarakat sekitar yang efektif.

Pendidikan Menengah. Pendidikan Menengah meliputi Sekolah Menengah Umum (SMU), Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat dengannya. Tujuan pendidikan menengah adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian; serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Program pengajaran di lingkungan sekolah umum dan kejuruan lebih luas dari pendidikan dasar. Program pengajaran umum mencakup bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran sebagai berikut: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; Pendidikan Agama; Bahasa dan Sastra Indonesia; Sejarah Nasional dan Sejarah Umum; Bahasa Inggris; Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; Matematika; Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Biologi dan Kimia), Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi, Sosiologi dan Geografi), dan Pendidikan Seni. Sejak kurikulum 1994, program pengajaran di jenjang pendidikan menengah ini diatur dalam program pengajaran khusus yang meliputi tiga jurusan, yakni: program bahasa, program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Program pengajaran khusus ini diselenggarakan di kelas III dan dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademik maupun pendidikan profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat. Siswa di kelas III diberi peluang untuk berpindah ke program pengajaran khusus lainnya sesuai dengan kemampuan, minat, dan kemajuan belajarnya. Kesempatan untuk berpindah dari program khusus yang telah dipilihnya ke program khusus lainnya diberikan sampai dengan akhir catur wulan 1 kelas III.

Kurikulum SMU dan yang sederajat menerapkan sistem catur wulan yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi tiga bagian waktu yang masing-masing disebut catur wulan (1 tahun = 3 catur wulan). Jumlah hari belajar dalam satu tahun ajaran adalah 240 hari, termasuk di dalamnya waktu bagi penyelenggaraan penilaian kegiatan, kemajuan dan hasil belajar siswa. Jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun ajaran sekurang-kurangnya 204 hari. Satu jam pelajaran lamanya 45 menit, dan sistem pengajarannya memakai sistem guru bidang studi.

Selama kurikulum 1994 berlaku bagi pendidikan menengah, terdapat banyak kritik dari pakar dan praktisi pendidikan. Kurikulum 1994 dipandang *overloaded* dan *subject-oriented*, misalnya tercemin dalam mata pelajaran Matematika yang sering dipandang sebagai momok yang memberatkan bagi para pelajar. Terlebih bila diingat metode mempelajarinya yang masih konvensional dan tidak aplikatif, menyebabkan para siswa merasa "berat" menerima pelajaran ini. Bahkan di lingkungan Asia saja, Indonesai belum pernah tampil dalam kejuaraan matematika antar pelajar internasional. Akibat lanjutan dari kurikulum yang *overloaded* tersebut, sering kali guru mengajar secara tergesa-gesa agar dapat mencapai target kurikulum yang ditetapkan. Penyelesaian soal matematis dirancang berdasarkan kemampuan akademik semata, tidak memasukkan unsur nilai atau sikap, menyebabkan perhitungannya bersifat kaku, materialis dan tidak diarahkan pada *problem solving*. Keringnya pendidikan nilai (afektif) ini baru dirasakan ketika terjadi kenakalan pelajar dan maraknya kasus perkelahian atau tawuran antar pelajar, terutama di ibu kota dan beberapa kota besar lain. Persoalan lainnya nampak pada lulusan sekolah tersebut, yang karena faktor kondisi ekonomi nasional, menyebabkan tidak mudah mendapat kerja, sedang untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, tidak semua lulusan sekolah menengah tersebut dapat mengikutinya. Konsep *link and match* yang diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kerja, dalam prakteknya kini berbenturan dengan krisis multi-dimensional yang dihadapi oleh Indonesia. Yang sudah bekerja pun banyak mengalami PHK, sementara para penganggur terdidik meningkat. Bagaimana pendidikan menengah dapat mengatasi hal ini ?

Agaknya Pemerintah sedikit mulai tanggap terhadap hal ini. Dimulai dari pembaharuan kebijakan, berangkat membenahi pendidikan nasional. Kebijakan politik yang berimbas langsung pada pendidikan yang ditempuh oleh Pemerintah berawal dari diberlakukannya Otonomi Daerah pada 2001. Kebijakan ini berpengaruh pada dunia pendidikan, dimana sekolah diberi wewenang pengelolaan yang lebih luas. Konsep *School Based Management* diperkenalkan ke sekolah untuk memberi kemandirian sekolah agar secara aktif dan dinamis dapat meningkatkan kualitas pendidikannya melalui manajerial seluruh sumber daya sekolah yang ada. Praktek *macro-oriented* atau segalanya diatur dari pusat

dan sentralisasi pendidikan yang berjalan selama ini dipandang tidak efektif, sebab apa yang dasumsikan dari pusat “beres”, ternyata di daerah “NIHIL”.

Pemerintah juga berani menempuh kebijakan subsidi silang dari kenaikan harga BBM yang sebagiannya untuk pendidikan. Soal biaya pendidikan ini memang dilematis, di satu sisi pendidikan perlu melengkapi diri dengan fasilitas dan kualitas yang memadai dan itu butuh biaya tinggi (*high cost*), tapi disisi lain daya beli masyarakat sejak krisis yang melanda Indonesia, telah menurun secara signifikan. Bagaimana membangun sekolah yang lengkap dan memadai tanpa kekuatan dana ?

Pendidikan Tinggi. Setelah seorang pelajar menamatkan studi di SMU atau yang setaraf dengannya, bila ia bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya, ia bisa memilih perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia. Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi menerapkan sistem kredit semester (sks), dan karenanya dalam setahun terdapat dua semester, semester ganjil dan semester genap. Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliah yang ditargetkan ditempuh dalam waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tinggi Strata 1 dalam waktu empat tahun. Namun, bila ia tidak sanggup, karena banyak mengulang mata kuliah yang rendah nilainya atau karena cuti, waktu yang ditempuh untuk diwisuda sebagai seorang sarjana, bisa lebih dari empat tahun. Kalau ia berhasil diwisuda, dan berniat untuk studi lanjut, masih ada dua tahap dalam pendidikan tinggi yang dapat ditempuh, yaitu jenjang Strata 2 atau Magister yang normalnya ditempuh selama dua tahun, dan jenjang Strata 3 atau Doktor dimana kuliah efektifnya ditempuh selama dua tahun sedang sisanya untuk penelitian. Apabila seluruh tahap pendidikan tinggi di atas ditempuh, diberikan gelar Doktor untuk bidang yang dipilihnya. Jenjang ini mengakhiri karier akademik seseorang secara formal.

Seperti halnya di banyak negara lain, di Indonesia juga dikenal adanya perguruan tinggi negeri yang dikelola langsung oleh Pemerintah, dan perguruan tinggi swasta. Dalam realitasnya, pelajar di Indonesia banyak yang mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terlebih dahulu, baru menetapkan cadangannya pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Masuk ke PTN disaring lewat Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau UMPTN. Kesan sekolah dan perguruan tinggi negeri pasti lebih unggul dan absah serta dianggap lebih mudah mendapat kerja masih melekat dan banyak diyakini oleh masyarakat. Padahal, setelah peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk perguruan tinggi diberlakukan dengan status *terakreditasi* dan *non-terakreditasi* sebenarnya memperlakukan sama antara perguruan tinggi negeri dengan swasta. Malah, bisa jadi perguruan tinggi swasta mendapat nilai yang lebih baik dari perguruan tinggi negeri. Soal unggul dan jaminan kerja merupakan perkara yang relatif. Perguruan tinggi sekedar

menyiapkan pesertanya untuk bermasyarakat, sedang keberhasilan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Perguruan tinggi diharapkan berfungsi sebagai *agent of change* bagi pola kehidupan masyarakat yang modern. Untuk itu perguruan tinggi perlu memiliki agenda pembaharuan.

Pertama kali, kehadiran universitas riset di Indonesia perlu segera direalisasi. Fungsi universitas riset adalah untuk pengembangan dan kajian ilmiah secara mendalam, dan ini sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian. Pendidikan dilangsungkan dalam bentuk perkuliaan di ruang kelas, penelitian atau riset dilakukan terutama oleh mahasiswa semester akhir sebelum diwisuda (berupa penulisan Skripsi, Tesis maupun Disertasi), dan pengabdian dilakukan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), atau kalau di universitas keguruan berupa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang kegiatannya adalah praktek mengajar di sekolah tertentu selama kurang lebih tiga bulan. Memang, tiap universitas di Indonesia normalnya memiliki Pusat Penelitian, akan tetapi dalam prakteknya lembaga tersebut amat terbatas, skopnya lokal atau paling banter nasional. Dibandingkan dengan negara maju, Amerika misalnya, universitas itu disiapkan untuk mencetuskan *masterpiece* dan penemuan ilmiah di bidangnya. Telah disebutkan terdahulu bahwa Universitas Chicago mampu meraih 68 hadiah Nobel, sekali lagi karena temuan ilmiahnya. Di Jepang, riset dan pengembangan (*Research and Development* atau R&D) tersebut tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi saja, melainkan hampir semua perusahaan besar, seperti Honda Astra, Toyota, Mitsubishi, Hitachi dan lain-lain, menyisihkan dana *grant* bagi para peneliti untuk melakukan riset terhadap bidang tertentu. The Toyota Foundation, misalnya, telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS) di Indonesia dalam bidang penelitian. Tiap tahun yayasan ini menawarkan beasiswa bagi peneliti muda untuk melakukan riset dengan tema pilihan sesuai dengan ketentuan yayasan. Rendahnya penelitian di lingkungan perguruan tinggi ini tercermin dari sedikitnya karya ilmiah yang dipublikasikan dan jumlah judul yang terbit tiap tahunnya, atau bila dilakukan penelitian, sebagaimana diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyeleksi proposal riset dari para peserta se-Indonesia, umumnya kurang berbobot.

Kedua kalinya, universitas internasional akan menjadi tren di masa depan nanti, seiring dengan meningkatnya globalisasi dan pasar bebas. Di lingkungan beberapa negara Islam seperti Malaysia dan Pakistan saja telah terdapat universitas internasional. Menjelang berakhirnya masa jabatan Mendikbud Wardiman Djojonegoro pada 1998, wacana investasi perguruan tinggi asing ramai dibicarakan di berbagai media massa. Saya sependapat dengan ide ini, tetapi akan lebih baik lagi kalau universitas internasional itu didirikan atas nama Pemerintah dan dikelola oleh Pemerintah untuk peserta nasional dan mancanegara, sedang tenaga edukatifnya bisa dijalin kerjasama dengan pihak

universitas luar negeri yang dipandang sesuai dengan kapasitas dan bidangnya. Universitas internasional dalam arti investasi negara asing untuk membuka cabang atau filian tertentu bagi universitasnya di Indonesia bisa dilakukan dengan peraturan dan batasan yang jelas agar tidak terjadi asosiasi budaya asing yang melunturkan identitas bangsa, terlebih kesan almamater luar negeri masih diidealisasikan sebagai produk pendidikan yang mesti bermutu. Sejauh ini masih melekat dalam kesan khalayak bahwa kuliah ke luar negeri itu lebih bergengsi dan bonafide. Di beberapa universitas di Indonesia sebenarnya telah menerima mahasiswa mancanegara untuk kuliah, namun selama ini mahasiswa mancanegara yang kuliah di beberapa universitas nasional tersebut bersifat sporadis, dan bisa jadi atas inisiatif individual. Kehadiran universitas yang khusus dipersiapkan untuk menampung peserta mancanegara dengan kurikulum dan silabi yang spesifik sebagaimana layaknya universitas internasional, merupakan konsekuensi globalisasi sekaligus tuntutan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia masa mendatang, agar perguruan tinggi kita tampil ke atas pentas internasional. Merealisasikan gagasan ini memang tidak mudah, namun harus diingat bahwa kemajuan suatu negara selalu dibarengi dengan kemajuan di bidang pendidikan.

Ketiga kalinya, masalah otonomi kampus. Walaupun hal ini muncul sejalan dengan proses Reformasi, namun tuntutan ke arah otonomi kampus merupakan keharusan historis. Sistem sentralisasi dan keseragaman yang telah diberlakukan selama ini terbukti tidak mampu mewujudkan perguruan tinggi yang independen, dinamis dan inovatif. Kemandirian akademik, kebebasan mimbar, kurikulum lokal, pemberdayaan potensi sumber daya kampus dan lain sebagainya akan muncul bilamana kebijakan pendidikan mengacu pada konsep perguruan tinggi *with wider mandate*. Politik pendidikan yang demokratis akan menyehatkan iklim perkembangan ilmiah bagi akademisi dan pihak kampus, walaupun tidak dipungkiri kebijakan otonomi kampus tersebut kemungkinan memunculkan kompetisi antar kampus yang kadang kala tidak sehat. Pemberdayaan internal dalam kampus menjadi tuntutan utama sebelum membenahi kampus itu sendiri. Padahal, SDM (Sumber Daya Manusia) perguruan tinggi di Indonesia masih memprihatinkan bila dibandingkan dengan negara lain. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, dalam satu juta penduduk di Indonesia hanya terdapat 65 Doktor, sementara Mesir 400, India 1250, Jerman 4000, Prancis 5000, Jepang dan Amerika Serikat masing-masing 6500, dan Israel 16.500 Doktor dalam satu juta penduduk.

Jadi, harus diakui bahwa kualitas SDM kita masih rendah. Oleh sebab itu, sebenarnya kita patut khawatir terhadap kemampuan bersaing SDM kita dalam era globalisasi pada milenium ketiga ini. Menurut data *United Nations Development Programme* (UNDP) yang diberi judul *Human Development Report 1996*, kualitas SDM kita berada pada posisi yang memprihatinkan. Laporan UNDP itu memuat angka indeks kualitas SDM (*Human Development Index*, HDI)

dari 174 negara di dunia. Hasil laporan itu sangat mengejutkan dan memprihatinkan, yaitu Indonesia berada pada peringkat ke-102. beberapa negara tetangga Indonesia sudah melampaui jauh, Singapura ada pada tingkat 34, Brunai Darussalam 36, Thailan 52, dan Malaysia pada peringkat 53. peringkat sepuluh terbaik HDI internasional diraih oleh negara-negara Eropa dan Barat sebagaimana terlihat di bawah ini. Dapat dibayangkan betapa rendahnya daya saing SDM Indonesia untuk memperoleh posisi kerja yang baik dalam era global. Pada 2002, daya saing Indonesia tentu lebih jelek lagi. Hal ini terjadi akibat krisis ekonomi dan politik yang sampai kini tak pernah tahu kapan akan berakhir.

Tiga agenda di atas merupakan tuntutan bagi perguruan tinggi yang mampu *go public*, dan karena desakan internasionalisasi pendidikan yang memang mengarah ke sana. Prospek dan problematika perguruan tinggi nasional menantang para “elit pendidikan” untuk menghadapinya secara serius. Tulisan ini sekedar memberikan refleksi dan sumbangsih pemikiran untuk membuka jalan bagi kerja besar tersebut. Untuk mewujudkan “impian” tersebut, terlebih dahulu universitas di Indonesia harus mampu membuktikan keunggulannya di banding universitas lainnya di luar negeri.

TABEL 10
SEPULUH TERBAIK PERINGKAT HDI 1996

PERINGKAT	NEGARA
1	Kanada
2	Amerika Serikat
3	Jepang
4	Belanda
5	Norwegia
6	Finlandia
7	Prancis
8	Islandia
9	Swedia
10	Spanyol

Sumber: Suyanto, Op. Cit., h.5.

BAGAN 11
SISTEM PERSEKOLAHAN UUSPN NO.2 TAHUN 1989

Usia						
24	Pendidikan Tinggi	Doktor (S-3)	Program Doktor (S-3)	Spesialis II (SP II)		
23		Magister (S-2)	Program Magister (S-2)	Spesialis I (SP I)		
22		Sarjana (S-1)	Program Sarjana (S-1)	Diploma 4 (D-4)		
21					Diploma 3 (D-3)	
20					Diploma 2 (D-2)	Diploma 1 (D-1)
19						
18	Pendidikan Menengah	Madrasah Aliyah (MA)	Sekolah Menengah Umum (SMU)	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		
17						
16						
15	Pendidikan Dasar	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)			
14						
13						
12		Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Sekolah Dasar (SD)			
11						
10						
9						
8						
7						
6						
5	Pra-Sekolah	Bustanul Athfal (BA) Raudlatul Athfal (RA)	Taman Kanak-kanak (TK)			

Sumber: Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), h.160.

Kelembagaan Pendidikan Islam. Secara historis Lembaga Pendidikan Islam (LPI) tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Lepas dari pengaruh Hindu-Budha atau Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akulturasi Islam dengan budaya lokal dalam konteks budaya asli (*indigenous*).²² Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, *salaf* dan non-klasikal. Lalu, dengan diperkenalkannya sekolah dalam bentuk klasikal oleh pemerintah Belanda, muncullah madrasah sebagai *counter institution* yang memuat tidak hanya pelajaran agama melainkan juga pelajaran umum sebagaimana dikembangkan oleh berbagai Ormas Islam saat itu. Selama periode Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan Islam diorganisir oleh Umat Islam sendiri melalui pendirian sekolah swasta dan pusat-pusat latihan.²³ Hingga kini, ketiga bentuk lembaga pendidikan tersebut, --pesantren, sekolah dan madrasah-- eksistensinya tetap ada bahkan terus dikembangkan sampai pasca kemerdekaan R.I. sampai sekarang. Adapun Perguruan Tinggi, baik PTU maupun PTAI, merupakan bentuk dan jenjang lanjutan dari ketiga LPI tersebut.

Institusi pesantren, sekolah dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yang bisa dibedakan satu sama lain, terutama dalam hal porsi materi pelajaran agamanya serta afiliasinya dengan departemen terkait. Pesantren, misalnya, memuat materi agama secara dominan, sedang sekolah umum memberikan alokasi waktu dua jam pelajaran agama dalam satu minggunya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 meliputi materi agama 70% dan materi umum 30 %, dan setelah SKB 3 Menteri tahun 1975, komposisinya dibalik menjadi 30 % materi agama dan 70 % materi umum. Meskipun demikian, khusus untuk madrasah ini, pada tahun 1986 diselenggarakan *madrasah pilot project* yang mengikuti komposisi materi agama 70% dan materi umum 30 %, seperti yang berlaku sebelum tahun 1975.²⁴

²²Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h.1. Di sini dikatakan bahwa andaikan Indonesia tidak mengalami penjajahan, maka bisa jadi UI, UGM, ITB dan lain-lain tidak akan ada. Yang ada adalah Universitas Tremas, Tebuireng dan seterusnya, sebagai bentuk lembaga pendidikan lanjutan dari pesantren yang notabene diintroduksi oleh kiai atau tokoh agama, sebagaimana yang terjadi pada Harvard University, universitas ini adalah hasil dari upaya kaum pendeta atau pihak keagamaan dalam mengembangkan pendidikan.

²³ Deliar Noer, "Administration of Islam in Indonesia" dalam *Monograph Series*, Publication No.58, (New York: Southeast Asia Program Cornell University, 1978), h.24.

²⁴ Munawir Sjadzali, "Kebangkitan Kesadaran Beragama sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama R.I.: Oktober 1985 - September 1986*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1986), h.175-176. SKB 3 Menteri Tahun 1975, waktu itu Menteri Agamanya adalah A. Mukti Ali, memberlakukan kurikulum madrasah dengan 30 % materi agama dan 30 % materi umum, dinilai sulit untuk mengharapakan keluaran madrasah yang memiliki pengetahuan agama dan penguasaan Bahasa Arab yang memadai. Karenanya kurikulum madrasah (*pilot project*) dengan komposisi 70 % materi agama dan 30 % materi umum diharapkan mampu mengatasi kelemahan di atas agar dapat terjun ke masyarakat dalam keadaan siap pakai. Lihat juga Munawir Sjadzali, *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, (Jakarta: UI Press, 1993), h.32-33. Berbeda dengan penilaian Munawir Sjadzali, A. Malik Fadjar yang pernah menjadi Menteri Agama pada Kabinet Reformasi di masa Kepresidenan Habibie, menyatakan bahwa komposisi 30 % materi agama dan 70 % materi umum adalah cukup ideal dan strategis, hanya saja

Keberadaan *madrasah pilot project* ini jumlahnya dibatasi pada beberapa daerah saja.²⁵ Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MAN PK) merupakan contoh kongkrit implementasi dari kebijakan tersebut.

Sedang dalam hal afiliasinya terhadap lembaga pemerintah, pesantren merupakan bentuk LPI mandiri yang umumnya diselenggarakan oleh masyarakat. Karena itu kurikulumnya bisa berbeda antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, sebab program pendidikannya disusun sendiri.²⁶ Sementara Sekolah, mulai jenjang SD, SLTP, SMU hingga bentuk dan jenjang lanjutan di PT, saat ini berada dibawa Departemen Pendidikan Nasional (Diknas). Adapun madrasah, baik MI, MTs, MA, maupun bentuk dan jenjang lanjutannya yakni PTAI, dikelola oleh Departemen Agama, dan karena itu kurikulum di sekolah dan madrasah bersifat sentral serta seragam secara nasional, meskipun dalam beberapa aspek terjadi desentralisasi kebijakan.

Perkembangan kelembagaan PAI ditangani oleh Departemen Agama, melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Dirjenbimbagais) yang dibentuk pada tahun 1978. Di sini diadakan kategorisasi kebijakan kelembagaan PAI dalam beberapa jenis: *pertama*, PAI yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai pendidikan jalur luar sekolah, misalnya pesantren. *Kedua*, PAI di perguruan Agama Islam (dari MI, MTs, sampai MA) dan PAI di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI); dan *ketiga*, PAI di lingkungan sekolah umum (dari SD, SLTP sampai SMU) dan PAI di Perguruan Tinggi (PT). Sedang yang *keempat*, Kebijakan PAI dalam Badan Peradilan Agama tidak dimasukkan dalam pembahasan tema ini karena lebih terkait dengan masalah hukum dari pada masalah pendidikan. Bagaimana perkembangan kebijakan kelembagaan PAI menurut tiga katerori di atas ? Berikut adalah penjelasannya.

PAI Jalur Pendidikan Luar Sekolah: Pesantren. Yang dimaksud dengan PAI jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat di sini adalah pesantren. Eksistensinya pada masa kolonial Belanda mengalami penekanan, tidak dapat tumbuh subur, tidak dapat berdiri tegak kuat, bahkan

pelaksanaannya, menurutnya, setengah-setengah. Lihat A. Malik Fadjar, "Madrasah dan Tantangan Modernitas", *Op. Cit.*, h.43. Juga Abdul Rachman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000), h.115.

²⁵ Pada tahun 1986, Departemen Agama yang waktu itu Menteri Agamanya adalah Munawir Sjadzali, menyelenggarakan *madrasah pilot project* dengan membuka MAN PK sebanyak lima buah: di Kota Baru, Padang Panjang, Sumatera Barat, Ciamis, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jember, Jawa Timur, dan Ujung Pandang. Lalu pada tahun 1990 dibuka lagi lima MAN PK baru: di Banda Aceh, Daerah Istimewa Aceh, Lampung, Surakarta, Jawa Tengah, Mataram, NTB, dan Banjarmasin. Lihat Munawir Sjadzali, *Op. Cit.*, h.33; juga Bachtiar Effendi, dkk, "Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis" dalam Azyumardi Azra (Ed.), *Menteri-Menteri Agama R.I.: Biografi Sosio-Politik*, *Op. Cit.*, h.402-403.

²⁶ A. Timur Djaelani, *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, [1982]), h.60.

direndahkan.²⁷ Pesantren mendapat pengawasan ketat melalui berbagai ordonansi yang diberlakukan oleh Belanda. Peran serta pesantren pada masa ini sebatas pada praktek ibadah, dakwah, sosial dan pendidikan,²⁸ sementara itu *abstain* di bidang politik,²⁹ karena Belanda mencegah setiap upaya yang mengarah pada gerakan politik. Jama'ah haji yang berangkat maupun pulang diawasi, terutama mereka yang sekembalinya dari Makkah mendirikan atau mengelola pesantren. Mengapa ? karena dikuatirkan masuknya ide Pan Islam dari Timur tengah yang mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan keagamaan. Meskipun demikian, pada perkembangan selanjutnya, pihak pesantren ikut serta berperan dalam pergerakan nasional dengan melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajah.

Keterlibatan pesantren lebih dalam terhadap masalah politik serta Politisasi Kiai terjadi pada masa pendudukan Jepang. Jepang melihat komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim sebagai kekuatan yang potensial bagi misi perangnya . Padahal basis Umat Islam terbesar ada di daerah yang notabene di bawah pengaruh kiai dalam pesantren. Itu sebabnya pemerintah Jepang sering mengadakan kunjungan dan memberi subsidi ke pesantren, mengangkat KH. Hasyim Asj'ari, meskipun secara simbolis, sebagai kepala *Shumubu* dan juga sebagai anggota PPKI, membentuk *Hizbullah* dan *Sabilillah*, kaderisasi kiai, dan mencabut kewajiban berseikerei setelah mendapat reaksi yang keras dari pihak Umat Islam, terutama kalangan pesantren.

Pada masa awal kemerdekaan, sebelum diresmikannya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946, BP KNIP pada 27 Desember 1945 telah menyampaikan usulan dan rencana pengembangan kelembagaan Agama Islam baik di lingkungan pesantren maupun madrasah kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K), diantaranya kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, sifat pengajarannya dimodernisir dan diberikan bantuan biaya serta lainnya. Setelah Kementerian Agama dibentuk

²⁷ Lihat Presiden Soeharto, "Pondok Pesantren: Tempat Pembentukan Tokoh Masyarakat" dalam *Agama dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Biru, 1981), h.230. Disampaikan pada saat Presiden Soeharto memberikan amanatnya pada saat peringatan setengah abad dan peresmian Masjid Jami' Pondok Modern "Darussalam" Gontor pada tanggal 2 Maret 1978. Juga Departemen Agama, *Sebuah Rangkuman tentang Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia*, , h.60.

²⁸ H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, "New Orientation of the Islamic World on the Eve of the Fifteenth Century of Hijriyah" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama Republik Indonesia*, Buku 9, (Jakarta: Departemen Agama, 1980), h.122., 124. Pidato ini disampaikan dalam simposium tentang *Islam Today* di Islamabad pada Mei 1980.

²⁹ Martin van Bruinessen, *Op. Cit.*, h.46, 115. Pesantren di sini dalam konteks lembaga pendidikan yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama (1926-1942). NU terlibat dalam politik pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), dan masa perjuangan kemerdekaan (1945-1949) menjadi aktif dan radikal dalam politik. Sejalan dengan berlakunya demokrasi liberal (parlementer) yang multipartai, NU bergabung dalam Partai Masyumi, seterusnya pada masa Orde Baru NU bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Musyawarah Nasional Munas Situbondo 1983 dan Muktamar Situbondo 1984 NU menarik diri kembali dalam politik praktis yang dikenal dengan kembali ke khittah 1926.

dengan KH. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama, perhatian terhadap pesantren terus bertambah. Jumlah lembaga pesantren, kiai maupun santrinya meningkat. Hingga tahun 1984-1985 jumlah lembaga ini mencapai ratusan pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik pesantren besar dengan santri yang banyak maupun pesantren kecil karena jumlah santrinya sedikit.³⁰ Pada Akhir Orde Baru, tahun 1998, jumlah pesantren tercatat mencapai 8.376 pesantren.

Kini, pesantren melakukan Modernisasi dengan mengembangkan bentuk alternatif kelembagaannya. Tidak hanya aspek kurikulum, manajemen, kegiatan, maupun sistem pengajarannya yang dikembangkan, melainkan pula sebagian pesantren saat ini telah memadukan madrasah ke dalam pesantren. Bahkan tidak sedikit di antara madrasah swasta yang ada sekarang didirikan di lingkungan pesantren.

PAI di Perguruan Agama Islam dan PTAI. Yang dimaksud dengan Perguruan Agama Islam di sini adalah madrasah, baik negeri maupun swasta, mulai jenjang MI, MTs maupun MA. Sedang PTAI dimasukkan dalam kategori ini adalah karena PTAI merupakan bentuk dan jenjang lanjutan dari Perguruan Agama Islam, meskipun kebijakan kelembagaannya terpisah. Kapan dan bagaimana perkembangan kebijakan tentang madrasah di Indonesia ? hal ini dapat ditelusuri sejak masa kolonial Belanda.

Madrasah. Secara historis, eksistensi madrasah di Indonesia telah ada sejak awal abad ke-20, atau paling cepat pada akhir abad ke-19, berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU dan lain-lain. Mengapa madrasah muncul pada masa kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20, bukan sebelumnya ? Ada dua analisa: *pertama*, karena beberapa kali usulan *Volksraad* (Dewan Rakyat) agar pelajaran Agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum selalu ditolak oleh Belanda. Belanda bahkan memberlakukan ordonansi *Indische Staatsregeling* pasal 179 ayat 2 yang menyatakan bahwa "pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Dan, pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah". Sampai dengan akhir pemerintahan Belanda di Indonesia, pengajaran agama di sekolah umum atau *open baar orderwijs* tidak pernah menjadi kenyataan. Hal ini menumbuhkan inisiatif untuk mendirikan model sekolah di luar kebijakan Belanda yang memberi muatan pelajaran Agama Islam lebih namun berbeda dengan komposisi materi PAI dalam pesantren yang telah ada sebelumnya. Lembaga tersebut adalah madrasah.

³⁰ Mengenai data jumlah pesantren beserta identitas para kiai pendirinya, terutama di lingkungan NU, dapat dilihat dalam Masdar F. Mas'udi, dkk, *Direktori Pesantren I*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986), h.1-394. Jumlah pesantren terbanyak ada di Jawa Timur.

Kedua, madrasah muncul karena tuntutan pembaharuan pendidikan Islam secara internal, baik dari segi metode maupun isi (materi pelajaran).³¹ Saat itu diperlukan hadirnya LPI selain pesantren yang mampu memberikan pengetahuan umum secara klasikal, agar tidak tertinggal dengan kemajuan yang telah dicapai oleh sekolah bentukan Belanda. Di sini madrasah berfungsi sebagai *counter institution* bagi sekolah model Belanda. Timbulnya pembaharuan ini dipercepat pula dengan hadirnya para alumnus Timur Tengah (Makkah dan Kairo) di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang sekembalinya ke tanah air merintis berdirinya pesantren dan madrasah.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), perkembangan madrasah tidak mengalami hambatan, bahkan pendidikan agama di sekolah umum diijinkan, walaupun guru agama yang mengajarkan pendidikan agama (Islam) tidak digaji oleh pemerintah Jepang.

Setelah proklamasi kemerdekaan R.I., madrasah berjalan sesuai dengan kemampuan para pengasuh dan masyarakat pendukungnya masing-masing. BP KNPI menganjurkan agar pendidikan di madrasah berjalan terus dan dipercepat, serta diberikan subsidi.³² Di samping itu, ijazah dari madrasah swasta (MIS) dihargai dan diakui sama dengan ijazah dari madrasah negeri (MIN), serta tamatannya memiliki *civil effect* yang sama dengan madrasah negeri.

Pembaharuan madrasah telah dimulai sejak Orde Lama (1945-1965). Tahun 1958/1959, misalnya, Departemen Agama melakukan upaya pembaharuan sistem pendidikan di madrasah dengan memperkenalkan Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan spesifikasi: lama belajar 8 tahun (berarti 8 kelas) untuk murid usia 6 sampai 14 tahun, bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi, industri dan transmigrasi, materi meliputi pengetahuan agama, umum dan keterampilan, dan berbasis pada pembangunan masyarakat pedesaan (*rural development*). Guna memenuhi tenaga guru di MWB-MWB tadi, didirikanlah Pusat Pelatihan Guru MWB di Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Pusat Pelatihan ini bersifat nasional. Peserta pelatihan adalah para tamatan PGAA (Pendidikan Guru Agama Atas) di seluruh Indonesia. Kurikulum pelatihan mencakup pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan koperasi. Ada pula pendidikan olah raga dan agama. Sayangnya, MWB ini tidak berjalan

³¹ Haidar Putra Daulay, "Pesantren, Sekolah dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam" dalam *Disertasi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1991), h.322.

³² Keputusan BP KNPI tanggal 27 Desember 1945 dan Peraturan Menteri Agama No.3 tanggal 19 Desember 1946. Lihat Mulyanto Sumardi, *Op. Cit.*, h.108, 113; juga Timur Djaelani, *Op. Cit.*, h. 39. bantuan kepada madrasah ini terus berlanjut sampai setelah munculnya UUPP No.4 Tahun 1950, yakni melalui Peraturan Menteri Agama No.7/1952 tanggal 23 Juli 1952 tentang pemberian bantuan kepada madrasah rendah dan lanjutan (MI dan MTs), yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama (waktu itu K.H. Wahib Wahab) No.2/1960 dengan ketentuan mengenai bentuk bantuan (hadiah, sokongan atau tunjangan), syarat-syarat memperoleh bantuan, cara penetapan pemberian bantuan, pengawasan dan kewajiban perguruan agama Islam, pengubahan dan penghentian pemberian bantuan dan pelaksanaan pemberian bantuan. Lihat juga: Deliar Noer, "Administration of Islam in Indonesia, *Op. Cit.*, h.50.

sebagaimana diharapkan, hanya bertahan beberapa tahun saja. Karena faktor keterbatasan sarana, peralatan, guru, respon masyarakat yang kurang dan pihak penyelenggara madrasah yang tidak profesional, maka program ini tidak berlanjut.

Pada masa awal Orde Baru, antara tahun 1967 sampai 1970, dilakukan penegerian di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) serta merubah nama dan struktur Madrasah Negeri.³³ Selanjutnya, tahun 1975, melalui SKB 3 Menteri, madrasah ditingkatkan mutu pendidikannya.³⁴

Berangkat dari SKB 3 Menteri tersebut PAI di perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dan status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum di mana 70 % merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30 % ilmu pengetahuan agama. Dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya, sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum.³⁵ Bedanya madrasah berada di bawah Depag, sementara sekolah di bawah Depdikbud yang sekarang menjadi Depdiknas, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran Agama Islam.

Posisi madrasah ini dipertegas kembali dalam UUSPN No.2 Tahun 1989 Bab IV pasal 11 ayat 6 tentang pendidikan keagamaan, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri, bahwa MI, MTs, dan MA masing-masing termasuk SD, SLTP, dan SMU yang berciri khas Agama Islam dan diselenggarakan oleh Departemen Agama. Tanggungjawab atas pengelolaan madrasah dilimpahkan Menteri kepada Menteri Agama, dan siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, apabila dalam satu kelas di suatu sekolah terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang siswa yang memeluk agama tertentu, pendidikan agama siswa yang bersangkutan wajib diberikan di kelas tersebut, sementara bagi siswa yang tidak memeluk agama yang sedang diajarkan pada saat

³³ Penegeerian MTs dan MA mengikuti Peraturan Menteri Agama No.29 tahun 1967 dan Keputusan Menteri Agama No.213 tahun 1970 tanggal 14 September 1970 tentang penghentian penegerian sekolah-sekolah dan madrasah swasta. Sedang perubahan nama dan struktur madrasah mengikuti Keputusan Menteri Agama No.52 tahun 1971 tentang perubahan nama-nama & struktur dan kurikulum Madrasah Negeri dan Sekolah Dinas. Lihat Mulyanto Sumardi, *Op. Cit.*, h.118-119. Lihat juga Husni Rahim, *Op. Cit.*, h.55. Azyumardi Azra menyebutkan bahwa penegerian madrasah ini telah dilakukan sejak 1950-an oleh Departemen Agama. Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Transisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos, 1999), h.103.

³⁴ Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) No. 06/1975, 037/U/1975 dan 36/1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah.

³⁵ M. Irsyad Djuwaeni, *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*, (Jakarta: Karsa Utama Mandiri dan PB Mathla'ul Anwar, 1998), h.53-54.

berlangsungnya pelajaran agama di kelas itu diberi kebebasan. Kurikulum dan bahan kajian yang diberikan di madrasah minimal sama dengan di sekolah, di samping bahan kajian lain yang diberikan pada madrasah tersebut.

Kelanjutan dari bentuk dan jenjang lembaga madrasah adalah Perguruan Tinggi Agama Islam atau PTAI.

PTAI. Gagasan untuk mendirikan PTAI sebenarnya telah dirintis sejak zaman penjajahan Belanda. Dr. Satiman Wirjosandjojo melontarkan gagasan tersebut dalam *Pedoman Masyarakat* No.15 Tahun IV (1938), untuk mengangkat harga diri kaum Muslim di tanah Hindia Belanda. Kemudian, pada tanggal 8 Juli 1945, gagasan dimaksud terwujud dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta di bawah pimpinan Abdul Kahar Muzakkir, K.H. Wahid Hasyim dan Mohammad Hatta, sebagai realisasi kerja Panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam (PPSTI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Upacara pembukaan STI ini dihadiri dan diresmikan oleh *Gunseikan*. Pada masa revolusi, STI berhijrah ke Yogyakarta, mengikuti hijrahnya pemerintah R.I. dari Jakarta ke Yogyakarta, dan pada tanggal 10 April 1946 dibuka kembali di kota tersebut. Lalu pada Nopember 1947, ketika dibentuk panitia perbaikan STI, terjadi kesepakatan mendirikan University Islam Indonesia (UII) pada tanggal 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan.

Selanjutnya, berdasarkan PP No.34 Tahun 1950, Fakultas Agama UII dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dengan tiga jurusan: Dakwah, Qadla' dan Tarbiyah. Sementara itu di Jakarta, enam tahun kemudian berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tanggal 14 Agustus 1957 berdasarkan ketetapan Menteri Agama No.1 Tahun 1957.

Dalam rangka menjadikan PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta lebih memenuhi kebutuhan Umat Islam akan pendidikan tinggi Agama Islam, dikeluarkan Peraturan Presiden No.11 Tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "*Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah*" yang merupakan penggabungan antara PTAIN Yogyakarta dengan ADIA Jakarta dengan PTAIN sebagai induk dan ADIA Jakarta sebagai Fakultas (yakni Fakultas Adab) dari institut baru tersebut. IAIN ini diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama K.H. Wahib Wahab.

Profile

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. IAIN ini diresmikan oleh Menteri Agama K.H. Wahib Wahab pada tanggal 24 Agustus 1960, merupakan IAIN tertua di Indonesia. Jumlah fakultas yang ada adalah 5, yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Adab, Fakultas Dakwah dan Fakultas Ushuluddin. Tiap fakultas memiliki jurusannya sendiri. Saat ditulisnya buku ini, IAIN

dimaksud sedang dalam proses pengembangan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Mahasiswa yang terdaftar di IAIN ini sebagian besar berlatar belakang dari Madrasah Aliyah, sebagiannya lagi dari SMU, SMK, dan lain-lain, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada beberapa peserta dari negara tetangga. Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri dilakukan antara lain dengan Belanda (*Leiden University*), Kanada (*McGill University*), Mesir (*Al-Azhar University*), serta lainnya. Lokasi perguruan tinggi ini amat strategis, berada di “kota pelajar” yang mudah dijangkau oleh kendaraan umum dengan alamat Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281.

Sumber: Buku Panduan IAIN Sunan Kalijaga, September 2000.

Perkembangan IAIN yang pesat, menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.27 Tahun 1963, yang memungkinkan didirikannya suatu IAIN yang terpisah dari pusat. Sudah barang tentu berdasarkan pertimbangan historis, Jakarta lah kota pertama yang mendapatkan kesempatan untuk memiliki IAIN baru itu. Dengan demikian IAIN Jakarta ialah IAIN kedua yang berdiri setelah IAIN Yogyakarta. Kini IAIN sudah berjumlah 14 dengan dibukanya IAIN termuda di Sumatera Utara pada tahun 1973 oleh Menteri Agama, waktu itu adalah Prof. Dr. H.A. Mukti Ali. Pembinaan di lingkungan IAIN terus dilakukan dalam segala aspek, di antaranya: masalah struktur organisasi, penelitian, uang pungutan mahasiswa, standardisasi IAIN, masa orientasi studi bagi mahasiswa, pembentukan jurusan dan fakultas, kurikulum dan silabi, peningkatan kemampuan bahasa asing (Arab dan Inggris), serta lainnya. Pada tahun-tahun berikutnya, masalah sarana fisik, non-fisik, sistem dan metode pengajaran dan pembinaan mahasiswa (via MENWA, KKN atau lainnya), kerja sama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri, juga terus disempurnakan. Tahun 1986–1988 merupakan kurun waktu dimana terjadi peningkatan kualitas dosen melalui penyelenggaraan Program Pascasarjana Jenjang Magister (S-2) maupun Doktor (S-3) atau pengiriman studi ke luar negeri, baik di Barat maupun Timur Tengah, yang hingga kini kian ditingkatkan.

Di samping IAIN yang notabene milik pemerintah, juga terdapat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) baik berupa STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta), yang menyelenggarakan satu jenis fakultas, maupun PTS yang mendirikan Fakultas Agama. Umumnya mahasiswa yang kuliah berasal di sana setelah terseleksi dari PTN, meskipun tidak menegasikan mereka yang memang dari awal telah memilih PTAIS. Hingga tahun 1996/1997, jumlah LPI, murid (mahasiswa) dan guru (dosen) yang ada di madrasah maupun PTAI disajikan dalam tabel berikut.

TABEL 11
JUMLAH LPI, SISWA DAN GURU MADRASAH/PTAI
DI SELURUH INDONESIA PADA TAHUN AJARAN 1996/1997

NO	KETERANGAN	MI	MTs	MA	PTAI
1	Jumlah LPI	23.298	9.846	3.392	298
2	Jumlah Siswa/Mahasiswa	3.481.200	1.706.591	480.698	357.927
3	Jumlah Guru/Dosen	161.392	157.290	60.829	22.114

Diolah dari sumber: Ministry of Education and Culture, INDONESIA: Education Statistics in Brief 1996/1997, (Jakarta: Ministry of Education and Culture, 1998), h.36-45.

PAI di Sekolah Umum. Eksistensi PAI di sekolah umum berubah-ubah menurut kebijakan pemerintah yang ada saat itu. Pada masa kolonial Belanda, sekolah umum tidak diperkenankan memasukkan Agama Islam sebagai mata pelajaran, dengan alasan pengajaran (sekolah) umum itu bersifat netral. Pelajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Kondisi ini berlanjut hingga akhir pemerintahan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang terjadi perubahan kebijakan. Jepang membolehkan pendidikan agama di sekolah umum, meskipun guru agama tidak digaji oleh pemerintah. Setelah Indonesia merdeka, dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran memutuskan bahwa pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran, sedang di SR (Sekolah Rakyat, sekarang Sekolah Dasar) diajarkan mulai kelas IV, guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa guru agama harus mempunyai pengetahuan umum, dan karenanya harus ada pendidikan guru agama.

Kemudian, cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah negeri diatur melalui SKB dua menteri sebagai penjelasan atas UUPP No.4 Tahun 1950, diantaranya jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya dan bahwa pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Di samping itu keputusan ini memuat ketentuan tentang lamanya pendidikan agama dalam seminggu (2 jam pelajaran tiap minggu), masalah pengangkatan dan pembiayaan guru agama, kewajiban guru agama, rencana pelajaran agama, petunjuk bagi guru agama dan pendidikan agama di sekolah partikelir.

Keputusan memberikan pelajaran agama di sekolah mulai kelas IV ini berkembang terus dan mengalami serangkaian perubahan kebijakan. Pada tahun 1960 dinyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas Negeri, dengan pengertian

bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta apabila wali/murid dewasa menyatakan keberatannya, lalu pada tahun 1966 kebijakan tersebut dihapus dengan menyatakan bahwa pendidikan agama menjadi pelajaran yang wajib diberikan di sekolah-sekolah negeri, apalagi swasta, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas Negeri.

Tahun-tahun berikutnya, searah dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, pengembangan sekolah diarahkan pada penambahan sarana dan prasarana keagamaan, karena pendidikan agama merupakan bagian dari pembentukan manusia seutuhnya. Hingga UUSPN No.2 Tahun 1989 diberlakukan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana terus dilakukan,³⁶ meskipun karena problem sosial-ekonomi, jumlahnya naik-turun, tetapi bisa disepakati bahwa animo masyarakat untuk sekolah kian meningkat. Kini, tidak mengherankan bila jumlah sekolah, siswa dan guru sejak kemerdekaan hingga sekarang terus melaju dengan perkembangan jumlah lembaga yang meningkat. Berikut ini dikemukakan data dimaksud pada tahun ajaran 1996/1997, sedang tahun 1930 sampai 1997, agar lebih praktis, disajikan pada bagian lampiran.

TABEL 12
JUMLAH SEKOLAH/PT, SISWA DAN GURUDI SELURUH INDONESIA
PADA TAHUN AJARAN 1996/1997

NO	KETERANGAN	LEMBAGA	SISWA	GURU
1	TK	40.215	1.624.961	93.962
2	SD	150.595	25.755.083	1.165.786
3	SLTP	20.544	7.571.300	430.981
4	SMU	8.065	2.684.224	214.289
5	SMEA	2.078	852.803	57.146
6	SMKK	172	57.541	5.632
7	STM	1.150	717.756	46.349
8	SMKL	494	139.061	14.380
9	PT	1.369	2.350.971	158.357

Diolah dari sumber: Ministry of Education and Culture, Op. Cit., h.36-45.

Perguruan Tinggi. Tercakup dalam pengertian Perguruan Tinggi adalah Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, politeknik, Akademi atau lembaga lain

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama Islam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1995), h.136. Disebutkan bahwa yang termasuk dalam jenis peningkatan sarana pendidikan itu meliputi: sarana fisik (bangunan sekolah, perabot, dan peralatan kantor), media pendidikan (perangkat keras maupun perangkat lunak), alat peraga dan praktik serta perbukuan sekolah.

yang merupakan kelanjutan dari jenjang menengah atas. Di antara bentuk Perguruan Tinggi di atas telah muncul sebelum Indonesia merdeka.

Secara historis, beberapa Perguruan Tinggi yang dijumpai sampai saat ini sebenarnya telah ada sejak masa kolonial Belanda, lalu pada masa pendudukan Jepang sebagian ada yang ditutup tapi kemudian dibuka kembali. Sampai pada periode ini, sebagaimana sekolah umum, Perguruan Tinggi bersifat netral artinya tidak memberikan perkuliahan agama. Namun, setelah Indonesia merdeka keberadaan Perguruan Tinggi dikembangkan lebih lanjut, bahkan banyak bermunculan Perguruan Tinggi lain yang belum ada sebelumnya. Sedang pelaksanaan pendidikan agama pada Perguruan Tinggi mengalami perkembangan kebijakan menurut konstelasi politik saat itu.

Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi pada masa Orde Lama (1945-1965) diberikan sebagai mata pelajaran, dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatannya. Selain itu, baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, diberikan pendidikan Pancasila dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai mata pelajaran. Saat itu pedoman pelaksanaan PAI di Perguruan Tinggi mengikuti pelaksanaan yang digunakan di Sekolah Menengah Atas dan bekerjasama dengan pihak Departemen Agama. Antara lain: pendidikan agama diberikan sebagai mata pelajaran tentamen atau ujian untuk para mahasiswa selama sekurang-kurangnya satu tahun kuliah atau 2 jam tiap minggu, tenaga pengajar PAI berasal dari lulusan IAIN yang dicalonkan oleh Menteri Agama R.I., dan materi dan buku PAI ditetapkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) bersama-sama dengan Menteri Agama R.I.

Peralihan ke Orde Baru (1966-1998) menimbulkan perubahan prinsip dalam kebijakan PAI di Perguruan Tinggi. Beberapa peraturan diberlakukan untuk tujuan pengembangan, sedang kebijakannya mengikuti konstelasi politik dan pola pembangunan yang tercermin dalam Ketetapan MPR, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Undang-Undang dan kurikulum yang berlaku.

Sifat pelaksanaan PAI di Perguruan Tinggi pada masa Orde Lama yang begitu longgar karena adanya alternatif mahasiswa untuk menyatakan ikut atau tidak, sebagaimana dimuat dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 bab II pasal 2 ayat 3 dan UU tentang Perguruan Tinggi No.22 Tahun 1961, pada awal Orde Baru kemudian dicabut dengan Ketetapan MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1968 dan dinyatakan bahwa pelajaran agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Universitas Negeri. Selanjutnya, GBHN tahun 1973 memprioritaskan pembangunan manusia seutuhnya dengan perhatian pada peningkatan sarana keagamaan. Sementara Undang-undang lain tentang Perguruan Tinggi diberlakukan, kurikulum PAI di lingkungan Perguruan Tinggi terus disempurnakan. Walaupun begitu, harus diakui, di samping intensitas PAI di Perguruan Tinggi Umum ini berbeda dengan PTAI yang sarat dengan materi keagamaan, sampai saat ini PAI di

Perguruan Tinggi Umum merupakan Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang hanya diberikan sebanyak 2 sks (2 x 50 menit) dari total 150 sks. Sama hanya dengan muatan PAI di sekolah umum yang diberikan sebanyak 2 jam pelajaran tiap minggu. Satu hal yang belum berubah sama sekali sejak dulu hingga kini.

Trend Baru Pola Kelembagaan PAI. Zaman telah berkembang, tuntutan masyarakat pun berubah. Pada masa kolonial Belanda, Pesantren hadir menawarkan porsi agama secara penuh, madrasah memberi alternatif model klasikal dengan memberi pengetahuan agama plus umum, sementara sekolah bentukan Belanda tetap dengan misinya bersikap netral agama, sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan umum. Kini, tiga bentuk lembaga pendidikan tersebut saling berinteraksi, membentuk pola pembauran. Pesantren sekarang, untuk tidak menyebut perkecualian beberapa pesantren, telah memperkenalkan materi umum dan menggunakan jasa teknologi modern dalam pengelolaannya. Pesantren *salaf* (tradisional) berkembang menjadi *khalaf* (modern), dari daerah pedesaan ke perkotaan, dari yang bernaung pada ormas Islam menuju ke manajemen yayasan, dari figure individual kiai beralih ke kepemimpinan kolektif, dan seterusnya. Untuk menjawab tuntutan zaman, agar para santrinya dapat meneruskan studi ke jenjang selanjutnya atau bekerja, di antara pesantren ada yang menyelenggarakan pendidikan klasikal dalam bentuk madrasah di pagi hari dengan mengikuti kurikulum Departemen Agama, sedang sore dan malam harinya mengikuti kurikulum pesantren secara lokal menurut ciri khas pesantren itu sendiri.³⁷ Bahkan didirikan pula Perguruan Tinggi Agama Islam atau *Ma'had 'Ali* di lingkungan pesantren. Koperasi, keterampilan elektronik dan komputerisasi administrasi dan manajemen pesantren juga masuk sebagai alternatif penggalan dana.

Kompleksitas pembauran pola kelembagaan PAI dialami juga oleh madrasah. Materi agama dan umum yang diintrodusir sejak awal kemunculannya, kini dirancang dalam bentuk *integrated curriculum* melalui tiga aksi: *pertama*, memberi nuansa Islami dalam bidang studi umum (mafikibb).³⁸ Untuk ini Departemen Agama, dalam batas tertentu, telah menerbitkan buku ajar bidang studi umum berwawasan Islam tersebut. Aksi *kedua*, merupakan kebalikan yang pertama, yakni memberi nuansa iptek pada bidang studi agama. Dengan demikian ciri khas madrasah sekarang adalah munculnya perpaduan antara imtaq dan iptek. Bisa jadi dua aksi di atas ini sebagai manifestasi upaya madrasah mendekatkan diri ke pola 'sekolah', agar tidak tersisih dari masyarakat yang masih memomorduakan madrasah. Menariknya, aksi ketiga adalah penciptaan suasana keagamaan di madrasah, baik dalam bidang fisik dan

³⁷ Salah satu contohnya adalah Pesantren Salafiyah as-Safi'iyah Asembagus Situbondo pimpinan almarhum K.H. As'ad Syamsul Arifin, dimana sekarang diteruskan oleh putranya K.H. Fawa'id.

³⁸ Mafikibb adalah singkatan untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahasa Inggris.

sarana, maupun dalam bidang suasana pergaulan dan pakaian. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk menciptakan suasana keagamaan ini antara lain adalah: do'a bersama, shalat berjama'ah, pengajian berkala, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), praktek ibadah, amal shaleh, pengajian kitab, *ukhuwah Islamiyah*, dan lain-lain. Tentu saja aksi ini lebih mendekatkan pola madrasah kepada pesantren. Dengan demikian yang terjadi adalah interaksi segitiga. Seterusnya, model madrasah juga dibenahi dengan munculnya MWB, MAN PK, MAK.³⁹ Aksi-aksi tadi membuktikan bahwa kelembagaan PAI sekarang ini cenderung mengalami pembauran (*synthesis*), saling ketergantungan (*interdependece*) dan perkembangannya tidak terjadi dalam bentuk garis lurus (*non-linier*). Penting pula untuk dicatat di sini, IAIN yang merupakan PTAI lanjutan dari madrasah, juga mengalami "metamorfosa" dengan terujudnya UIN (Universitas Islam Negeri) atau paling tidak IAIN *with wider mandate*.⁴⁰

Sekolah dan PTU, sebagai bentuk kelembagaan yang di dalamnya terdapat muatan PAI, juga mengalami gerak pembauran ini. Terutama sekolah yang bernaung di bawah ormas Islam atau yayasan. Penambahan materi agama melalui kegiatan ekstrakurikuler menurut ciri khas lembaga tersebut, dirasa sebagai alternatif dari sedikitnya alokasi waktu yang ditetapkan oleh Diknas. Pada bulan puasa sekolah seringkali mengadakan *pesantren kilat*, pondok Ramadhan atau ceramah keagamaan di hari besar Islam.

Pembauran pola LPI dilakukan sejalan dengan kian menguatnya kemandirian dan fleksibilitas lembaga terkait untuk mengatur dirinya sendiri, atau otonomi. Di masa yang akan datang tipologi LPI bukan lagi tergantung dari bentuk lembaganya, apakah pesantren, madrasah atau sekolah, melainkan produk yang dihasilkan, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Juga bukan dari status apakah negeri atau swasta, melainkan jaminan kualitas (*Quality Assurance*) yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Belakangan ini konsep *Total Quality Management* yang semula dicetuskan dari Amerika Serikat, lalu dikembangkan oleh Jepang, masuk dan mulai mempengaruhi dunia pendidikan nasional. Jadinya, trend pembauran LPI tersebut sudah tidak terjadi akibat faktor internal semata, melainkan faktor eksternal dari luar negeri juga kuat pengaruhnya. Konsep pendidikan pembebasan (*liberal education*), eksistensialisme dalam pendidikan, *deschooling society*, pendidikan gaya bank, demokratisasi pendidikan, sebagaimana terlihat dari terbitan buku belakangan ini, seperti tulisan Ivan Illich, Paulo Freire dan lainnya, diminati oleh para mahasiswa Muslim. Pembauran global adalah konsekuensi internasionalisasi

³⁹ MWB adalah Madrasah Wajib Belajar. MWB memberik materi perpaduan antara pengetahuan agama, umum dan keterampilan. MAN PK adalah Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus. Komposisi materi agama dibanding umum di sini adalah 70 : 30. Sedang MAK adalah Madrasah Aliyah Keagamaan yang sepenuhnya memberi materi keagamaan mirip dengan pola pesantren.

⁴⁰ Saat penelitian ini ditulis, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta.

pendidikan, namun hendaknya diingat bahwa pembauran total dalam bentuk *melting pot* akan menghilangkan identitas pendidikan. Jelas tidak semua praktek yang diklaim sukses di suatu negara pasti sesuai untuk diterapkan ke negara lain, sebagaimana kata Paulo Freire: “pendidikan (di suatu negara) itu tidak dapat ditransplantasikan (ke negara lain) melainkan diinventori (sendiri oleh negara tersebut)”.



Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Alamsjah Ratu Perwiranegara. "New Orientation of the Islamic World on the Eve of the Fifteenth Century of Hijriyah" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama Republik Indonesia*, Buku 9. Jakarta: Departemen Agama, 1980.
- Arifin, M.. *Kapita Selecta Pendidikan: Umum dan Agama*. Semarang: Toha Putra, [1981].
- Azra, Azyumardi (Ed.). *Menteri-Menteri Agama R.I.: Biografi Sosio-Politik*. Jakarta: kerjasama INIS, PPIM, dan Departemen Agama, 1998.
- . *Pendidikan Islam: Transisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos, 1999.
- Daulay, Haidar Putra, "Pesantren, Sekolah dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam" dalam *Disertasi*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama Islam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1995.
- . *Mengenal Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Pusat Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.
- Djaelani, A. Timur. *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, [1982].
- Djuwaeni, M. Irsyad. *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam*. Jakarta: Karsa Utama Mandiri dan PB Mathla'ul Anwar, 1998.
- Effendi, Bachtiar, dkk. "Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis" dalam Embree, Aislie T (Ed.). *Encyclopedia of Asian History*. Vol.2. New York: Charles Scribner's Sons, t.t.
- Errington, Joseph. "Language, religion and Identity in Indonesia" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 3/1999.
- Esposito, John L (Ed.). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Vol.2. New York: Pxford University Press, 1995.
- Fadjar, Malik. "Membangun Madrasah Sebagai Wahana Peradaban Modern", dalam Dawam Rahardjo (Ed.). *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*., Jakarta: Intermedia, 1997.
- Feillard, Andree. "Pre-election Visit to East Java's Ulama" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 3/1999.
- Johns, Anthony H. "INDONESIA: Islam and Cultural Pluralism" dalam John. L. Esposito (Ed.), *Islam in Asia: Religion, Politics and Society*. New York: Oxford University Press, 1987.
- K. Abdoelrachman. *Knowing Countries*. Jakarta: Djambatan, 1976.

- Laffan, Michael. "A Visit to Jakarta's Bayt al-Qur'an" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 3/1999.
- Liddle, R. William dan Rizal Mallarangeng. "Indonesia in 1996: Pressure from Above and Below", dalam *Asian Survey*. USA: University of California Press, Vol.XXXVII, No.2 February 1997.
- Madjid, Nurcholis. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.
- Mas'udi, Masdar F., dkk. *Direktori Pesantren I*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1986.
- Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- McKendrick, David. "Indonesia in 1991: Growth, Privilege and Rules" dalam *Asian Surveys*. USA: University of California Press, 1992.
- Noer, Deliar. "Administration of Islam in Indonesia" dalam *Monograph Series*, Publication No.58. New York: Southeast Asia Program Cornell University, 1978.
- Presiden Soeharto. "Pondok Pesantren: Tempat Pembentukan Tokoh Masyarakat" dalam *Agama dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Biru, 1981.
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir*, Bagian I (Permasalahan). Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1979.
- Sastramidjaja, Yatun. "Islamic Revival and Youth in Indonesia" dalam *International Institute for the Study of Islam in the Modern World*. Leiden: ISIM Newsletter, 9/2002.
- Shaleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
- Siswatiningsih B. "Dinamika Kependudukan: Kaitannya dengan Variabel Agama". Dalam *Makalah Diskusi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 25 April 2002.
- Situmeang, John B. "Democratization in Indonesia: an Enormous Challenge" dalam *Pelangi*. Jakarta: AMINEF Newsletter, Vol.I Num.3/July-September 1999.
- . *Pelangi*. Jakarta: AMINEF Newsletter, Vol.I Num.2/March-June 1999.
- Sjadzali, Munawir. "Kebangkitan Kesadaran Beragama sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama R.I.: Oktober 1985 - September 1986*. Jakarta: Departemen Agama R.I., 1986.
- . *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sumardi, Muljanto. *Bibliografi Pendidikan Islam di Indonesia: 1945-1975*. Jakarta: Lembaga Penelitian Ilmu Agama dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1976.
- Supriatma, A. Made Tony (Ed.). 1996: *Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997.
- Suyanto. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: AdiCita, 2000.
- Tadjab. *Perbandingan Pendidikan: Studi tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Modern, Islam dan Nasional*. Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Taher, Tarmizi. *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia*. Jakarta: CENCIS, 1997.

Back-cover

Kerjasama internasional di bidang pendidikan bisa plus-minus. Di antara keistimewaannya adalah terbentuk *mutual understanding between countries*, membangun *peace-education* atas dasar kemanusiaan, meningkatkan wawasan *multi-cultural education*, dan lebih dari itu dapat mempelajari kelemahan dan keunggulan, keberhasilan dan kegagalan, persamaan dan perbedaan teori dan praktek pendidikan di berbagai negara. Akan tetapi, biar bagaimanapun, sikap inferioritas negara *underdeveloped* yang berlebihan terhadap negara maju dengan pretensi bahwa segala sesuatu yang berasal dari negara maju (Barat) adalah simbol kemoderenan dan kemajuan, akan menimbulkan krisis identitas bangsa itu sendiri. Selain itu, ketergantungan pendidikan dengan negara maju yang terlalu lama dan berlebihan, tanpa adanya upaya pembaharuan pendidikan di negara tuan rumah, bisa menyebabkan asosiasi budaya.

Tulisan ini cukup polos dalam membeberkan sketsa pendidikan antar negara dimaksud, dimulai dari dasar-dasar dan prinsip perbandingan, lalu diketengahkan kondisi sistem dan kebijakan pendidikan di berbagai negara di dunia seaktual mungkin, setelah itu dianalisa secara kritis dalam konteks pendidikan di Indonesia. Menariknya, gaya bahasa dalam tulisan ini *familiar* atau tidak kaku, di sana dini ditampilkan gambar ilustratif, peta, skema dan tabel, sehingga menjadikan buku ini mudah dipahami.

Abd. Rachman Assegaf adalah dosen mata kuliah Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam (PPNI) dan Filsafat Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dosen Pendidikan Agama Islam di UPN "Veteran" Yogyakarta. Beliau telah melakukan berbagai penelitian, di antaranya adalah yang diselenggarakan oleh *The Toyota Foundation*, Puslitbang Departemen Agama, maupun Puslit IAIN Sunan Kalijaga, tentang berbagai masalah pendidikan Islam, di samping aktif dalam forum seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, penulisan jurnar, buku dan lain-lain.